

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Moderasi beragama semakin relevan dalam konteks keindonesiaan yang plural dan dinamis, terutama karena tantangan yang timbul dari keberagaman agama dan budaya di berbagai daerah. Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, juga menaungi pemeluk agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal. Keberagaman ini merupakan kekayaan, namun juga menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola secara bijak. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai insiden intoleransi, radikalisme, dan konflik antar maupun intraumat beragama menunjukkan tren meningkat, khususnya di daerah dengan komposisi keagamaan yang kompleks. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang merepresentasikan kondisi tersebut, dengan masyarakat multi-etnis dan multi-agama yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Jika tidak ditangani secara strategis, dinamika keberagaman ini berisiko mengganggu kohesi sosial dan stabilitas nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019 b).

Moderasi beragama memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat (49:13) menegaskan pentingnya memahami dan menghormati keberagaman manusia:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019a)

Salah satu wilayah yang mencerminkan kompleksitas keberagaman agama dan budaya di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dihuni oleh komunitas Muslim, Kristen, Katolik, serta penganut kepercayaan lokal seperti *Aluk Todolo* yang masih lestari di beberapa daerah, terutama di Tana Toraja. Di tengah keberagaman ini, muncul pula berbagai tantangan sosial seperti eksklusivisme, polarisasi identitas, dan konflik simbolik. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada dua wilayah yang merepresentasikan kontras sosial dan kultural, yakni Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Kota Parepare mencerminkan dinamika wilayah urban dengan dominasi masyarakat Muslim, sedangkan Tana Toraja menggambarkan wilayah rural yang didominasi oleh komunitas Kristen dan masyarakat adat. Keduanya menjadi lokasi strategis untuk memahami bagaimana komunikasi moderasi beragama dijalankan di tengah relasi mayoritas–minoritas yang kompleks, serta bagaimana pendekatan kultural dapat menjembatani ketegangan sosial berbasis identitas (Nasir & Rijal, 2021).

Berdasarkan data BPS tahun 2023, mayoritas penduduk di Sulawesi Selatan menganut agama Islam yaitu 8.261.698 jiwa, Kristen 693.511 jiwa, Katolik 152.415 jiwa, Hindu 63.409 jiwa, Buddha 20.824 jiwa, Aliran Kepercayaan 688 jiwa dan Konghucu 76 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Di Kota Parepare, jumlah penduduk Muslim mencapai 151.293 jiwa, sedangkan Kristen Protestan sebanyak 5.326 jiwa, Katolik 2.131 jiwa, Hindu 800 jiwa, dan Buddha 750 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023). Adapun Kabupaten Tana Toraja didominasi oleh penganut agama Kristen, yakni Protestan sebanyak 185.243 jiwa, Katolik 41.926 jiwa, disusul Islam 31.956 jiwa, Hindu/*Aluk Todolo* 4.414 jiwa, Buddha 355 jiwa, dan agama lainnya 20 jiwa (Badan Pusat Statistik Tana Toraja, 2023). Meskipun data ini menggambarkan keberagaman yang cukup signifikan, realitas sosial menunjukkan bahwa toleransi antarumat beragama di wilayah ini bersifat dinamis dan rentan. Relasi sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas berpotensi memunculkan gesekan, terutama ketika dipicu oleh isu-isu sensitif, sentimen identitas, atau ketimpangan akses terhadap ruang publik dan kebijakan lokal.

Parepare merupakan rumah bagi berbagai suku, antara lain Bugis, Makassar, Toraja, dan beberapa suku lainnya (Aminah & Jalil, 2019). Namun, beberapa peristiwa baru-baru ini, seperti penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel (Abduh, 2023), menunjukkan adanya potensi konflik yang dapat mengancam harmoni sosial. Di Kota Parepare, pada tahun 2023 ada sejumlah kalangan yang menentang pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Massa berdemonstrasi untuk menghentikan pembukaan sekolah karena tidak memiliki izin. Warga sekitar menolak dengan alasan mayoritas penduduk sekitar lokasi adalah Muslim dan izinnya tidak jelas (Abduh, 2023). Selain itu, beberapa warga setempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi konflik agama yang mungkin timbul akibat pembangunan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, kekhawatiran warga terhadap potensi konflik agama yang mungkin timbul akibat pembangunan fasilitas keagamaan baru di kawasan tersebut semakin meningkat. Situasi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan perbedaan agama ketika merumuskan kebijakan pembangunan di Kota Parepare. Kasus ini menunjukkan bagaimana absennya dialog lintas agama dan miskomunikasi administratif dapat memperbesar potensi konflik. Perbedaan persepsi tentang izin pembangunan menjadi simbol ketegangan antar komunitas yang tidak diantisipasi melalui pendekatan komunikasi kultural.

Pada Mei 2024, Kementerian Agama Kota Parepare melibatkan dua pegawai non-Muslim dalam panitia pemberangkatan haji, yang kemudian dilaporkan ke berbagai pihak sebagai petugas haji. Akibatnya, kesalahpahaman dan rumor pun bermunculan. Melalui video YouTube bertajuk "Konyol, 2 Non-Muslim Menjadi Pejabat Haji di Kementerian Agama, Hanya Ingin Disebut Toleran?", isu tersebut semakin menguat dan menuai kontroversi di masyarakat. Video tersebut dengan cepat menyebar luas dan menjadi viral hingga menuai beragam reaksi dari masyarakat (Humas, 2024). Banyak yang mempertanyakan kebijakan Kementerian Agama dan menuding Kementerian Agama tidak peka

terhadap norma agama. Hal ini menimbulkan konflik antar organisasi yang merasa terganggu dan marah atas keputusan tersebut. Mereka menilai tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap ibadah haji dan merusak hubungan harmonis antar umat beragama. Isu ini memperlihatkan bagaimana pemahaman keagamaan yang sempit dan kurangnya edukasi publik tentang peran administratif dalam ritual keagamaan dapat memicu reaksi berlebihan. Ketiadaan komunikasi antarlembaga dan lambatnya klarifikasi juga memperburuk situasi.

Salah satu kasus intoleransi yang sempat mencuat di Tana Toraja adalah permasalahan terkait pembangunan rumah ibadah. Pada tahun 2018, terjadi penolakan terhadap pembangunan masjid di sebuah desa di Tana Toraja oleh beberapa kelompok masyarakat setempat. Kasus ini menjadi sorotan karena meskipun Tana Toraja dikenal dengan tingkat toleransi beragamanya yang tinggi, ada segelintir masyarakat yang menunjukkan sikap intoleran. Mereka menolak pembangunan masjid dengan alasan bahwa wilayah tersebut mayoritas beragama Kristen dan khawatir akan terjadi perubahan dalam komposisi demografi agama. Meskipun demikian, pemerintah daerah bersama tokoh agama setempat segera turun tangan untuk meredam potensi konflik. Mereka mengadakan dialog lintas agama yang melibatkan tokoh-tokoh agama Kristen, Islam, serta masyarakat adat untuk mencari solusi damai atas persoalan ini. Hasilnya, pembangunan masjid dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama dan diiringi dengan komitmen untuk menjaga kerukunan antarumat beragama (Michael et al., 2023). Walaupun berhasil diselesaikan secara damai, kasus ini mencerminkan kerentanan dialog lintas iman di wilayah mayoritas Kristen. Kekhawatiran tentang perubahan demografi agama memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi inter-komunal yang dilandasi kepercayaan, bukan kecurigaan.

Bulan Maret tahun 2024, terdapat kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan anggota DPRD Sulawesi Selatan, JRM, telah memicu perhatian publik di Tana Toraja. JRM diduga melakukan tindakan yang dianggap tidak sensitif secara agama melalui grup WhatsApp. Kasus ini mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tana Toraja yang menyarankan JRM untuk meminta maaf secara terbuka guna meredakan ketegangan yang berpotensi mempengaruhi hubungan antarumat beragama di wilayah tersebut (Fatir, 2024).

Selain dinamika antaragama, tantangan dalam menjaga kerukunan juga muncul dari dalam komunitas keagamaan itu sendiri. Di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Parepare dan Tana Toraja, ketegangan internal sering kali terjadi akibat perbedaan pandangan dan interpretasi dalam satu agama. Konflik laten ini mencakup perbedaan antara kelompok konservatif dan moderat, friksi antarorganisasi keagamaan, hingga perselisihan seputar metode dakwah dan ritual keagamaan. Ketegangan semacam ini tidak selalu muncul ke permukaan, namun memiliki dampak signifikan terhadap kohesi sosial internal dan kapasitas kolektif komunitas dalam merespons isu-isu lintas agama. Oleh

karena itu, moderasi beragama tidak hanya penting dalam membangun relasi antarumat, tetapi juga krusial dalam memperkuat harmoni internal dan mencegah fragmentasi identitas keagamaan yang dapat memperlemah jejaring sosial masyarakat.

Guna menjaga kerukunan di tengah keberagaman tersebut, dibutuhkan model komunikasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dan adaptif terhadap konteks lokal. Komunikasi tidak sekadar menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi, tetapi juga berfungsi sebagai strategi sosial untuk mencegah kesalahpahaman, meredam konflik simbolik, dan membangun ruang dialog yang setara. Dalam konteks Parepare dan Tana Toraja, pendekatan komunikasi yang berbasis nilai-nilai budaya lokal terbukti lebih efektif karena mampu menyentuh dimensi emosional dan identitas masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menjembatani perbedaan agama, tetapi juga mendorong sikap saling menghormati, memperkuat keterhubungan sosial, dan menghidupkan kembali modal sosial yang bersifat inklusif.

Nilai-nilai budaya lokal di Parepare berkontribusi besar dalam membangun suasana yang kondusif bagi moderasi beragama (Aminah & Jalil, 2019). Dalam kehidupan masyarakat Bugis, nilai-nilai seperti *sipakatau* (saling memanusiaikan), *sipakalebbi* (saling menghargai), dan *sipakainge* (saling mengingatkan) tidak hanya menjadi pedoman etika interpersonal, tetapi juga menjadi fondasi komunikasi yang menekankan kesetaraan dan keharmonisan. Nilai-nilai ini mampu melampaui sekat-sekat keagamaan dan menciptakan rasa kebersamaan di tengah perbedaan. Dalam praktiknya, komunikasi berbasis nilai lokal ini menjadi medium yang ampuh untuk meredakan ketegangan sosial, memperkuat kohesi antarumat, dan membangun narasi toleransi yang mengakar dalam keseharian. Oleh karena itu, pendekatan kultural ini perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam strategi komunikasi moderasi beragama, agar nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun perdamaian.

Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan formal untuk mempromosikan moderasi beragama, seperti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kampanye moderasi dari Kementerian Agama, pendekatan ini sering bersifat *top-down* dan kurang menjangkau struktur sosial di akar rumput. Di sisi lain, masyarakat lokal masih memiliki dan mempraktikkan nilai-nilai budaya seperti *sipakatau*, *aluk todolo*, dan *unnalli melo*, namun belum diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan publik. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan pendekatan antara regulasi formal dan budaya komunitas, yang menyebabkan upaya moderasi berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan. Oleh karena itu, dibutuhkan model komunikasi yang mampu menjembatani kedua pendekatan ini secara sinergis dan kontekstual.

Tana Toraja juga merupakan daerah dengan kekayaan budaya yang sangat kuat, di mana tradisi adat dan agama hidup berdampingan. Masyarakat mayoritas Kristen tetap melestarikan warisan leluhur mereka melalui praktik adat seperti upacara *aluk todolo*, yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni. Praktik adat ini membantu mengintegrasikan berbagai keyakinan dalam masyarakat, sehingga menciptakan kerangka budaya yang mendukung moderasi beragama (Andri, 2023). Rumah adat Tongkonan bukan hanya simbol identitas budaya, tetapi juga simbol harmoni dan koeksistensi antara berbagai kepercayaan di Tana Toraja. Rumah adat Tongkonan menjadi simbol kuat dari toleransi dan koeksistensi antaragama di wilayah ini (Andri, 2023).

Konsep seperti *unnalli melo*, yang berarti 'membeli kebaikan,' juga mencerminkan kearifan lokal yang mendorong masyarakat untuk menghormati perbedaan dan berkontribusi pada kebaikan bersama tanpa memandang latar belakang agama (Dwifani, 2023). *Unnalli Melo* adalah sistem kepercayaan yang mendorong masyarakat untuk bersikap baik dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama, tanpa memandang latar belakang agama. Nilai-nilai seperti ini sangat relevan dalam konteks moderasi beragama, di mana toleransi dan saling menghargai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sosial (Dwifani, 2023). Oleh karena itu, kearifan lokal ini tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu, tetapi juga membentuk pola pikir moderat dalam beragama di Tana Toraja. Kearifan lokal seperti nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Tongkonan dan konsep "*unnalli melo*" memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga toleransi antaragama. Nilai-nilai ini, yang menekankan harmoni dan saling menghormati, relevan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang menjadi landasan bagi kerukunan antarumat beragama.

Di tengah masyarakat yang beragam, *opinion leader* memainkan peran kunci dalam menyebarkan pesan moderasi. Pemimpin agama, tokoh adat, dan akademisi tidak hanya menjadi panutan, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara komunitas agama dan masyarakat umum. Di Parepare, tokoh adat dan pemimpin komunitas sering kali menjadi mediator dalam mengatasi konflik sosial, sementara di Tana Toraja, pemimpin adat Kristen dan tokoh agama Islam aktif dalam dialog lintas agama. Kehadiran mereka membantu memastikan pesan moderasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada jika *opinion leader* tidak memiliki pandangan moderat atau justru memperkeruh situasi. Karena itu, penting untuk mengembangkan strategi komunikasi yang mengoptimalkan peran *opinion leader* dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama secara efektif (Hadi Kusuma & Susilo, 2020). Keterlibatan tokoh-tokoh agama dari berbagai kepercayaan dalam kegiatan sosial dan budaya pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap inklusi dan kerja sama antaragama. Praktik ini sejalan dengan temuan studi yang menyoroti peran dialog antaragama dan partisipasi pemimpin agama dalam mempromosikan harmoni sosial dan pemahaman (Halim & Faisal, 2024).

Meskipun pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan formal untuk mempromosikan moderasi beragama seperti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kampanye moderasi dari Kementerian Agama pendekatan ini kerap bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya menjangkau struktur sosial di tingkat akar rumput. Di sisi lain, masyarakat lokal di wilayah seperti Parepare dan Tana Toraja masih memelihara dan mempraktikkan nilai-nilai budaya seperti *sipakatau*, *aluk todolo*, dan *unnalli melo*, yang telah terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial. Namun, nilai-nilai ini belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam desain kebijakan publik. Kesenjangan ini menciptakan jurang antara regulasi formal negara dan pendekatan budaya komunitas, sehingga inisiatif moderasi sering kali berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan daya jangkau sosial. Untuk itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang mampu menjembatani dua pendekatan ini yakni dengan merancang model komunikasi yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal.

Pengaruh *opinion leader* di kedua wilayah juga sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan praktik moderasi beragama. Di Parepare, tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas berperan sebagai mediator dalam situasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Mereka sering kali menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial, termasuk yang berkaitan dengan agama. Melalui peran mereka, pesan-pesan tentang pentingnya toleransi dan moderasi dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat luas, karena mereka memiliki otoritas moral yang diakui oleh komunitasnya (Kholil et al., 2020).

Hal serupa juga terjadi di Tana Toraja, para *opinion leader*, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, memainkan peran penting dalam menjaga harmoni antaragama. Para pemimpin ini tidak hanya memiliki peran spiritual, tetapi juga menjadi jembatan dalam dialog antaragama. Mereka mampu menyebarkan pesan-pesan moderasi melalui berbagai acara adat, pertemuan keagamaan, dan kegiatan sosial. Dengan pengaruh yang kuat di komunitasnya, mereka memastikan bahwa kerukunan antaragama tetap terjaga dan potensi konflik dapat diredam. Selain itu, pemimpin agama Kristen di Tana Toraja juga sering terlibat dalam dialog dengan penganut kepercayaan tradisional, menunjukkan bahwa kolaborasi antaragama merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis (Andri, 2023).

Peran *opinion leader* dalam moderasi beragama tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terhubung dengan inisiatif yang lebih luas yang didukung oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah menciptakan platform bagi tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk berdialog dan bekerja sama dalam mempromosikan moderasi beragama. Kolaborasi antara pemerintah dan *opinion leader* ini memastikan bahwa pesan-pesan moderasi beragama tidak hanya disebarkan melalui jalur formal, tetapi juga diperkuat melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas (Halim & Faisal, 2024).

Opinion leader di Parepare, seperti tokoh agama, kepala adat, dan pemimpin komunitas, memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terkait moderasi beragama. Mereka sering kali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik sosial, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Dengan status sosial yang dihormati oleh masyarakat, mereka mampu menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama secara efektif, baik melalui ceramah agama, diskusi publik, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial. Peran mereka dalam membangun dialog antaragama sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah potensi konflik di kota ini, di mana perbedaan agama bisa menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik.

Di Tana Toraja, *opinion leader* termasuk pemimpin adat dan tokoh agama memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni antaragama. Mereka tidak hanya memimpin kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam dialog antaragama. Kehadiran mereka dalam berbagai ritual adat dan pertemuan lintas agama memperkuat hubungan antar komunitas yang berbeda. Para pemimpin ini menggunakan pengaruh mereka untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama yang relevan dengan tradisi lokal, sehingga nilai-nilai moderasi lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dengan dukungan kuat dari *opinion leader*, Tana Toraja menjadi contoh wilayah yang mampu menjaga kerukunan antarumat beragama melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis kearifan lokal.

Berbagai penelitian telah mengkaji moderasi beragama, peran *opinion leader*, dan komunikasi lintas budaya. Penelitian Ridho et al. (2023) menyoroti pentingnya sinergi komunikasi antarpemangku kepentingan dalam menciptakan kerukunan agama di Indonesia. Mereka menemukan bahwa model komunikasi yang terbuka dan melibatkan semua lapisan masyarakat efektif dalam mengurangi konflik. Muhlisin et al. (2023) meneliti implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi Islam dan menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan toleransi. Selain itu, penelitian Hati et al. (2023) menunjukkan bagaimana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Medan berhasil menurunkan tingkat intoleransi melalui dialog sosial yang intensif.

Penelitian sebelumnya membahas moderasi beragama dan komunikasi secara terpisah. Gap penelitian terlihat pada kurangnya kajian tentang integrasi budaya lokal dan peran *opinion leader* dalam satu model komunikasi komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menggabungkan kedua aspek tersebut untuk menciptakan model komunikasi yang lebih kontekstual dan efektif di wilayah Parepare dan Tana Toraja maupun wilayah serupa lainnya.

Selain perbedaan sosial-budaya, moderasi beragama juga menjadi isu dalam internal satu agama, bukan hanya antaragama. Di Indonesia, perbedaan interpretasi dalam satu agama sering kali memunculkan perdebatan dan bahkan

konflik, baik dalam aspek teologis maupun dalam praktik keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada hubungan antaragama, tetapi juga bagaimana moderasi dapat diterapkan di dalam internal satu agama untuk mencegah konflik yang berakar pada perbedaan tafsir keagamaan.

Perkembangan teknologi informasi dan media digital juga mempengaruhi dinamika moderasi beragama. Di era digital, opini keagamaan tidak hanya dibentuk oleh tokoh agama konvensional, tetapi juga oleh *influencer*, akademisi, dan bahkan pengguna media sosial yang memiliki jangkauan luas. Media sosial dan algoritma digital dapat memperkuat atau justru memperlemah moderasi beragama, tergantung pada bagaimana informasi keagamaan dikomunikasikan dan disebarluaskan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana teknologi mempengaruhi penyebaran wacana moderasi beragama dan bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi dalam masyarakat.

Selain itu, peran *opinion leader* dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama mengalami transformasi. Jika sebelumnya tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi menjadi pilar utama dalam membentuk opini keagamaan, kini peran tersebut semakin bersaing dengan *influencer* digital di media sosial. Perubahan ini menuntut analisis lebih mendalam mengenai bagaimana *opinion leader* tradisional dan digital dapat bersinergi dalam memperkuat moderasi beragama.

Melihat kompleksitas dinamika keberagaman dan beragamnya pendekatan yang belum terkoordinasi secara utuh, diperlukan sebuah model komunikasi strategis yang mampu menjembatani pendekatan struktural negara dengan pendekatan kultural masyarakat lokal. Model ini harus berakar pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitas, sekaligus mengoptimalkan peran *opinion leader* sebagai aktor kunci dalam membangun narasi moderasi. Di tengah tantangan intoleransi, fragmentasi sosial, serta disrupsi digital, integrasi antara pendekatan komunikasi berbasis budaya lokal dan keterlibatan *opinion leader* menjadi semakin mendesak. Model yang dikembangkan tidak hanya harus deskriptif, tetapi juga aplikatif dan solutif mampu merespons kebutuhan konteks lokal seperti di Parepare dan Tana Toraja, serta relevan untuk diterapkan di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini diarahkan untuk merumuskan model komunikasi yang kontekstual, kolaboratif, dan berkelanjutan guna memperkuat praktik moderasi beragama di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai budaya lokal berperan dalam membangun moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja ?
2. Bagaimana peran *opinion leader* dalam memperkuat komunikasi moderasi beragama berbasis budaya ?

3. Bagaimana model komunikasi strategis berbasis nilai lokal dan *opinion leader* dapat dikembangkan untuk mendorong moderasi beragama di masyarakat majemuk ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai budaya lokal yang mendukung moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja.
2. Mendeskripsikan peran *opinion leader* dalam menyampaikan pesan moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja.
3. Merumuskan model komunikasi strategis berbasis budaya lokal dan peran *opinion leader* yang dapat diterapkan di wilayah multikultural

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang topik "Model Komunikasi Penguatan Budaya Lokal dan *Opinion leader* dalam Membangun Moderasi Beragama di Sulawesi Selatan" diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis, praktis, dan teoritis.

- 1.4.1. Secara Teoritis: Mengintegrasikan pendekatan *etnografi komunikasi*, *stakeholder theory*, dan *diffusion of innovation* dalam kajian komunikasi keberagaman dan menawarkan model komunikasi yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas budaya lokal.
- 1.4.2. Secara Praktis: Menjadi referensi strategis bagi pemangku kebijakan (FKUB, Kemenag, Pemda, media lokal) dalam mengembangkan pendekatan moderasi berbasis komunitas dan menjadi acuan bagi tokoh adat dan tokoh agama dalam melakukan kampanye toleransi lintas iman berbasis nilai lokal.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Sulawesi Selatan memiliki konteks sosial-budaya yang kaya dengan beragam agama dan tradisi lokal. Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja adalah dua wilayah yang merepresentasikan dinamika budaya dan agama yang sangat unik. Parepare, dengan mayoritas penduduk Muslim, dan Tana Toraja yang didominasi oleh Kristen serta kepercayaan lokal *aluk todolo*, menawarkan tantangan dan peluang dalam membangun moderasi beragama. Budaya lokal dan tradisi di kedua wilayah ini, seperti Tongkonan di Tana Toraja dan nilai-nilai Bugis di Parepare, menjadi elemen penting dalam menjaga harmoni sosial.

Pemilihan Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja sebagai wilayah studi didasarkan pada karakteristik yang kontras namun saling melengkapi. Parepare merepresentasikan masyarakat urban-Muslim dengan dinamika sosial

keagamaan yang kompleks, termasuk pengaruh digitalisasi dan keberadaan kelompok mayoritas yang dominan. Sementara itu, Tana Toraja merepresentasikan masyarakat rural-Kristen dengan kekayaan tradisi adat dan keberadaan minoritas Muslim dalam struktur sosialnya. Kedua wilayah ini menghadapi tantangan yang berbeda namun memiliki urgensi yang sama dalam hal penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu, keduanya menjadi ruang sosial yang tepat dan relevan untuk merancang model komunikasi strategis berbasis budaya lokal dan keterlibatan aktor komunitas.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori komunikasi untuk memahami dinamika penyebaran moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja. Teori *stakeholder* digunakan untuk menganalisis peran berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil, media dan bisnis) bekerja sama dalam menciptakan model komunikasi yang mendukung moderasi beragama. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menjaga kerukunan sosial. Menurut Freeman (2010), teori ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Rogers (2003) relevan dalam menggambarkan bagaimana ide moderasi beragama dapat menyebar melalui peran *opinion leader*, yang berfungsi sebagai agen perubahan di masyarakat. Dengan kedua teori ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana pesan-pesan moderasi diterima dan diproses oleh masyarakat melalui mekanisme komunikasi yang melibatkan berbagai pihak.

Teori *multi-step flow* Katz & Lazarsfeld Katz & Lazarsfeld (1955) dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pesan-pesan dari media massa atau pemerintah disebarluaskan melalui tokoh-tokoh kunci, yang kemudian mempengaruhi masyarakat luas. Dalam konteks moderasi beragama, *opinion leader* seperti tokoh agama dan tokoh adat memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi kepada komunitas.

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji model komunikasi penguatan budaya lokal dan *opinion leader* dalam konteks moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif untuk membangun moderasi beragama di wilayah ini.

Hasil penelitian dirancang untuk memberikan wawasan praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil, media dan pelaku bisnis dalam merancang program-program yang berbasis pada prinsip model komunikasi penguatan budaya lokal dan *opinion leader*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat moderasi beragama dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

1.6. Kebaruan Penelitian

Penelitian tentang moderasi beragama dan komunikasi lintas budaya terus berkembang, namun sebagian besar masih terfragmentasi dan belum membentuk model komunikasi yang integratif dan aplikatif berbasis konteks lokal. Model-model yang ada cenderung mengkaji moderasi beragama dari sisi normatif atau kebijakan negara, sedangkan aspek komunikasi strategis dan nilai-nilai budaya lokal belum dijadikan komponen utama dalam membangun kerukunan sosial. Komunikasi antarbudaya memiliki peran vital dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi yang dapat diterima lintas agama dan etnis secara bermakna (Tameryan et al., 2022; Thahir, 2023). Beberapa studi seperti Jiang (2024) dan Yao (2023) menunjukkan urgensi pengembangan desain komunikasi lintas budaya dalam konteks yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan *opinion leader* dan kearifan lokal ke dalam satu sistem komunikasi moderasi beragama. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menawarkan model komunikasi strategis berbasis budaya lokal dan peran *opinion leader* sebagai respons terhadap kebutuhan kerukunan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya, budaya lokal sering kali hanya diposisikan sebagai simbol identitas atau ornamen dalam program moderasi beragama, bukan sebagai instrumen aktif dalam proses komunikasi strategis. Pendekatan ini kurang mampu menggali potensi budaya lokal sebagai bahasa bersama yang dapat membangun jembatan antar keyakinan dan mereduksi eksklusivisme. Budaya memiliki dimensi simbolik dan praksis yang dapat dikapitalisasi sebagai medium penyampaian nilai moderasi secara persuasif dan kontekstual. Penelitian oleh Makmun (2023) menunjukkan bagaimana strategi komunikasi berbasis Javanology berperan dalam menguatkan dialog antarbudaya melalui nilai-nilai lokal yang adaptif dan transformatif. Demikian pula, penelitian oleh Mailin et al. (2023) menegaskan bahwa nilai kearifan lokal di Tanjung Balai secara signifikan mendukung komunikasi keagamaan yang inklusif, ketika digunakan secara strategis dalam program pemerintah. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebby*, dan *aluk todolo* tidak hanya berfungsi sebagai simbol harmoni, tetapi juga sebagai perangkat komunikasi yang memiliki daya gugah sosial dan legitimasi kultural dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama.

Peran *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama belum sepenuhnya dikaji dalam kerangka komunikasi strategis yang berbasis budaya lokal. Beberapa penelitian sebelumnya masih menempatkan tokoh agama dan tokoh adat sebagai pelengkap program formal negara, bukan sebagai aktor kunci yang mampu memediasi pesan-pesan lintas identitas secara otoritatif dan diterima komunitas. Padahal, *opinion leader* memiliki modal sosial dan kultural yang menjadikannya sebagai jembatan efektif antara pemerintah dan masyarakat akar rumput. Penelitian Ali, et al. (2022) tentang Klenteng-Mosque di Semarang

menunjukkan bagaimana opini keagamaan tokoh-tokoh lokal mampu membingkai pesan dakwah secara inklusif dan lintas agama. Penelitian (Usman et al., 2024) juga menegaskan peran tokoh lokal dalam komunikasi antarbudaya Persia-Aceh yang efektif menahan potensi konflik melalui narasi moderat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya memasukkan *opinion leader* sebagai elemen sentral dalam model komunikasi, bukan hanya sebagai penyambung informasi, melainkan sebagai aktor strategis yang dapat mempengaruhi sikap publik melalui narasi-narasi budaya dan agama yang kontekstual.

Tantangan utama dalam membangun moderasi beragama adalah kesenjangan antara pendekatan formal negara yang bersifat legalistik dan pendekatan budaya lokal yang bersifat dialogis-komunitarian. Di berbagai wilayah, upaya negara seringkali tidak mampu menjangkau ruang sosial yang dijaga oleh norma dan struktur adat. Hal ini menyebabkan pesan moderasi beragama kehilangan daya resonansi di tingkat komunitas, khususnya di wilayah yang memiliki kompleksitas identitas seperti Parepare dan Tana Toraja. Penelitian Mailin et al. (2023) memperlihatkan bahwa komunikasi pemerintah yang berbasis nilai lokal justru lebih diterima karena menyatu dalam praktik sosial sehari-hari. Sementara itu, studi Mahfud et al. (2022) menunjukkan efektivitas komunikasi Islam moderat dalam mencegah intoleransi, terutama jika pesan tersebut dibingkai melalui pendekatan yang memahami struktur sosial dan bahasa budaya lokal. Oleh karena itu, pengembangan model komunikasi berbasis budaya lokal dan *opinion leader* bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga strategis sebagai respons terhadap meningkatnya dinamika intoleransi antar dan intra umat beragama.

Pemilihan Parepare dan Tana Toraja sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada alasan geografis, tetapi karena keduanya merepresentasikan konfigurasi sosial-budaya dan religius yang kontras namun saling melengkapi. Parepare, sebagai kota pesisir urban dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadirkan tantangan komunikasi dalam konteks masyarakat homogen secara keagamaan, namun plural dalam praktik sosial dan ideologi keagamaan. Sebaliknya, Tana Toraja mencerminkan masyarakat rural yang mayoritas Kristen dan masih kuat menjaga kearifan lokal seperti *aluk todolo*, yang hidup berdampingan dengan agama-agama formal. Studi Thahir (2023) menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi antarbudaya dalam wilayah yang memiliki sejarah pluralisme dan konflik identitas. Hal ini diperkuat oleh temuan Asmin (2022) yang menyoroti efektivitas strategi komunikasi pemandu wisata di Toraja dalam menjembatani narasi agama dan budaya kepada publik global. Oleh karena itu, kedua wilayah ini memberikan basis empiris yang kuat untuk mengembangkan model komunikasi moderasi yang bersifat situasional, kontekstual, dan adaptif terhadap karakter masyarakat lokal.

Transformasi media digital telah menggeser pola komunikasi *opinion leader* dari dominasi ruang tatap muka menuju ekosistem daring yang lebih terbuka, cepat, dan kompetitif. Tokoh agama dan tokoh adat yang sebelumnya

menjadi sumber otoritatif nilai dan norma sosial kini harus bersaing dengan aktor digital seperti konten kreator, selebgram religi, hingga akun-akun anonim yang memproduksi narasi keagamaan tanpa akuntabilitas. Studi Zikrillah & Mutaqin (2024) menggarisbawahi bagaimana konten visual di media sosial dapat memperkuat atau bahkan mendistorsi pesan moderasi keagamaan tergantung pada framing dan algoritma platform. Di sisi lain, penelitian Ikhsano et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi digital yang strategis dapat memperluas jangkauan dan efektivitas pesan keagamaan jika dilakukan oleh *opinion leader* yang adaptif terhadap pola interaksi digital. Oleh karena itu, model komunikasi berbasis budaya lokal yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan konteks sosial-budaya luring, tetapi juga merespons dinamika komunikasi digital yang menentukan legitimasi opini keagamaan di era disrupsi.

Dalam menghadapi kompleksitas sosial dan tantangan intoleransi, diperlukan model komunikasi strategis yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga kontekstual secara kultural dan sosial. Penelitian ini merumuskan model yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, *aluk todolo* dengan peran *opinion leader* sebagai penggerak sosial yang memiliki legitimasi komunitas. Model ini memperhatikan dinamika lokal yang berbeda antara Parepare dan Tana Toraja, yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, adat, media, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Temuan dari Herari et al. (2024) dan Ali, et al. (2022) menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang bersifat kolaboratif, berbasis nilai lokal, dan terstruktur secara digital terbukti mampu memperkuat pesan moderasi dan mengatasi resistensi sosial. Dengan demikian, model komunikasi yang ditawarkan bukan hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif untuk mendorong kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, sejalan dengan agenda SDGs, khususnya target SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

1.7. Teori

1.7.1. Difusi Inovasi

Teori difusi inovasi merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk memahami bagaimana suatu inovasi baru diterima dan diadopsi oleh suatu komunitas atau masyarakat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 melalui bukunya yang berjudul "*Diffusion of Innovations*". Rogers mengembangkan teori ini dengan menggabungkan penelitian dari berbagai bidang seperti pendidikan, sosiologi, dan komunikasi untuk membentuk pemahaman komprehensif tentang bagaimana inovasi menyebar.

Teori difusi inovasi secara umum menggambarkan bagaimana suatu inovasi diinformasikan (dikomunikasikan) melalui media tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada sekelompok anggota sistem sosial tertentu. Hal ini sesuai dengan pandangan Rogers (1961) "*as a process where an innovation is*

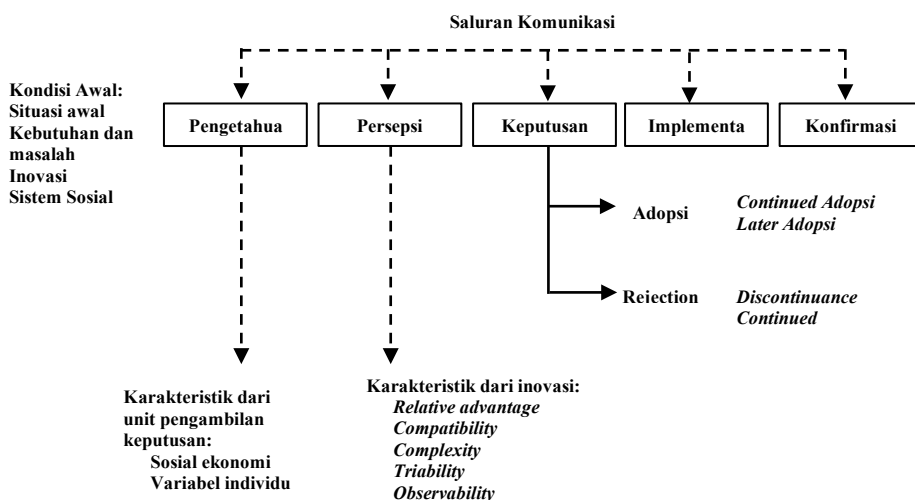
communicated through certain channels over a certain period of time among members of a social system". Difusi inovasi adalah sebagai proses penyebaran inovasi melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial. Lebih lanjut, difusi dipandang sebagai suatu jenis komunikasi yang berfokus pada penyebaran ide-ide baru, atau menurut Rogers (1961), "*which is the dissemination of a new idea from the source of its discovery or creation to the end user or adopter*", difusi adalah tentang bagaimana ide-ide baru menyebar dari sumbernya, baik penemuan atau kreasi, hingga pengguna atau penerima akhir (Rogers, 2003).

Teori difusi inovasi yang dirumuskan oleh Everett M. Rogers terdiri dari empat komponen utama yang berperan dalam proses penyebaran suatu inovasi (Rogers, 2003):

- a) Inovasi: inovasi diartikan sebagai suatu ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu. Dalam konteks difusi inovasi, suatu inovasi dikategorikan berdasarkan persepsi kebaruan dari sudut pandang penerimanya, bukan penemu atau penyebar inovasi tersebut.
- b) Saluran Komunikasi: ini mengacu pada metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi inovasi dari pengirim ke penerima. Adopsi inovasi oleh individu biasanya terjadi setelah mereka menerima informasi tentang inovasi tersebut melalui komunikasi dengan orang lain. Efektivitas suatu saluran komunikasi bergantung pada seberapa baik saluran tersebut mengadaptasi pesan kepada khalayak sasaran.
- c) Jangka Waktu : merupakan jangka waktu yang diperlukan seseorang untuk berpindah dari tahap pertama kali menyadari suatu inovasi hingga akhirnya memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Periode waktu ini sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan adopsi inovasi.
- d) Sistem Sosial: sistem sosial berkaitan dengan struktur dan norma masyarakat yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab individu di dalamnya. Dalam konteks difusi inovasi, sistem sosial berperan sebagai lingkungan penyebaran inovasi, dimana inovasi tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Teori yang diperkenalkan oleh Rogers memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi dan langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang mempengaruhi difusi inovasi antara lain persepsi terhadap atribut inovasi, jenis keputusan inovasi, saluran komunikasi, kondisi sistem sosial, dan peran agen perubahan. Tahapan dalam pengambilan keputusan inovasi meliputi pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, dimana setiap tahapan berperan penting dalam menentukan apakah suatu inovasi akan diterima atau ditolak (Rogers, 2003). Teori difusi inovasi merupakan teori yang

dikembangkan oleh Everett M. Rogers yang bertujuan untuk memahami bagaimana ide dan teknologi baru menyebar dalam suatu sistem sosial. Teori ini menggunakan konsep difusi dan inovasi yang berarti penyebaran penemuan-penemuan baru dari satu pihak ke pihak lain. Difusi inovasi adalah proses penyampaian inovasi melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu kepada anggota suatu sistem sosial. Everett M. Rogers menjelaskan difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berfungsi untuk menyampaikan inovasi atau ide-ide baru.



Gambar 1.1 Model Proses Pengambilan Keputusan Inovasi

Sumber: Rogers 1983 dalam Bahfiarti et al., 2022

Faktor-faktor yang memengaruhi proses difusi suatu inovasi antara lain karakteristik inovasi (*perceived atribut of Innovation*), jenis keputusan inovasi (*type of innovation decisions*), (3) saluran komunikasi (*communication channels*), (4) karakteristik lingkungan sosial (*nature of social system*) dan fungsi agen perubahan (*change agents*) (Rogers, 2003).

Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan inovasi adalah:

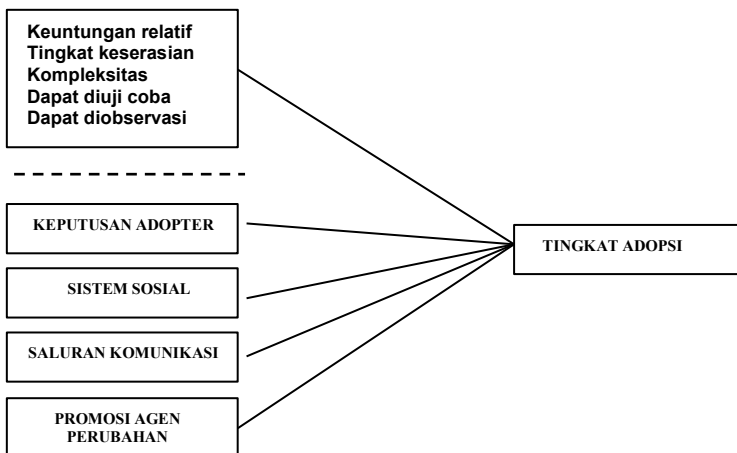
- a) Tahap pembentukan pengetahuan, dimana seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) memperoleh informasi tentang keberadaan, manfaat dan cara kerja suatu inovasi.
- b) Tahap persuasi, dimana seorang individu (atau unit pengambil keputusan lainnya) mulai membentuk opini positif atau negatif.
- c) Tahap keputusan terjadi ketika individu atau unit pengambil keputusan lainnya melakukan aktivitas yang menghasilkan keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi.

- d) Tahap implementasi, ketika individu atau unit pengambil keputusan lainnya mulai menggunakan inovasi.
- e) Tahap konfirmasi, dimana individu atau unit pengambil keputusan lainnya mencari konfirmasi atas keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi yang telah diambil.

Teori difusi inovasi oleh Everett Rogers ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana sebuah ide atau inovasi dalam hal ini model komunikasi dapat diterima, diadopsi dan disebarluaskan di masyarakat. Dengan mempelajari karakteristik inovasi, komunikasi interpersonal, dan peran *opinion leader*, untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penyebaran model komunikasi untuk memperkuat budaya lokal dan membangun moderasi beragama. Teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers memberikan kerangka komprehensif untuk memahami bagaimana inovasi menyebar dalam suatu masyarakat atau komunitas. Dengan memahami komponen-komponen utama teori ini, seperti inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial, pembuat kebijakan dan praktisi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkenalkan dan mendorong adopsi inovasi baru (Rogers, 2003). Pentingnya memahami dinamika sistem sosial adalah kunci untuk memastikan bahwa inovasi dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam masyarakat.

Aspek penting dalam teori difusi inovasi adalah peran komunikasi interpersonal dan *opinion leader* dalam proses penyebaran inovasi. Melalui komunikasi interpersonal yang efektif, informasi mengenai inovasi dapat disebarluaskan secara lebih luas dan lebih meyakinkan (Rogers, 2003). *Opinion leader*, atau individu yang memiliki pengaruh dalam suatu komunitas, berperan penting dalam mempercepat adopsi inovasi karena mereka sering dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memanfaatkan *opinion leader* dalam strategi komunikasi dapat menjadi faktor kunci keberhasilan penyebaran inovasi.

Implementasi teori difusi inovasi tidak hanya terbatas pada pengenalan teknologi atau ide baru. Konsep ini juga sangat relevan dalam upaya perubahan sosial. Dengan menerapkan prinsip teori difusi inovasi, inisiatif perubahan sosial dapat dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan luasnya adopsi inovasi (Rogers, 2003). Hal ini mencakup pemahaman karakteristik inovasi yang mempengaruhi penerimaannya, strategi komunikasi yang efektif, dan dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana inovasi diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Dengan demikian, teori difusi inovasi menawarkan panduan berharga untuk merancang dan melaksanakan program yang bertujuan memperkenalkan perubahan positif dalam masyarakat.



Gambar 1.2 Faktor yang Memengaruhi Tingkat Adopsi, Rogers 1983
Sumber: Rogers 1983 dalam Bahfiarti et al., 2022

Lebih lanjut Rogers (1983) menjelaskan proses upaya perubahan yang dilakukan seseorang untuk mengadopsi inovasi baru, yang dilakukan dalam beberapa tahap dalam kehidupannya. Menurut penelitian yang dilakukan, penerimaan atau penolakan seseorang terhadap inovasi tergantung pada karakteristik inovasi tersebut (Bahfiarti et al., 2022). Upaya perubahan, meskipun belum mengadopsi inovasi, memerlukan tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap Kesadaran (*awareness*), dimana seseorang mengetahui dan menyadari bahwa ada suatu inovasi yang menimpa dirinya, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap inovasi tersebut.
- b) Tahap Keinginan (*interest*), dimana seseorang mulai mempertimbangkan atau mengembangkan sikap terhadap inovasi yang telah disadarinya, sehingga timbul keinginan dan hasrat untuk mengadopsi inovasi tersebut.
- c) Tahap Evaluasi (*evaluation*), dimana seseorang mengambil keputusan apakah akan menerima inovasi tersebut atau tidak.
- d) Tahap Percobaan (*trial*), dimana seseorang mengimplementasikan keputusannya dan mulai mencoba tindakan baru.
- e) Tahap Adopsi (*adoption*), yaitu seseorang mengkonfirmasi atau memverifikasi inovasi yang telah diciptakan dan kemudian mulai mengadopsinya.

Teori difusi inovasi dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana ide moderasi beragama dapat diadopsi oleh masyarakat di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Inovasi yang dimaksud dalam hal ini adalah ide moderasi beragama yang masih merupakan hal yang baru oleh beberapa kalangan. Komponen utama teori difusi inovasi menurut Rogers (2003) dalam penelitian ini adalah:

- a) Inovasi: Moderasi beragama sebagai ide baru yang dipromosikan dalam masyarakat melalui komunikasi budaya lokal.
- b) Saluran Komunikasi: Menggunakan media lokal dan *opinion leader* untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi kepada masyarakat.
- c) Jangka Waktu: Periode waktu yang diperlukan untuk masyarakat di Parepare dan Tana Toraja menerima dan mengadopsi nilai-nilai moderasi beragama. Proses ini mungkin membutuhkan waktu yang bervariasi berdasarkan respons komunitas dan intensitas kampanye moderasi.
- d) Sistem Sosial: Budaya lokal, norma-norma, dan tradisi di kedua daerah tersebut sangat memengaruhi bagaimana moderasi beragama diterima. Pendekatan komunikasi yang menghargai tradisi dan kearifan lokal akan lebih efektif dalam memperkenalkan gagasan moderasi beragama.

Implementasi teori difusi inovasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran *opinion leader* dalam memperkenalkan dan menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Melalui penelitian ini kita dapat melihat sejauh mana sistem sosial dan nilai budaya lokal memengaruhi penerimaan inovasi ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempercepat atau memperlambat adopsi nilai-nilai moderasi.

1.7.2. Stakeholder Theory

Stakeholder theory merupakan suatu pendekatan manajemen yang mengakui keberadaan berbagai kelompok yang mempunyai kepentingan atau “kepentingan” dalam suatu organisasi. Teori ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, namun juga kepada berbagai pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi tersebut (Freeman et al., 2018). Menurut Freeman, pemangku kepentingan adalah siapa pun atau apa pun yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Freeman menekankan pentingnya melibatkan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

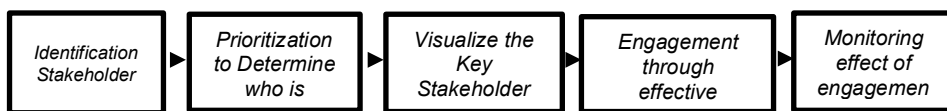
Salah satu pakar perkembangan *stakeholder theory* yang terkenal adalah R. Edward Freeman. Dalam bukunya yang berjudul “*Strategic Management: A Stakeholder Approach*” yang diterbitkan pada tahun 1984, Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi” (Freeman, 2010). Freeman menyatakan manajemen perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek atau kepentingan pemegang saham. Menurut Freeman, pendekatan ini akan membawa keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan.

Dalam penelitian ini, *stakeholder theory* Freeman diterapkan untuk mengidentifikasi peran *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare dan Tana Toraja. *Stakeholder theory*

menggarisbawahi bahwa program moderasi beragama, harus melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha. Freeman menyatakan bahwa interaksi yang efektif antara pemangku kepentingan ini dapat memperkuat komunikasi antar kelompok dan mendukung keberlanjutan serta kesuksesan program moderasi beragama secara holistik.

Pendekatan ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap kelompok yang terlibat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyuarakan kepentingan mereka, dan berkolaborasi demi keberhasilan program. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, teori ini memungkinkan terjadinya sinergi yang mendorong dialog dan kerja sama dalam menjaga harmoni antar umat beragama.

Untuk menganalisis keterlibatan stakeholder, ada lima langkah termasuk mengidentifikasi semua pemangku kepentingan, menentukan siapa yang paling penting, membuat peta pemangku kepentingan, meningkatkan kolaborasi melalui komunikasi yang efektif, dan memantau hasilnya. Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.3 Langkah-langkah Menilai Keterlibatan *Stakeholder*

Sumber: (Bourne, 2009)

Langkah awal untuk mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan adalah mengidentifikasi harapan, motif, niat, dan kepentingan pemangku kepentingan terhadap posisi mereka di sekitar proyek. Kepentingan siapa yang harus diprioritaskan dapat diputuskan dengan identifikasi ini. Setelah ditemukan, hal selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap pemangku kepentingan yang paling relevan. Proses penilaian didasarkan pada tiga elemen atau alat (Bourne, 2009) yaitu:

- a) Kekuatan, adalah kepemilikan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.
- b) Legitimasi, adalah pengakuan sosial yang dihasilkan dari perilaku pemangku kepentingan yang sesuai dengan sistem norma masyarakat.
- c) Kepentingan, adalah klaim tentang waktu yang rentan atau penting yang menuntut perhatian segera.
- d) Dominasi pemangku kepentingan, langkah selanjutnya adalah visualisasi keterlibatan pemangku kepentingan. Untuk menentukan apakah pemangku kepentingan tersebut termasuk dalam kategori apa, apakah mereka adalah pemangku kepentingan laten, pemangku kepentingan

menunggu, atau pemangku kepentingan tetap, kegiatan visualisasi tersebut akan dibuat dalam bentuk "*stakeholder mapping*".

Meskipun demikian, sebelum memulai pemetaan kategori pemangku kepentingan, penting untuk menentukan pemangku kepentingan mana yang paling penting. Untuk menentukan pemangku kepentingan mana yang paling penting, Anda dapat menggunakan metrik pemangku kepentingan (Bourne, 2009).

Dalam penelitian ini, *stakeholder theory* membantu memahami bagaimana berbagai pihak yang terlibat dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Langkah-langkah untuk menilai keterlibatan pemangku kepentingan dalam konteks ini meliputi:

- a) Pemangku kepentingan: langkah pertama adalah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat atau mempunyai kepentingan dalam penelitian ini. Hal ini mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang mungkin mempengaruhi atau terpengaruh oleh hasil penelitian. Dalam konteks kajian moderasi beragama, pemangku kepentingan dapat mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat umum di Sulawesi Selatan.
- b) Prioritas untuk menentukan siapa yang penting: setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan, langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas mereka berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap penelitian. Hal ini memastikan bahwa sumber daya dan upaya komunikasi terfokus pada pemangku kepentingan yang paling berpengaruh dan berkepentingan.
- c) Visualisasi pemangku kepentingan utama: membuat peta atau diagram pemangku kepentingan dapat membantu memvisualisasikan hubungan antar pemangku kepentingan dan memahami dinamika kekuasaan yang ada. Hal ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi siapa yang harus menjadi fokus utama upaya komunikasi dan keterlibatan.
- d) Keterlibatan melalui komunikasi yang efektif: komunikasi adalah kunci dalam membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Peneliti perlu mengembangkan strategi komunikasi efektif yang mampu menjangkau dan melibatkan pemangku kepentingan utama. Hal ini dapat mencakup pertemuan tatap muka, lokakarya, seminar, atau penggunaan media sosial dan platform digital.
- e) Memantau dampak keterlibatan: terakhir, penting untuk memantau dan mengevaluasi dampak keterlibatan pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan pengumpulan umpan balik dan pengukuran dampak interaksi dengan pemangku kepentingan terhadap penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan strategi keterlibatan dan komunikasi mereka untuk meningkatkan efektivitasnya.

Stakeholder theory dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana berbagai pihak terlibat dalam proses komunikasi moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja.

- a) Peran *Stakeholder* : mengidentifikasi bahwa pemangku kepentingan tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga melibatkan tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, media, dan bisnis. Mereka semua memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan moderasi beragama.
- b) Pendekatan Multidimensional: penekanan untuk menunjukkan bahwa semua pihak memiliki peran penting dan harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait moderasi beragama, karena mereka dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.
- c) Kolaborasi dan Komunikasi: menyoroti pentingnya kolaborasi antara kelompok-kelompok yang terlibat. Misalnya, pemerintah perlu bekerja sama dengan tokoh agama untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi, sementara media dan masyarakat sipil berperan dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hidup harmonis di tengah keragaman agama dan budaya.
- d) Keberlanjutan: Dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, teori ini membantu menciptakan strategi komunikasi yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan harmoni jangka panjang di Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini, *stakeholder theory* yang diperkenalkan oleh Freeman digunakan untuk mengeksplorasi peran penting berbagai pemangku kepentingan dalam membangun moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan berbagai pihak seperti tokoh agama, akademisi, media, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dan peran yang saling mempengaruhi, sehingga pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk mencapai harmoni dan keberlanjutan program moderasi beragama.

Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka yang sistematis untuk memahami interaksi antara pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan sosial-keagamaan. Freeman menyatakan bahwa kolaborasi yang efektif antara kelompok-kelompok ini tidak hanya akan membantu menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama, tetapi juga meningkatkan komunikasi dan pemahaman yang lebih baik di tengah masyarakat. Penggunaan *stakeholder theory* ini membantu merancang strategi komunikasi yang inklusif, berkelanjutan, dan memastikan keberhasilan moderasi beragama jangka panjang di Sulawesi Selatan, terutama di wilayah Parepare dan Tana Toraja.

1.7.3. Multi-Step Flow Theory

Teori *multi-step flow* merupakan pengembangan dari konsep awal *two-step flow* yang diperkenalkan oleh Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz pada tahun 1940-an. *two-step flow* menyatakan bahwa pengaruh media massa tidak langsung mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, melainkan melalui tokoh-tokoh kunci atau *opinion leaders* yang bertindak sebagai perantara dalam menyebarkan informasi. Katz & Lazarsfeld (1955) dalam bukunya *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications* menjelaskan bahwa *opinion leaders* memainkan peran penting dalam menyaring dan menginterpretasikan pesan media sebelum menyampaikannya kepada masyarakat umum. Melalui interaksi sosial, pesan yang berasal dari media massa mengalami transformasi dan penyederhanaan, sehingga *opinion leader* mampu memberikan pengaruh yang lebih signifikan dalam proses pembentukan opini publik.

Lazarsfeld et al., (1944) dalam penelitian mereka yang berjudul *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign*, menemukan bahwa dalam konteks pemilihan presiden di Amerika Serikat, pengaruh media massa terhadap keputusan pemilih tidaklah langsung. Pemilih lebih cenderung dipengaruhi oleh interaksi pribadi dengan *opinion leaders* daripada pesan-pesan media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *opinion leaders* berfungsi sebagai mediator yang efektif dalam penyebaran pengaruh, yang mengarah pada pembentukan opini yang lebih kuat di kalangan masyarakat luas. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan teori komunikasi politik dan strategi komunikasi dalam kampanye politik di berbagai negara.

Seiring berkembangnya teori ini, model komunikasi *multi-step flow* diperkenalkan untuk menggambarkan bagaimana aliran informasi dan pengaruh tidak hanya melewati dua langkah sederhana, tetapi melalui beberapa tahap dalam jaringan komunikasi yang lebih kompleks. Katz & Lazarsfeld (1955) menambahkan bahwa di dalam masyarakat modern yang lebih majemuk, *opinion leaders* seringkali tersebar dalam berbagai kelompok sosial, dan mereka memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran yang berbeda. Dalam konteks moderasi beragama, teori ini relevan untuk memahami bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, pemimpin agama, dan media berkolaborasi dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran *opinion leaders* dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Pemimpin-pemimpin ini bertindak sebagai perantara yang dapat memengaruhi masyarakat luas melalui interaksi sosial dan penyebaran informasi yang dikemas secara strategis. Pesan-pesan moderasi beragama, yang berasal dari pemerintah atau lembaga agama, seringkali lebih mudah diterima ketika disampaikan oleh *opinion leaders* yang memiliki otoritas sosial di komunitas mereka.

Teori *multi-step flow* digunakan untuk memahami peran *opinion leader* dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. *Opinion leader* dalam konteks ini mencakup tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, serta pemimpin lokal yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat. Teori ini relevan karena menggambarkan bagaimana *opinion leader* berperan sebagai jembatan antara media massa dan masyarakat luas, terutama dalam proses penyebaran informasi yang sensitif terkait isu keagamaan.

Menurut teori *multi-step flow*, aliran informasi di masyarakat tidak bersifat langsung dari media massa ke khalayak, melainkan melalui beberapa lapisan, dengan *opinion leader* berfungsi sebagai perantara. *Opinion leader* menerima, memilah, dan menafsirkan informasi yang mereka terima dari media massa sebelum menyebarkannya kepada masyarakat. Lazarsfeld et al., (1944) menjelaskan bahwa *opinion leader* tidak hanya menyampaikan informasi secara pasif, tetapi mereka juga menyesuaikan pesan-pesan tersebut dengan konteks dan nilai-nilai lokal yang ada. Dalam hal ini, tokoh agama dan pemimpin komunitas di Sulawesi Selatan memainkan peran krusial dalam menyaring dan menyebarkan pesan-pesan yang berkaitan dengan moderasi beragama dan harmoni antarumat beragama.

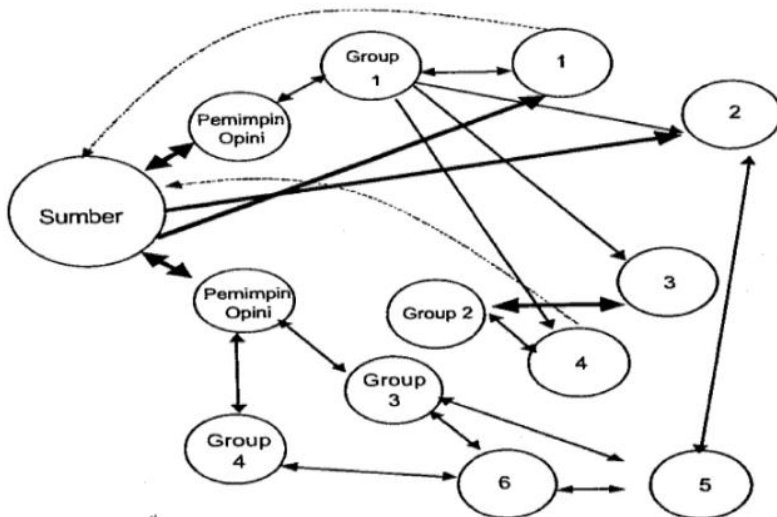
Teori ini juga membantu dalam memahami bagaimana pesan berbasis budaya lokal lebih efektif disampaikan melalui *opinion leader* yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks budaya setempat. *Opinion leader*, yang dipercaya oleh komunitasnya, mampu mengkomunikasikan pesan-pesan dengan cara yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Terutama di daerah seperti Parepare dan Tana Toraja yang memiliki tradisi budaya dan agama yang kuat, *opinion leader* memiliki kemampuan untuk menafsirkan pesan-pesan moderasi dengan nuansa lokal yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini meningkatkan relevansi pesan moderasi beragama dalam konteks budaya lokal (Katz & Lazarsfeld, 1955).

Teori ini juga menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama melibatkan banyak pemangku kepentingan, tidak hanya media. *Opinion leader* di Parepare dan Tana Toraja memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat lokal dan sering kali dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel. Menurut Katz & Lazarsfeld (1955), kemampuan *opinion leader* untuk mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu krusial seperti moderasi beragama menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi publik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada eksplorasi bagaimana *opinion leader* membentuk dan memelihara harmoni antarumat beragama di wilayah Parepare dan Tana Toraja.

Teori *multi-step flow* menyoroti bahwa penyebaran informasi di masyarakat tidak selalu berlangsung secara linier. Pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa dapat mengalami modifikasi atau penyesuaian ketika melewati *opinion leader*, yang menafsirkan informasi tersebut sesuai

dengan konteks sosial budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya memahami bagaimana *opinion leader* menerjemahkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam konteks lokal, yang selanjutnya berperan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan tersebut. Proses ini memungkinkan relevansi nilai moderasi beragama untuk lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat di Sulawesi Selatan (Katz & Lazarsfeld, 1955).

Teori ini menjadi dasar penting dalam penelitian karena menjelaskan mekanisme alur informasi yang kompleks dan berlapis, serta menggarisbawahi peran strategis *opinion leader* dalam menyebarluaskan pesan moderasi yang inklusif, damai, dan relevan bagi komunitas lokal di Parepare dan Tana Toraja. Teori ini juga mengidentifikasi potensi hambatan dalam penyebaran pesan moderasi beragama. Jika *opinion leader* memiliki pandangan yang kurang moderat atau bahkan ekstrem, hal ini dapat menghambat penerimaan masyarakat terhadap pesan-pesan moderasi beragama. Dengan demikian, pemahaman tentang aliran informasi dalam masyarakat melalui teori ini memungkinkan perancangan strategi komunikasi yang lebih baik, di mana *opinion leader* yang mendukung moderasi beragama dapat diberdayakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang konstruktif (Katz & Lazarsfeld, 1955).



Gambar 1.4 *Muti Step Flow Theory*
Sumber: (Black & Whitney, 1991)

Berdasarkan model komunikasi *multi-step flow* yang disajikan, alur penyebaran informasi dimulai dari Sumber (misalnya, media massa), yang kemudian menyalurkan informasi kepada *Opinion leader* di setiap kelompok sosial, seperti Group 1 dan Group 4. *Opinion leader* berfungsi sebagai perantara utama dalam menyaring dan menafsirkan informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Informasi ini kemudian disebarluaskan melalui komunikasi langsung

dalam kelompok dan antar kelompok sosial lainnya, misalnya Group 2 dan Group 3.

Setelah *opinion leader* menerima informasi, mereka menyebarkannya kepada anggota kelompok melalui komunikasi interpersonal, yang lebih efektif dan persuasif. Selain itu, interaksi antar kelompok juga memperkuat penyebaran informasi secara horizontal, menciptakan jalur distribusi informasi yang lebih luas dan komprehensif. Alur komunikasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya membentuk opininya berdasarkan informasi langsung dari media, tetapi dari *opinion leader* yang menafsirkan dan menyesuaikan informasi dengan konteks budaya dan sosial yang berlaku. Dalam penelitian ini, *opinion leader*, termasuk tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan, memainkan peran kunci dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada komunitas yang lebih luas. Ini memperlihatkan bahwa peran *opinion leader* sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap pesan-pesan terkait moderasi beragama.

1.8. Desain Konseptual

Dalam pengembangan moderasi beragama berbasis budaya lokal, nilai-nilai Al-Qur'an juga memberikan arahan yang jelas tentang sikap moderasi. Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:143) menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan* (umat yang moderat):

"Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019a)

Konsep ini sejalan dengan penguatan budaya lokal seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi*, yang menekankan harmoni dan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49:13). Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan dan penghormatan antarumat manusia sebagai dasar moderasi beragama dalam keberagaman budaya:

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019a)

Ayat ini memperkuat konsep budaya lokal seperti *sipakatau* (saling memanusiaikan) dan *sipakalebbi* (saling menghormati), yang sejalan dengan prinsip inklusivitas dan penghargaan terhadap perbedaan dalam moderasi beragama.

Lebih lanjut, moderasi beragama juga selaras dengan ajaran dalam Al-Quran Surah An-Nisa (4:36), yang memerintahkan kebaikan kepada tetangga dan semua manusia tanpa memandang perbedaan agama:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019a)

Ayat ini memperkuat pentingnya nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan untuk membangun toleransi dan moderasi dalam masyarakat multikultural seperti Parepare dan Tana Toraja.

Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5:8). Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan sikap moderat dalam menilai serta memperlakukan orang lain, termasuk dalam konteks sosial dan keagamaan:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019a)

Moderasi beragama membutuhkan keadilan dalam sikap dan tindakan, yang dalam konteks budaya lokal dapat diterjemahkan dalam praktik sikap saling menghormati dan menjaga harmoni sosial di Sulawesi Selatan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya moderasi dalam beragama. Rasulullah bersabda, "Agama itu mudah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah" (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan pentingnya bersikap moderat, tidak berlebihan dalam melaksanakan ajaran agama, agar umat Islam dapat menjalankan agama dengan penuh keseimbangan dan ketenangan tanpa terjebak dalam ekstremisme.

Ajaran agama Kristen Protestan, dalam Alkitab menekankan pentingnya kasih kepada sesama dan hidup damai dengan semua orang. Sikap moderasi dalam Kristen Protestan terlihat dari ajaran untuk tidak menghakimi dan menghormati perbedaan, sebagaimana yang terdapat dalam ayat

"Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Matius 22:39) dan "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan..." (Ibrani 12:14).

Ajaran ini memperkuat nilai-nilai toleransi dan keharmonisan sosial dalam kehidupan beragama. (Sumatera Selatan, 2020)

Kristen Katolik, dalam ajarannya bahwa konsep moderasi beragama diwujudkan melalui dialog antaragama dan penghormatan terhadap kepercayaan lain. Katolik mendorong sikap inklusif dan penerimaan terhadap perbedaan untuk membangun harmoni dalam kehidupan sosial. Ajaran ini didukung oleh ayat dalam Alkitab yang berbunyi:

"Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah" (Matius 5:9).

Sikap terbuka dalam ajaran Katolik mencerminkan komitmen terhadap moderasi beragama sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Gultom, 2022).

Ajaran agama Hindu, moderasi beragama tercermin dalam ajaran Ahimsa, yang menekankan prinsip tanpa kekerasan dan kasih sayang terhadap semua makhluk. Selain itu, konsep *Tat Twam Asi* mengajarkan bahwa setiap individu adalah bagian dari satu kesatuan yang harus saling menghormati. Ayat dalam Weda menyebutkan bahwa "*Ahimsa paramo dharma*" (Tanpa kekerasan adalah kewajiban tertinggi), yang menjadi dasar dalam menjaga harmoni sosial dan menghargai perbedaan. Ajaran ini menekankan pentingnya keseimbangan dan toleransi dalam kehidupan beragama (Rahmatina & Ali, 2024)

Ajaran agama Buddha, konsep jalan tengah (*Majjhima Patipada*) menjadi dasar moderasi beragama, yang mengajarkan untuk menghindari dua ekstrem: pemuasan nafsu dan penyiksaan diri. Buddha menekankan pentingnya keseimbangan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Salah satu ayat dalam Tripitaka menyatakan,

"Tidak membunuh makhluk, cinta kasih, kasih sayang dan kebajikan hati kepada semua makhluk..." (*Sutta Pitaka, Digha Nikaya*).

Ajaran ini mengarahkan umat Buddha untuk mengembangkan sikap moderat dalam beragama dan menjaga perdamaian dengan sesama (Mutawakkil, 2022).

Ajaran agama Konghucu, ajaran moderasi beragama terlihat dalam konsep Zhong Yong, yang menekankan keseimbangan dan keselarasan dalam segala aspek kehidupan. Sikap moderasi dalam Konghucu juga mendorong toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, sebagaimana yang tercermin dalam ajaran

"Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan lakukan kepada orang lain" (Analek 15:24).

Dengan mengamalkan ajaran ini, umat Konghucu diharapkan dapat menciptakan harmoni sosial dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.)

Setiap agama di Indonesia memiliki ajaran yang menekankan pentingnya moderasi, toleransi, dan keseimbangan dalam kehidupan beragama. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk membangun kerukunan dan harmoni dalam masyarakat yang multikultural, sehingga memperkuat kehidupan beragama yang damai dan inklusif.

1.8.1. Budaya Lokal

Budaya lokal mengacu pada seperangkat nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, seni, dan praktik yang diadopsi dan dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah tertentu (Geertz, 2019). Kebudayaan lokal merupakan wujud identitas kolektif suatu komunitas dan seringkali berkembang secara organik dari interaksi antar individu dalam jangka waktu yang lama (Lixinski, 2018). Definisi budaya

lokal sering kali berkaitan dengan identitas budaya suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan mencerminkan sejarah, geografi, lingkungan, dan pengalaman kolektif mereka.

Kebudayaan lokal juga mencerminkan kompleksnya hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di mana ia tinggal. Melalui budaya lokal, masyarakat mengembangkan cara unik dalam berinteraksi dengan alam, seperti tradisi pertanian berkelanjutan, pemeliharaan hutan adat, dan pengetahuan tentang flora dan fauna lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi (Lixinski, 2018). Pengertian budaya lokal tidak hanya mencakup aspek material saja, namun juga aspek non material yang mencakup sistem nilai, sikap, dan kepercayaan yang membentuk pandangan hidup dan perilaku sehari-hari masyarakat setempat. Budaya lokal mempunyai peranan penting dalam memperkuat identitas individu dan kelompok, menjaga keberagaman budaya, dan sebagai sumber inspirasi seni, musik, dan sastra.

Kebudayaan lokal dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, makanan, pakaian, arsitektur, musik, tari, upacara adat, cerita rakyat, seni rupa, dan praktik keagamaan. Ini semua merupakan wujud nilai, tradisi, dan identitas budaya yang khas pada suatu komunitas atau kelompok. Salah satu ciri budaya lokal adalah keunikan dan keragamannya. Setiap daerah atau masyarakat mempunyai ciri budaya yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, agama, suku, dan lingkungan geografis. Budaya lokal juga dapat menjadi kebanggaan dan identitas bagi masyarakat lokal, serta menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peneliti yang tertarik untuk memahami dan mengapresiasi keanekaragaman budaya di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks pengembangan penelitian ini, pemahaman dan penghormatan terhadap budaya lokal sangatlah penting. Hal ini memungkinkan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, program dan proyek yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan nilai-nilai masyarakat lokal, dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, budaya lokal merupakan bagian integral dari identitas masyarakat, dan berperan penting dalam membentuk cara hidup, persepsi dan interaksi sosial di tingkat lokal dan global.

Kebudayaan lokal mempunyai berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah atau masyarakat (Hannerz, 2012). Fungsi-fungsi tersebut mencerminkan pentingnya budaya lokal dalam menjaga kelangsungan, jati diri, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Berikut uraian empat fungsi pokok kebudayaan lokal.

- a. Menjaga Identitas dan Warisan Budaya: Budaya lokal berperan dalam menjaga identitas kolektif suatu komunitas dan mewariskan pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Hal ini mencakup praktik budaya seperti adat istiadat, upacara keagamaan, bahasa, tari, musik, dan seni rupa yang menjadi ciri khas masyarakat setempat.

- b. Pengembangan Identitas dan Rasa Bangga: Budaya lokal membantu individu dan kelompok dalam mengembangkan identitas diri dan rasa bangga terhadap asal usul dan sejarahnya. Hal ini memberikan stabilitas dan kepercayaan diri anggota masyarakat dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Lingkungan dan Norma Sosial: Budaya lokal juga berfungsi sebagai kerangka acuan perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat. Melalui nilai, norma, dan etika yang terkandung dalam budaya lokal, masyarakat menentukan standar yang diterima dalam hal moralitas, keadilan, dan hubungan antar individu.
- d. Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Lokal: Budaya lokal dapat menjadi sumber daya ekonomi yang penting melalui wisata budaya, kerajinan lokal, pertanian tradisional, dan industri kreatif lainnya. Pengembangan dan pemajuan budaya lokal dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis di Parepare, Sulawesi Selatan, kearifan lokal memainkan peran penting yang tercermin dalam berbagai aspek budaya dan kehidupan sehari-hari. (Baharuddin et al., 2021) membahas tentang pengaruh budaya lokal Bugis terhadap konfigurasi spasial permukiman Soreang di Kota Parepare, dimana makna budaya seperti saling menghargai, adil, dan rasa kekeluargaan membentuk pola permukiman tersebut. Suparman et al. (2019) menyebutkan penanggalan Bugis merupakan warisan budaya yang mendahului masuknya Islam ke wilayah tersebut dan terus digunakan bersamaan dengan penanggalan Hijriah, yang menandakan pelestarian budaya leluhur. Kontradiksi atau fakta menarik muncul ketika mempertimbangkan konteks kearifan lokal Bugis yang lebih luas.

Kearifan lokal juga menjadi bagian integral dari pendidikan moral pada anak usia dini, di mana nilai-nilai seperti rasa malu, harga diri, adat istiadat, kesabaran, dan kerja keras ditanamkan sejak kecil (Ali, Riyanti, et al., 2022). Hubungan antara Islam, masyarakat adat, dan kearifan lokal di Enrekang, dimana desa adat mempertahankan adat istiadat mereka bersamaan dengan praktik keagamaan, yang menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan tradisi Islam dalam komunitas Bugis (Muhaemin et al., 2023). Kearifan lokal masyarakat Bugis di Parepare, Sulawesi Selatan, memiliki banyak segi, meliputi norma sosial kesopanan (Mahmud, 2011), tata kota yang dipengaruhi nilai-nilai budaya (Baharuddin et al., 2021), Pendidikan moral (Ali, Riyanti, et al., 2022), dan interaksi antara adat istiadat dan Islam (Muhaemin et al., 2023). Elemen-elemen ini secara kolektif berkontribusi pada kekayaan identitas budaya Bugis dan ekspresinya dalam kehidupan sehari-hari dan organisasi masyarakat.

Konsep kearifan lokal mengacu pada sistem pengetahuan adat yang tertanam kuat dalam budaya dan praktik masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bugis Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kearifan lokal diwujudkan dalam berbagai

bentuk, antara lain pemanfaatan tanaman obat, norma sosial, dan praktik budaya. Selain itu, praktik kesopanan orang Bugis, yang dipengaruhi oleh status sosial, usia, jenis kelamin, dan keakraban, mencerminkan norma dan nilai budaya mereka (Mahmud, 2011). Praktik-praktik tersebut bukan hanya sekedar bentuk etika sosial namun juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dan hierarki sosial dalam masyarakat. Menariknya, integrasi praktik Islam dengan tradisi asli Bugis-Makassar, seperti ritual “Haji Bawakaraeng”, menunjukkan interaksi dinamis antara agama dan adat istiadat setempat (Pabbajah, 2021).

Representasi budaya Bugis dalam karya sastra, sebagaimana terlihat dalam novel *La Galigo 2*, semakin menggambarkan kekayaan warisan Bugis dan evolusinya seiring berjalannya waktu (Yunus & Musliadi, 2023). Konfigurasi spasial permukiman Soreang di Kota Parepare juga mencerminkan pengaruh nilai-nilai budaya lokal terhadap desain perkotaan (Baharuddin et al., 2021). Kearifan lokal masyarakat Bugis di Kota Parepare mencakup spektrum pengetahuan dan praktik yang luas, mulai dari keahlian etnobotani hingga etika sosial dan perpaduan antara agama dan tradisi adat. Elemen-elemen tersebut secara kolektif berkontribusi terhadap identitas budaya dan tatanan sosial masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan (Baharuddin et al., 2021; Mahmud, 2011; Pabbajah, 2021; Yunus & Musliadi, 2023).

Konsep budaya lokal di Parepare dapat ditelaah dalam kerangka model komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, tokoh agama, media, masyarakat sipil dan bisnis dalam menumbuhkan moderasi beragama. Integrasi nilai-nilai budaya lokal sangat penting dalam membangun moderasi beragama, terbukti dengan penelitian yang menyoroti peran nilai-nilai budaya dan agama dalam mendorong toleransi dan kerukunan (Pajarianto et al., 2023). Studi-studi ini menunjukkan pentingnya kearifan lokal dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam menumbuhkan iklim keagamaan yang moderat.

Menariknya, meskipun model komunikasi dalam penelitian ini menekankan pendekatan kolaboratif, penelitian yang ditinjau menunjukkan bahwa peran *opinion leader*, seperti pemimpin agama dan adat, sangat penting dalam menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama (Daheri et al., 2023; Mujizatullah, 2022; Pajarianto et al., 2022). Para pemimpin ini bertindak sebagai teladan dan simbol dalam komunitas mereka, yang mencerminkan lembaga-lembaga tradisional yang mempunyai wewenang untuk mempengaruhi pelestarian dan pemajuan pemahaman budaya lokal. Ringkasnya, budaya lokal Parepare dapat diperkuat melalui model komunikasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong moderasi beragama.

Peran *opinion leader* sangat penting dalam proses ini, karena mereka mewujudkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, dan saling pengertian yang melekat dalam budaya lokal. Pendekatan kolaboratif ini dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis, di mana moderasi beragama dipraktikkan dan dihargai (Daheri et al., 2023; Mujizatullah,

2022; Pajarianto et al., 2022). Budaya lokal di kota Parepare bercirikan ajaran *Tau Lotang* yang berakar kuat pada tradisi '*urf*' masyarakat Wattang Bacukiki. Tradisi adat istiadat tersebut mencakup berbagai nilai, antara lain nilai tauhid, kemanusiaan, kehidupan, spiritual, moral, sosial, dan intelektual, serta merupakan bagian integral dari pendidikan multikultural dan pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan multikultural dan berorientasi pada penguatan nilai-nilai pendidikan Islam Nusantara dalam konteks Indonesia (Aminah & Jalil, 2019).

Meskipun mengalami perubahan sosial, dengan keturunan *to lotang* yang kini bekerja di berbagai bidang seperti kepolisian, pegawai negeri, dan keperawatan, masyarakat tetap menjunjung tinggi praktik tradisional mereka. Termasuk di dalamnya tradisi ritual makam *lolong loma* dan *mappalili* yang tetap menjadi bagian integral dari budaya lokal (Aminah & Jalil, 2019). Ajaran tau lotang dan tradisi '*urf*' yang bertahan lama membentuk sistem pendidikan budaya yang beraneka segi serta diterapkan dalam komunitas Muslim setempat, menyoroti dimensi keagamaan dan multikultural mereka (Jufri & Azis, 2018). Menariknya, meskipun terjadi evolusi peran profesional, komunitas Wattang Bacukiki tetap mempertahankan ritual serta adat istiadat mereka, menunjukkan ketahanan budaya yang adaptif.

Konsep '*urf*' (praktik adat) memainkan peran penting dalam wacana moderasi beragama, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan kekayaan keragaman budaya dan agama. Studi-studi yang ditinjau menunjukkan bahwa '*urf*' dapat berperan penting dalam menumbuhkan lingkungan moderasi beragama dengan mengintegrasikan adat dan tradisi lokal ke dalam praktik keagamaan, sehingga mendorong toleransi dan keharmonisan sosial (Faizah et al., 2022; Haryanto, 2022). Menariknya, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa '*urf*' dan tradisi lokal sudah selaras dengan prinsip moderasi beragama dan dipraktikkan dalam masyarakat, penelitian lain menyoroti implementasi strategis dari '*urf*'. Hal ini menunjukkan adanya interaksi dinamis antara struktur keagamaan formal dan praktik budaya informal dalam mendorong moderasi beragama.

Ringkasnya, penggabungan '*urf*' ke dalam penguatan moderasi beragama terlihat jelas dalam literatur yang diulas. Adat dan tradisi setempat tidak hanya sejalan tetapi juga mendukung moderasi beragama, sehingga berkontribusi terhadap hidup berdampingan secara damai antara kelompok agama dan budaya yang berbeda. Hal ini tercermin dalam cara masyarakat menginternalisasi dan mempraktikkan moderasi melalui interaksi dan hubungan sosial sehari-hari, serta cara para pemimpin dan lembaga agama mengintegrasikan '*urf*' ke dalam ajaran dan aktivitas mereka (Faizah et al., 2022; Haryanto, 2022).

Karya Bronislaw Malinowski, meskipun tidak secara spesifik membahas budaya lokal Parepare, memberikan kerangka kerja yang luas untuk memahami keterkaitan antara agama, gotong royong, dan praktik sosial dalam membentuk

identitas komunitas (Yunus & Musliadi, 2023). Pendekatan fungsionalis Malinowski terhadap budaya menekankan pentingnya berbagai elemen budaya dalam memenuhi kebutuhan individu dalam suatu masyarakat. Studinya tentang hukum dan sihir dalam masyarakat primitif menggambarkan bagaimana institusi dan praktik budaya berkontribusi pada stabilitas dan kohesi komunitas (Goralski & Górniak-Kocikowska, 2018; Szulczewski, 2017). Menariknya, refleksi Malinowski sendiri dan analisis ilmiah selanjutnya atas karyanya mengungkapkan pemahaman yang kompleks tentang peran ahli etnografi, yang dapat diterapkan pada studi budaya lokal Parepare. Metode etnografi, dengan penekanan pada observasi partisipan, seperti yang dipraktikkan oleh Malinowski, melibatkan pendalaman diri dalam kehidupan sehari-hari di Parepare untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik keagamaan, nilai-nilai gotong royong, dan adat istiadat sosial (Venkataraman, 2023).

Penguatan budaya lokal juga berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai generasi muda seperti toleransi, perdamaian, dan kerukunan antar umat beragama (Fauzian et al., 2021). Ajaran *tau lotang*, yang berakar pada tradisi "*urf*" masyarakat Wattang Bacukiki, membentuk budaya lokal Kota Parepare. Tradisi tersebut mengandung berbagai nilai, termasuk nilai tauhid, kemanusiaan, kehidupan, spiritual, moral, sosial, dan intelektual. Nilai-nilai ini merupakan komponen penting dari pendidikan multikultural dan Islam di Indonesia. Ini dimasukkan ke dalam sistem pendidikan multikultural dan ditujukan untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan Islam Nusantara di Indonesia (Aminah & Jalil, 2019). Melalui pendidikan budaya lokal, generasi muda dapat belajar pentingnya menghargai perbedaan dan bekerja sama melintasi perbedaan agama dan budaya. Oleh karena itu, budaya lokal tidak hanya menjadi warisan penting yang harus dilestarikan, tetapi juga dapat dijadikan alat untuk membangun masa depan masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih damai dan inklusif khususnya di Kota Parepare.

Sipakatau, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* adalah prinsip-prinsip moderasi beragama yang ditemukan dalam falsafah Bugis (Hamzah & Marwati, 2023). Dalam tradisi Suku Bugis, *sipakatau* mencakup eksistensi manusia secara keseluruhan, termasuk martabat dan kehormatan sebagai manusia. Konsep nilai ini memiliki aspek sosial vertikal dan horizontal, yang mengajarkan pentingnya saling menghargai, memperlakukan, dan memanusiakan sesama manusia. Ini adalah apa yang disebut *musawah*, yaitu bagaimana manusia memiliki emansipasi, yaitu bagaimana mereka bersikap dan berpikir, memanusiakan manusia. Memuliakan satu sama lain adalah makna dari *sipakalebbi*. Konsep ini mengandung nilai *tasamuh*, yang berarti menerima dan menghargai perbedaan dan keberagaman, seperti menghargai kemajemukan.

Al-Qur'an banyak mengatakan tentang perbedaan dan memberikan petunjuk untuk sifat *tasamuh*. Tidak hanya memuliakan individu secara pribadi, tetapi juga mencakup agama dan kepercayaan mereka. Konsep *sipakalebbi* berarti saling memuliakan. Konsep ini mengandung nilai *tasamuh*, yang berarti

menerima dan menghargai perbedaan dan keberagaman, seperti menghargai kemajemukan. Al-Qur'an banyak mengatakan tentang perbedaan dan memberikan petunjuk untuk sifat *tasamuh*. Tidak hanya memuliakan individu secara pribadi, tetapi juga mencakup agama dan kepercayaan mereka.

Selain itu, konsep *sipakainge* yang berisi prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. *Amar ma'ruf nahi mungkar* adalah bagian dari upaya kontrol sosial dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mempromosikan kesholehan sosial dan mencegah pelanggaran norma sosial. Melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah tanggung jawab yang harus dilakukan baik dalam kelompok maupun dalam masyarakat. Jika dilakukan oleh anggota masyarakat, akan menghasilkan kedamaian dan ketentraman di tempat tersebut.

Budaya lokal Tana Toraja dicirikan oleh perpaduan unik antara kepercayaan dan praktik masyarakat adat, seperti *aluk todolo*, dengan unsur agama Kristen (Maulana et al., 2023). Rumah adat Tongkonan berfungsi sebagai simbol toleransi beragama dan menjadi sentral pelestarian adat dan upacara adat (Andri, 2023). Warisan budaya Tana Toraja yang kaya, termasuk ritual dan tradisinya yang unik, memiliki potensi yang signifikan sebagai daya tarik wisata, berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat lokal dan pengakuan global atas budaya khususnya (Winowatan & Anneke W, 2023). Budaya lokal *aluk todolo* di Tana Toraja merupakan sistem kepercayaan dan praktik kompleks yang menjadi inti identitas masyarakat Tana Toraja. *Aluk todolo*, yang diterjemahkan menjadi "jalan nenek moyang", adalah sistem kepercayaan asli yang hidup berdampingan dengan agama Kristen di kalangan masyarakat Tana Toraja.

Meskipun budaya Toraja mengalami modernisasi, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional, seperti penanaman nilai budaya *siri'* sejalan dengan pendidikan Islam di kalangan anak-anak Muslim (Alang, 2020). Komunitas *aluk todolo* menggunakan ritual sebagai bentuk perlawanan dan negosiasi identitas terhadap dominasi agama resmi. Kearifan lokal seperti Tongkonan dan upacara seperti *rambu solo'* dan *Karapasan* berperan dalam menumbuhkan moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama (Bachrong & Ansar, 2021). Hal ini mencakup serangkaian ritual, yang paling menonjol adalah upacara pemakaman *rambu solo'*, yang merupakan acara rumit yang menandakan status sosial dan kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya (Hidayat, 2022). *Rambu solo'* juga merupakan cerminan pandangan masyarakat Toraja tentang kematian dan kehidupan setelah kematian, yang berakar kuat pada kepercayaan tradisional mereka (Maulana et al., 2023). Selain itu, rumah adat Tongkonan juga berfungsi sebagai media untuk menumbuhkan toleransi beragama dan merupakan simbol penghormatan masyarakat Toraja terhadap beragam praktik keagamaan (Andri, 2023).

Aluk todolo merupakan salah satu elemen fundamental dalam identitas budaya Tana Toraja, yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ritual pemakaman hingga pembinaan toleransi beragama. Terlepas dari tekanan modernisasi dan integrasi agama, masyarakat Tana Toraja terus mempraktikkan

dan mengadaptasi tradisi mereka, memastikan keberlangsungan warisan budaya unik mereka. Menariknya, meskipun *aluk todolo* dianggap ketuhanan dan mencakup segalanya, namun praktik di dalamnya, seperti upacara *rambu solo*, telah mengalami perubahan karena pengaruh agama Kristen dan modernitas (Hidayat, 2022).

Adaptasi ini menunjukkan sifat dinamis budaya lokal Tana Toraja yang mampu mengintegrasikan unsur-unsur baru dengan tetap mempertahankan prinsip intinya. Budaya lokal Tana Toraja merupakan perpaduan kompleks dari kepercayaan tradisional, ritual, dan pengaruh modern. Upaya masyarakat untuk melestarikan identitas budayanya sambil merangkul keragaman agama dan modernitas terlihat jelas dalam praktik dan peran bangunan tradisional seperti Tongkonan. Dinamika budaya ini tidak hanya berkontribusi pada tatanan sosial Tana Toraja tetapi juga menawarkan wawasan berharga tentang interaksi antara tradisi dan modernisasi.

Meskipun tidak mempelajari Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja secara langsung, kontribusi metodologis dan perspektif fungsionalis Malinowski memberikan lensa berharga untuk menganalisis dinamika budaya di daerah tersebut. Karyanya menekankan pentingnya praktik dan institusi budaya dalam membentuk identitas komunitas, yang dapat diterapkan pada konteks Parepare untuk memahami bagaimana keyakinan agama, nilai-nilai komunal, dan praktik sosial berkontribusi pada pembentukan identitas lokal (Krysińska-Kaluźna, 2023). Bronislaw Malinowski menekankan pentingnya unsur budaya seperti kepercayaan, nilai, praktik, dan institusi sosial dalam membentuk struktur dan fungsi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Malinowski menyoroti bagaimana budaya lokal Sulawesi Selatan yang meliputi tradisi keagamaan, nilai gotong royong, dan praktik sosial berperan penting dalam membentuk identitas dan perilaku masyarakat lokal. Model komunikasi *hexahelix* dapat digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi antara pemangku kepentingan lokal dan *opinion leader* dalam konteks budaya ini dapat memperkuat budaya lokal dan membangun moderasi beragama.

Identitas dan nilai-nilai masyarakat Sulawesi Selatan sangat dibentuk oleh budaya lokal. Meningkatkan budaya lokal dapat menjadi landasan kuat untuk meningkatkan toleransi dan mengurangi konflik. Kebudayaan lokal Sulawesi Selatan yang kaya akan tradisi, adat istiadat dan kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun sangat mempengaruhi jati diri dan nilai-nilai masyarakatnya (Hadi.R, 2020). Adat istiadat setempat mencerminkan perbedaan agama dan suku yang ada di daerah tersebut dan menjadi landasan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Moderasi beragama, memperluas pemahaman dan rasa hormat terhadap budaya lokal dapat menjadi kunci untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dan mengurangi kemungkinan konflik.

1.8.2. *Opinion leader*

Peran *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama kini tidak lagi hanya berada di tangan tokoh agama dan adat, tetapi juga menyebar ke tokoh digital yang memiliki pengaruh luas di media sosial. *Opinion leader* digital memainkan peran besar dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang toleransi dan keberagaman, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran ideologi ekstrem jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana *opinion leader* tradisional dan digital berinteraksi dalam membangun wacana moderasi beragama.

Opinion leader merupakan sebuah konsep yang dijelaskan oleh beberapa tokoh di bidang sosiologi dan komunikasi sebagai individu yang mempunyai pengaruh signifikan dalam membentuk opini, sikap dan perilaku orang lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld adalah dua tokoh di bidang komunikasi massa yang menyumbangkan konsep *opinion leader* dalam kajian pengaruh media massa dan komunikasi interpersonal. Menurut kajiannya, *opinion leader* adalah individu yang memiliki kualitas kepemimpinan dan keahlian dalam bidang tertentu yang memungkinkannya mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku orang lain di sekitarnya. *Opinion leader* biasanya dikenal sebagai orang-orang yang aktif, berpengetahuan dan dipercaya dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu (Wang et al., 2018).

Opinion leader dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk pengambilan keputusan politik, pembelian produk, atau adopsi inovasi (Wang et al., 2018). Mereka sering kali memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dalam mengenai topik tertentu dibandingkan anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi penting bagi orang lain. Misalnya, dalam kelompok pecinta musik, *opinion leader* mungkin adalah individu yang paling banyak menghadiri konser, mengenal artis-artis terkemuka, dan memiliki penilaian yang dihormati oleh anggota lainnya.

Pengaruh *opinion leader* dalam membentuk opini dan sikap individu dapat terjadi melalui komunikasi interpersonal secara langsung seperti percakapan tatap muka, atau melalui media massa seperti media sosial atau blog. Di era digital saat ini, *opinion leader* juga dapat berperan dalam membentuk opini melalui konten yang mereka bagikan di platform online, yang dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pandangan banyak orang (Jacksen et al., 2021). Meskipun *opinion leader* mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan perilaku orang lain, penting untuk diingat bahwa pengaruh mereka tidak selalu positif atau benar. Terkadang, *opinion leader* dapat mempengaruhi orang lain untuk mengambil sikap atau perilaku yang tidak rasional atau bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap informasi yang diterimanya dari berbagai sumber, termasuk dari para *opinion leader*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan *opinion leader* memegang peranan sentral dalam membangun moderasi beragama. *Opinion leader* dalam

konteks ini dapat bertindak sebagai mediator antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya, dan memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan moderasi dan mendorong keharmonisan antaragama. *Opinion leader* dalam penelitian ini dapat berasal dari berbagai latar belakang, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau individu yang mempunyai pengaruh signifikan di masyarakat lokal. Mereka mempunyai kedudukan dan keyakinan yang kuat di mata masyarakat, sehingga berpotensi mempengaruhi pandangan dan sikap orang lain terhadap persoalan agama dan budaya.

Opinion leader mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat. Dalam bidang atau komunitas tertentu, mereka dihormati, diakui, dan sering dianggap sebagai pemimpin (Miller, 2015). Melalui kekuatan sosialnya, *opinion leader* dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan orang lain. *Opinion leader* dalam moderasi beragama dapat berperan penting dalam menyebarkan pesan-pesan yang mendukung toleransi, perbincangan antaragama, dan kerukunan dalam masyarakat. Dengan melibatkan para *opinion leader* dalam diskusi dan kegiatan yang mengedepankan keharmonisan dan toleransi, hal ini dapat menciptakan momentum positif bagi perubahan sosial yang berkelanjutan (Kholil et al., 2020; Noviani et al., 2022). Konsep moderasi beragama yang mencakup nilai-nilai seperti keseimbangan, toleransi, kesetaraan, dan kreativitas sangat penting untuk mengakui keberadaan pihak lain, menghormati perbedaan, dan mendorong solusi tanpa kekerasan (Noviani et al., 2022) M

Meskipun penelitian-penelitian tersebut menyoroti peran positif para *opinion leader* dalam mendorong moderasi beragama, terdapat pemahaman implisit bahwa efektivitas para pemimpin ini bergantung pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan mewujudkan prinsip-prinsip moderasi dalam interaksi mereka dengan para pengikutnya (Kholil et al., 2020). Hal ini khususnya relevan dalam konteks dialog antaragama dan pemeliharaan keharmonisan sosial (Anggraeni et al., 2023; Djainudin, 2022).

Dalam konteks penguatan budaya lokal *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama, para *opinion leader* dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempromosikan nilai-nilai dan tradisi lokal yang menghormati keberagaman agama dan budaya. Melalui keterlibatan aktifnya dalam kegiatan masyarakat dan upaya pendidikan, para *opinion leader* dapat membantu menjaga dan mengembangkan warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Selain itu, dalam membangun moderasi beragama, para *opinion leader* dapat berperan penting dalam memoderasi diskusi dan dialog antar agama, serta membantu memperkuat jaringan kerja sama antar agama. Dengan mengedepankan toleransi, pengertian dan saling menghormati antar umat beragama, para *opinion leader* dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbangunnya kerukunan dan kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Selatan.

Di Parepare, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, adalah salah satu tokoh yang aktif mendukung moderasi beragama melalui inisiatif akademis dan kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara Moderasi Beragama. Beberapa perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia berpartisipasi dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara Moderasi Beragama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan moderasi beragama di kalangan siswa dan masyarakat umum. Pejabat tinggi dari Kementerian Agama RI juga hadir di acara tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong moderasi beragama di daerah tersebut.

Selain itu, inisiatif lokal seperti Kampung Moderasi Beragama di Kota Parepare yang bertujuan untuk meningkatkan harmoni dan toleransi antarumat beragama. Inisiatif ini dipimpin oleh tokoh lokal seperti Aminah Amin, Asisten 1 Setda Kota Parepare, yang secara aktif mendidik masyarakat tentang pentingnya kerukunan antaragama. Para *opinion leader* ini sangat penting untuk menjaga masyarakat bersatu dan menghindari hal-hal yang dapat memecah belah. Dalam upaya melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum, mereka berusaha memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama.

Di Tana Toraja, *opinion leader* berperan penting dalam menjaga kerukunan dan mempromosikan moderasi beragama. Tokoh gereja Toraja dan pemimpin kepercayaan *aluk todolo* berperan sebagai mediator dalam potensi konflik dan membimbing komunitas dalam merangkul keberagaman secara damai. Imam Besar Masjid Raya Makale dan pemimpin gereja Kristen juga aktif dalam dialog antaragama, menciptakan ruang komunikasi yang menghormati perbedaan. Dukungan pemerintah daerah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat kolaborasi antar kelompok agama.

Secara keseluruhan, para pemimpin agama dan masyarakat di Tana Toraja berperan sebagai *opinion leader* yang membangun dan mempertahankan moderasi beragama. Upaya mereka meliputi dialog, mediasi, serta penyebaran nilai toleransi dan kerukunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai budaya lokal dan peran *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama, guna merancang strategi komunikasi yang efektif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan

1.8.3. Moderasi Beragama

1.8.3.1. Landasan Hukum Moderasi Beragama

Landasan hukum moderasi beragama di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan penting yang bertujuan untuk memperkuat praktik dan pemahaman moderasi beragama. Dasar hukum moderasi beragama di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat (2), Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia pasal 22 ayat (2) tentang, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama pasal 2, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 lampiran III KKMB Kemenag RI (2024) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2024.

Berikut landasan hukum terkait moderasi beragama di Indonesia yang mendukung dan memperkuat inisiatif ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2):

“Negara menjamin kebebasan setiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan keyakinannya.” Pasal ini menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan menjadi landasan konstitusional bagi moderasi beragama di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 ayat (2):

“Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut agama dan keyakinannya.” Undang-undang ini menegaskan kembali hak kebebasan beragama yang dilindungi negara, sejalan dengan pasal 29 UUD 1945.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Pasal 2:

“Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.” Perpres ini mengatur tugas dan fungsi Kementerian Agama, termasuk urusan moderasi beragama.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Lampiran III:

RPJMN ini memuat strategi penguatan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional. Lampiran III memuat kebijakan dan program penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam rangka pembangunan nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama:

Perpres ini memberikan kerangka yang jelas untuk memperkuat moderasi beragama, termasuk pedoman umum, indikator, esensi moderasi beragama, serta program dan strategi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Perpres ini memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan moderasi beragama secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Perpres ini juga memuat indikator moderasi beragama, esensi moderasi beragama, ekosistem dan kelompok strategis, serta arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama.

6. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan moderasi beragama. PMA ini bertujuan untuk memastikan upaya penguatan moderasi beragama terlaksana dengan baik melalui kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Landasan hukum ini bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan mutu pelayanan keagamaan, serta mengembangkan perekonomian masyarakat dan sumber daya keagamaan. Penerapan moderasi beragama berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap konstitusi sebagai kesepakatan nasional dan negara. Dengan landasan hukum tersebut, Indonesia berkomitmen untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis, moderat, dan inklusif, serta mencegah ekstremisme dan radikalisme yang dapat mengancam kerukunan antar umat beragama.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan bersama (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 /Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan, 2006).

Indikator moderasi beragama dalam implementasi dan mengukur keberhasilan penguatan terdapat dalam peraturan Presiden Republik Indonesia (2023) yang terdiri atas empat indikator yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi. Esensi moderasi beragama dalam penguatannya diturunkan kedalam program dan kegiatan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun umat beragama dan penghayat kepercayaan dengan mengedepankan pesan keagamaan dalam moderasi beragama. Esensi

keagamaan tersebut yaitu menjaga keselamatan jiwa, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat martabat kemanusiaan, memperkuat nilai moderasi, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama, dan menaati komitmen berbangsa (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Moderasi beragama, sesuai dengan peta jalan yang dirumuskan dalam Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengejawantahkan esensi ajaran agama untuk melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum (KKMB Kemenag RI, 2024). Prinsip-prinsipnya meliputi keadilan, keseimbangan, dan ketaatan pada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Ada tiga indikator utama untuk mengukur apakah cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang dianggap ekstrem atau tidak moderat (KKMB Kemenag RI, 2024):

1. Melanggar Nilai-Nilai Kemanusiaan: Cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan dianggap radikal jika atas nama agama, mereka melanggar nilai-nilai luhur kemanusiaan. Inti ajaran agama harus mencakup pemeliharaan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Melanggar Kesepakatan Bersama: Praktik keagamaan dianggap radikal jika, atas nama agama, melanggar kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Di Indonesia, kesepakatan ini diwujudkan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang nilai-nilainya diambil dari nilai-nilai luhur agama.
3. Mengabaikan Aturan Sosial dan Pemerintahan: Sikap keagamaan dianggap radikal jika melanggar aturan-aturan sosial dan pemerintahan untuk menciptakan ketertiban sosial dan kebaikan bersama. Pelanggaran ini sering kali menciptakan ketidaktertiban dan mengganggu kesejahteraan umum.

Kebijakan hukum yang telah dijabarkan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Presiden dan Menteri, tidak hanya memberikan kerangka legal bagi moderasi beragama, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan menjamin kebebasan beragama, kebijakan tersebut berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hubungan yang harmonis antara umat beragama. Melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang terkandung dalam kebijakan hukum, kerukunan antar umat beragama dapat dipelihara, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan toleran. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis dan sejalan dengan prinsip moderasi.

Konsep moderasi beragama dalam penelitian ini tidak hanya mencakup hubungan antaragama, tetapi juga moderasi dalam internal satu agama. Perbedaan interpretasi keagamaan sering kali memunculkan konflik dalam satu agama yang berujung pada perpecahan. Selain itu, tantangan moderasi beragama semakin kompleks di era digital karena penyebaran informasi yang tidak terkontrol dapat memperkuat pemikiran eksklusif atau radikal. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diperkuat melalui komunikasi digital dan pendekatan berbasis budaya lokal.

1.8.3.2. Implementasi Moderasi Beragama

Implementasi moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja bertumpu pada pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang telah lama menjadi perekat sosial. Di Parepare, program-program moderasi beragama diterapkan melalui pendidikan formal dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Salah satu inisiatif penting adalah Kampung Moderasi Beragama, sebuah program yang mempromosikan harmoni antaragama melalui pelatihan dan dialog interaktif di tingkat masyarakat (Niar, 2023). Program ini melibatkan tokoh agama, akademisi, serta pemerintah lokal yang bekerja sama untuk memperkuat kerukunan. Salah satu inisiatif utamanya adalah pembentukan “Kampung Moderasi Beragama,” yang bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan dan menghormati perbedaan agama.

Selain itu, Kemenag Parepare menggelar berbagai kegiatan yang mencerminkan moderasi beragama, seperti workshop bagi para pendidik madrasah dan peringatan Maulid Nabi bertema moderasi beragama. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya saling menghormati dan toleransi. Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Parepare berupaya menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal kerukunan dan moderasi beragama, sesuai dengan prinsip menjaga harkat dan martabat manusia serta membangun kehidupan yang damai dan harmonis.

Di Kabupaten Tana Toraja, implementasi moderasi beragama diakui melalui peran budaya lokal yang kuat. Tradisi Tongkonan dan adat istiadat Toraja, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan antaragama (Pajarianto et al., 2022). Dialog lintas agama juga dilakukan secara berkala di Tana Toraja, dipimpin oleh tokoh agama Kristen dan Islam (Bachrong & Ansar, 2021). Dialog ini tidak hanya bertujuan meredakan potensi konflik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya moderasi dalam menjalankan ajaran agama.

Selain melalui pendidikan dan dialog, implementasi moderasi beragama di kedua wilayah juga diwujudkan dalam peran aktif *opinion leader*. Tokoh-tokoh masyarakat, seperti kepala adat, pemimpin agama, dan tokoh lokal lainnya, memainkan peran sentral sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Di Parepare, peran ini terlihat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata

(KKN) Nusantara Moderasi Beragama, yang melibatkan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi di kalangan masyarakat luas (Khoeron, 2023).

Tantangan dalam implementasi moderasi beragama tetap ada, terutama di Parepare. Salah satu kasus yang mencuat adalah penolakan terhadap pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel pada tahun 2023. Sekelompok warga, yang mayoritas beragama Islam, menolak pendirian sekolah tersebut dengan alasan bahwa sekolah tersebut tidak memiliki izin yang sah dan berlokasi di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Demonstrasi besar-besaran terjadi, dan beberapa kelompok konservatif khawatir bahwa pendirian sekolah ini dapat mengubah komposisi demografis agama di wilayah tersebut. Penolakan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan beragama dan kekhawatiran terhadap perubahan sosial yang dirasakan oleh kelompok mayoritas (Abduh, 2023).

Situasi ini semakin kompleks dengan keputusan DPRD Kota Parepare pada 20 September 2024, yang secara resmi menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel (Fatimah, 2024). Keputusan ini diambil setelah menerima aspirasi dari warga yang mengkhawatirkan dampak sosial dan demografis dari pembangunan sekolah tersebut. Dalam pernyataannya, DPRD menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan keharmonisan sosial di wilayah Parepare, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Keputusan ini, meskipun legal, menuai protes dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang melihatnya sebagai langkah mundur dalam upaya menjaga toleransi dan moderasi beragama.

Penolakan dari DPRD ini memperlihatkan bahwa proses implementasi moderasi beragama di Parepare tidak selalu berjalan mulus dan sering kali menghadapi tantangan dari kepentingan politik lokal dan sensitivitas agama. Meskipun tujuan utama kebijakan moderasi beragama adalah menciptakan keharmonisan dan toleransi, dalam praktiknya sering terjadi konflik antara upaya mempertahankan identitas mayoritas dan melindungi hak-hak minoritas agama. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana penerapan kebijakan moderasi beragama di tingkat lokal sering kali harus berhadapan dengan dinamika politik dan sosial yang kompleks.

Selain itu, pada Mei 2024, Kota Parepare kembali menjadi sorotan publik ketika muncul isu terkait dua pegawai non-Muslim yang terlibat dalam panitia pemberangkatan haji. Isu ini berkembang menjadi kontroversi setelah beredar video yang menyebut bahwa Kementerian Agama mengizinkan dua pegawai non-Muslim menjadi pejabat haji. Video tersebut menyebar dengan cepat di media sosial, mengundang reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang menganggap hal ini sebagai ketidakpekaan terhadap norma agama, yang menyebabkan munculnya kritik keras terhadap Kementerian Agama. Kasus ini mencerminkan

bagaimana ketegangan dapat muncul ketika kebijakan pemerintah dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai agama mayoritas di suatu wilayah.

Selain dua kasus tersebut, Kota Parepare juga pernah mengalami insiden penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah minoritas. Pada 2018, terjadi protes serupa ketika ada rencana pembangunan gereja baru di salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Kasus ini berujung pada dialog antara tokoh agama dan pemerintah setempat untuk mencari solusi damai. Namun, kasus-kasus seperti ini menggambarkan betapa sensitifnya isu pendirian rumah ibadah di Parepare dan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya moderasi, tantangan terhadap kerukunan beragama masih sangat nyata.

Sementara di Tana Toraja, perbedaan interpretasi agama antara kelompok masyarakat yang lebih tradisional dan modern juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi program moderasi beragama. Salah satu contoh yang mencuat adalah permasalahan yang melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Tana Toraja pada tahun 2024, ketika MUI memberikan kritik terhadap salah satu anggota DPRD yang diduga melakukan tindakan penistaan agama. Kasus ini berawal dari dugaan bahwa anggota DPRD tersebut mengirimkan pesan yang dianggap tidak sensitif secara agama melalui sebuah grup WhatsApp, yang kemudian memicu ketegangan di masyarakat (Fatir, 2024). MUI Tana Toraja menyarankan agar anggota DPRD tersebut meminta maaf secara terbuka untuk meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih luas di masyarakat.

Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Tana Toraja dikenal dengan toleransi beragamanya yang tinggi, potensi gesekan tetap ada, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif terkait agama. MUI berperan aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan cara mengedepankan dialog dan mediasi antarumat beragama. Langkah yang diambil MUI Tana Toraja ini berhasil mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan menunjukkan bahwa kolaborasi antara tokoh agama dan pemerintah lokal sangat penting dalam menjaga kerukunan. Kasus ini juga mencerminkan bahwa program moderasi beragama di Tana Toraja tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada bagaimana masyarakat lokal dan pemimpinnya menangani isu-isu yang dapat memicu ketegangan. Dengan adanya intervensi dari MUI dan tokoh agama lainnya, proses penyelesaian konflik berjalan lebih lancar, memperkuat komitmen terhadap moderasi beragama dan harmoni sosial di wilayah tersebut.

Implementasi moderasi beragama di Tana Toraja memiliki fondasi kuat yang ditopang oleh kearifan lokal dan budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Budaya lokal seperti *Aluk Todolo* dan simbol-simbol adat seperti *Tongkonan* memainkan peran penting dalam menciptakan ruang dialog antaragama yang inklusif dan harmonis. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, Tana Toraja juga menghadapi tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, khususnya dengan pemeluk Islam dan kepercayaan tradisional. Namun, kolaborasi antara tokoh adat, pemimpin agama,

dan masyarakat umum telah berhasil mempertahankan harmoni sosial, dengan mengedepankan prinsip-prinsip saling menghormati dan toleransi. Buku Pola Hubungan Lintas Agama di Tana Toraja oleh Nuryani Hj. (2015) menggambarkan bagaimana dialog antaragama dibangun melalui nilai-nilai budaya lokal yang memprioritaskan kerjasama dan pengertian (Nuryani, 2015).

Peran *opinion leader* seperti tokoh agama dan tokoh adat dalam mempromosikan moderasi beragama di Tana Toraja sangat penting. Melalui pengaruh mereka, pesan-pesan tentang toleransi dan kerukunan disebarkan secara efektif di kalangan masyarakat. Selain itu, kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan berbagai kelompok agama juga menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama antarumat beragama. Inisiatif-inisiatif seperti ini membuktikan bahwa moderasi beragama bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga praktik nyata yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di Tana Toraja. Hal ini sejalan dengan temuan Nuryani yang menekankan pentingnya pola hubungan lintas agama dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama.

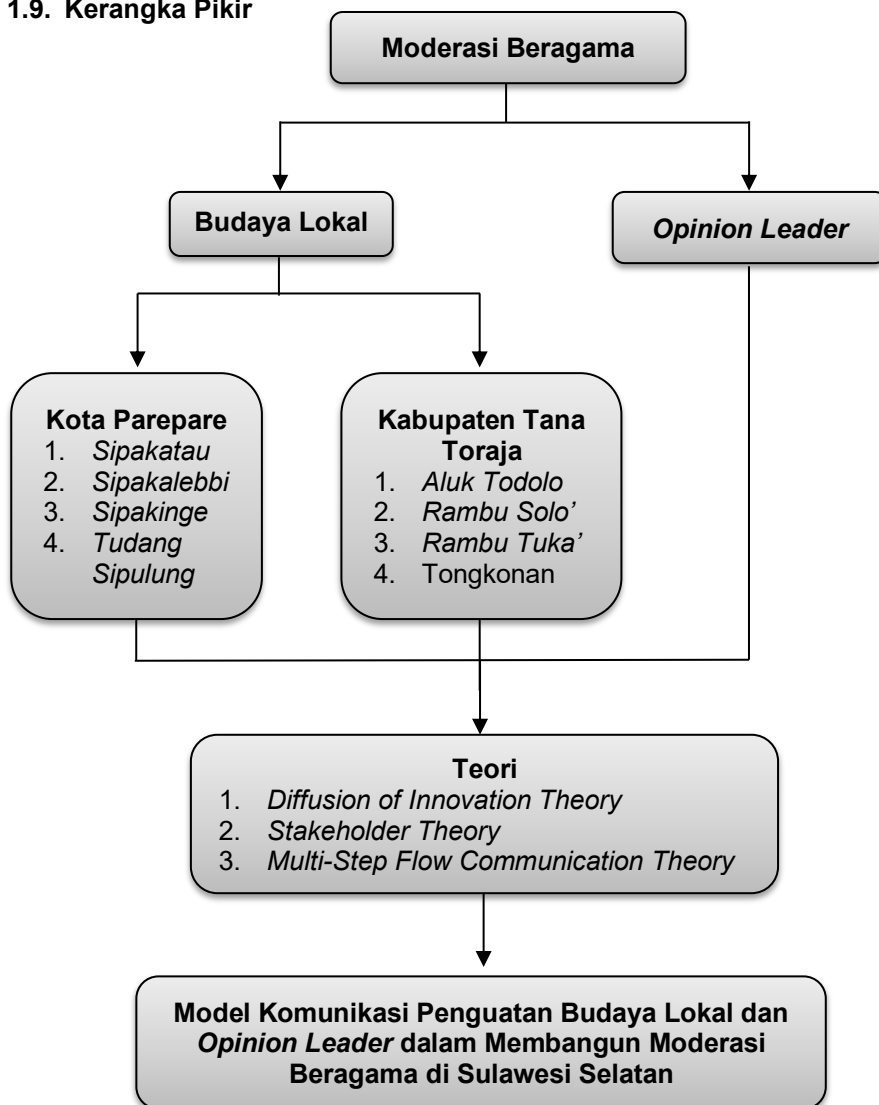
Tradisi Tongkonan dan kepercayaan *aluk todolo* menjadi simbol toleransi dan harmoni, di mana masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda hidup berdampingan dengan damai. Artikel ini menekankan pentingnya menjaga moderasi dan toleransi dalam menghadapi tantangan keragaman agama (Yunus & Mukoyyarah, 2022). Hal ini relevan dengan implementasi moderasi beragama di Tana Toraja, di mana nilai-nilai budaya lokal berperan penting dalam menciptakan kerukunan sosial. Banyak penelitian mendukung implementasi moderasi beragama di Tana Toraja, khususnya dalam hubungan antarumat Islam dan Kristen. Berbagai studi menunjukkan bahwa kearifan lokal, seperti nilai-nilai adat dan budaya, memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial. Misalnya, penelitian yang menyoroti peran ritual tradisional seperti *aluk todolo* dan dialog antaragama menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemimpin agama dan masyarakat. Selain itu, moderasi beragama telah berhasil menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi umat beragama di Tana Toraja, memperkuat kerukunan dan toleransi (Alam, 2023; Musyarif et al., 2019; Umar & Hakim, 2019).

Secara keseluruhan, implementasi moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja mengedepankan prinsip inklusivitas, dialog terbuka, dan pelibatan masyarakat dalam berbagai level. Nilai-nilai budaya lokal yang mendukung harmoni dan kerukunan menjadi faktor penguat dalam keberhasilan program ini. Melalui pendekatan ini, moderasi beragama di kedua wilayah tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga sebagai praktik hidup yang mencerminkan semangat kebersamaan di tengah perbedaan agama dan budaya.

Kerukunan berarti sepakat menerima perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai tolok ukur dalam membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan (Rusydi & Zolehah, 2018). Kerukunan antar umat

beragama tidak sebatas mewujudkan sikap toleransi saja, melainkan mampu saling tolong menolong dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus dijaga agar terciptanya kerukunan nasional. Oleh karena keberagaman tersebut, maka kerukunan merupakan hal penting yang harus dijaga oleh masyarakat dalam kehidupannya. Hidup rukun dalam artian antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama (Rusydi & Zolehah, 2018).

1.9. Kerangka Pikir



Gambar 1.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada model komunikasi penguatan budaya lokal dan *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Moderasi beragama merupakan tujuan utama yang diharapkan dapat menciptakan harmoni sosial, memperkuat toleransi, dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua komponen utama sebagai input, yaitu budaya lokal dan *opinion leader*.

Budaya lokal berfungsi sebagai fondasi nilai yang mengandung prinsip-prinsip hidup harmonis. Di Parepare, nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* menjadi pedoman dalam membangun relasi sosial yang inklusif. Sementara di Tana Toraja, tradisi *rambu solo'*, *aluk todolo*, dan *tongkonan* menjadi simbol nilai budaya yang memperkuat kohesi sosial lintas komunitas. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membangun moderasi beragama dengan menekankan penghormatan terhadap keberagaman.

Opinion leader memainkan peran strategis sebagai perantara dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. *Opinion leader* terdiri dari berbagai aktor, yaitu tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Tokoh agama berperan dalam menyampaikan pesan moderasi melalui ceramah, dialog lintas agama, dan kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dalam melestarikan tradisi budaya yang inklusif, seperti *rambu solo'* dan ritual adat lainnya, yang menjadi wadah interaksi antarumat beragama. Akademisi mendukung proses ini dengan pengembangan teori, penelitian, dan pendekatan ilmiah yang berbasis fakta. Media, baik tradisional maupun digital, memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi kepada audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.

Model Komunikasi yang dirumuskan dalam penelitian ini berfungsi sebagai penghubung antara budaya lokal dan *opinion leader* dengan masyarakat. Proses komunikasi ini melibatkan dua saluran utama, yaitu saluran formal dan saluran digital. Saluran formal meliputi forum dialog lintas agama, kegiatan tradisi budaya, dan acara keagamaan. Sementara saluran digital mencakup media sosial, platform daring, dan konten komunikasi berbasis teknologi. Melalui kedua saluran ini, nilai-nilai budaya lokal disebarluaskan oleh *opinion leader* kepada masyarakat, sehingga menciptakan pola komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama. Pertama, *Diffusion of Innovations Theory* yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dan moderasi beragama dapat tersebar melalui saluran komunikasi formal maupun digital, hingga diadopsi oleh masyarakat luas. Kedua, *Stakeholder Theory* yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan media, dalam menyebarkan pesan moderasi beragama secara bersama-sama. Ketiga, *Multi-Step Flow Theory* yang menekankan peran *opinion leader* sebagai komunikator kunci dalam menyaring, memodifikasi, dan mendistribusikan nilai-nilai budaya lokal kepada masyarakat dalam tahapan yang sistematis.

Hasil dari model komunikasi ini, penelitian mengidentifikasi tiga dampak utama. Pertama, *social harmony* yang tercermin dalam terciptanya hubungan yang harmonis antarumat beragama melalui dialog, tradisi budaya, dan interaksi sosial yang inklusif. Kedua, *tolerance reinforcement* yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan agama, budaya, dan keyakinan di kalangan masyarakat. Ketiga, *cultural preservation* yang memastikan kelestarian nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas komunitas dan alat pemersatu sosial.

Kerangka pikir ini menunjukkan alur yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari input berupa budaya lokal dan peran *opinion leader*, dilanjutkan dengan proses komunikasi melalui saluran formal dan digital, serta dukungan teori yang memperkuat model. Hasil akhirnya adalah terwujudnya moderasi beragama melalui terciptanya harmoni sosial, penguatan toleransi, dan pelestarian budaya lokal. Kerangka ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai budaya lokal, peran *opinion leader*, serta pendekatan komunikasi yang berbasis teori ilmiah dan praktik yang efektif.

1.10. Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2023). *Duduk Perkara Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare Ditolak Warga*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6973950/duduk-perkara-pembangunan-sekolah-kristen-gamaliel-di-parepare-ditolak-warga>
- Alam, S. (2023). Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tana. *Sosioireligius: Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1). <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v8i1.40341>
- Alang, A. H. (2020). Siri' Culture in Tana Toraja. *International Journal of Asian Education*, 1. <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.67>
- Ali, M., Nadhifah, U., & Arenggoasih, W. (2022). Klenteng Mosque's Religious Moderation: Intercultural Communication and Remarking Da'wah of Wasathiyah Islam. In *Jurnal Dakwah Risalah* (Vol. 33, Issue 1). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://doi.org/10.24014/jdr.v33i1.16515>
- Ali, M., Riyanti, R., & Khomsiyatun, U. (2022). Pendidikan Moral Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal dalam Keluarga. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2287–2295. <https://doi.org/10.31004/OBSESI.V6I3.2020>
- Aminah, H. S., & Jalil, A. (2019). *The Culture of Society's Ritual To Lotang In Watang Bacukiki, Parepare City*. 2(2), 183–193. <https://doi.org/10.5281/JRM.V2I2.22>
- Andri. (2023). *Tongkonan Sebagai Media Toleransi Beragama di Tana Toraja Dalam Kajian Sosiologis*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6h24z>
- Anggraeni, D., Muslih, M., & Ghonii, M. I. A. (2023). Harmony in Diversity: Exploring Religious Moderation Perspectives through Interfaith Dialogue.

Jurnal Penelitian. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i2.2275>

- Asmin, A. I. (2022). Tour Guides' Intercultural Communication Strategies In Toraja. In *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* (Vol. 2, Issue 2, pp. 55–62). Dosen Muslim Indonesia. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v2i2.216>
- Bachrong, F., & Ansar, F. A. (2021). Religious Moderation In Karapasan The Local Culture Of Tana Toraja Community In South Sulawesi. *Al-Qalam*, 27. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i1.973>
- Badan Pusat Statistik, P. S. S. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur (Jiwa), 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/1798/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-kelompok-umur.html>
- Badan Pusat Statistik Tana Toraja. (2023). *Kabupaten Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2023*. <https://tatorkab.bps.go.id/publikasi.html>
- Baharuddin, H., Asmal, I., & Syarif, E. (2021). The Impact of Local Wisdom on the Coastal Settlement Spatial Configuration in the City of Parepare. *EPI International Journal of Engineering*, 4. <https://doi.org/10.25042/10.25042/epi-ije.082021.11>
- Bourne, L. (2009). *Stakeholder Relationship Management*. Gower Publishing Limited.
- Daheri, M., Warsah, I., Morganna, R., Putri, O. A., & Adelia, P. (2023). Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 31, 571–586. <https://doi.org/10.25133/JPSSv312023.032>
- Djainudin, H. (2022). The Conception of Religious Moderation in Interfaith Dialogue in Indonesia; Case Study in Flores Nusa Tenggara Timur. *Humanika*, 22. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54304>
- Dwifani, M. (2023). *Moderasi Beragama : Peran Unnalli Melo Sebagai Perekat Kerukunan Umat Beragama di Tana Toraja*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ypuvf>
- Faizah, R., Baedowi, A., & Yusrina, J. A. (2022). Religious Moderation: The Concepts and Implementation of Local Traditions in Karimunjawa. *Dialog*, 45. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.642>
- Fatimah. (2024, September 21). *Hasil RDP di DPRD, Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Ditolak - Laman 2 dari 2 - Portal Insiden*. <https://Portalinsiden.Com/>. <https://portalinsiden.com/2024/09/21/hasil-rdp-di-dprd-pembangunan-sekolah-kristen-gamaliel-ditolak/2/>
- Fatir, M. D. (2024). *MUI Toraja menyikapi dugaan penistaan agama anggota DPRD Sulsel*. ANTARA News Makassar. <https://makassar.antaranews.com/berita/531618/mui-toraja-menyikapi-dugaan-penistaan-agama-anggota-dprd-sulsel>

- Fauzian, R., Hadiat, Ramdani, P., & Yudiyanto, M. (2021). Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Membentuk Sikap Moderat Siswa Madrasah. *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v6i1.933>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Geertz, C. (2019). outes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. In *Sciences* (Vol. 28, Issue 1).
- Goralski, M. A., & Górnjak-Kocikowska, K. (2018). Permissionless Evolution of Ethics–Artificial Intelligence. *Business Strategy in the Artificial Intelligence Economy*.
- Gultom, O. (2022). Moderasi Beragama: Cara Pandang Moderat Mengamalkan Ajaran Agama di Indonesia dalam Perspektif Fenomenologi Agama. *Perspektif, Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 17(1), 36–37.
- Hadi.R, Z. (2020). *Karakteristik Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan*.
- Hadi Kusuma, J., & Susilo, S. (2020). Intercultural and Religious Sensitivity among Young Indonesian Interfaith Groups. *Religions*, 11. <https://doi.org/10.3390/rel11010026>
- Halim, I., & Faisal, F. (2024). Perspectives of Interfaith Figures on Religious Moderation in an “Intolerant City”: A Study in Padang. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.22373/arj.v4i1.22866>
- Hamzah, I., & Marwati, A. (2023). *Revitalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Falsafah Bugis: Sipakatau Sipakalebbi dan Sipakainge*. 16(2), 141–152.
- Hannerz, U. (2012). *Writing Future Anthropologies*. Bloomsbury Publishing. <https://www.routledge.com/Transnational-Connections-Culture-People-Places/Hannerz/p/book/9780415143097>
- Haryanto, J. T. (2022). Religious Moderation In Javanese Culture In The Community Of Tirenggo Village, Bantul, Yogyakarta. *Penamas*, 35. <https://doi.org/10.31330/penamas.v35i2.567>
- Hati, L. P., Al-Mujtahid, N. M., Kholil, S., Sahfutra, S. A., Ginting, L. D. C. U., & Fahreza, I. (2023). Religious Harmony Forum: Ideal Religious Moderation in the Frame of Building Tolerance in Medan City, Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 104(104(4)). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.420>
- Herari, N., Assegaff, S. B., Utomo, A. G., & Friscillia, A. P. (2024). Using SEM Model for Fighting Diabetes: Strategic Communication Plan in Jakarta City, Indonesia. In *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* (Vol. 40, Issue 4, pp. 539–560). Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press). <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2024-4004-30>
- Hidayat, E. K. N. (2022). Paradigma Perubahan Sosial Dalam Ritual Pemakaman

Rambu Solo Di Tana Toraja. *Kusa Lawa*, 2.
<https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.01.05>

Humas. (2024, May 20). *Pegawai Non Islam di Parepare bukan Petugas Haji, tapi Panitia Pemberangkatan Jemaah*.
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pegawai-non-islam-di-parepare-bukan-petugas-haji-tapi-panitia-pemberangkatan-jemaah>

Ikhsano, A., Stellarosa, Y., & Ramonita, L. (2024). Digital Communication in Music Industry: An Analysis of Instagram Management in Indonesia and Southeast Asia. In *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* (Vol. 40, Issue 4, pp. 521–538). Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM Press). <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2024-4004-29>

Jacksen, J., Susanto, E. H., & Pandrianto, N. (2021). Analisis Key Opinion leaders di Media Sosial dalam Membentuk Opini Khalayak. *Koneksi*, 5(1), 90. <https://doi.org/10.24912/KN.V5I1.10170>

Jiang, W. (2024). Research on Cross-Cultural Product and Service Design Dynamics in a Global Perspective. In *Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics* (Vol. 14699, pp. 256–263). https://doi.org/10.1007/978-3-031-60898-8_17

Jufri, M., & Azis, A. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Tau Lotang Terhadap Masyarakat Lokal Wattang Bacukiki Kota Parepare. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.590>

Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played By People In The Flow of Mass Communications*. Free Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Moderasi Beragama Menurut Perspektif Agama Khonghucu*. 2021. Retrieved February 10, 2025, from <https://kemenag.go.id/khonghucu/moderasi-beragama-menurut-perspektif-agama-khonghucu-n7p6bw>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019a). *Alquran dan Terjemahannya*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019b). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Khoeron, M. (2023). *Mahasiswa 52 PTKN Gelar KKN Nusantara Moderasi Beragama di Tana Toraja*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/mahasiswa-52-ptkn-gelar-kkn-nusantara-moderasi-beragama-di-tana-toraja-eh1ZS>

Kholil, S., Sihombing, I., & Yusnadi, Y. (2020). Interfaith Figures Communication Model in Building Religious Harmony in North Labuhanbatu Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1383>

KKMB Kemenag RI. (2024). *Peta Jalan Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*.

- Krysińska-Kałużna, M. (2023). W poszukiwaniu prawa: Malinowski pomiędzy zwyczajem i zbrodnią. *Kultura i Społeczeństwo*, 67. <https://doi.org/10.35757/kis.2023.67.4.1>
- Lixinski, L. (2018). Intangible Heritage Economics and the Law: Listing, Commodification and Market Alienation. *Safeguarding Intangible Heritage: Practices and Politics*, 54–67. <https://doi.org/10.2139/SSRN.4253282>
- Mahfud, M., Ghofur, A., & Musyafak, N. (2022). PREVENTION OF INTOLERANCE THROUGH IMPLEMENTATION OF ISLAMIC COMMUNICATION IN RELIGIOUS MODERATION. In *Profetik: Jurnal Komunikasi* (Vol. 15, Issue 1, pp. 48–66). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/pjk.v15i1.2415>
- Mahmud, M. (2011). Politeness Practices In Bugis Society. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doi.org/10.23917/kls.v23i1.4318>
- Mailin, Lahmuddin, & Waris. (2023). Government Communication in Building Religious Moderation Based on Local Wisdom Values in Tanjung Balai City. In *JURNAL PENELITIAN* (pp. 109–126). LP2M IAIN Pekalongan. <https://doi.org/10.28918/jupe.v20i2.1921>
- Makmun, M. T. Al. (2023). Javanology's Communication Strategies: Empowering, Adapting, and Developing Javanese Culture through Intercultural Communication and Dialogue. In *Jurnal Javanologi* (Vol. 5, Issue 1, p. 900). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/javanologi.v5i1.67936>
- Maulana, A. M. R., Karomi, K., & Ahyadi, N. A. R. A. (2023). Christian Funeral Rites And Rambu Solo' In Tana Toraja. *Harmoni*, 22. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i2.709>
- Michael, A., Masruri, S., & Husein, F. (2023). Exploring The Gradual Islamization of Tana Toraja In South Sulawesi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24. <https://doi.org/10.14421/esensia.v24i2.4450>
- Miller, K. (2015). Organizational Communication: Approaches and Processes Seventh Edition. *Reputation Management: The Key to Successful Public Relations and Corporate Communication*, 153–182.
- Muhaemin, Rusdiansyah, Pabbajah, M., & Hasbi. (2023). Religious Moderation in Islamic Religious Education as a Response to Intolerance Attitudes in Indonesian Educational Institutions. *Journal of Social Studies Education Research*, 14(2), 253–274. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85163684775
- Muhlisin, Kholis, N., & Rini, J. (2023). Navigating the Nexus: Government Policies in Cultivating Religious Moderation Within State Islamic Higher Education. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 11(1), 207–236. <https://doi.org/10.21043/qijis.v11i1.12677>
- Mujizatullah, M. (2022). The Role of The Galesong Observant Forum in Strengthening Religious Moderation in Takalar District. *Al-Ulum*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.30603/AU.V22i1.2742>
- Musyarif, Siri, H., & Mundzir, C. (2019). *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten*

Tana Toraja (p. 1).

- Mutawakkil, M. A. (2022). Pesan Perdamaian Dalam Kitab Suci Enam Agama Di Indonesia Dan Solusi Atas Konflik Agama Di Tengah Masyarakat. *Journal Transformation of Mandalika*, 3(3), 149. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/1969>
- Nasir, M., & Rijal, M. K. (2021). Keeping The Middle Path: Mainstreaming Religious Moderation Through Islamic Higher Education Institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Niar. (2023). *Wujud Toleransi Beragama, Parepare Hadirkan Kampung Moderasi Beragama - Rakyat Sulsel*. Rakat Sulsel. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/07/11/wujud-toleransi-beragama-parepare-hadirkan-kampung-moderasi-beragama/>
- Noviani, D., Muchtar, C., Mardeli, Mutiara, & Dey, M. (2022). Religious Moderation In The Framework Of Life. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 4. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v4i2.142>
- Nuryani. (2015). *Pola Hubungan Lintas Agama di Tana Toraja* (p. 1).
- Pabbajah, M. (2021). From the Indigeneous to the Religious Practices: Islamic Construction of the Local Tradition in South Sulawesi, Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22. <https://doi.org/10.14421/esensia.v22i1.2800>
- Pajarianto, H., Galugu, N. S., & Pribadi, I. (2023). Youth Religious Moderation Model and Tolerance Strengthening Through Intellectual Humility. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2022). Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 /Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan, 53 1689 (2006).
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Penguatan Moderasi Beragama*. 58.
- Rahmatina, N., & Ali, R. (2024). Moderasi Beragama sebagai Pilar Persatuan Bangsa: Studi Komparatif Kitab Suci Islam dan Hindu. *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, 20(1), 103–126.
- Ridho, A., Rahmat, S., Masri, M. S. H., & Warsah, I. (2023). Synergizing Stakeholders' Communication for Religious Harmony in Indonesia. *Islamic Communication Journal*, 8(1), 41–64. <https://doi.org/10.21580/icj.2023.8.1.13626>

- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations. In *Achieving Cultural Change in Networked Libraries*. <https://doi.org/10.4324/9781315263434-16>
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), 170–181.
- Sumatera Selatan, K. A. (2020). *Mimbar Agama Katolik*. 34, 34–36. https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1SURAT17/Moderasi_Beragama_Berdasarkan_Inspirasi_Yoh__19_25_-_34.pdf
- Suparman, S. A., Muhaemin, M., Ilyas, K., & -, -. (2019). *Relation of Islam, Indigenous People, and Local Wisdom in Enrekang South Sulawesi*. <https://doi.org/10.30605/iconss.55>
- Szulczewski, G. (2017). Cultural anthropology of Bronisław Malinowski and reflections on the economic crisis. *Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym*, 20. <https://doi.org/10.18778/1899-2226.20.6.04>
- Tameryan, T. Y., Юльевна, Т. Т., Zyubina, I. A., Анатольевна, З. И., Zheltukhina, M. R., & Ростиславовна, Ж. М. (2022). Polycode as a Strategic Resource of Intercultural Communication. *RUDN Journal of Language Studies, Semiotics and Semantics*, 13(3), 750–768. <https://doi.org/10.22363/2313-2299-2022-13-3-750-768>
- Thahir, M. (2023). RELIGIOUS PLURALITY AND THE URGENCY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN INDONESIA. In *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* (Vol. 19, Issue 1, pp. 37–50). IAIN Palu. <https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1905>
- Umar, U., & Hakim, M. A. (2019). Hubungan Kerukunan Antara Umat Beragama Dengan Pembentukan Perilaku Sosial Warga Perumahan PT Djarum Singocandi Kudus. In *JURNAL PENELITIAN* (Vol. 13, Issue 1, p. 71). State Islamic College of Kudus. <https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.4898>
- Usman, A. R., Sulaiman, A., Fauzan, A., Zulyadi, T., Salahuddin, A., Putri, N., Jannah, M., & Misra, L. (2024). Religious Moderation Through Persia-Aceh Intercultural Communication. In *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (Vol. 24, Issue 2, p. 471). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://doi.org/10.22373/jiif.v24i2.17443>
- Venkataraman, V. V. (2023). *Nikolai Mikluho-Maclay's ethnographic methods in New Guinea (1871-1873)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/f3mja>
- Wang, Z., Wang, J., & Cao, H. (2018). *Opinion leaders Discovery in Social Networking Site Based on the Theory of Propagation Probability*. <https://doi.org/10.1109/imcec.2018.8469273>
- Winowatan, W. J., & Anneke W, J. P. (2023). Potensi Budaya Suku Toraja Sebagai Daya Tarik Wisata Pada Kabupaten Tana Toraja Dan Toraja Utara. *Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP)*, 6. <https://doi.org/10.31314/tulip.6.1.1-8.2023>
- Yao, Y. (2023). English as a Lingua Franca in Mainland China: An Analysis of Intercultural Business Communicative Competence. *International Journal of*

Business Communication, 60(1), 3–23.
<https://doi.org/10.1177/2329488419898221>

Yunus, & Mukoyaroh. (2022). Pluralitas dalam Menjaga Toleransi di Tana Toraja. *Dinamika*, 7(1).

Yunus, R. Y. I., & Musliadi, M. (2023). Bugis Culture Deconstruction In Novel La Galigo 2. *Literature and Literacy*, 1. <https://doi.org/10.21831/litlit.v1i1.16>

Zikrillah, A., & Mutaqin, Z. (2024). Suitability Of Visual Communication Content On Instagram Against Ministry Of Religion Religious Moderation Concept. In *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* (Vol. 4, Issue 1, pp. 41–56). IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <https://doi.org/10.24235/sejati.v4i1.71>

BAB II

KOMUNIKASI BUDAYA LOKAL DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI KOTA PAREPARE DAN KABUPATEN TANA TORAJA

2.1. Abstrak

SULVINAJAYANTI. **Komunikasi Budaya Lokal Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja** (dibimbing oleh Tuti Bahfiati dan H. M. Iqbal Sultan).

Latar Belakang. Budaya lokal berperan strategis dalam membentuk komunikasi dan interaksi sosial yang mendukung moderasi beragama. Di Parepare, nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, serta tradisi *tudang sipulung*, *mappadendang* dan *mappalili* menjadi landasan etik dialog dan resolusi konflik. Di Tana Toraja, adat *Tongkonan*, kepercayaan *aluk todolo*, dan ritual *rambu solo'*, *rambu tuka'*, serta *ma'kombongan* berfungsi sebagai wahana solidaritas lintas iman. Perbedaan konteks sosial dan keagamaan di kedua wilayah membentuk strategi komunikasi budaya yang khas. **Tujuan.** Mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai budaya lokal yang mendukung moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja, serta memahami bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. **Metode.** Penelitian menggunakan pendekatan etnografi komunikasi dan *grounded theory*, dengan kerangka *stakeholder theory* dan *multi-step flow theory*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan lintas iman. Inventarisasi nilai budaya dilakukan dengan memetakan keterkaitannya pada sembilan nilai moderasi beragama. **Hasil.** Nilai-nilai budaya lokal di kedua wilayah terbukti masih hidup dan relevan sebagai instrumen komunikasi sosial. Di Parepare, *sipakatau* dan *sipakalebbi* digunakan dalam forum musyawarah *tudang sipulung* untuk meredakan konflik dan membangun dialog lintas agama, meskipun terdapat pergeseran makna di kalangan generasi muda. Di Tana Toraja, ritual *rambu solo'* memadukan unsur adat dan agama menjadi simbol koeksistensi dan dialog lintas iman yang telah mengakar. Kedua wilayah menunjukkan bahwa budaya lokal mampu memperkuat toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap tradisi di tengah keberagaman agama. **Kesimpulan.** Integrasi nilai budaya lokal dengan strategi komunikasi berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam memperkuat moderasi beragama. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tradisi lokal dengan sembilan nilai moderasi beragama dalam kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan publik dan penguatan harmoni sosial.

Kata Kunci: harmoni sosial; kerukunan multikultural; lintas agama; simbol adat nilai-nilai kearifan lokal; warisan budaya;

ABSTRACT

SULVINAJAYANTI. **Local Cultural Communication in Building Religious Moderation in Parepare City and Tana Toraja Regency** (supervised by Tuti Bahfiati and H. M. Iqbal Sultan).

Background. Local culture plays a strategic role in shaping communication and social interaction that supports religious moderation. In Parepare, the values of *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, as well as the traditions of *tudang sipulung*, *mappadandang*, and *mappalili* form the ethical foundation for dialogue and conflict resolution. In Tana Toraja, the Tongkonan custom, the *aluk todolo* belief system, and the *rambu solo'*, *rambu tuka'*, and *ma'kombongan* rituals serve as vehicles for interfaith solidarity. The different social and religious contexts in the two regions have shaped unique cultural communication strategies. **Aim.** To identify and analyze local cultural values that support religious moderation in Parepare City and Tana Toraja Regency, and to understand how these values are internalized and practiced by the community in their daily lives. **Method.** The research uses a communication ethnography and grounded theory approach, with a stakeholder theory and multi-step flow theory framework. Data was obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation of interfaith activities. Cultural values were inventoried by mapping their relevance to nine values of religious moderation. **Results.** Local cultural values in both regions are still alive and relevant as instruments of social communication. In Parepare, *sipakatau* and *sipakalebbi* are used in the *tudang sipulung* deliberative forum to resolve conflicts and build interfaith dialogue, although there has been a shift in meaning among the younger generation. In Tana Toraja, the *rambu solo'* ritual combines traditional and religious elements into a symbol of coexistence and interfaith dialogue that has deep roots. Both regions demonstrate that local culture can strengthen tolerance, balance, and respect for traditions amid religious diversity. **Conclusion.** The integration of local cultural values with communication strategies based on local wisdom has proven effective in strengthening religious moderation. The novelty of this research lies in the combination of local traditions with nine values of religious moderation in a theoretical framework that can be used to enrich public policy and strengthen social harmony.

Keywords: cultural heritage; interfaith; multicultural harmony; social harmony; traditional symbols of local wisdom values.

2.2. Pendahuluan

Sebagai pilar identitas masyarakat, budaya lokal berperan dalam membentuk pola komunikasi dan interaksi sosial. Dalam konteks moderasi beragama, budaya lokal dapat memperkuat harmoni sosial atau, sebaliknya, menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Konsep ini mencakup nilai-nilai, tradisi, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas (Geertz, 2019). Lebih dari sekadar identitas kelompok, budaya lokal juga menjadi sarana menjaga keberlangsungan norma sosial dan membangun solidaritas antaranggota masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Selain itu, budaya lokal berperan dalam membentuk sistem nilai yang memandu interaksi sosial dan relasi antar kelompok yang berbeda, termasuk dalam aspek keberagaman agama (Huntington, 1996).

Budaya lokal memainkan peran penting dalam membangun harmoni sosial dan moderasi beragama, sebagaimana terlihat dalam praktik budaya di Tana Toraja. Tradisi *rambu solo*, misalnya, bukan sekadar ritual pemakaman, tetapi juga menjadi ajang mempererat hubungan sosial antara berbagai kelompok agama yang hidup berdampingan di wilayah tersebut. Upacara ini mencerminkan koeksistensi antara nilai-nilai budaya tradisional, animisme, dan pengaruh agama-agama besar seperti Kristen dan Islam, yang saling menghormati dalam pelaksanaannya (Alam, 2023; Ramadhan et al., 2024). Praktik ini membuktikan bahwa budaya lokal dapat menjadi titik temu bagi komunitas yang beragam dan berkontribusi dalam merawat kerukunan antarumat beragama.

Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja menghadirkan dinamika sosial yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam membangun moderasi beragama di Indonesia. Parepare, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sering menghadapi permasalahan dalam menjaga harmoni sosial. Salah satu contoh nyata adalah penolakan pembangunan sekolah Kristen oleh sekelompok warga pada tahun 2023 (Abduh, 2023). Peristiwa ini mencerminkan adanya resistensi terhadap keberagaman agama, yang dapat dipengaruhi oleh kurangnya dialog lintas agama yang efektif. Resistensi semacam ini menunjukkan pentingnya intervensi berbasis budaya lokal untuk mengatasi kesenjangan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman.

Berbeda dengan Parepare, Kabupaten Tana Toraja justru menawarkan potret kerukunan antarumat beragama melalui praktik budaya lokal, khususnya upacara *rambu solo*. Tradisi ini melibatkan umat dari berbagai agama Kristen, Islam, dan penganut *aluk todolo* dalam pelaksanaannya. Sebagai salah satu ritual pemakaman paling penting bagi masyarakat Toraja, *rambu solo* memadukan elemen budaya dan agama yang berbeda, seperti penyembelihan kerbau (tradisi lokal), doa-doa Kristen, dan penghormatan terhadap leluhur melalui simbol *tau-tau*. Temuan penelitian Alam (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas agama ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya dialog yang harmonis antarumat beragama di tengah perbedaan keyakinan.

Rambu solo' menjadi bukti nyata bagaimana tradisi lokal dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat multireligius. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar yang terdiri dari penganut agama yang berbeda bekerja sama untuk mempersiapkan ritual, menghormati nilai-nilai agama masing-masing. Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Tana Toraja berhasil memadukan nilai-nilai lokal dengan prinsip toleransi yang mendalam (Aulia & Nawas, 2021). Sebagai ritual pemakaman yang diwariskan turun-temurun, *Rambu Solo'* tidak hanya menjadi simbol penghormatan terakhir bagi leluhur, tetapi juga sebagai medium untuk memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga toleransi beragama (Ramadhan et al., 2024).

Penelitian lain menunjukkan bahwa dalam upacara ini, berbagai unsur budaya dan agama berpadu secara harmonis, seperti penyembelihan kerbau sebagai bagian dari tradisi adat, pelaksanaan doa menurut kepercayaan Kristen, dan pengakomodasian ritual Islam bagi anggota keluarga yang beragama Islam (Alam, 2023; Maulana et al., 2023). Dengan demikian, *Rambu solo'* bukan sekadar praktik budaya, tetapi juga cerminan kuat dari koeksistensi dan dialog antaragama yang telah lama terjalin di Tana Toraja (Hidayat, 2022; Pora' et al., 2023).

Parepare, sebagai kota urban, menghadapi tantangan yang berbeda. Perbedaan struktur sosial dan tekanan modernisasi sering kali memicu konflik antaragama, seperti dalam kasus pembangunan fasilitas keagamaan. Namun, nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*, yang telah lama menjadi landasan interaksi sosial masyarakat Bugis, memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam meredakan konflik ini. Nilai-nilai tersebut mendorong sikap saling menghormati, memuliakan, dan mengingatkan, yang dapat menjadi panduan dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat urban (Alang, 2020).

Meskipun nilai-nilai budaya seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* masih sering dikutip dalam wacana sosial, terdapat pertanyaan kritis: apakah nilai-nilai tersebut masih benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat atau telah mengalami pelemahan makna menjadi simbolik belaka. Sebagian tokoh masyarakat di Parepare, sebagaimana diwawancarai dalam penelitian ini, menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut masih digunakan dalam penyelesaian konflik, kadang bahkan lebih kuat dari pendekatan hukum formal. Namun, terdapat pula pengakuan bahwa generasi muda hanya memahami istilahnya, tanpa mendalami nilai substantifnya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya validasi empirik terhadap keberfungsian nilai-nilai budaya lokal, baik dalam praktik komunitas maupun persepsi lintas generasi.

Dinamika ini menyoroti pentingnya strategi komunikasi yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Di Parepare, pendekatan berbasis budaya lokal perlu didukung oleh kebijakan formal dan dialog lintas agama yang lebih intensif untuk mengatasi resistensi terhadap keberagaman. Sementara itu, di Tana Toraja, penguatan tradisi lokal seperti *rambu solo'* dapat terus dijaga sebagai

model harmoni yang berbasis pada kolaborasi antaragama. Fakta sosial ini memberikan gambaran bahwa moderasi beragama tidak hanya bergantung pada nilai-nilai agama semata, tetapi juga pada kekuatan budaya lokal dalam menyatukan perbedaan.

Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya nilai budaya lokal dalam membangun harmoni lintas agama di masyarakat multireligius. Alang (2020) menekankan bahwa nilai-nilai budaya Bugis, seperti *sipakatau* (saling memaniakan), *sipakalebbi* (saling memuliakan), dan *sipakainge* (saling mengingatkan), menjadi pilar utama dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai norma interaksi sosial, tetapi juga memberikan landasan moral bagi masyarakat Bugis dalam merespons keberagaman agama. Studi ini memberikan wawasan tentang potensi nilai-nilai lokal sebagai panduan dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan

Di Tana Toraja, penelitian oleh Bachrong & Ansar (2021b) menunjukkan bahwa budaya *karapasan* memainkan peran penting dalam mendorong moderasi beragama. Tradisi ini, yang berakar pada nilai penghormatan terhadap orang lain, memberikan ruang bagi masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai. Namun, Bachrong & Ansar lebih menyoroti aspek tradisional dalam konteks masyarakat adat, tanpa menggali integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan formal yang dapat diterapkan di wilayah perkotaan.

Budaya *rambu solo'* di Tana Toraja menjadi simbol koeksistensi lintas agama yang kental. Penelitian oleh Ramadhan et al. (2024) menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung nilai moderasi beragama yang relevan dengan pilar keadilan, keseimbangan, dan toleransi yang dicetuskan oleh Quraish Shihab. Pilar keadilan terlihat dalam kesempatan yang diberikan kepada umat Islam untuk menyembelih hewan kurban sesuai syariatnya, sedangkan pilar keseimbangan tercermin dalam pembagian ruang dan makanan yang menghormati aturan agama masing-masing. Pilar toleransi diwujudkan melalui upaya masyarakat Kristen untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga menjaga saudara Muslim mereka dari pelanggaran aturan agama, seperti tidak menyajikan makanan babi secara terbuka di hadapan mereka (Ramadhan et al., 2024).

Upacara *rambu solo'* menjadi contoh konkret lain dari koeksistensi lintas agama di Tana Toraja. Penelitian Alam (2023) dan Aulia & Nawas (2021) mengungkapkan bahwa upacara ini melibatkan elemen kepercayaan lokal, Kristen, dan Islam dalam ritualnya. Ritual seperti *mantunu tedong* dan *ma'paliang* memperlihatkan bagaimana nilai-nilai toleransi tercermin dalam pelibatan semua pihak, terlepas dari perbedaan agama. Kolaborasi ini bukan hanya menciptakan hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga memupuk dialog lintas agama yang dapat menjadi model untuk wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam keberagaman agama.

Selain nilai-nilai budaya lokal, peran *opinion leader* dalam membangun harmoni lintas agama menjadi tema yang banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Akhmedshina (2021) dalam studinya di Uzbekistan menunjukkan bahwa dialog lintas agama yang dipimpin oleh *opinion leader*, seperti tokoh agama dan tokoh adat, dapat memperkuat ikatan sosial di masyarakat multireligius. *Opinion leader* ini memainkan peran strategis dalam menyampaikan pesan moderasi dan toleransi, sekaligus mendorong kolaborasi lintas pemimpin agama untuk menciptakan harmoni sosial. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji integrasi nilai-nilai budaya lokal sebagai instrumen utama dalam memperkuat dialog lintas agama di konteks masyarakat Indonesia, sehingga terdapat ruang kontribusi baru dalam penelitian ini.

Penelitian Alang (2020) memusatkan perhatian pada nilai-nilai budaya Bugis tanpa mengaitkannya dengan konteks urban seperti Parepare, yang memiliki tantangan sosial berbeda dibandingkan dengan masyarakat adat di pedesaan. Sementara itu, penelitian tentang *rambu solo'* oleh Alam (2023) dan (Aulia & Nawas, 2021) memberikan wawasan yang kaya tentang praktik budaya sebagai alat moderasi beragama, tetapi belum mengeksplorasi bagaimana praktik ini dapat diintegrasikan dalam kebijakan formal atau diadopsi ke dalam strategi komunikasi multi-*stakeholder*.

Penelitian sebelumnya belum banyak membahas sinergi antara budaya lokal dan pendekatan komunikasi modern. Misalnya, tradisi Bugis dan Toraja memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan strategi komunikasi berbasis teori difusi inovasi dan *multiple-step flow communication*, dimana pesan-pesan moderasi beragama dapat disebarluaskan melalui *opinion leader* kepada komunitas yang lebih luas. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi budaya lokal dan pendekatan komunikasi kontemporer.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, gap penelitian terlihat pada minimnya eksplorasi tentang bagaimana nilai budaya lokal diadaptasi dalam kebijakan formal dan strategi komunikasi modern. Studi tentang *sipakatau* dan *sipakalebbi* cenderung berfokus pada interaksi sosial masyarakat pedesaan, sementara penelitian tentang *rambu solo'* lebih menyoroti praktik adat tanpa mengeksplorasi sinerginya dengan pendekatan komunikasi formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani celah tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, seperti *rambu solo'*, ke dalam strategi komunikasi multi-*stakeholder* untuk mendukung moderasi beragama di wilayah urban dan rural.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai budaya lokal, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *aluk todolo*, dalam membangun moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi peran *opinion leader*, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dalam menyebarkan nilai budaya lokal sebagai instrumen moderasi beragama. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengembangkan rekomendasi strategi komunikasi berbasis nilai budaya lokal

yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat moderasi beragama di wilayah dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda, yaitu Parepare sebagai wilayah urban dan Tana Toraja sebagai wilayah rural.

Moderasi beragama merupakan strategi yang sangat penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Keberhasilan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada nilai-nilai universal, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai lokal yang kaya akan kearifan budaya diakomodasi dan disinergikan. Sulawesi Selatan, dengan kompleksitas sosial budaya yang unik, menawarkan peluang untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai lokal, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *rambu solo*, dapat diintegrasikan dengan sembilan nilai moderasi beragama, yakni Kemanusiaan, Kemaslahatan Umum, Adil, Berimbang, Toleransi, Anti Kekerasan, Penghormatan kepada Tradisi, Komitmen Kebangsaan, dan Ketaatan pada Konstitusi.

Tradisi lokal seperti *rambu solo* di Tana Toraja sudah mencerminkan beberapa nilai moderasi beragama, seperti toleransi dan penghormatan kepada tradisi, masih terdapat tantangan dalam menjadikannya bagian dari strategi komunikasi formal yang sistematis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akomodasi nilai budaya lokal dalam menyosialisasikan moderasi beragama masih belum maksimal. Tradisi lokal seringkali dipandang sebagai elemen adat semata dan belum sepenuhnya diberdayakan sebagai instrumen komunikasi yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai seperti toleransi, anti kekerasan, dan komitmen kebangsaan (Alam, 2023; Ramadhan et al., 2024).

Inventarisasi budaya lokal yang relevan dengan sembilan nilai moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak. Tradisi seperti *sipakatau*, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, dan *sipakalebbi*, yang mengajarkan kemaslahatan umum melalui penghormatan, perlu diidentifikasi dan dipetakan. Inventarisasi ini penting untuk memetakan potensi budaya lokal sebagai instrumen edukasi masyarakat. Dengan pemetaan yang tepat, budaya lokal dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moderasi beragama secara lebih luas dan kontekstual kepada masyarakat.

Dalam konteks edukasi masyarakat, pelatihan berbasis nilai budaya lokal melalui *Training of Trainers* (TOT) moderasi beragama menjadi langkah strategis. TOT ini dapat membantu tokoh adat, tokoh agama, dan pendidik memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat dipadukan dengan sembilan nilai moderasi beragama untuk mempromosikan komitmen kebangsaan dan ketaatan pada konstitusi. Langkah ini tidak hanya memperkuat strategi komunikasi, tetapi juga mendorong peran aktif *opinion leader* dalam menyampaikan pesan moderasi beragama di masyarakat yang memiliki keragaman sosial budaya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi nilai budaya lokal dengan pendekatan komunikasi berbasis teori *stakeholder*. Dengan memanfaatkan sinergi antara tradisi lokal dan sembilan nilai moderasi beragama, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan model komunikasi

berbasis nilai budaya lokal yang relevan untuk konteks urban dan rural. Model ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan komunitas lokal dalam mempromosikan harmoni lintas agama di Indonesia.

2.3. Literature Review

2.4.1. Budaya Lokal

Budaya lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku dan sikap masyarakat terhadap keberagaman, termasuk dalam konteks moderasi beragama. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Parepare dan Tana Toraja, nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga harmoni antarumat beragama (Hamzah & Marwati, 2023). Tradisi-tradisi ini telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk menekan potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan agama atau keyakinan.

Salah satu contoh penerapan budaya lokal dalam moderasi beragama dapat ditemukan dalam tradisi *rambu solo'*, sebuah upacara kematian yang melibatkan berbagai kelompok agama di Tana Toraja. Upacara ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menjadi arena interaksi lintas agama, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama berkumpul dan berpartisipasi tanpa memandang perbedaan keyakinan mereka (Alam, 2023). Dalam hal ini, budaya lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat moderasi beragama dan menekan ekstremisme.

Selain *rambu solo'*, rumah adat Tongkonan di Tana Toraja juga berfungsi sebagai simbol kebersamaan dan koeksistensi lintas agama. Tongkonan bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan spiritual, di mana masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda sering kali berkumpul untuk berdiskusi, merayakan upacara adat, dan menjaga harmoni sosial (Andri, 2023). Nilai-nilai seperti ini menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun dan memelihara moderasi beragama.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa budaya lokal di Sulawesi Selatan, khususnya nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*, memainkan peran penting dalam menghindari konflik antaragama. Alang (2020) menekankan bahwa nilai-nilai budaya lokal ini bukan hanya sekadar norma sosial, tetapi juga sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perselisihan dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang plural. Nilai *sipakatau*, misalnya, mendorong penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama, sementara *sipakalebbi* mengajarkan bahwa setiap individu layak dimuliakan dan dihargai, terlepas dari perbedaan keyakinan.

Meskipun kontribusi budaya lokal dalam menjaga moderasi beragama telah diakui dalam banyak studi, masih ada kekurangan dalam kajian yang ada. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada wilayah pedesaan seperti Tana Toraja, sementara penerapan nilai-nilai budaya lokal di wilayah urban seperti

Parepare belum banyak dieksplorasi (Baharuddin et al., 2021). Parepare, sebagai kota multikultural dengan populasi yang beragam, menghadapi tantangan yang berbeda dalam menjaga moderasi beragama, terutama dalam situasi dimana resistensi terhadap keberagaman agama masih cukup kuat, seperti dalam kasus penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel (Abduh, 2023).

Penelitian terdahulu juga belum secara mendalam membahas bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dengan pendekatan formal dalam kebijakan publik. Bachrong & Ansar (2021) dalam penelitian mereka di Tana Toraja menemukan bahwa budaya *karapasan* sangat mendukung moderasi beragama, tetapi implementasinya di tingkat kebijakan formal masih terbatas. Evaluasi yang lebih mendalam terhadap integrasi budaya lokal dalam kebijakan moderasi beragama, terutama di wilayah urban, memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran budaya dalam konteks yang lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam konteks yang lebih modern dan urban. Di era digital saat ini, budaya lokal juga perlu dikaji dalam hubungannya dengan penggunaan media sosial dan bagaimana nilai-nilai ini disebarluaskan di platform digital untuk mencapai khalayak yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda Febriani & Ritonga (2022). Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tidak hanya berfungsi di komunitas tradisional tetapi juga relevan di tengah masyarakat modern.

2.4.2. Moderasi Beragama

Moderasi beragama adalah konsep yang semakin penting dalam diskursus keagamaan di Indonesia, khususnya dalam mencegah konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Dengan pendekatan yang seimbang, moderasi beragama mendorong masyarakat untuk menjauhi ekstremisme di satu sisi, dan di sisi lain, tidak mengabaikan esensi agama. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan stabilitas sosial, terutama di wilayah yang memiliki keragaman agama yang tinggi. Dalam konteks Sulawesi Selatan, moderasi beragama menjadi kunci penting untuk menjaga hubungan lintas agama, dimana sikap moderat dianggap sebagai solusi untuk menciptakan kerukunan (Daheri et al., 2023). Ketika masyarakat berpegang teguh pada prinsip moderasi, mereka lebih cenderung untuk mengadopsi sikap inklusif, saling menghargai, dan terbuka terhadap dialog.

Budaya lokal juga memberikan landasan yang kuat bagi moderasi beragama, terutama di Sulawesi Selatan. Nilai-nilai lokal seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi* yang diajarkan dalam masyarakat Bugis-Makassar menjadi pilar penting dalam mendukung konsep moderasi beragama. Tradisi-tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk selalu menempatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama manusia, termasuk mereka yang berbeda agama. Misalnya, dalam konteks Tana Toraja, upacara adat *rambu solo'* berfungsi sebagai kegiatan untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang

agama, yang secara tidak langsung memperkuat moderasi beragama (Alam, 2023). Tradisi lokal seperti ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam kerangka kebersamaan dan toleransi.

Selain melalui tradisi lokal, peran *opinion leader*, khususnya tokoh agama, menjadi sangat penting dalam menyebarkan pesan moderasi beragama. Tokoh-tokoh agama memiliki otoritas moral dan sosial yang besar, sehingga pesan-pesan yang mereka sampaikan cenderung diikuti oleh masyarakat. Di Tana Toraja dan Parepare, tokoh agama sering kali memfasilitasi dialog antaragama, baik secara formal maupun informal, untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama (Akhmedshina, 2021). Dalam ceramah dan khutbah mereka, tokoh agama juga mengajak masyarakat untuk menghindari sikap fanatik dan mendukung dialog sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan. Namun, dalam beberapa kasus, tantangan dalam mengimplementasikan moderasi beragama masih cukup nyata. Misalnya, resistensi terhadap keberagaman agama di beberapa wilayah masih menjadi hambatan, seperti yang terlihat dalam penolakan pembangunan sekolah Kristen di Parepare (Abduh, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai moderasi telah diperkenalkan, masih ada masyarakat yang enggan menerima keberagaman agama. Hal ini mencerminkan adanya dinamika sosial yang kompleks, di mana faktor politik, ekonomi, dan sosial juga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap moderasi beragama.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa moderasi beragama efektif dalam mencegah konflik jika didukung oleh dialog antarumat beragama. Daheri et al. (2023) menekankan pentingnya kolaborasi antara tokoh agama dan masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Di wilayah-wilayah yang berpotensi konflik, dialog lintas agama dapat mengurangi ketegangan dan mendorong toleransi. Penelitian Faizah et al., (2022) mengungkapkan bahwa tradisi lokal juga berperan penting dalam memperkuat moderasi, karena masyarakat lebih mudah menerima pesan-pesan agama yang disampaikan melalui pendekatan budaya.

Moderasi beragama telah menunjukkan keberhasilannya, ada aspek-aspek yang masih kurang dalam beberapa penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penggunaan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan pesan moderasi beragama masih belum banyak dibahas. Febriani & Ritonga (2022) menyoroti bahwa media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda dengan pesan moderasi, tetapi masih diperlukan lebih banyak penelitian mengenai bagaimana hal ini bisa diimplementasikan secara efektif. Di era digital, platform media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini masyarakat, sehingga penting bagi para tokoh agama dan *opinion leader* untuk memanfaatkan media ini dengan baik.

Mengingat pentingnya moderasi beragama dalam menciptakan kohesi sosial, ke depan, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan komunitas lokal harus diperkuat. Pajarianto et al. (2023) menekankan bahwa moderasi beragama

tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Selain itu, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama, agar lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Dengan demikian, moderasi beragama dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial yang lebih berkelanjutan.

Moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan antaragama, tetapi juga mencakup aspek moderasi dalam internal satu agama. Perbedaan interpretasi ajaran keagamaan sering kali menjadi sumber friksi di antara kelompok-kelompok dalam satu agama. Dalam Islam, misalnya, perbedaan mazhab dan pemahaman terhadap hukum Islam dapat menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok yang memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam agama Kristen, perbedaan antara aliran Protestan dan Katolik dalam interpretasi ajaran juga dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik (Nasution, 2022).

Tantangan utama dalam penerapan moderasi dalam internal satu agama adalah adanya konflik interpretasi ajaran yang terkadang diperburuk oleh faktor sosial dan politik. Kelompok-kelompok dengan pemahaman tekstualis sering kali berbenturan dengan kelompok yang memiliki pendekatan lebih kontekstual dalam memahami ajaran agama. Di beberapa kasus, perbedaan ini tidak hanya terbatas pada perdebatan akademik, tetapi juga berdampak pada kebijakan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat (Rahman, 2023).

Di Parepare dan Tana Toraja, fenomena ini juga terjadi. Dalam komunitas Muslim di Parepare, terdapat dinamika antara kelompok-kelompok Islam tradisional dengan kelompok yang lebih progresif dalam memahami ajaran Islam. Beberapa isu seperti penggunaan hukum Islam dalam kebijakan daerah serta peran perempuan dalam kepemimpinan agama sering menjadi bahan diskusi yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam internal Islam (Hidayat, 2023). Sementara itu, dalam komunitas Kristen di Tana Toraja, perbedaan antara gereja-gereja dengan pendekatan teologis yang berbeda sering kali muncul dalam wacana publik, terutama dalam isu-isu sosial dan budaya (Lembang, 2023).

Selain itu, tantangan sosial seperti politik identitas, media sosial, dan globalisasi juga turut memperumit penerapan moderasi dalam internal satu agama. Media sosial, misalnya, sering kali menjadi sarana bagi kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi yang dapat memperdalam perbedaan di antara kelompok dalam satu agama. Algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna juga dapat memperkuat polarisasi dan mempersempit ruang dialog antar kelompok yang berbeda pemahaman dalam satu agama (Saputra & Ramli, 2023).

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif dan berbasis budaya lokal. Budaya *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* di Parepare, misalnya, dapat menjadi model dalam membangun dialog yang lebih terbuka dalam komunitas Muslim. Nilai-nilai ini menekankan penghormatan terhadap sesama, bahkan dalam konteks perbedaan pemahaman keagamaan. Di Tana Toraja, tradisi diskusi dan musyawarah dalam komunitas gereja dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyelesaikan perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok Kristen yang ada di daerah tersebut (Hamzah, 2023).

Dengan demikian, moderasi dalam internal satu agama bukan hanya sekadar mengelola perbedaan tafsir keagamaan, tetapi juga tentang bagaimana membangun dialog yang sehat, menghindari polarisasi, serta menciptakan ruang inklusif bagi berbagai kelompok untuk hidup berdampingan dalam satu komunitas agama. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menggali strategi yang paling efektif dalam membangun komunikasi yang inklusif dalam internal satu agama, khususnya dalam konteks budaya lokal di Parepare dan Tana Toraja.

2.4. Metode

2.4.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu upaya menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang terjadi serta keterkaitannya satu sama lain (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dengan fokus pada penggambaran peristiwa atau fenomena secara langsung dan realistis. Dalam konteks ini, pendekatan deskriptif kualitatif memberikan gambaran rinci mengenai fenomena yang diteliti, khususnya dalam memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana budaya lokal berkontribusi dalam membangun moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tuturan, perilaku, dan interaksi sosial dari individu, kelompok, atau organisasi yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang utuh dan holistik (Creswell & Creswell, 2018).

Dalam penelitian ini, desain etnografi komunikasi dipilih untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana komunikasi memainkan peran penting dalam moderasi beragama di Kota Parepare dan konteks serupa di Indonesia. Etnografi komunikasi adalah pendekatan analitis dan interpretatif yang digunakan untuk memahami praktik komunikasi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks dalam analisis komunikasi untuk mengumpulkan serta menganalisis data (Sadler-Smith & Kalou, 2015). Salah satu konsep kunci dalam etnografi komunikasi adalah kompetensi komunikatif yang diperkenalkan oleh Dell Hymes, yang tidak hanya menekankan

penguasaan bahasa, tetapi juga pemahaman penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang spesifik (Nurfridayanti et al., 2022; Sadler-Smith & Kalou, 2015).

Etnografi komunikasi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi dalam praktik sosial dan budaya serta implikasinya terhadap pembentukan identitas dan hubungan antar individu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna-makna yang dibangun dalam interaksi sehari-hari, memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika komunikasi dalam konteks budaya tertentu (Astika, 2020). Dalam konteks penelitian ini, etnografi komunikasi memberikan pandangan tentang peran budaya lokal dan *opinion leader* dalam membangun moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja. Desain etnografi komunikasi dalam penelitian ini berfokus pada penguatan budaya lokal dan peran *opinion leader* dalam menumbuhkan moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja.

Dalam etnografi komunikasi, komunikasi dipandang sebagai bagian integral dari praktik budaya. Ini mencakup analisis tentang bagaimana orang berkomunikasi, menggunakan bahasa, simbol, tanda, dan ritual dalam konteks sosial tertentu. Etnografi komunikasi terdiri dari beberapa elemen penting, termasuk *setting, participants, ends, act sequence, key, instrumentalities, norms*, dan *genre* (Kuswarno, 2008). Dalam konteks moderasi beragama di Sulawesi Selatan, pendekatan ini membantu memahami bagaimana komunikasi antar agama terjadi, serta bagaimana nilai-nilai moderasi dapat disampaikan secara efektif melalui praktik komunikasi yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Dengan demikian, etnografi komunikasi menawarkan pandangan yang luas namun mendalam tentang bagaimana elemen-elemen budaya dan sosial membentuk dinamika komunikasi, yang sangat penting dalam membangun moderasi beragama di wilayah seperti Parepare dan Tana Toraja.

Penelitian ini berfokus pada komunikasi nilai budaya lokal dalam membangun moderasi beragama di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Kedua wilayah ini dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal komposisi agama dan budaya, namun keduanya menunjukkan tingkat kerukunan yang tinggi. Parepare didominasi oleh penduduk Muslim dengan tradisi keislaman yang kuat, sedangkan Tana Toraja dikenal dengan populasi Kristen yang besar serta praktik budaya lokal yang masih lestari. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana nilai budaya lokal menjadi instrumen dalam membangun moderasi beragama, dengan menelaah peran aktor-aktor kunci dalam menjaga harmoni sosial melalui nilai-nilai budaya dan interaksi antar agama.

2.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Informan meliputi tokoh agama, tokoh adat, pejabat pemerintah, akademisi,

media, dan pelaku bisnis yang berpengaruh dalam masyarakat Parepare dan Tana Toraja. Mereka dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman terkait moderasi beragama dan budaya lokal (Douglas, 2022). Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi kebijakan lokal terkait moderasi beragama, publikasi media, dan catatan sejarah. Sumber data sekunder ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana moderasi beragama diimplementasikan di kedua wilayah tersebut, dan bagaimana media serta kebijakan lokal memengaruhi dinamika hubungan antaragama.

Untuk memahami bagaimana komunikasi budaya lokal mendukung moderasi beragama, penelitian ini melibatkan berbagai kategori informan yang memiliki peran strategis dalam penyebaran nilai-nilai budaya dan keagamaan. Tokoh adat berperan sebagai penjaga tradisi serta fasilitator dalam mengharmoniskan budaya dengan ajaran agama. Mereka memahami secara mendalam nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* dalam masyarakat Bugis Parepare, serta konsep Tongkonan dan *aluk todolo* yang menjadi identitas budaya masyarakat Tana Toraja. Informan dari kategori ini mencakup tokoh adat Bugis di Parepare serta pemimpin adat Tana Toraja yang aktif dalam pelestarian tradisi.

Tokoh agama juga memainkan peran penting dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam komunikasi keagamaan guna menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman. Mereka berperan sebagai jembatan antara budaya lokal dan moderasi beragama melalui komunikasi lintas agama yang inklusif. Dalam penelitian ini, informan dari kategori ini mencakup imam masjid di Parepare dan Makale, Tana Toraja yang menyisipkan nilai budaya dalam dakwahnya, serta pendeta Kristen di Tana Toraja yang mengadopsi tradisi budaya lokal dalam ajaran keagamaannya.

Selain itu, akademisi memberikan perspektif ilmiah mengenai komunikasi budaya dan moderasi beragama. Dengan pendekatan berbasis penelitian, mereka membantu memetakan pola komunikasi budaya secara teoritis dan kontekstual. Informan dalam kategori ini meliputi Kepala Pusat Moderasi Beragama IAIN Parepare, dosen IAIN Parepare yang meneliti tradisi Bugis, serta peneliti di IAKN Toraja yang mendalami *aluk todolo*.

Masyarakat sipil dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga memiliki peran signifikan dalam membangun komunikasi lintas agama dan budaya. FKUB secara aktif memfasilitasi dialog berbasis budaya lokal untuk menjaga harmoni antar umat beragama melalui kebijakan yang mendukung moderasi berbasis kearifan lokal. Informan dalam kategori ini mencakup ketua FKUB Parepare serta anggota FKUB di Tana Toraja yang memiliki pengalaman dalam merancang pendekatan berbasis budaya lokal dalam membangun moderasi beragama.

Dengan memahami peran setiap aktor dalam sistem komunikasi budaya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana budaya

lokal dan *opinion leader* menjadi bagian integral dalam membangun serta mempertahankan moderasi beragama. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan model komunikasi budaya yang berkelanjutan dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Berikut tabel kriteria informan:

Tabel 2.1 Kriteria Informan Penelitian

Kategori Informan	Deskripsi	Informan
Akademisi	Peneliti dan dosen yang mempunyai keahlian di bidang kajian sosial, budaya, dan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Moderasi Beragama IAIN Parepare 2. Dosen IAIN Parepare 3. Dosen IAKN Toraja
Tokoh Agama	Individu yang mempunyai peran penting dalam komunitas keagamaan dan mempengaruhi praktik dan pandangan keagamaan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendeta Kristen di Tana Toraja 2. Imam Masjid Raya Makale Tana Toraja 3. Imam Masjid Raya Kota Parepare
Tokoh Adat	Individu yang memiliki peran sentral dalam melestarikan tradisi, nilai-nilai budaya, serta memegang otoritas dalam pelaksanaan adat di komunitas lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tokoh Adat Bugis 2. Tokoh Adat Toraja
Masyarakat Sipil	Kelompok ini mencakup organisasi non-pemerintah, LSM, dan aktivis yang peduli terhadap isu-isu budaya dan agama, serta penduduk lokal yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan atau budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Parepare 2. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tana Toraja

Sumber: Data Penelitian, 2024

2.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, analisis dokumen.

a. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman mendalam dari informan (Lexy J. Moleong, 2019). Digunakan untuk menggali informasi dari informan terkait pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap moderasi beragama dan budaya lokal. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *rambu solo'*, diterapkan dalam membangun moderasi beragama di masyarakat. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga

berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis lintas agama.

Dalam konteks moderasi beragama, nilai-nilai budaya lokal ini berkontribusi pada penyebaran sembilan nilai utama moderasi beragama. Moderasi beragama bertumpu pada sembilan nilai utama yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Komitmen kebangsaan menjadi prinsip utama yang menegaskan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, moderasi beragama juga menuntut adanya toleransi, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan serta keberagaman budaya. Selain itu, anti-kekerasan menjadi nilai fundamental yang menolak segala bentuk tindakan radikal dan mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan perbedaan.

Penghormatan terhadap tradisi dan budaya lokal juga menjadi bagian integral dari moderasi beragama, karena adat dan nilai-nilai kearifan lokal telah lama berfungsi sebagai perekat sosial dalam kehidupan masyarakat. Moderasi beragama juga berlandaskan pada nilai kemanusiaan, yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi setiap individu tanpa diskriminasi. Nilai keadilan turut ditekankan, di mana setiap individu diharapkan untuk bersikap adil dalam menjalankan ajaran agamanya serta dalam kehidupan sosial.

Selain itu, moderasi beragama menuntut sikap berimbang (*tawazun*), yakni tidak bersikap ekstrem dalam memahami dan menjalankan agama, baik dalam keyakinan maupun praktik keagamaan. Nilai kemaslahatan umum juga menjadi prinsip utama, di mana kepentingan bersama harus diutamakan demi menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Moderasi beragama harus berpijak pada ketaatan terhadap konstitusi, yaitu penghormatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari kesepakatan sosial dalam kehidupan bernegara. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, moderasi beragama dapat menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni, mencegah konflik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Di balik potensi yang besar tersebut, terdapat tantangan dalam menyosialisasikan nilai-nilai budaya lokal secara efektif, terutama di tengah masyarakat modern yang semakin kompleks. Penelitian ini juga mengidentifikasi peluang yang dapat dioptimalkan untuk mendukung sembilan nilai moderasi beragama melalui adaptasi tradisi lokal ke dalam kebijakan formal atau media digital. Selain itu, peran *opinion leader*, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, menjadi fokus eksplorasi dalam penelitian ini. *Opinion leader* memainkan peran strategis sebagai penghubung antara tradisi lokal dan masyarakat luas, menyampaikan nilai-nilai budaya lokal dengan cara yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat yang beragam. Memahami penerapan nilai budaya lokal, tantangan, peluang, dan peran *opinion leader*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam

pengembangan strategi moderasi beragama berbasis budaya lokal yang lebih terstruktur dan sistematis.

b. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif merupakan metode penelitian kualitatif yang umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk antropologi dan sosiologi, dimana peneliti membenamkan diri dalam suatu komunitas atau pengaturan sosial untuk mengamati dan berinteraksi dengan partisipan di lingkungan alaminya (Morales-Pate et al., 2023). Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung interaksi sosial, aktivitas keagamaan, dan peran *opinion leader* dalam masyarakat. Metode ini memberikan peneliti kesempatan untuk menyaksikan bagaimana nilai-nilai budaya lokal, seperti *sipakatau* dan *rambu solo*, diterapkan dalam hubungan lintas agama dan dalam tradisi lokal. Selain itu, observasi ini juga membantu memahami tantangan dan dinamika yang muncul dalam menyosialisasikan sembilan nilai moderasi beragama, seperti toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Observasi ini dapat memperoleh gambaran yang lebih otentik tentang praktik moderasi beragama yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menangkap nuansa budaya yang mungkin sulit dijelaskan melalui wawancara semata.

Observasi partisipatif dalam penelitian ini dirancang tidak hanya untuk merekam aktivitas yang terlihat, tetapi juga untuk memahami makna di balik praktik budaya dan interaksi lintas agama. Dengan membaaur dalam kegiatan masyarakat, peneliti dapat menangkap detail non-verbal, bahasa simbolik, dan ekspresi sosial yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai budaya lokal. Proses ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterhubungan antara praktik budaya seperti *sipakatau* di Parepare atau *rambu solo* di Tana Toraja dengan sembilan nilai moderasi beragama secara nyata di lapangan. Observasi yang dilakukan secara sistematis ini menjadi landasan dalam menyusun panduan observasi yang memfokuskan pada penerapan nilai-nilai, dinamika lintas agama, serta tantangan yang muncul dalam menjaga harmoni sosial.

Tabel 2.2 disajikan sebagai panduan observasi yang dirancang untuk memandu peneliti dalam mengamati secara langsung dinamika sosial, praktik keagamaan, dan penerapan nilai budaya lokal di tengah kehidupan masyarakat. Panduan ini tidak hanya memuat indikator-indikator observasi yang bersifat deskriptif, tetapi juga diarahkan untuk menangkap dimensi makna yang terkandung dalam setiap praktik budaya dan interaksi lintas agama. Fokus pengamatan mencakup penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* di Parepare, serta peran adat *Tongkonan*, kepercayaan *aluk todolo*, dan ritual *rambu solo* di Tana Toraja sebagai media pemersatu masyarakat multikultural. Selain itu, panduan ini juga mengarahkan peneliti untuk mencermati simbol-simbol lintas agama, pola kolaborasi antarumat, serta respons masyarakat terhadap keterlibatan kelompok agama lain dalam kegiatan budaya. Observasi yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu

menangkap nuansa interaksi yang sering kali tidak terekam melalui wawancara formal, seperti ekspresi non-verbal, bahasa tubuh, dan penggunaan ruang sosial dalam kegiatan adat maupun keagamaan. Dengan demikian, panduan ini berfungsi ganda: sebagai instrumen pengumpulan data empiris yang sistematis dan sebagai alat interpretasi yang membantu memahami bagaimana nilai-nilai budaya lokal diinternalisasi, diadaptasi, dan diwariskan dalam konteks moderasi beragama.

Tabel 2.2 Panduan Observasi

No	Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi Kode
1	Nilai Budaya Lokal di Parepare	Penerapan nilai <i>sipakatau</i>	Observasi praktik nilai saling menghormati dalam interaksi sehari-hari masyarakat di Parepare.
2		Penerapan nilai <i>sipakalebbi</i>	Observasi bagaimana nilai memuliakan orang lain terlihat dalam interaksi sosial dan kegiatan keagamaan.
3		Penerapan nilai <i>sipakainge</i>	Observasi nilai saling mengingatkan terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam menjaga kerukunan.
4	Nilai Budaya Lokal di Tana Toraja	Peran Tongkonan dalam kehidupan sosial	Observasi fungsi rumah adat Tongkonan sebagai pusat kegiatan sosial dan simbol persatuan.
5		Penerapan nilai <i>aluk todolo</i>	Observasi penerapan nilai spiritualitas dan tradisi <i>aluk todolo</i> dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja.
6		Solidaritas dalam <i>rambu solo'</i>	Observasi partisipasi masyarakat dalam upacara <i>rambu solo'</i> sebagai wujud gotong royong dan solidaritas sosial.
7	Kegiatan Lintas Agama	Kolaborasi Lintas Agama	Observasi kolaborasi antara pemuka agama atau komunitas lintas agama dalam tradisi lokal dan kegiatan sosial.
8		Respons terhadap agama lain	Observasi respons masyarakat terhadap keterlibatan agama lain dalam kegiatan budaya lokal.
9		Simbol lintas agama	Observasi simbol-simbol budaya atau praktik yang menunjukkan penghormatan terhadap agama lain.

Sumber: Data Penelitian, 2024

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis dokumen yang relevan, seperti kebijakan lokal, laporan komunitas, dan publikasi media. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk menilai bagaimana dukungan kelembagaan, seperti kebijakan pemerintah dan program sosial, berperan dalam memfasilitasi moderasi beragama. Selain itu, analisis publikasi media dilakukan untuk memahami bagaimana media memberitakan isu-isu terkait moderasi

beragama dan bagaimana pemberitaan tersebut memengaruhi opini publik. Dengan analisis ini, peneliti dapat mengevaluasi peran kelembagaan dan media dalam mempengaruhi dinamika sosial yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama.

Tabel 2.3. Dokumentasi

No	Jenis Dokumen	Deskripsi Kode
1	Kebijakan Lokal	Menggali bagaimana pemerintah mendukung komunikasi nilai budaya melalui kebijakan dan program kerukunan.
2	Publikasi Media	Menganalisis bagaimana media berperan sebagai saluran komunikasi nilai budaya dan mendorong opini publik tentang moderasi beragama.
3	Catatan Sejarah	Mengeksplorasi sejarah tradisi budaya yang relevan dengan moderasi beragama dan harmoni sosial.

Sumber: Data Penelitian, 2024

Informan yang dipilih dalam penelitian ini, yakni tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan perwakilan FKUB, memiliki relevansi yang kuat dengan dokumen-dokumen yang dianalisis. Tokoh Adat memiliki keterkaitan langsung dengan catatan sejarah yang memberikan gambaran mendalam tentang penerapan nilai-nilai budaya lokal seperti *aluk todolo* di Tana Toraja dan *sipakatau* di Parepare. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini mendukung data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh adat sebagai sumber primer. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi budaya lokal dijaga, diwariskan, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tokoh Agama berkaitan erat dengan laporan organisasi keagamaan, yang mencatat berbagai program dan kegiatan keagamaan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Dokumen ini menjadi dasar untuk mengembangkan pertanyaan wawancara yang mengeksplorasi peran tokoh agama dalam menyampaikan pesan moderasi beragama melalui kegiatan keagamaan, ceramah, dan pendekatan berbasis tradisi lokal.

Akademisi memainkan peran penting dalam memberikan analisis teoritis dan kontekstual terhadap temuan penelitian. Dukungan dari catatan sejarah dan publikasi media menjadi landasan kajian akademis yang dapat menjelaskan pola komunikasi nilai budaya lokal dalam membangun harmoni sosial. Melalui analisis ini, akademisi memberikan perspektif kritis terhadap praktik komunikasi budaya serta relevansinya dalam menciptakan moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja.

Perwakilan FKUB memiliki relevansi yang kuat dengan kebijakan lokal dan laporan program sosial. Dokumen-dokumen ini mencerminkan upaya kelembagaan dalam memfasilitasi dialog antaragama dengan pendekatan berbasis nilai budaya lokal. Wawancara dengan perwakilan FKUB bertujuan untuk menggali strategi kolaborasi multi-*stakeholder* antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mendukung program moderasi beragama.

Tabel 2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

No	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Fokus Data	Metode Analisis
1	Data Wawancara	Tokoh Agama, Tokoh Adat, Akademisi, Masyarakat Sipil (FKUB)	Wawancara Mendalam	Pandangan mengenai nilai budaya lokal dan perannya dalam moderasi beragama	Analisis Analisis Tematik
2	Data Observasi	Upacara adat (<i>rambu solo</i> , <i>rambu tuka</i> , <i>sipakatau</i> , <i>sipakalebbi</i> , Tongkonan, <i>aluk todolo</i>) dan interaksi antaragama	Observasi Partisipatif	Praktik komunikasi budaya lokal dalam moderasi beragama	Analisis Deskriptif
3	Data Dokumentasi	Dokumen kebijakan lokal, publikasi media, laporan FKUB, foto kegiatan	Studi Dokumen	Kebijakan dan representasi nilai budaya dalam moderasi beragama	Analisis Konten

Sumber: Data Penelitian, 2024

2.4.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti berpedoman pada azas-azas pengolahan data dan analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif dinyatakan dengan kata-kata atau simbol, mendeskripsikan secara mendalam terkait hasil pengamatan yaitu observasi dan wawancara (Creswell & Creswell, 2018). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengolah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Langkah-langkah analisis data yang diterapkan meliputi:

2.4.4.1 Pengodean Data

Proses pengodean dalam penelitian ini mengikuti pendekatan *Grounded Theory* yang dikembangkan oleh (Corbin & Strauss, 2008). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dan sistematis, sehingga menghasilkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan pengodean dilakukan dalam tiga langkah utama, yaitu pengodean terbuka, pengodean aksial, dan pengodean selektif.

1. Pengkodean Terbuka (*Open Coding*). Pada tahap ini, data wawancara, observasi, dan dokumentasi dipecah menjadi unit-unit kecil yang lebih spesifik untuk mengidentifikasi tema awal.

2. Pengkodean Aksial (*Axial Coding*). Tema-tema awal yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya, sehingga membentuk kategori utama.
3. Pengkodean Selektif (*Selective Coding*). Pada tahap terakhir, kategori utama yang telah terbentuk dirangkai menjadi narasi yang menjelaskan fenomena secara menyeluruh.

Hasil pengodean data wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini mengungkap berbagai aspek komunikasi budaya lokal dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Melalui proses pengkodean terbuka, aksial, dan selektif, ditemukan beberapa tema utama yang menjadi dasar dalam analisis ini. Berikut adalah kesimpulan utama dari hasil pengodean:

1. Nilai Budaya Lokal sebagai Fondasi Moderasi Beragama
 Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, *siri' na pesse* di Parepare serta Tongkonan, dan *aluk todolo* di Tana Toraja memiliki peran penting dalam membangun harmoni sosial. Nilai-nilai ini bukan hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat hubungan antarumat beragama.
2. Tradisi Lokal sebagai Simbol Harmoni
 Tradisi dan praktik budaya seperti gotong royong dalam acara adat, *tudang sipulung* di Parepare, serta *rambu solo'*, *rambu tuka'* dan Tongkonan di Tana Toraja telah menjadi simbol persatuan dan harmoni sosial. Selain itu, *mappalili* merupakan upacara adat yang dilakukan sebelum musim tanam padi dimulai, *mappadandang* sebagai tradisi panen dan *tudang sipulung* sebagai forum musyawarah menjadi bagian penting dalam memperkuat keterikatan sosial dan membangun ruang dialog yang inklusif di Parepare. Keberlanjutan tradisi ini memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama tetap tertanam dalam kehidupan masyarakat.
3. Dialog dan Kolaborasi Lintas Agama sebagai Strategi Moderasi
 Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dialog berbasis budaya menjadi metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat hubungan lintas agama. Forum seperti *tudang sipulung* di Parepare serta interaksi dalam ritual adat di Tana Toraja menjadi wadah untuk membangun pemahaman bersama dan mengatasi perbedaan.
4. Peran *Opinion Leader* dalam Penyebarluasan Nilai Moderasi
 Tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi memainkan peran strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya lokal sebagai instrumen moderasi beragama. Mereka bertindak sebagai *opinion leader* yang berperan dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi melalui dakwah, pendidikan, dan kebijakan berbasis budaya lokal.

5. Pendidikan sebagai Sarana Pelestarian Budaya Lokal dalam Moderasi Beragama

Institusi pendidikan memiliki kontribusi penting dalam integrasi nilai budaya lokal ke dalam kurikulum sebagai upaya membangun karakter moderasi beragama bagi generasi muda. Pendidikan berbasis budaya lokal membantu memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

6. Peran Media dalam Penguatan Moderasi Beragama

Media, baik tradisional maupun digital, telah menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan nilai budaya lokal untuk mendukung moderasi beragama. Pemberitaan mengenai praktik budaya lokal dan kampanye moderasi beragama melalui platform digital berkontribusi dalam memperluas jangkauan pesan-pesan harmoni lintas agama.

7. Tantangan Globalisasi terhadap Budaya Lokal

Modernisasi dan globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya lokal. Berkurangnya peran generasi muda dalam menjaga tradisi, serta berkembangnya ekstremisme berbasis digital, menjadi faktor yang dapat mengancam nilai-nilai budaya yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi agar nilai budaya lokal tetap relevan dalam konteks kehidupan modern.

8. Kolaborasi Multi-*Stakeholder* sebagai Pendekatan Holistik

Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat moderasi beragama berbasis budaya lokal. Dukungan kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya, serta keterlibatan berbagai pihak dalam dialog dan kegiatan sosial berbasis budaya, menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran.

Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa komunikasi budaya lokal berperan sebagai mekanisme penting dalam membangun moderasi beragama. Keberlanjutan nilai dan tradisi lokal, diperkuat dengan peran *opinion leader*, pendidikan, media, dan kolaborasi multi-stakeholder, menjadi faktor kunci dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman agama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja.

2.4.4.2 Analisis Tematik

Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam data yang relevan dengan fokus penelitian mengacu pada pendekatan Braun & Clarke (2006). Pada penelitian ini, nilai-nilai budaya lokal memainkan peran sentral dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Beberapa tradisi yang telah dikodifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik budaya lokal tidak hanya menjadi bagian dari

identitas masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat harmoni sosial, dialog lintas agama, dan penguatan nilai moderasi beragama.

1. Nilai Budaya Lokal dalam Harmoni Sosial

Nilai-nilai budaya seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *siri' na pesse* di Parepare, serta *Tongkonan*, *rambu solo'*, dan *aluk todolo* di Tana Toraja menjadi fondasi utama dalam membangun harmoni sosial. Budaya-budaya ini mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap sesama, solidaritas, serta etika dalam interaksi sosial. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, konsep *sipakatau* mengajarkan penghormatan antar individu, sementara *sipakalebbi* menekankan sikap memuliakan sesama. Di sisi lain, nilai *siri' na pesse* memperkuat solidaritas dan harga diri dalam komunitas.

Di Tana Toraja, Tongkonan bukan hanya sebagai rumah adat, tetapi juga simbol persatuan dan nilai kebersamaan. *Rambu solo'* sebagai ritual kematian dan *rambu tuka'* sebagai upacara syukuran menunjukkan bagaimana budaya dapat menjadi alat untuk membangun harmoni sosial dalam komunitas yang beragam secara agama dan kepercayaan.

2. Tradisi Lokal sebagai Sarana Moderasi Beragama

Beberapa tradisi lokal di Parepare dan Tana Toraja telah menjadi instrumen moderasi beragama yang efektif.

- *Mappadandang*, sebuah ritual panen padi yang dilakukan secara kolektif, memperkuat kebersamaan lintas komunitas dan menunjukkan nilai kerja sama yang tinggi.
- *Mappalili*, sebagai ritual pemanggilan hujan yang dipimpin oleh *Bissu*, mencerminkan bagaimana adat dan kepercayaan dapat berpadu dalam praktik sosial yang inklusif.
- *Tudang sipulung*, forum musyawarah yang sering digunakan dalam masyarakat Bugis, telah menjadi model penyelesaian konflik berbasis budaya yang mencerminkan keterbukaan dan dialog inklusif.

Dalam konteks moderasi beragama, praktik-praktik ini membuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki mekanisme internal untuk menciptakan toleransi dan resolusi konflik berbasis budaya. Praktik ini tidak hanya bertahan dalam lingkup adat, tetapi juga telah diadopsi dalam strategi penyelesaian konflik dan dialog lintas agama.

3. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal sebagai Alat Moderasi

Pendidikan berbasis budaya lokal berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama. Beberapa institusi pendidikan di Parepare dan Tana Toraja telah mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam studi keagamaan. Perguruan tinggi telah memasukkan mata kuliah Studi Budaya Lokal sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya lokal dan harmoni sosial kepada generasi muda. Program seperti KKN Moderasi Beragama yang diterapkan di

Tana Toraja juga menjadi contoh konkret bagaimana mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai budaya dalam membangun dialog dan kerja sama lintas agama.

4. Dialog Lintas Agama Berbasis Budaya

Dialog lintas agama yang berbasis pada nilai budaya lokal menjadi metode yang terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik sosial dan memperkuat moderasi beragama. Di Parepare dan Tana Toraja, forum-forum dialog seperti *tudang sipulung* telah menjadi model interaksi sosial yang inklusif. Partisipasi tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat dalam forum-forum ini menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi alat utama dalam membangun pemahaman bersama. Dengan menggunakan pendekatan budaya, dialog lintas agama lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai lokal yang sudah lama tertanam dalam kehidupan sosial mereka.

5. Kolaborasi Multisektor untuk Penguatan Moderasi Beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja tidak terlepas dari kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah. Upaya bersama ini menjadi strategi efektif dalam menjaga harmoni sosial dan membangun pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya keberagaman.

Program-program berbasis komunitas yang mengedepankan nilai budaya, seperti festival budaya, seminar adat, serta keterlibatan media dalam menyiarkan praktik budaya lokal, telah menjadi bagian dari strategi penguatan moderasi beragama. Peran media, baik tradisional maupun digital, dalam menyebarkan pesan budaya lokal juga berkontribusi dalam menciptakan narasi positif tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi budaya lokal memainkan peran penting dalam membangun moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja. Nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun telah menjadi alat utama dalam membangun harmoni sosial, memfasilitasi dialog lintas agama, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberagaman. Pendidikan berbasis budaya lokal, kolaborasi multisektor, dan peran media menjadi faktor penunjang dalam memastikan nilai-nilai moderasi beragama tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.4.4.3 Analisis Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik komunikasi budaya lokal dalam konteks moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana nilai-nilai budaya lokal, yang telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat, dapat berperan dalam memperkuat hubungan sosial antar umat beragama dan mendukung terciptanya moderasi beragama. Dalam analisis deskriptif ini, menggunakan data hasil observasi partisipatif yang mencakup berbagai praktik

adat dan upacara tradisional, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, *mappalili*, *mappadandang*, *tudang sipulung*, Tongkonan, *aluk todolo*, *rambu tuka'* dan *rambu solo'*. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana budaya lokal di kedua daerah tersebut menjadi sarana untuk membangun kerukunan dan solidaritas sosial, yang pada gilirannya mendukung terciptanya harmoni lintas agama.

Pendekatan terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam konteks penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-normatif, melainkan juga ditopang oleh validasi empiris melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, akademisi, generasi muda, dan pejabat Kementerian Agama. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi*, dan *aluk todolo* masih diinternalisasi dan dijalankan dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan komunikasi berbasis budaya benar-benar berakar pada realitas sosial yang masih hidup, bukan sekadar romantisme budaya atau narasi simbolik yang tak lagi fungsional.

Observasi terhadap kegiatan lintas agama, kolaborasi antar agama, respons masyarakat terhadap keterlibatan agama lain, serta simbol-simbol penghormatan lintas agama menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana komunikasi budaya lokal dapat menciptakan ruang untuk dialog antar agama yang lebih inklusif dan toleran. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana budaya lokal di Parepare dan Tana Toraja dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam memperkuat moderasi beragama, serta bagaimana praktik-praktik budaya tersebut dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Nilai Budaya Lokal di Parepare

a) *Sipakatau*

Praktik nilai *sipakatau* di Parepare mengedepankan saling menghormati antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dalam cara masyarakat memperlakukan satu sama lain, baik dalam interaksi sosial maupun kegiatan keagamaan. Nilai ini menjadi dasar penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antar umat beragama di Parepare. Masyarakat yang saling menghormati cenderung memiliki rasa toleransi yang tinggi, mendukung terciptanya suasana yang damai.

Acara perayaan keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Natal, umat dari berbagai agama saling mengunjungi rumah satu sama lain. Hal ini menunjukkan penghormatan dan saling menghargai antar umat beragama, sesuai dengan nilai *sipakatau* yang mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam beragama. Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat Parepare lebih cenderung memperlakukan orang lain dengan kesopanan, seperti memberikan tempat duduk untuk orang yang lebih tua

atau menghormati keputusan kolektif dalam pengambilan keputusan komunitas. *Sipakatau* bukan hanya terbatas pada bentuk kesopanan, tetapi juga memperkuat rasa toleransi antar umat beragama, dengan menciptakan interaksi yang damai dan penuh rasa saling menghormati.

Nilai *sipakatau* juga tercermin dalam sistem hierarki sosial yang berlaku di Parepare, di mana orang yang lebih tua atau lebih dihormati (seperti tetua adat atau pemimpin agama) selalu diberikan penghormatan khusus dalam setiap interaksi. Dalam pertemuan komunitas atau musyawarah desa, keputusan yang diambil selalu memperhatikan suara dan pandangan tetua adat atau pemimpin agama sebagai bentuk penghormatan terhadap kebijaksanaan dan pengalaman mereka.

Temuan wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag Parepare memperkuat keberlangsungan nilai ini di tengah masyarakat:

"Nilai *sipakatau* itu masih hidup, kita lihat dalam keseharian masyarakat. Bahkan anak-anak muda pun atau remaja masjid, mereka bicara dengan bahasa yang menunjukkan penghormatan. Itu bukan sekadar formalitas, tapi sudah jadi karakter." (Wawancara, 25 Juli 2024)

b) *Sipakalebbi*

Nilai *sipakalebbi* yang berarti memuliakan orang lain tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat Parepare. Dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, masyarakat Parepare menunjukkan sikap yang menghargai dan memuliakan sesama. Praktik ini memperkuat hubungan antar umat beragama, karena nilai tersebut mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, yang mendukung terciptanya harmoni lintas agama di lingkungan mereka.

Nilai *sipakalebbi*, yang mengajarkan untuk memuliakan orang lain, tercermin jelas dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat Parepare. Dalam kegiatan seperti gotong royong dan perayaan-perayaan keagamaan, masyarakat menunjukkan sikap menghargai dan memuliakan sesama. Misalnya, saat ada perayaan keagamaan, anggota masyarakat dari berbagai agama turut hadir untuk membantu tanpa membedakan latar belakang agama atau keyakinan. Ini juga tercermin dalam cara masyarakat merayakan peristiwa penting bersama, seperti pernikahan dan kelahiran, di mana tetangga dan komunitas saling membantu tanpa membedakan agama atau kepercayaan.

Nilai *sipakalebbi* diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kepada sesama dalam bentuk materi atau non-materi. Masyarakat Parepare sering terlibat dalam pengumpulan dana atau bantuan untuk keluarga yang sedang mengalami kesulitan, tanpa memperhatikan perbedaan agama. Ini membuktikan bahwa mereka mengutamakan prinsip memuliakan orang lain sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Saat perayaan besar seperti hari raya, masyarakat Parepare, baik yang Muslim maupun Kristen, sering kali saling mengundang untuk berbagi makanan. Ini bukan hanya untuk menghormati agama lain, tetapi juga sebagai bagian dari praktik *sipakalebbi*, di mana mereka merasa

terpanggil untuk memuliakan sesama, terutama dalam perayaan yang bersifat religius. Praktik *sipakalebbi* berfungsi sebagai jembatan antarumat beragama dalam menciptakan hubungan sosial yang positif dan harmonis. Dengan memuliakan orang lain, masyarakat Parepare mendukung terciptanya suasana yang toleran dan penuh penghargaan terhadap perbedaan.

Hasil wawancara juga menegaskan nilai ini masih relevan secara empiris: "Kita ini orang Bugis, *sipakalebbi* itu nafas kita. Kalau ada tamu, kita sambut dengan hormat. Kalau ada saudara beda agama yang berduka, kita tetap datang bantu. Tidak ada sekat." (Wawancara, 25 Juli 2024)

c) *Sipakainge*

Nilai *sipakainge* menekankan pentingnya saling mengingatkan dalam menjaga kerukunan. Praktik ini terlihat jelas dalam interaksi sosial di Parepare, dimana masyarakat saling mengingatkan satu sama lain untuk selalu menjaga perdamaian dan kerukunan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan keagamaan. Hal ini menciptakan fondasi sosial yang kuat untuk moderasi beragama, menjadikan budaya lokal sebagai penguat hubungan antarumat beragama yang harmonis.

Nilai *sipakainge* menekankan pentingnya saling mengingatkan dalam menjaga kerukunan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Parepare sering terlibat dalam kegiatan sosial yang mengingatkan satu sama lain untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dalam acara pertemuan atau musyawarah desa, masyarakat selalu menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari konflik. Nilai ini terlihat jelas dalam praktik keagamaan, dimana masyarakat saling mengingatkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya dalam hal toleransi dan penghargaan terhadap ritual dan upacara agama masing-masing. *Sipakainge* berperan penting dalam memperkuat moderasi beragama.

Sipakainge juga tercermin dalam cara masyarakat Parepare menangani konflik sosial. Dalam kasus perbedaan pendapat antar kelompok agama atau antar individu, masyarakat Parepare biasanya mengadakan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Pendekatan ini mencerminkan nilai saling mengingatkan untuk menjaga perdamaian dan kerukunan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Musyawarah ini dilakukan dengan menghormati pandangan masing-masing pihak dan mencari titik temu tanpa ada pihak yang merasa terpinggirkan.

Salah satu implementasi nyata dari nilai *sipakainge* adalah melalui pendidikan di keluarga. Orang tua di Parepare sering mengingatkan anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, teman, dan orang lain dari berbagai latar belakang. Pendidikan moral yang berbasis pada saling mengingatkan untuk menjaga kerukunan ini ditanamkan sejak dini, menjadikan generasi muda lebih toleran dan menghargai keberagaman. Dengan saling mengingatkan untuk menjaga kerukunan,

masyarakat Parepare membangun fondasi yang kuat untuk hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung antar umat beragama.

Wawancara juga menunjukkan bahwa generasi muda mengadopsi nilai ini dalam konteks yang lebih digital:

"Sekarang anak-anak muda saling mengingatkan di grup WhatsApp remaja masjid atau pemuda gereja. Kalau ada isu intoleran, mereka bilang 'jangan dibagikan, itu memecah belah'. Jadi *sipakainge* sekarang itu juga ada di ruang digital." (Wawancara, 25 Juli 2024)

d) *Mappalili*

Mappalili sebagai representasi harmoni antara agama dan kepercayaan lokal di Kota Parepare merupakan ritual pemanggilan hujan yang dipimpin oleh tetua adat, kelompok tokoh adat yang memiliki peran penting dalam tradisi Bugis. Ritual ini tidak hanya merefleksikan hubungan spiritual antara manusia dan alam, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai kepercayaan tradisional dapat berdampingan dengan agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Keberadaan tetua adat sebagai pemimpin ritual mencerminkan inklusivitas budaya Bugis, dimana adat dan agama tidak saling meniadakan, melainkan justru berpadu dalam praktik sosial yang harmonis. Dalam konteks moderasi beragama, *mappalili* menjadi contoh bagaimana masyarakat Parepare menjaga keseimbangan antara keyakinan tradisional dan ajaran agama formal, sehingga menciptakan ruang dialog yang lebih luas dan terbuka dalam kehidupan beragama.

e) *Mappadendang*

Mappadendang sebagai sarana interaksi sosial dan toleransi beragama di Parepare. Sebagai kota yang memiliki keberagaman sosial dan budaya, Parepare juga dikenal dengan tradisi *mappadendang*, perayaan pasca panen yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Tradisi ini menjadi wadah interaksi sosial lintas komunitas, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan etnis berkumpul untuk merayakan keberhasilan pertanian. Dalam praktiknya, *mappadendang* bukan hanya sekadar perayaan adat, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Dalam perspektif moderasi beragama, tradisi ini mencerminkan bagaimana komunikasi berbasis budaya dapat menjadi alat pemersatu, menghilangkan sekat-sekat perbedaan, serta memperkuat semangat inklusivitas di tengah masyarakat yang multikultural.

f) *Tudang Sipulung*

Tudang sipulung sebagai model dialog keberagaman dan moderasi beragama di Parepare. Tradisi *tudang sipulung*, sebuah forum musyawarah yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk isu-isu keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini menekankan nilai keterbukaan dan dialog yang inklusif, di mana setiap individu, termasuk tokoh

agama dan pemimpin adat, dapat menyampaikan pandangan mereka secara setara. Dalam konteks moderasi beragama, *tudang sipulung* menjadi model komunikasi yang mendorong interaksi lintas agama secara harmonis, mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan, serta mencegah konflik sosial. Tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat Parepare memiliki mekanisme budaya yang kuat dalam mengelola keberagaman dan menjaga kohesi sosial melalui komunikasi yang demokratis dan berbasis kearifan lokal.

Ketiga praktik budaya ini memperlihatkan bahwa di Parepare, nilai-nilai lokal telah berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif dalam membangun moderasi beragama. Tradisi seperti *mappalili*, *mappadandang*, dan *tudang sipulung* menunjukkan bahwa budaya tidak hanya menjadi identitas kolektif, tetapi juga alat untuk memperkuat inklusivitas, toleransi, dan harmoni sosial. Dalam kajian disertasi ini, pendekatan budaya lokal di Parepare dapat menjadi model bagaimana komunikasi berbasis nilai tradisi dapat berkontribusi dalam merawat keberagaman, mengatasi konflik berbasis agama, serta membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif dan demokratis. Oleh karena itu, pemanfaatan budaya lokal dalam strategi komunikasi moderasi beragama menjadi langkah penting dalam merancang kebijakan sosial yang berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas keberagaman seperti di Kota Parepare.

Nilai Budaya Lokal di Tana Toraja

a) Tongkonan

Tongkonan, sebagai rumah adat, berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial di Tana Toraja. Fungsi simbolis ini tidak hanya berkaitan dengan identitas budaya, tetapi juga sebagai simbol persatuan bagi masyarakat Toraja. Dalam konteks moderasi beragama, Tongkonan memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antarumat beragama. Rumah adat ini menjadi tempat di mana berbagai komunitas agama berkumpul, menunjukkan rasa persatuan dalam keragaman.

Dalam berbagai acara adat seperti upacara *rambu solo*, Tongkonan menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam upacara adat, tetapi juga duduk bersama, bercengkrama, dan memperlihatkan harmoni sosial di tengah perbedaan keyakinan. Buku Toraja, Tongkonan dan Kerukunan menjelaskan bahwa Tongkonan tidak sekadar rumah adat, tetapi juga simbol warisan leluhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, termasuk dalam membangun kerukunan antaragama. Dalam masyarakat Toraja, keberadaan Tongkonan menegaskan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menjalin hubungan sosial yang erat, melainkan justru menjadi bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat ikatan komunitas.

Lebih dari sekadar tempat tinggal, Tongkonan juga sering digunakan sebagai ruang musyawarah antar kelompok agama untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tongkonan,

seperti *siri'*, *sipakatau*, dan sikap gotong royong, menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa kehidupan bermasyarakat tetap harmonis di tengah keberagaman. Sebagai simbol persatuan dan kedamaian, Tongkonan mencerminkan bagaimana budaya lokal dapat berfungsi sebagai instrumen dalam membangun moderasi beragama yang berkelanjutan.

Tongkonan sebagai rumah adat bukan hanya simbol struktur sosial, tetapi juga menjadi titik temu lintas agama dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Rumah adat ini memainkan peran sebagai pusat musyawarah, rekonsiliasi, dan pertemuan komunal yang sering kali dihadiri oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar agama. Drs. Sampe Bara Langi, M.Sc., Sekretaris Umum MUI Tana Toraja, menegaskan: "Tongkonan masih hidup di tengah masyarakat dan menjadi tempat pengambilan keputusan penting, termasuk menyangkut kegiatan sosial dan keagamaan lintas iman. Di sinilah semangat gotong royong, toleransi, dan musyawarah tetap dijaga."

Tongkonan tidak hanya mencerminkan identitas kultural, melainkan juga merepresentasikan inklusivitas sosial dalam konteks keagamaan. Fungsi Tongkonan dalam menyatukan masyarakat menjadikannya simbol nyata komunikasi budaya lokal yang mendukung moderasi beragama.

b) *Aluk Todolo*

Aluk todolo merupakan tradisi spiritual yang mendalam dan menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Toraja. Sebagai sistem kepercayaan leluhur, *aluk todolo* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan roh leluhur, tetapi juga membentuk etika sosial yang mendukung harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai spiritual dalam *aluk todolo* mendorong moderasi beragama dengan menekankan pentingnya moralitas, keseimbangan, serta penghormatan terhadap sesama. Masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini menerapkan prinsip toleransi dan saling menghormati, sehingga memperkuat etika sosial yang berlandaskan nilai-nilai lokal.

Dalam upacara *rambu solo'*, yang merupakan bagian dari tradisi *aluk todolo*, masyarakat Toraja dari berbagai latar belakang agama berkumpul dan bersama-sama merayakan ritual tersebut. Meskipun terdapat perbedaan keyakinan, mereka tetap menunjukkan rasa hormat dan toleransi dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini menjadi ruang inklusif yang mempertemukan berbagai kelompok agama dalam satu peristiwa budaya, memperkuat sikap saling menghargai dan memperkokoh hubungan sosial yang harmonis.

Selain itu, nilai spiritual dalam *aluk todolo* mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan dan alam sekitar. Konsep ini tercermin dalam cara masyarakat Toraja hidup berdampingan dengan berbagai komunitas agama lain tanpa menimbulkan konflik. Etika lokal yang diwariskan melalui *aluk todolo* menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas, yang pada akhirnya berkontribusi dalam menciptakan tatanan sosial yang

mendukung moderasi beragama. Tradisi ini membuktikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi elemen penting dalam membangun sikap moderat, toleran, dan inklusif di tengah keberagaman agama.

Aluk todolo sebagai warisan spiritual masyarakat Toraja mengandung nilai-nilai etis seperti keseimbangan, penghormatan terhadap leluhur, dan tata hubungan sosial yang harmonis. Meskipun tidak lagi menjadi agama resmi, *aluk dodolo* tetap dijalankan dalam bentuk nilai dan praktik sosial, seperti dalam pengaturan ritus adat, penghormatan terhadap alam, dan tata krama komunal. Menurut Sampe Bara Langi: “Nilai-nilai Aluk Todolo masih diterapkan, walaupun tidak semua generasi muda memahami akar spiritualnya. Ini menjadi tantangan besar dalam pewarisan nilai.”

Tampak adanya pergeseran makna di kalangan generasi muda, di mana sebagian besar hanya memahami *aluk todolo* sebagai warisan budaya, bukan sebagai panduan hidup spiritual yang utuh. Hal ini menandakan pentingnya revitalisasi makna dan edukasi budaya kepada generasi penerus.

c) *Rambu Solo'*

Rambu solo', sebagai salah satu upacara adat paling penting di Tana Toraja, mencerminkan solidaritas sosial yang mendalam dan menjadi simbol kuat dari kerja sama lintas agama. Upacara ini bukan sekadar ritual budaya yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga wadah bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam satu peristiwa yang penuh makna. Partisipasi aktif dari kelompok agama yang berbeda dalam *rambu solo'* menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat berperan dalam memperkuat hubungan sosial serta membangun harmoni antarumat beragama. Tradisi ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Toraja tidak hanya hadir dalam ajaran keagamaan, tetapi juga terwujud dalam praktik sosial yang mengutamakan kebersamaan.

Dalam pelaksanaannya, *rambu solo'* melibatkan berbagai pihak, termasuk pemuka agama dari berbagai keyakinan, yang berkolaborasi untuk menyelenggarakan upacara ini dengan penuh rasa saling menghormati. Meskipun upacara ini berakar pada tradisi Toraja, partisipasi komunitas agama lain menunjukkan bahwa nilai-nilai solidaritas dan kerja sama lintas agama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Toraja. Selain itu, upacara ini juga memperlihatkan semangat gotong royong, di mana masyarakat dari berbagai agama bersama-sama menyiapkan dan melaksanakan rangkaian ritual, menunjukkan sinergi antara budaya dan agama dalam menjaga keseimbangan sosial.

Lebih dari sekadar warisan budaya, *rambu solo'* menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dapat dijadikan sebagai instrumen moderasi beragama. Melalui interaksi yang harmonis dalam upacara ini, masyarakat Toraja memperkuat pemahaman pentingnya saling menghormati di tengah perbedaan. Kehadiran elemen lintas agama dalam *rambu solo'* bukan hanya melestarikan

tradisi, tetapi juga menciptakan ruang inklusif yang mempererat hubungan sosial serta memperkuat semangat toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai budaya lokal seperti Tongkonan, *aluk todolo*, dan *rambu solo'* di Tana Toraja tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat moderasi beragama. Tongkonan sebagai simbol persatuan, *aluk todolo* sebagai dasar spiritual yang mengajarkan etika hidup bermasyarakat, dan *rambu solo'* sebagai bentuk solidaritas sosial yang melibatkan kerjasama lintas agama, semuanya berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh saling menghormati. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Toraja membuktikan bahwa budaya lokal dapat menjadi penguat hubungan sosial yang lebih inklusif dan mendukung terciptanya moderasi beragama di tengah keberagaman.

Rambu solo' tetap menjadi sarana nyata kerja sama lintas agama. Dalam praktiknya, keluarga Kristen, Islam, dan penganut *aluk todolo* bahu membahu dalam rangkaian acara pemakaman adat. Keterlibatan tokoh agama dari berbagai kepercayaan menjadi bukti moderasi beragama yang mengakar secara sosial. Dalam wawancaranya, Sampe Bara Langi menyampaikan: "*Kita bisa lihat di setiap rambu solo', ada doa Kristen, kadang tahlilan Islam, dan penghormatan tradisi. Masyarakat Toraja sudah biasa hidup dalam tatanan seperti itu.*"

Namun, ia juga mengingatkan bahwa "*generasi muda mulai melihat upacara ini hanya sebagai tontonan budaya, bukan penghayatan nilai.*" Ini menjadi isyarat bahwa perlu ada komunikasi lintas generasi yang menekankan makna spiritual dan sosial dari tradisi ini.

d) *Unnalli Melo*

Unnalli melo, sebagai ungkapan kebijaksanaan Toraja yang berarti "mengalah untuk menang bersama", merupakan filosofi budaya yang menekankan kompromi dan resolusi damai. Nilai ini berfungsi sebagai prinsip sosial dalam meredakan konflik dan membangun konsensus lintas agama. Dalam praktik komunitas, nilai ini hadir dalam bentuk pengambilan keputusan bersama dan penerimaan terhadap keberagaman perspektif dalam forum adat maupun keagamaan.

Jika dibandingkan dengan nilai-nilai budaya di Parepare (seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi*), nilai-nilai di Tana Toraja seperti Tongkonan, *rambu solo'*, dan *aluk todolo* lebih terlembaga dalam bentuk struktur sosial dan ritus komunal. Sementara Parepare menekankan pada nilai personal dan interpersonal dalam konteks urban, Tana Toraja menghadirkan nilai yang berakar dalam struktur adat dan ritus kolektif, menjadikannya ruang interaksi religius yang terorganisir dalam sistem sosial adat.

e) *Ma'kombongan*

Ma'kombongan adalah tradisi musyawarah adat di Tana Toraja yang berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, pembentukan aturan adat, serta penyelesaian masalah atau konflik secara kolektif. Istilah ini berasal dari kata *kombong* yang berarti “mengumpulkan sedikit demi sedikit hingga banyak” atau “berkumpul untuk membicarakan sesuatu”. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum hadirnya sistem pemerintahan modern, sehingga dapat dipandang sebagai bentuk demokrasi tradisional masyarakat Toraja.

Pelaksanaan *Ma'kombongan* dipimpin oleh *To Parengnge'* (ketua adat) bersama tokoh adat lainnya seperti *Bunga' Lalan*, *Ambek Tondok*, dan dihadiri oleh tokoh agama, pemimpin komunitas, serta masyarakat. Dalam forum ini dibahas pembuatan atau perubahan aturan adat, penegakan sanksi bagi pelanggar, serta langkah-langkah menjaga *karapasan tondok* (kedamaian kampung). Proses ini menekankan asas kebersamaan, keterbukaan, dan keadilan tanpa memandang status sosial atau agama.

Fungsi *Ma'kombongan* sangat luas, mulai dari merencanakan upacara adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'*, menjadi forum penyelesaian konflik tanah atau rumah tangga, hingga menjalankan peradilan adat. Tahapannya meliputi analisis masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif solusi, evaluasi dampak positif dan negatif, serta pengambilan keputusan yang harus disepakati dan ditaati bersama. Dalam pelaksanaannya, *Ma'kombongan* sering disertai ritual adat, termasuk penyembelihan hewan sebagai bagian dari legitimasi keputusan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam *Ma'kombongan* mencakup:

1. Nilai moral: menjaga kehormatan, integritas, dan keteladanan pemimpin adat serta mengajarkan sikap saling menghargai antaranggota masyarakat.
2. Nilai sosial: memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian antarwarga tanpa memandang perbedaan latar belakang.
3. *Karapasan tondok*: menciptakan perdamaian, persatuan, dan harmoni sosial di wilayah adat.
4. Integrasi sosial: memastikan keteraturan hidup bersama melalui kesepakatan norma hukum adat yang mengikat semua pihak.

Dalam konteks moderasi beragama, *Ma'kombongan* menjadi wadah strategis untuk meredakan konflik lintas iman. Forum ini memungkinkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dari berbagai agama untuk duduk bersama, membahas persoalan secara terbuka, dan mencari titik temu demi kepentingan bersama. Prinsip *unnalli melo* (mengalah untuk menang bersama) yang melekat dalam *Ma'kombongan* memperkuat budaya kompromi dan resolusi damai, menjadikannya instrumen penting dalam membangun harmoni antarumat beragama di Tana Toraja.

Kegiatan Lintas Agama:

a) Kolaborasi Lintas Agama dalam Tradisi dan Kegiatan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat di Parepare dan Tana Toraja, kolaborasi lintas agama sering terlihat dalam tradisi dan kegiatan sosial. Pemuka agama dan komunitas lintas agama bekerja sama dalam berbagai kegiatan budaya dan keagamaan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga menjadi wujud nyata dari moderasi beragama. Praktik kolaborasi lintas agama memperlihatkan bahwa agama tidak menjadi penghalang dalam membangun hubungan sosial yang inklusif.

Kolaborasi lintas agama di Parepare dan Tana Toraja terlihat jelas dalam berbagai tradisi dan kegiatan sosial, yang melibatkan pemuka agama dan komunitas dari berbagai keyakinan. Kerja sama ini tidak hanya memperkaya nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga menjadi cerminan dari moderasi beragama. Misalnya, dalam berbagai perayaan atau upacara adat, seperti *rambu solo'* di Tana Toraja atau Idul Fitri di Parepare, anggota masyarakat dari agama yang berbeda sering kali bekerja sama dalam menyiapkan acara, mengatur tempat, dan menyediakan makanan.

Di Parepare, selama peringatan Hari Raya Idul Fitri, umat Muslim sering menerima kunjungan dari umat Kristen dan sebaliknya. Selain itu, dalam kegiatan sosial seperti gotong royong untuk membersihkan tempat ibadah, baik masjid maupun gereja, selalu melibatkan umat dari agama yang berbeda. Di Tana Toraja, *rambu solo'* melibatkan pemuka agama dari berbagai agama yang berbicara bersama dalam upacara adat, memberikan doa bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini memperlihatkan bahwa tradisi lokal dapat mempererat hubungan antar umat beragama dan memperlihatkan moderasi beragama yang diwujudkan melalui kolaborasi lintas agama.

b) Respons Positif terhadap Keterlibatan Agama Lain

Respons masyarakat terhadap keterlibatan agama lain dalam kegiatan budaya lokal menunjukkan sikap positif dan terbuka. Masyarakat Parepare dan Tana Toraja menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap agama lain, yang tercermin dalam sikap mereka yang mendukung partisipasi lintas agama dalam berbagai tradisi dan kegiatan sosial. Sikap ini memperlihatkan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama.

Di Parepare, dalam kegiatan pawai budaya, masyarakat dari berbagai agama turut serta bersama, dengan mengenakan pakaian adat masing-masing, menunjukkan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan. Mereka berpartisipasi aktif dalam menunjukkan kekayaan budaya lokal dan melibatkan agama lain tanpa rasa ragu atau diskriminasi. Di Tana Toraja, dalam upacara *rambu solo'*, masyarakat dari berbagai agama turut hadir, mengucapkan selamat kepada keluarga yang sedang berduka, serta memberikan bantuan dalam bentuk materi dan tenaga. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Toraja memiliki sikap

inklusif terhadap agama lain, yang tercermin dalam respons positif mereka terhadap keterlibatan agama lain dalam kegiatan adat.

c) Simbol Penghormatan Lintas Agama

Dalam upacara adat dan kegiatan sosial, simbol-simbol budaya lokal sering digunakan untuk menunjukkan penghormatan terhadap agama lain. Penggunaan simbol ini tidak hanya sebagai bentuk budaya, tetapi juga sebagai media komunikasi yang mengandung pesan moderasi beragama. Simbol-simbol ini memperlihatkan bagaimana budaya lokal dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun penghormatan terhadap keberagaman agama, menciptakan ruang bagi harmoni sosial.

Dalam upacara *rambu solo*' di Tana Toraja, simbol seperti pohon beringin yang digunakan dalam upacara ini melambangkan kehidupan bersama dan persatuan antara individu-individu yang berbeda, baik dalam aspek agama maupun sosial. Simbol-simbol tersebut tidak hanya menjadi bagian dari ritual budaya, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang keharmonisan dan rasa saling menghormati antar umat beragama. Di Parepare, simbol-simbol budaya seperti keris yang digunakan dalam acara kebudayaan, sering kali dipertunjukkan oleh umat beragama yang berbeda sebagai tanda saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dalam acara-acara ini, simbol-simbol tersebut menjadi perwujudan nyata dari moderasi beragama yang memanfaatkan nilai-nilai budaya untuk menciptakan ruang bagi harmoni sosial.

2.4.4.4 Analisis Konten

Dalam penelitian ini, analisis konten digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, dokumen akademik, dan catatan sejarah budaya lokal yang berkaitan dengan model komunikasi nilai budaya lokal dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal yang relevan dalam membangun moderasi beragama, serta memahami bagaimana budaya lokal berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama.

Analisis konten dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi makna yang terkandung dalam kebijakan pemerintah serta tradisi budaya lokal. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai budaya seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal lainnya dapat memperkuat moderasi beragama, serta bagaimana aspek-aspek tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Parepare dan Tana Toraja. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dokumen. Dokumen yang dianalisis terdiri dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait dengan budaya lokal yang mendukung dalam membangun moderasi beragama

Tabel 2.5. Analisis Dokumen Kebijakan

Dokumen	Tujuan	Aspek Terkait Kerukunan dan Budaya	Implementasi	Hasil yang Diharapkan
AD1 - 1: Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006	Mendorong pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB.	Mengatur dialog antarumat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat sebagai bagian dari kerukunan.	Pembentukan dan pemberdayaan FKUB, pelaksanaan kegiatan sosial lintas agama.	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan pelestarian budaya lokal melalui FKUB.
AD1 - 2: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama	Menguatkan moderasi beragama melalui cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang melindungi martabat manusia serta membangun kemaslahatan umum.	Menyelaraskan hubungan beragama dan berbudaya, melindungi hak keagamaan, serta memperkuat harmoni sosial dan toleransi.	Dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan pendekatan sistematis, melibatkan masyarakat melalui sosialisasi, advokasi, dan program lintas sektor seperti pendidikan, media, dan komunitas agama.	Masyarakat yang rukun, harmonis, dan moderat berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD 19
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama	Memberikan pedoman umum penguatan moderasi beragama melalui indikator, esensi, dan ekosistem moderasi beragama.	Pendidikan, media, dan komunitas masyarakat menjadi ekosistem strategis dalam penguatan moderasi beragama.	Penguatan pendidikan, sosialisasi, literasi media, pengembangan komunitas berbasis toleransi, serta pelibatan lembaga keagamaan dalam membangun harmoni lintas budaya dan agama.	Terciptanya ekosistem moderasi beragama yang melibatkan berbagai pihak secara inklusif dan berkelanjutan.
AD1 - 3: Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2023	Menyusun organisasi dan tata kerja pemerintah lembang untuk mendukung kerukunan dan pengelolaan budaya.	Pengelolaan budaya lokal yang melibatkan kerukunan antar agama dan memperkuat kearifan lokal.	Pengaturan perangkat desa untuk memfasilitasi kegiatan budaya dan sosial yang inklusif.	Peningkatan kerjasama lintas agama di tingkat desa dan pengelolaan budaya yang lebih inklusif.

Dokumen	Tujuan	Aspek Terkait Kerukunan dan Budaya	Implementasi	Hasil yang Diharapkan
AD1 - 4: Peraturan Daerah Kota Parepare No. 7 Tahun 2021	Mengintegrasikan kerukunan antaragama dalam kebijakan pemajuan kebudayaan.	Pemajuan kebudayaan yang mengintegrasikan prinsip kerukunan antar agama dan budaya lokal.	Pelaksanaan festival kebudayaan, program dialog lintas agama.	Terwujudnya masyarakat yang lebih harmonis dan toleran melalui kegiatan budaya yang melibatkan berbagai agama.
AD1 - 5: Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama (KMB)	Memberikan pedoman pembentukan Kampung Moderasi Beragama (KMB) untuk mendukung pembangunan nasional.	Mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam struktur masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis komunitas.	Pembentukan Pokja, identifikasi desa/kelurahan, pelaksanaan program-program moderasi, dan evaluasi keberlanjutan.	Terbentuknya komunitas dengan cara pandang, sikap, dan praktik moderasi beragama yang mendukung harmoni sosial.
AD1 - 6	Peta Jalan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024	Memberikan arah kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama secara nasional dan lokal.	Memperkuat ekosistem moderasi beragama melalui pendidikan, media, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.	Implementasi kebijakan di berbagai sektor dengan dukungan dari komunitas agama, akademisi, dan pemerintah daerah.

Sumber: Data Penelitian, 2024

b) Catatan Sejarah budaya lokal yang mendukung dalam membangun moderasi beragama

Tabel 2.6 Catatan Sejarah Budaya Lokal

Bagian	Sub-Bagian	Isi Utama	Analisis	Relevansi dengan Moderasi Beragama
Bagian Ketiga	<i>Aluk Todolo</i>	Menjelaskan sistem kepercayaan asli Toraja, termasuk ritual, hukum, dan fungsi sosialnya.	<i>Aluk todolo</i> mencerminkan nilai-nilai harmoni sosial yang dapat dijadikan contoh dialog budaya untuk membangun moderasi beragama.	Tradisi <i>aluk todolo</i> menunjukkan bagaimana adat dapat hidup berdampingan dengan agama besar seperti Islam dan Kristen.
	Hukum dan Sanksi dalam <i>Aluk Todolo</i>	Menguraikan norma sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan komunitas dalam sistem <i>aluk todolo</i> .	Norma dalam <i>aluk todolo</i> dapat menjadi pedoman untuk harmoni sosial, mengurangi konflik berbasis adat atau agama.	Sanksi adat sebagai pengendali sosial relevan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat majemuk.
	Adaptasi <i>Aluk Todolo</i> terhadap Agama Besar	Membahas bagaimana <i>aluk todolo</i> beradaptasi dengan ajaran agama seperti Islam, Kristen Protestan, dan Katolik.	Adaptasi ini adalah contoh nyata moderasi budaya dan agama, relevan untuk membangun harmoni di wilayah Parepare dan Tana Toraja.	Harmoni antara adat dan agama mendukung moderasi beragama berbasis budaya lokal.
Bagian Keempat	Tongkonan dan Masyarakat Toraja	Tongkonan sebagai simbol budaya, pusat spiritual, dan sosial masyarakat Toraja.	Tongkonan dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk memperkuat moderasi beragama melalui dialog lintas agama.	Tongkonan sebagai pusat harmoni mencerminkan nilai kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat.
	Fungsi Sosial dan Spiritual Tongkonan	Menjelaskan peran Tongkonan dalam menyatukan keluarga besar dan menciptakan solidaritas komunitas.	Fungsi Tongkonan sebagai ruang komunikasi dapat diaplikasikan dalam dialog lintas agama.	Tongkonan mendukung moderasi sosial dan spiritual, cocok untuk menciptakan harmoni lintas agama.
Bagian Kelima	Adat Istiadat dan Kebudayaan Toraja	Hubungan antara adat istiadat dan agama dalam menciptakan harmoni sosial di Toraja.	Adat istiadat sebagai alat komunikasi memperkuat hubungan antaragama, relevan untuk moderasi di Parepare dan Toraja.	Integrasi adat dan agama menjadi fondasi kerukunan antarumat beragama.

Bagian	Sub-Bagian	Isi Utama	Analisis	Relevansi dengan Moderasi Beragama
Bagian Keenam	Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kalangan Toraja	Membahas contoh praktik kerukunan umat beragama di Toraja, termasuk hubungan antara komunitas Islam, Kristen, dan adat.	Dapat dijadikan studi kasus konkret untuk moderasi beragama berbasis budaya lokal.	Kerukunan berbasis adat relevan untuk menunjukkan bagaimana dialog lintas agama dapat dikelola.
	Kerukunan di Luar Daerah	Kerukunan komunitas Toraja yang tinggal di luar Toraja menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya Toraja tetap terjaga dalam konteks keberagaman agama.	Menunjukkan bagaimana nilai budaya lokal dapat berfungsi di luar wilayah asal untuk moderasi beragama.	Diaspora budaya Toraja relevan untuk melihat bagaimana budaya lokal dapat menyebarkan moderasi di konteks berbeda.
Bagian Ketujuh	Pendapat dan Saran Para Tokoh	Saran praktis dari tokoh-tokoh masyarakat Toraja tentang memperkuat kerukunan hidup antarumat beragama.	Dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi implementasi moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja.	Pandangan tokoh relevan untuk kebijakan moderasi berbasis kearifan lokal.
	Rambu-Rambu Kerukunan Umat Beragama	Prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran.	Pedoman ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja.	Rambu-rambu ini mendukung komunikasi lintas agama yang berkelanjutan.
	Kerukunan Dinamis dan Spesifik	Kerukunan hidup umat beragama yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.	Konsep ini menunjukkan fleksibilitas budaya dalam moderasi, penting untuk wilayah dengan dinamika sosial tinggi seperti Parepare.	Kerukunan dinamis mencerminkan adaptasi nilai budaya dalam menjawab tantangan sosial.

Sumber: Toraja, Tongkonan dan Kerukunan (Baturante, 2019)

Data buku Toraja, Tongkonan dan Kerukunan dapat dipahami bahwa Tongkonan, sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Toraja, dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk dialog lintas agama. Di Tana Toraja, fungsi Tongkonan sebagai simbol harmoni sosial dapat diperkuat untuk mempertemukan berbagai komunitas agama dalam bingkai moderasi beragama. Di sisi lain, konsep ini dapat diadaptasi di Parepare melalui tradisi lokal seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi*, yang juga menekankan nilai-nilai penghormatan dan kebersamaan. Penerapan ini bertujuan untuk menguatkan harmoni sosial sekaligus memperkuat komunikasi lintas agama di kedua wilayah.

Adat *aluk todolo* menunjukkan kemampuan tradisi lokal untuk beradaptasi dengan ajaran agama besar seperti Islam, Kristen, dan Katolik, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara adat dan agama. Sorotan pada proses adaptasi ini relevan untuk mempromosikan moderasi berbasis budaya di Parepare dan Toraja. Hal ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana harmoni budaya dan agama dapat dicapai, sekaligus memperkuat argumen bahwa tradisi lokal dapat berperan penting dalam menciptakan dialog lintas agama.

Pandangan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat yang dibahas dalam buku ini dapat dijadikan panduan untuk menyusun strategi implementasi moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja. Dengan memanfaatkan pandangan tersebut, strategi yang dirancang dapat lebih relevan dan praktis, serta berbasis pada kearifan lokal yang sudah terbukti berhasil menjaga harmoni di masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Prinsip-prinsip kerukunan yang disampaikan dalam buku ini dapat digunakan untuk menciptakan pedoman komunikasi lintas agama yang jelas dan berkelanjutan. Dengan membangun kerangka kerja yang berbasis budaya lokal, rambu-rambu ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan toleran. Penerapan pedoman ini bertujuan untuk membentuk komunikasi lintas agama yang efektif sekaligus memperkuat moderasi beragama berbasis budaya di wilayah Parepare dan Tana Toraja.

2.4.4.5 Analisis Kontekstual

Analisis kontekstual dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya lokal diterapkan dalam membangun moderasi beragama di dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu Parepare (urban) dan Tana Toraja (rural). Perbedaan latar sosial, komposisi demografis keagamaan, dan bentuk komunikasi sosial memengaruhi pendekatan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama.

Di Parepare, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki karakter sebagai kota pelabuhan dengan interaksi sosial yang intens, nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* berperan besar dalam menciptakan ruang dialog sosial antarumat beragama. Sementara itu, di Tana

Toraja yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dan hidup dalam struktur adat yang kental, budaya lokal seperti Tongkonan, *rambu solo'*, dan *aluk todolo* menjadi fondasi dalam memperkuat solidaritas lintas agama melalui partisipasi dalam ritual adat.

Melalui tabel berikut, perbedaan dan kesamaan pendekatan moderasi beragama di kedua wilayah tersebut disajikan secara terstruktur. Tabel ini mencakup elemen budaya lokal, data yang relevan, aplikasi nilai budaya dalam moderasi beragama, relevansi kontekstual, serta strategi implementasi yang dapat diterapkan untuk memperkuat dialog lintas agama.

Tabel 2.7. Analisis Kontekstual

Konteks Wilayah	Elemen Budaya Lokal	Data yang Ditemukan	Implementasi dalam Moderasi Beragama	Relevansi
Urban (Parepare)	<i>Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge</i>	Nilai saling menghormati, memuliakan, dan saling mengingatkan menjadi dasar hubungan sosial.	Digunakan dalam ruang dialog untuk mencegah konflik sosial dan membangun harmoni.	Membantu mengatasi tantangan resistensi keberagaman agama di masyarakat urban.
	<i>Mappalili</i>	Ritual pertanian yang dipimpin oleh pemuka adat dan agama untuk memberkati sawah sebelum musim tanam.	Mempertemukan berbagai elemen masyarakat lintas agama dalam kegiatan kolektif berbasis spiritual.	Menjadi media untuk memperkuat interaksi sosial berbasis agama dan budaya.
	<i>Mappadendang</i>	Tradisi pasca panen yang melibatkan komunitas dalam perayaan dan musik tradisional.	Membangun solidaritas sosial dan memperkuat relasi antarumat beragama melalui keterlibatan bersama.	Menjadi alat pemersatu dalam menjaga nilai gotong royong dan kebersamaan lintas agama.
	<i>Tudang Sipulung</i>	Tradisi musyawarah dalam budaya Bugis yang digunakan untuk membahas isu sosial dan agama.	Menjadi ruang dialog lintas agama untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan membangun kesepahaman sosial.	Relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan integrasi sosial dalam masyarakat multikultural.

Konteks Wilayah	Elemen Budaya Lokal	Data yang Ditemukan	Implementasi dalam Moderasi Beragama	Relevansi
Rural (Tana Toraja)	<i>Rambu Solo'</i>	Tradisi ini melibatkan partisipasi lintas agama dan menjadi simbol penghormatan.	Media komunikasi lintas agama yang memperkuat harmoni sosial melalui tradisi adat.	Solidaritas dalam tradisi adat mendukung moderasi berbasis budaya.
	<i>Rambu Tuka'</i>	Upacara syukuran dalam masyarakat Toraja yang menandai renovasi rumah Tongkonan atau perayaan adat lainnya.	Mengundang berbagai komunitas lintas agama untuk berpartisipasi dalam perayaan budaya.	Meningkatkan interaksi sosial antaragama dan memperkuat nilai kebersamaan.
	<i>Tongkonan</i>	Rumah adat yang digunakan untuk musyawarah dan dialog antaragama.	Dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menciptakan harmoni lintas agama.	Simbol persatuan di tengah keberagaman, relevan untuk dialog berbasis komunitas.
	<i>Aluk Todolo</i>	Tradisi spiritual yang menunjukkan adaptasi terhadap nilai agama besar seperti Kristen dan Islam.	Contoh harmoni budaya dan agama yang dapat direplikasi dalam konteks lain.	Mencerminkan kemampuan tradisi lokal untuk beradaptasi dengan keberagaman agama.

Sumber: Data Penelitian, 2024

Data pada Tabel 2.7 menunjukkan bahwa perbedaan konteks sosial dan budaya antara Parepare dan Tana Toraja memainkan peran penting dalam penerapan nilai budaya lokal untuk membangun moderasi beragama. Di Parepare, moderasi beragama diwujudkan melalui integrasi nilai budaya dalam forum sosial dan kebijakan publik. Nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* membentuk fondasi interaksi yang sopan, saling menghormati, dan inklusif dalam kehidupan perkotaan yang multikultural.

Salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai tersebut adalah melalui *tudang sipulung*, forum deliberasi khas Bugis yang menjadi sarana diskusi sosial dan keagamaan secara setara dan damai. Forum ini melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemerintah kota. Nilai-nilai budaya di Parepare juga diimplementasikan melalui praktik agraris seperti *mappalili* dan

mappadandang, yang melibatkan komunitas lintas agama secara kolektif dan simbolis. Tradisi ini menjadi alat komunikasi spiritual dan sosial untuk memperkuat solidaritas antarumat beragama.

Selain itu, upaya formal dari pemerintah kota yang bekerja sama dengan tokoh agama memperlihatkan bahwa kebijakan publik berbasis budaya lokal dapat menjadi pendekatan efektif untuk menjembatani perbedaan keyakinan, seperti dalam kasus resistensi terhadap pembangunan lembaga pendidikan berbasis agama tertentu. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat dan pejabat lokal, ditegaskan bahwa forum-forum adat dan budaya menjadi alat penting dalam meredam konflik dan membangun kesepahaman (Wawancara, Parepare, Oktober 2024).

Sementara itu, di Tana Toraja, praktik moderasi beragama diwujudkan melalui partisipasi dalam ritual adat yang mengandung nilai solidaritas dan toleransi lintas agama. Tradisi seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'* tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat, tetapi juga menjadi ruang terbuka bagi komunitas dari berbagai latar belakang agama untuk terlibat dalam praktik sosial dan budaya secara kolektif. Rumah adat Tongkonan berperan sebagai pusat pengambilan keputusan dan musyawarah komunitas, di mana nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan diwujudkan secara nyata.

Tradisi spiritual *aluk todolo* menunjukkan kemampuan masyarakat Toraja dalam mempertahankan warisan budaya leluhur sembari beradaptasi dengan ajaran agama-agama besar seperti Kristen dan Islam. Dalam wawancara bersama Sekretaris Umum MUI Tana Toraja, disampaikan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah memeluk agama resmi, nilai-nilai luhur *aluk todolo* tetap hidup dan menjadi pedoman etika sosial: "Kami melihat bahwa *aluk todolo* bukan lagi semata sebagai sistem kepercayaan, tetapi menjadi sumber nilai yang menopang cara hidup Toraja, termasuk dalam membina kerukunan antarumat beragama." (Wawancara, Sampe Bara Langi, November 2024).

Namun demikian, terjadi pergeseran makna di kalangan generasi muda. Sebagian dari mereka mulai menjauh dari pemaknaan spiritual terhadap tradisi adat, dan lebih melihatnya sebagai bagian dari identitas kultural atau pariwisata. Hal ini mengindikasikan perlunya revitalisasi nilai budaya agar tetap menjadi alat komunikasi moderasi yang relevan lintas generasi.

Dalam konteks perbandingan, Parepare menampilkan bentuk moderasi berbasis kebijakan dan forum publik yang terbuka, sedangkan Tana Toraja mengedepankan moderasi berbasis praktik ritual dan simbol budaya yang partisipatif. Perbedaan ini mencerminkan karakter masyarakat masing-masing: masyarakat urban yang cenderung responsif terhadap isu pluralisme dalam ruang publik, dan masyarakat rural yang menjadikan tradisi sebagai sarana untuk merawat keharmonisan sosial.

Dengan demikian, data dan narasi empiris dari kedua wilayah ini memperkuat argumen bahwa komunikasi moderasi berbasis budaya lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah terbukti secara empiris melalui partisipasi

komunitas, ritual adat, serta forum deliberatif yang menumbuhkan toleransi dan harmoni lintas agama.

2.4.4.6 Validasi Data

Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui pendekatan triangulasi sumber dan member checking. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan data dengan membandingkan berbagai sumber informasi serta mengonfirmasi hasil analisis dengan pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang moderasi beragama berbasis budaya lokal di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja.

Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan kebijakan pemerintah, dokumen akademik, dan catatan sejarah budaya lokal guna mengidentifikasi konsistensi informasi mengenai nilai-nilai budaya yang berperan dalam membangun moderasi beragama. Sementara itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi hasil analisis kepada tokoh adat, akademisi, dan pemangku kebijakan lokal, guna memastikan bahwa interpretasi yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan realitas sosial yang mereka alami. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akurasi dalam analisis data, sehingga temuan penelitian dapat dipercaya serta memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam studi komunikasi dan moderasi beragama berbasis budaya lokal.

Validasi data dalam penelitian ini mengintegrasikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami peran budaya lokal dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja. Pendekatan ini menggunakan triangulasi sumber guna memastikan akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan. Fokus utama validasi adalah nilai-nilai dan tradisi budaya seperti *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbi*, *rambu solo'*, *rambu tuka'*, dan *aluk todolo*, yang telah lama menjadi landasan harmoni sosial di wilayah tersebut. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial yang harmonis tetapi juga berperan dalam membangun moderasi lintas agama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya lokal digunakan secara strategis dalam menciptakan dialog antaragama, menyelesaikan konflik, dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat multi agama. Data yang diperoleh dari berbagai metode saling melengkapi, memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai budaya diterapkan dalam kehidupan sosial untuk memperkuat moderasi beragama. Dengan perbedaan karakteristik sosial antara Parepare dan Tana Toraja, analisis ini menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan dan strategi berbasis kearifan lokal yang efektif dalam menciptakan harmoni lintas agama.

Guna memperkuat interpretasi nilai-nilai budaya lokal ini, berbagai perspektif dari informan kunci disertakan melalui kutipan wawancara. Akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama memberikan pandangan yang mendalam, menyoroti pentingnya tradisi lokal dalam membangun komunikasi lintas agama. Kutipan-

kutipan tersebut menggarisbawahi peran strategis nilai-nilai budaya lokal dalam memfasilitasi moderasi beragama di tengah keragaman masyarakat. Selain itu, observasi mencatat praktik nyata di lapangan yang menunjukkan bagaimana nilai budaya lokal diterapkan. Sebagai contoh, nilai *sipakatau* secara aktif digunakan dalam forum FKUB untuk menyelesaikan konflik sosial; tradisi *rambu solo'* melibatkan partisipasi lintas agama dalam mendukung solidaritas komunitas; dan *tudang sipulung* menjadi ruang dialog inklusif untuk menyelesaikan konflik antarumat beragama. Praktik-praktik ini menunjukkan relevansi nilai budaya lokal sebagai alat penyelesaian konflik dan penguatan harmoni sosial. Dokumentasi, dalam bentuk laporan resmi FKUB, media lokal, dan kebijakan pendidikan, juga mendukung peran nilai budaya lokal. Dokumen-dokumen ini memberikan bukti tambahan bahwa nilai-nilai lokal seperti *sipakatau* dan *rambu solo'* telah diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program yang mendukung moderasi beragama. Dokumentasi ini memperkuat argumen bahwa nilai budaya lokal dapat menjadi landasan kebijakan yang berkelanjutan dalam membangun kerukunan lintas agama.

Hasil validasi data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan hubungan erat antara nilai budaya lokal dan moderasi beragama. Analisis ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran budaya lokal di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja sebagai alat strategis dalam membangun harmoni lintas agama.

1. Nilai Budaya Lokal sebagai Fondasi Moderasi Beragama

Budaya lokal di Parepare dan Tana Toraja memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni sosial melalui penerapan nilai-nilai berikut:

- Parepare:

Sipakatau dan *sipakalebbi* menjadi landasan utama dalam menciptakan hubungan sosial yang inklusif. Forum lintas agama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) menggunakan prinsip Sipakatau untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan ruang dialog berbasis penghormatan. Tantangan urbanisasi yang membawa keberagaman agama berhasil diatasi melalui implementasi nilai-nilai ini dalam kebijakan lokal dan pendidikan. Selain itu, budaya *mappalili*, *mappadendang*, dan *tudang sipulung* juga berkontribusi dalam membangun moderasi beragama. *Mappalili*, sebagai ritual pertanian yang melibatkan pemuka adat dan tokoh agama dalam memberkati sawah sebelum musim tanam, menjadi sarana mempertemukan komunitas lintas agama dalam kegiatan kolektif berbasis spiritual. Tradisi ini memperkuat interaksi sosial berbasis agama dan budaya, mencerminkan bagaimana ritual agraris tetap memiliki relevansi dalam masyarakat urban. *Mappadendang*, perayaan pasca panen yang melibatkan musik dan tarian tradisional, memperkuat solidaritas sosial melalui

keterlibatan aktif berbagai kelompok masyarakat tanpa sekat agama. Perayaan ini menjadi alat pemersatu dalam menjaga nilai gotong royong dan kebersamaan lintas agama. *Tudang sipulung* memainkan peran sebagai mekanisme deliberatif yang memungkinkan tokoh agama, *opinion leader*, dan pemerintah setempat untuk membangun pemahaman bersama dalam menghadapi perbedaan agama dan budaya. Sebagai forum musyawarah khas Bugis, *tudang sipulung* memberikan ruang bagi semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi dalam berbagai isu sosial dan agama secara damai.

- Tana Toraja:

Budaya lokal berperan dalam menciptakan moderasi beragama melalui keterlibatan masyarakat dalam ritual adat yang menjadi simbol kebersamaan lintas agama. *Rambu solo'*, tradisi pemakaman khas Toraja, melibatkan partisipasi lintas agama dalam berbagai aspek ritual. Prosesi ini mencerminkan solidaritas antar agama yang memperkuat harmoni sosial. Selain itu, *rambu tuka'*, sebagai upacara syukuran atas renovasi rumah adat Tongkonan, mengundang berbagai komunitas agama untuk berpartisipasi dalam perayaan budaya. Kehadiran lintas agama dalam prosesi ini menunjukkan bagaimana interaksi sosial berbasis adat tetap menjadi perekat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Tongkonan, sebagai rumah adat yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial, juga menjadi ruang musyawarah dan dialog antaragama, mirip dengan peran *tudang sipulung* di Parepare. Dengan fungsi ini, Tongkonan menjadi simbol persatuan dan identitas komunitas dalam menghadapi keberagaman. Sementara itu, tradisi *aluk todolo*, yang pada awalnya merupakan sistem kepercayaan leluhur, menunjukkan bagaimana budaya lokal mampu beradaptasi dengan agama-agama besar seperti Kristen dan Islam tanpa kehilangan identitas dasarnya. Tradisi ini menjadi contoh konkret bahwa nilai budaya dapat hidup berdampingan dengan agama dan bahkan memperkuat kohesi sosial.

Di Parepare maupun di Tana Toraja, budaya lokal bukan hanya sekadar identitas tradisional, tetapi juga berfungsi sebagai alat efektif dalam membangun moderasi beragama. Parepare lebih menekankan integrasi budaya ke dalam kebijakan formal dan ruang dialog inklusif, sedangkan Tana Toraja mengandalkan partisipasi komunitas dalam tradisi adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Implementasi nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, *tudang sipulung*, *mappalili*, dan *mappadandang* di Parepare, serta *rambu solo'*, *rambu tuka'*,

Tongkonan, *aluk todolo* dan *ma'kombongan* di Tana Toraja, menunjukkan bahwa budaya dapat menjadi mekanisme alami dalam menciptakan dialog lintas agama dan memperkuat harmoni dalam masyarakat multikultural.

2. Pendidikan Berbasis Budaya Lokal sebagai Strategi Moderasi
 - Kurikulum Pendidikan:
Integrasi nilai budaya lokal dalam kurikulum, seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi* di Parepare, menciptakan generasi muda yang memahami pentingnya penghormatan lintas agama. Mata kuliah tentang tradisi lokal, seperti *Tongkonan* dan *rambu solo'*, menjadi landasan edukasi moderasi berbasis budaya di institusi pendidikan tinggi.
 - KKN Moderasi Beragama:
Program KKN oleh PTKIN Se-Indonesia yang berlokasi di Tana Toraja melibatkan mahasiswa dalam implementasi nilai-nilai budaya lokal seperti *rambu solo'* dan *Tongkonan*. KKN ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pengalaman dapat mendukung moderasi lintas agama. Selain itu, KKN menjadi sarana kolaborasi antara akademisi dan masyarakat, menghubungkan teori moderasi dengan praktik nyata.
3. Tradisi Lokal sebagai Media Dialog Lintas Agama
Tradisi lokal seperti *tudang sipulung* di Parepare dan *rambu solo'* di Tana Toraja berfungsi sebagai ruang dialog lintas agama. Observasi menunjukkan bahwa tradisi ini memperkuat kerja sama lintas agama dan menciptakan harmoni sosial. Hal ini menjadikan tradisi lokal alat strategis untuk menyampaikan pesan moderasi beragama.
4. Moderasi Beragama melalui Simbol dan Tradisi
Tradisi lintas agama, seperti *rambu solo'*, menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi media komunikasi untuk menyampaikan pesan moderasi beragama. Simbol budaya seperti *Tongkonan* di Tana Toraja dan penghormatan dalam *sipakatau* di Parepare menonjolkan peran budaya lokal sebagai media komunikasi toleransi dan harmoni.
5. Dukungan Kebijakan
Peraturan Daerah (Perda) di Parepare dan Tana Toraja telah mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam program moderasi beragama, seperti pembentukan FKUB dan pelaksanaan festival budaya lintas agama. Kampung Moderasi Beragama menjadi inisiatif penting yang didasarkan pada prinsip moderasi lintas agama berbasis budaya.
6. Perbedaan Konteks Urban dan Rural
 - Parepare (Urban):
Keberagaman yang tinggi memerlukan pendekatan berbasis dialog lintas agama seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi* untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat perkotaan.

Implementasi nilai budaya lokal lebih terintegrasi dalam kebijakan formal, seperti pendidikan dan program sosial.

- Tana Toraja (Rural):

Tradisi adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'* menjadi ruang partisipasi lintas agama yang lebih organik dan berbasis komunitas. Simbol adat seperti Tongkonan menjadi media utama untuk membangun solidaritas sosial.

Hasil validasi data ini menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan alat strategis untuk menciptakan harmoni lintas agama. Di Parepare, pendekatan formal berbasis *sipakatau*, *sipakalebbi* dan pendidikan lokal memperlihatkan efektivitasnya dalam masyarakat urban. Di Tana Toraja, tradisi seperti *rambu solo'* dan Tongkonan berfungsi sebagai simbol kerukunan dalam komunitas rural. Dengan dukungan kebijakan dan pendidikan, nilai budaya lokal dapat menjadi fondasi moderasi beragama yang berkelanjutan. Hal ini memberikan rekomendasi praktis untuk kebijakan berbasis kearifan lokal dalam mempromosikan harmoni sosial lintas agama.

2.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.5.1 Hasil Penelitian

2.5.1.1 Nilai Budaya Lokal di Kota Parepare dalam Membangun Moderasi Beragama

1) Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge*

Nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* merupakan fondasi sosial masyarakat Bugis di Parepare yang telah lama menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai simbol normatif, tetapi masih berfungsi secara aktif dan relevan dalam praktik keseharian masyarakat lintas agama di Parepare.

Sipakatau mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan penuh penghormatan tanpa memandang latar belakangnya. Nilai ini terlihat dalam interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan inklusif, di mana keberagaman agama tidak menjadi penghalang dalam menjalin hubungan yang harmonis. *Sipakalebbi* menekankan pentingnya sikap menghargai tradisi dan praktik keagamaan orang lain. Hal ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat yang tetap menunjukkan rasa hormat terhadap perayaan agama lain dan bersedia berpartisipasi dalam acara sosial yang melibatkan berbagai komunitas keagamaan. *Sipakainge*, di sisi lain, berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang dilakukan secara santun, membantu masyarakat untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga keharmonisan dan menghindari konflik.

Tradisi-tradisi ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk menekan potensi konflik yang

mungkin timbul akibat perbedaan agama atau keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga nilai ini tidak hanya diterapkan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam berbagai forum sosial, termasuk dalam penyelesaian konflik dan musyawarah antar komunitas agama.

Observasi dan wawancara dengan masyarakat Parepare menunjukkan bahwa nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* masih menjadi prinsip utama dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ini terlihat dalam interaksi antar agama, penyelesaian konflik sosial, dan hubungan komunitas yang harmonis. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa sikap menghormati perbedaan kepercayaan merupakan bagian dari etika yang diajarkan sejak kecil di lingkungan keluarga dan komunitas.

Dalam kehidupan sehari-hari, *sipakatau* tercermin dalam cara masyarakat berinteraksi tanpa memandang perbedaan agama. *Sipakalebbi* diwujudkan dalam sikap menghargai tradisi dan praktik keagamaan umat lain, seperti menghadiri undangan acara keagamaan meskipun tidak ikut dalam ibadahnya. Sementara itu, *sipakainge* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang dilakukan dengan cara yang santun, terutama dalam mengingatkan masyarakat untuk menjaga harmoni dan menghindari ujaran kebencian.

Berikut kutipan wawancara yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai ini masih dipraktikkan dalam interaksi sosial dan keagamaan. Seorang tokoh adat di Parepare menekankan bahwa penghormatan terhadap sesama tanpa memandang agama merupakan bagian dari nilai *sipakatau* yang masih diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat:

"Di lingkungan kami, siapa pun yang datang selalu diterima dengan baik, tidak peduli agamanya apa. Yang penting adalah bagaimana kita saling menghormati. Kalau ada tetangga yang berbeda agama mengadakan acara, kami ikut datang sebagai bentuk penghormatan, begitu juga sebaliknya." (Wawancara dengan seorang tokoh adat di Parepare, Agustus 2024)

Sementara itu, seorang pemuka agama menjelaskan bahwa nilai *sipakalebbi* mengajarkan untuk menghargai keyakinan orang lain, baik dalam forum keagamaan maupun dalam interaksi sosial:

"Kami diajarkan sejak kecil untuk tidak meremehkan kepercayaan orang lain. Bahkan, dalam diskusi atau forum keagamaan, kami selalu mendengarkan dengan penuh rasa hormat tanpa langsung menilai atau menyalahkan. Karena dalam budaya kami, saling menghargai lebih penting daripada saling memenangkan pendapat." (Wawancara tokoh agama di Parepare, Agustus 2024)

Selain itu, nilai *Sipakainge* sebagai kontrol sosial yang santun juga masih diterapkan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Seorang tokoh masyarakat menuturkan bahwa mengingatkan seseorang harus dilakukan dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan konflik:

"Kalau ada perbedaan paham, kami tidak langsung menegur dengan keras. Kami lebih memilih mengingatkan dengan cara yang baik dan berbicara secara pribadi. Cara ini lebih efektif karena orang yang diingatkan tidak merasa disalahkan, tapi justru dihargai." (Wawancara tokoh masyarakat, Parepare, Agustus 2024)

Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga nilai ini menjadi dasar bagi pola interaksi yang harmonis, seperti yang disampaikan oleh seorang dosen yang menyoroti bagaimana nilai-nilai ini telah tertanam dalam budaya masyarakat Parepare:

"Ketiga nilai ini selalu kami gunakan dalam interaksi sehari-hari. Saat ada perbedaan dalam komunitas, kami selalu mencoba menyelesaikannya dengan cara baik, tanpa harus ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Ini sudah menjadi bagian dari budaya kami." (Wawancara dosen di Parepare, Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah tokoh agama, pemuka adat, dan masyarakat umum di Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja, ditemukan bahwa budaya lokal masih menjadi faktor utama dalam membangun moderasi beragama. Di Parepare, mayoritas informan menilai bahwa nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* masih dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang tokoh agama Islam di Parepare menyatakan:

"Kami selalu mengajarkan kepada generasi muda bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih, dan budaya Bugis mengajarkan untuk menghormati sesama. Sipakatau sangat penting untuk menjaga hubungan antarumat beragama di Parepare." (Wawancara Tokoh Adat di Parepare, Agustus 2024)

Masyarakat Parepare secara aktif menerapkan nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari budaya yang memperkuat moderasi beragama. *Sipakatau*, yang menekankan penghormatan terhadap sesama, tercermin dalam interaksi sosial di mana masyarakat menyambut siapa saja dengan sikap ramah tanpa membedakan latar belakang agama. Hal ini terlihat dalam kebiasaan saling mengunjungi saat hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri dan Natal, yang menjadi simbol kebersamaan tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. *Sipakalebbi*, yang menitikberatkan pada penghargaan terhadap keberagaman, juga terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penggalangan dana dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan tanpa memandang perbedaan agama. Saat perayaan keagamaan seperti

Maulid Nabi dan Natal, masyarakat berbagi makanan dengan tetangga dari latar belakang agama yang berbeda sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masing-masing.

Sipakainge, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, menjadi instrumen efektif dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Dalam penyelesaian perbedaan pendapat, masyarakat Parepare lebih memilih musyawarah melalui pendekatan budaya, seperti dalam forum *sudang sipulung*, yang menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelesaikan permasalahan sosial secara damai. Tokoh adat dan pemuka agama berperan aktif dalam menengahi perselisihan dengan pendekatan yang menghargai perasaan orang lain, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare mengatakan bahwa:

"Nilai-nilai seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi* masih kuat dipraktikkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam kegiatan lintas agama. Misalnya saat Natal dan Idul Fitri, masyarakat saling mengunjungi dan memberikan penghormatan antarumat beragama." (Wawancara, Kepala Kemenag Parepare, Mei 2025)

Penemuan ini memperkuat bahwa nilai *sipakatau* sebagai sikap saling menghormati masih menjadi modal sosial dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Demikian pula, *sipakalebbi* (memuliakan) dan *sipakainge* (saling mengingatkan) menjadi mekanisme sosial yang aktif untuk menjaga ketertiban, kesopanan, dan mencegah konflik di masyarakat urban yang plural.

Penerapan *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* serta *tudang sipulung* dalam kehidupan sosial masyarakat membentuk pola interaksi yang inklusif dan harmonis, mencegah eksklusivisme keagamaan, serta memperkuat solidaritas komunitas. Ketiga nilai ini berfungsi sebagai strategi sosial dalam membangun moderasi beragama, di mana penghormatan, penghargaan, dan kesadaran sosial menjadi prinsip utama dalam menjaga hubungan lintas agama. Keberlanjutan nilai-nilai ini dalam sistem sosial masyarakat Parepare membuktikan bahwa kearifan lokal bukan hanya sekadar konsep moral, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang aktif dalam membangun toleransi dan keberagaman yang berkelanjutan.

Dengan mempertahankan nilai-nilai ini, masyarakat Parepare telah membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, di mana dialog, musyawarah, dan kesepahaman menjadi strategi utama dalam menyelesaikan perbedaan. Penerapan nilai-nilai ini juga diajarkan sejak dini dalam lingkungan keluarga dan pendidikan, menanamkan kesadaran pentingnya menjaga kebersamaan dalam keberagaman.

Oleh karena itu, *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* bukan hanya bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis-Makassar, tetapi juga pilar utama dalam membangun moderasi beragama yang lebih kuat dan berkelanjutan di Parepare.

Tabel 2.8. Konstruksi Nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi* dan *Sipakainge*

Nilai Budaya	Deskripsi	Dampak	Implementasi
<i>Sipakatau</i>	Mengajarkan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama.	Mencegah eksklusivisme keagamaan dan meningkatkan interaksi sosial lintas agama.	Menyambut tetangga yang berbeda agama dalam perayaan hari raya keagamaan; tidak melakukan ujaran kebencian terhadap kelompok agama lain.
<i>Sipakalebbi</i>	Mengutamakan penghargaan terhadap keberagaman dan kepercayaan orang lain.	Meningkatkan rasa kebersamaan dan mencegah konflik berbasis agama.	Menghadiri undangan acara keagamaan komunitas lain tanpa harus berpartisipasi dalam ibadahnya; berbagi makanan saat perayaan hari raya berbeda.
<i>Sipakainge</i>	Berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dengan pendekatan yang santun.	Mengurangi potensi ketegangan sosial dan menciptakan harmoni dalam keberagaman.	Menyelesaikan perbedaan pendapat terkait agama melalui musyawarah; mengingatkan secara halus ketika ada ujaran yang berpotensi memecah belah.

Sumber: Data Penelitian, 2024

2) Tradisi *Mappalili* sebagai Model Integrasi Budaya dan Moderasi Beragama

Tradisi *mappalili* merupakan ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk permohonan kepada alam untuk keberkahan panen yang baik. Ritual ini dipimpin oleh pemimpin adat yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi dan harmoni sosial. Berdasarkan dokumentasi sejarah dan wawancara dengan tokoh adat di Parepare, *mappalili* tidak hanya berfungsi sebagai ritual pertanian, tetapi juga sebagai media integrasi budaya dan agama. Berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki latar belakang kepercayaan berbeda, turut serta dalam ritual ini sebagai bentuk kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya lokal.

Observasi menunjukkan bahwa dalam setiap pelaksanaan *mappalili*, masyarakat yang beragama Islam, Hindu, Kristen, dan pemeluk kepercayaan lokal sama-sama ikut berpartisipasi dalam berbagai prosesi, mulai dari doa bersama hingga simbolisasi penghormatan terhadap alam. Tradisi ini menegaskan bahwa

keberagaman bukan menjadi penghalang dalam membangun kebersamaan, tetapi justru menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat yang berbasis pada nilai harmoni dan gotong royong.

Kutipan wawancara menunjukkan bagaimana *mappalili* tetap relevan dalam membangun keharmonisan lintas agama di masyarakat Parepare. Seorang tokoh adat menegaskan bahwa:

"Ritual ini tidak pernah membedakan siapa yang boleh dan tidak boleh ikut serta. Setiap warga, apapun agamanya, boleh berpartisipasi dalam prosesi. Ini bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga bentuk kebersamaan dalam kehidupan bertani dan sosial." (Wawancara tokoh adat, Parepare, September 2024)

Sementara itu, seorang pemuka agama Islam menyampaikan bahwa:

"*Mappalili* menjadi ruang di mana kita bisa melihat bagaimana budaya dan agama dapat berjalan berdampingan. Kami tidak menganggapnya sebagai ibadah, tetapi sebagai warisan budaya yang tetap perlu kita hormati." (Wawancara tokoh agama Islam, Parepare, September 2024)

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa peran *Bissu* sebagai pemimpin adat tetap dipertahankan, meskipun dalam beberapa dekade terakhir terjadi perubahan sosial yang mempengaruhi eksistensi mereka. Dalam dokumentasi ritual *mappalili* tahun 2023, terlihat bahwa meskipun jumlah *Bissu* semakin berkurang, masyarakat tetap melestarikan ritual ini dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka agama, menunjukkan adanya adaptasi budaya terhadap perkembangan zaman.

Dokumentasi dari beberapa upacara *mappalili* di Watang Bacukiki menunjukkan bahwa masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda tetap berpartisipasi dalam ritual ini, baik sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur maupun sebagai ekspresi solidaritas sosial. Prosesi ritual ini dipimpin oleh pemuka adat, dengan peran penting *Bissu* yang masih dipertahankan meskipun mengalami adaptasi di tengah perubahan sosial. Dalam setiap pelaksanaan *mappalili*, masyarakat berkumpul di tengah sawah, mengelilingi dua ekor sapi sebagai bagian dari simbol permohonan kesuburan tanah.

Kehadiran masyarakat lintas agama dalam prosesi *mappalili* semakin mempertegas fungsi tradisi ini sebagai media integrasi budaya dan moderasi beragama. Dokumentasi menunjukkan suasana kebersamaan yang tercipta selama ritual berlangsung, di mana peserta yang berasal dari komunitas Islam, Kristen, dan kepercayaan lokal mengikuti prosesi tanpa sekat agama. Dalam wawancara dengan tokoh adat, dijelaskan bahwa *mappalili* bukan hanya sekadar ritual agraris, tetapi juga menjadi perwujudan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi.

Seorang tokoh adat menegaskan bahwa tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk tetap bekerja sama dan menghormati satu sama lain tanpa memandang perbedaan kepercayaan, sebagaimana disampaikan dalam kutipan wawancara:

"Kami percaya bahwa *Mappalili* adalah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling bekerja sama tanpa melihat perbedaan agama. Semua orang bisa ikut serta, karena ini adalah ritual kebersamaan." (Wawancara Tokoh Adat, September 2024)

Kegiatan budaya lainnya seperti *mappalili* (ritual tanam) dan *mappadandang* (ritual panen) menunjukkan keterlibatan berbagai komunitas agama dalam satu ruang budaya yang inklusif. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menciptakan interaksi lintas iman yang konkret.

"Saat *mappalili*, tokoh agama Islam hadir bersama tokoh adat. Itu momen sakral, semua masyarakat terlibat, tidak melihat agamanya apa, karena yang dihormati adalah tanah dan kehidupan." (Wawancara, Kepala Kemenag Parepare, Mei 2025)

Dengan demikian, hasil temuan ini secara empiris menunjukkan bahwa nilai budaya lokal tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar hidup dan terus dijalankan sebagai instrumen komunikasi sosial yang membentuk moderasi beragama di Parepare.

Tradisi *mappalili* merupakan ritual adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Bugis sebagai bentuk permohonan kepada alam untuk keberkahan panen. Lebih dari sekadar prosesi pertanian, *mappalili* berfungsi sebagai model integrasi budaya dan moderasi beragama karena melibatkan berbagai komunitas lintas agama dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dari latar belakang kepercayaan yang berbeda menjadikan tradisi ini sebagai ruang inklusif yang memperkuat nilai kebersamaan dan toleransi. Keikutsertaan tokoh adat dan pemuka agama dalam ritual ini semakin mempertegas peran *mappalili* sebagai sarana membangun harmoni sosial tanpa mengorbankan identitas agama atau budaya tertentu. Keberlanjutan tradisi ini, meskipun mengalami beberapa adaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, tetap mempertahankan esensi kebersamaan yang menjadi perekat dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Penerapan *mappalili* sebagai alat moderasi beragama tercermin dalam keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, baik Muslim, Kristen, maupun penganut kepercayaan lokal, dalam prosesi ritual ini. Keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa *mappalili* bukan sekadar

praktik budaya, tetapi juga simbol solidaritas sosial yang melampaui batas agama. Meskipun peran *Bissu* mengalami pergeseran akibat perubahan sosial dan agama, masyarakat tetap melestarikan esensi ritual ini dengan melibatkan tokoh adat serta pemuka agama sebagai bagian dari prosesi. Adaptasi ini mencerminkan bagaimana budaya dan agama dapat berjalan berdampingan tanpa saling menegasikan, melainkan saling melengkapi sebagai bagian dari identitas sosial yang inklusif dan harmonis.

Dalam praktiknya, *mappalili* tidak hanya menjadi sarana ritual pertanian, tetapi juga menjadi ruang musyawarah dan interaksi sosial. Prosesi ini memperlihatkan bagaimana gotong royong menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara adat dan agama. Selain itu, partisipasi kolektif dalam *mappalili* menunjukkan bahwa nilai kebersamaan lebih kuat daripada perbedaan kepercayaan, menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Dengan tetap mempertahankan unsur-unsur utama seperti penghormatan terhadap simbol budaya dan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat, *mappalili* menjadi bukti bahwa budaya lokal dapat menjadi media efektif dalam memperkuat integrasi sosial dan membangun moderasi beragama.

Relevansi *mappalili* dalam konteks modern semakin terlihat dari bagaimana masyarakat tetap mempertahankan ritual ini sebagai bagian dari identitas budaya, meskipun terdapat pengaruh agama dan modernisasi. Keberlanjutan tradisi ini menunjukkan bahwa budaya lokal mampu menjadi mekanisme alami dalam membangun moderasi beragama, di mana perbedaan keyakinan tidak menjadi faktor pemisah, tetapi justru menjadi bagian dari identitas sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, *Mappalili* bukan hanya warisan budaya, tetapi juga strategi sosial dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama dalam kehidupan masyarakat Parepare.

Tabel 2.9 berikut menyajikan konstruksi tradisi *mappalili* sebagai salah satu model integrasi budaya dan moderasi beragama di masyarakat Bugis. Tradisi ini bukan hanya sekadar ritual adat untuk memohon keberkahan panen, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pertemuan lintas iman yang mempererat hubungan sosial. Melalui keterlibatan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat dari berbagai latar kepercayaan, *mappalili* menghadirkan harmoni antara nilai budaya lokal dan ajaran agama. Meskipun mengalami adaptasi seiring perubahan sosial, tradisi ini tetap mempertahankan esensi kebersamaan, sehingga menjadi contoh nyata bahwa budaya dan agama dapat berjalan beriringan dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan toleran.

Tabel 2.9. Konstruksi Tradisi *Mappalili* sebagai Model Integrasi Budaya dan Moderasi Beragama

Aspek	Deskripsi	Dampak	Implementasi
<i>Mappalili</i>	Ritual adat masyarakat Bugis sebagai permohonan untuk panen yang baik.	Menghubungkan komunitas lintas agama melalui ritual budaya yang inklusif.	Masyarakat Muslim, Kristen, Hindu, dan penganut kepercayaan lokal ikut serta dalam prosesi <i>mappalili</i> .
Keterlibatan Masyarakat Lintas Agama	Semua individu, tanpa memandang agama, diizinkan berpartisipasi dalam prosesi ritual.	Menumbuhkan kebersamaan dan saling menghormati dalam keberagaman.	Ritual <i>mappalili</i> melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat dari berbagai kepercayaan.
Peran Tokoh Adat dan Pemuka Agama	Pemuka adat memimpin ritual, sedangkan pemuka agama terlibat dalam upaya integrasi budaya dan agama.	Memungkinkan terjalinnya hubungan yang harmonis antara budaya lokal dan ajaran agama.	Tokoh adat memimpin ritual, sementara pemuka agama mengedukasi tentang nilai-nilai persatuan dalam keberagaman.
Keberlanjutan dan Adaptasi	Meskipun terjadi perubahan sosial, esensi <i>mappalili</i> tetap dipertahankan dengan beberapa adaptasi.	Menunjukkan bahwa budaya dan agama dapat berjalan berdampingan tanpa saling menegasikan.	Beberapa prosesi ritual mengalami modernisasi, tetapi tetap mempertahankan nilai inti kebersamaan.

Sumber: Data Penelitian, 2024

3) *Mappadendang* sebagai Model Integrasi Budaya dan Moderasi Beragama

Tradisi *Mappadendang* merupakan ritual pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat Bugis sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Ritual ini melibatkan musik tradisional, tarian, serta prosesi adat yang dipimpin oleh tokoh adat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat di Parepare, *mappadendang* bukan hanya sekadar perayaan panen, tetapi juga menjadi media untuk membangun kebersamaan lintas agama dan sosial.

Observasi menunjukkan bahwa dalam setiap perayaan *mappadendang*, masyarakat dari berbagai latar belakang agama Islam, Kristen, Hindu, dan kepercayaan lokal ikut serta dalam prosesi. Mereka berpartisipasi dalam permainan musik tradisional, tarian, serta jamuan

makan bersama yang menandakan solidaritas sosial. Dalam wawancara dengan tokoh adat, ditekankan bahwa:

"*Mappadendang* bukan hanya milik satu kelompok saja, ini adalah tradisi bersama yang diwariskan dari nenek moyang kita. Tidak ada yang bertanya apa agamamu, semua ikut bersama untuk merayakan panen sebagai berkah." (Wawancara dengan tokoh adat, Parepare, September 2024)

Di sisi lain, pemuka agama Islam di Parepare juga menegaskan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan justru menjadi media untuk mempererat hubungan sosial antarumat beragama:

"Kami melihat *mappadendang* sebagai bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Ini bukan ritual keagamaan, tetapi bentuk kebersamaan yang meneguhkan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat." (Wawancara dengan tokoh agama Islam, Parepare, September 2024)

Selain itu, dalam dokumentasi perayaan *mappadendang* di Parepare tahun 2023, terlihat bahwa keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama semakin kuat dalam menjaga nilai-nilai moderasi beragama melalui budaya. Meski terjadi perubahan sosial dan modernisasi, *mappadendang* tetap dipertahankan sebagai ruang interaksi sosial yang memperkuat nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* tiga konsep penting dalam budaya Bugis yang mengajarkan tentang saling menghormati, memuliakan, dan mengingatkan satu sama lain.

Dokumentasi dari berbagai perayaan *mappadendang* juga menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat lintas agama, yang berkumpul untuk bersama-sama merayakan panen sebagai simbol kehidupan yang harmonis. Hal ini menegaskan bahwa *mappadendang* bukan hanya sebuah ritual budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat keterhubungan antar umat beragama. Seorang tokoh adat menambahkan bahwa:

"Dalam setiap perayaan, kita selalu mengingat bahwa yang terpenting adalah kebersamaan. Tidak ada perbedaan antara Muslim, Kristen, atau Hindu di sini. Semua bergembira bersama sebagai satu masyarakat." (Wawancara dengan tokoh adat, Parepare, September 2024)

Keberlanjutan *mappadendang* dalam konteks modern menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menjadi alat efektif dalam membangun moderasi beragama. Dengan tetap dipertahankannya unsur-unsur utama seperti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, penghormatan terhadap simbol-simbol budaya, serta partisipasi aktif

dalam prosesi sosial, *mappadendang* menjadi model integrasi budaya yang menunjukkan bahwa keberagaman dapat dikelola dalam harmoni.

Tabel berikut menguraikan berbagai aspek dalam *tudang sipulung* serta perannya dalam membangun moderasi beragama.

Tabel 2.10 Konstruksi Tradisi *Mappadendang* sebagai Model Integrasi Budaya dan Moderasi Beragama

Aspek	Deskripsi	Dampak	Implementasi
<i>Mappadendang</i>	Ritual pasca panen masyarakat Bugis sebagai ungkapan syukur atas hasil panen.	Menghubungkan komunitas lintas agama melalui perayaan budaya yang inklusif.	Masyarakat Muslim, Kristen, dan kepercayaan lokal berpartisipasi dalam prosesi bersama.
Keterlibatan Masyarakat Lintas Agama	Semua individu, tanpa memandang agama, dapat berpartisipasi dalam perayaan.	Menumbuhkan kebersamaan dan saling menghormati dalam keberagaman.	Ritual <i>Mappadendang</i> melibatkan tokoh adat, pemuka agama, serta masyarakat dari berbagai kepercayaan.
Peran Tokoh Adat dan Pemuka Agama	Tokoh adat memimpin ritual, sementara pemuka agama terlibat dalam memberikan perspektif kebersamaan.	Memungkinkan hubungan harmonis antara budaya lokal dan nilai agama.	Pemuka agama Islam dan Kristen turut serta dalam mendukung nilai kebersamaan dalam perayaan.
Keberlanjutan dan Adaptasi	Meskipun mengalami perubahan sosial, esensi <i>Mappadendang</i> tetap dipertahankan.	Menunjukkan bahwa budaya dan agama dapat berjalan berdampingan tanpa saling menegasikan.	Beberapa prosesi mengalami modernisasi, tetapi tetap mempertahankan nilai inti kebersamaan.

Sumber: Data Penelitian, 2024

4) *Tudang Sipulung* sebagai Ruang Dialog dan Resolusi Konflik

Tradisi *tudang sipulung* merupakan forum musyawarah yang telah lama digunakan oleh masyarakat Bugis sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, termasuk konflik yang melibatkan perbedaan agama. Observasi terhadap beberapa pertemuan *tudang sipulung* di Parepare menunjukkan bahwa tradisi ini tetap dipraktikkan di berbagai komunitas sebagai bentuk penyelesaian konflik berbasis budaya. Dalam beberapa kasus, *tudang sipulung* digunakan sebagai mekanisme mediasi untuk menangani ketegangan

antar umat beragama, baik yang disebabkan oleh perbedaan praktik ibadah maupun kesalahpahaman dalam kehidupan sosial. Wawancara dengan beberapa pemuka agama dan tokoh adat menunjukkan bahwa *tudang sipulung* bukan hanya sekadar pertemuan adat, tetapi juga berfungsi sebagai wadah komunikasi yang inklusif, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk berbicara dan mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Observasi lain menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui forum ini karena mengutamakan pendekatan dialog dan kebersamaan, dibandingkan dengan metode formal seperti proses hukum yang sering kali memperburuk ketegangan sosial. *Tudang sipulung* memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan perspektif mereka dengan cara yang lebih santun dan berbasis musyawarah, sehingga penyelesaian masalah yang dihasilkan lebih bersifat restoratif daripada retributif. Tradisi ini juga telah berkembang dari sekadar forum adat menjadi sarana strategis dalam penguatan moderasi beragama, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat sipil.

Kutipan wawancara menunjukkan bagaimana *tudang sipulung* menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. Seorang pemuka agama menyatakan:

"Dalam *tudang sipulung*, kita diajarkan untuk mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini yang membuat forum ini tetap relevan dalam menyelesaikan perbedaan." (Wawancara dengan tokoh agama, Parepare, September 2024)

Selain itu, seorang tokoh adat menekankan bahwa pendekatan musyawarah dalam *tudang sipulung* lebih efektif daripada jalur hukum, karena lebih menekankan pemulihan hubungan sosial:

"Kita tidak perlu membawa masalah kecil ke pengadilan jika bisa diselesaikan dengan baik dalam pertemuan ini. *Tudang sipulung* adalah cara kita menjaga hubungan tanpa perlu menimbulkan konflik yang lebih besar." (Wawancara dengan tokoh adat, Parepare, September 2024)

Tudang sipulung merupakan forum musyawarah tradisional masyarakat Bugis yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyelesaian konflik berbasis budaya. Forum ini menciptakan ruang diskusi yang inklusif, memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk berdialog secara terbuka dan mencari solusi atas perbedaan dengan pendekatan yang damai dan partisipatif. Observasi terhadap beberapa pertemuan *Tudang sipulung* menunjukkan bahwa masyarakat dapat duduk bersama dalam satu

forum tanpa adanya dominasi kelompok tertentu. Dalam salah satu pertemuan yang membahas kesalahpahaman mengenai pendirian tempat ibadah, terlihat bahwa forum ini mampu meredakan ketegangan dengan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Dokumentasi juga menunjukkan bahwa suasana diskusi berlangsung dengan penuh penghormatan dan sikap saling mendengarkan, sehingga memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama.

Lebih jauh, pengaruh nilai budaya terhadap generasi muda juga divalidasi melalui wawancara dengan tokoh agama dan tokoh pendidikan. Meski terdapat pengaruh globalisasi, nilai-nilai budaya tersebut masih ditanamkan melalui institusi keluarga dan pendidikan.

"Kami tanamkan dari kecil, kalau bertemu orang tua harus hormat, harus tahu aturan duduk, bicara. Nilai itu disebut sipakatau. Sekarang memang berbeda, tapi anak-anak masih bisa paham asal diarahkan." (Wawancara, Kepala MTsN 1 Tana Toraja, November 2024)

"Meskipun mereka hidup di era digital, anak muda Parepare tetap menunjukkan penghargaan terhadap nilai lokal, terutama dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ziarah makam, atau perayaan keagamaan lintas umat." (Wawancara, Kepala Kemenag Parepare, Mei 2025)

Dalam praktiknya, nilai-nilai ini diterapkan secara aktual, seperti dalam *tudang sipulung*, forum musyawarah khas Bugis yang digunakan untuk membahas berbagai isu sosial, termasuk moderasi beragama. Forum ini melibatkan tokoh lintas agama, pemerintah, dan masyarakat dalam proses deliberasi untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun kesepakatan lintas iman.

Sebagai media komunikasi berbasis budaya, *tudang sipulung* memiliki peran strategis dalam membangun toleransi dan menyelesaikan konflik sosial. Pendekatan musyawarah yang diterapkan memungkinkan masyarakat mengatasi ketegangan sosial dengan cara yang lebih damai dan konstruktif. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dicapai melalui forum ini terbukti lebih menguntungkan semua pihak dibandingkan dengan pendekatan hukum yang cenderung berorientasi pada kemenangan salah satu pihak. Keberlanjutan *tudang sipulung* dalam konteks modern menunjukkan bahwa mekanisme ini tetap relevan dalam menjaga harmoni sosial, terutama di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks.

Forum ini juga mengandalkan keterlibatan berbagai pihak dalam proses diskusi, termasuk tokoh agama, pemimpin adat, perwakilan masyarakat, dan pemerintah daerah, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Dalam prosesnya, penyelesaian konflik berbasis dialog menjadi aspek utama, di mana setiap individu memiliki kesempatan menyampaikan pandangannya tanpa rasa takut atau tekanan. Pendekatan ini menciptakan suasana kondusif bagi pencarian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan.

Selain sebagai ruang resolusi konflik, *tudang sipulung* juga memiliki peran penting dalam penguatan kesepahaman antarumat beragama. Forum ini mendorong masyarakat untuk memahami perspektif masing-masing, sehingga menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sosial. Kesepahaman ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun pembangunan komunitas. Dengan terus dipraktikkan dan dikembangkan, *tudang sipulung* menjadi model pengelolaan keberagaman agama yang lebih damai dan berkelanjutan.

Sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya, *tudang sipulung* menegaskan bahwa moderasi beragama dapat dibangun tanpa mengorbankan nilai-nilai keyakinan masing-masing, melainkan melalui pemahaman bersama yang lebih mendalam. Dengan menekankan musyawarah sebagai strategi utama, *tudang sipulung* bukan hanya sekadar warisan tradisional, tetapi juga telah berkembang menjadi mekanisme sosial yang relevan dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Keberadaannya membuktikan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perbedaan agama dan budaya.

Tabel 2.11 memaparkan konstruksi tradisi *tudang sipulung* sebagai salah satu mekanisme kearifan lokal masyarakat Bugis dalam menciptakan ruang dialog dan resolusi konflik, termasuk konflik berbasis agama. Sebagai forum musyawarah tradisional, *tudang sipulung* memberikan kesempatan setara bagi semua pihak untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Tradisi ini tidak hanya menekankan pendekatan dialogis, tetapi juga melibatkan peran strategis pemuka agama, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat guna memastikan keputusan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan bersama. Dengan orientasi pada musyawarah dan kesepakatan kolektif, *tudang sipulung* menjadi sarana efektif untuk mencegah eskalasi konflik, memperkuat kohesi sosial,

serta menumbuhkan pemahaman lintas agama di wilayah multiagama seperti Parepare.

Tabel 2.11 Konstruksi Tradisi *Tudang Sipulung* sebagai Ruang Dialog dan Resolusi Konflik

Aspek	Deskripsi	Dampak	Implementasi
Makna <i>Tudang Sipulung</i>	Forum musyawarah tradisional yang digunakan masyarakat Bugis untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk konflik berbasis agama.	Menciptakan ruang komunikasi yang inklusif bagi semua kelompok agama untuk menyelesaikan perbedaan secara damai.	<i>Tudang sipulung</i> digunakan untuk meredakan ketegangan terkait pendirian tempat ibadah di Parepare.
Pendekatan Dialogis	Semua pihak memiliki hak untuk berbicara, mendengar, dan mencari solusi bersama.	Mencegah konflik agama yang eskalatif dengan pendekatan musyawarah.	Masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik agama melalui diskusi terbuka dibandingkan jalur hukum.
Keterlibatan Pemuka Agama dan Tokoh Adat	Tokoh agama, pemimpin adat, dan perwakilan masyarakat ikut serta dalam proses dialog.	Memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama tanpa dominasi satu kelompok tertentu.	Tokoh agama dan pemuka adat memimpin forum diskusi untuk menyelesaikan ketegangan sosial antarumat beragama.
Dampak Sosial	<i>Tudang Sipulung</i> mendorong penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan membangun pemahaman lintas agama.	Menguatkan kohesi sosial dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam masyarakat multiagama.	Forum ini dijadikan strategi penyelesaian konflik dalam kebijakan lokal terkait kerukunan umat beragama.

Sumber: Data Penelitian, 2024

2.5.1.2 Nilai Budaya Lokal di Kabupaten Tana Toraja dalam Membangun Moderasi Beragama

Budaya lokal di Tana Toraja memiliki kekayaan nilai yang tidak hanya menjadi identitas etnis, tetapi juga memainkan peran penting dalam merawat harmoni antarumat beragama. Nilai-nilai ini tercermin dalam Tongkonan (rumah adat), *aluk todolo* (kepercayaan leluhur), *ma'kombongan*, serta tradisi *rambu*

solo' dan *rambu tuka'*, yang semuanya masih berfungsi aktif dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.

1) Tongkonan sebagai Simbol Moderasi dan Harmoni Sosial

Tongkonan, rumah adat masyarakat Toraja, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial yang menjadi simbol persatuan dan keharmonisan. Observasi terhadap kehidupan masyarakat di Tana Toraja menunjukkan bahwa Tongkonan masih memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya, terutama dalam konteks moderasi beragama. Wawancara dengan beberapa tokoh adat dan pemuka agama mengungkapkan bahwa Tongkonan tidak hanya menjadi tempat tinggal keluarga besar, tetapi juga menjadi ruang kolektif bagi berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Dalam kehidupan masyarakat Toraja, setiap Tongkonan memiliki peran yang melekat dalam struktur sosial, di mana setiap keluarga besar berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama, mengadakan ritual adat, serta memperkuat hubungan kekeluargaan tanpa memandang perbedaan agama. Observasi lebih lanjut menunjukkan bahwa di dalam komunitas yang lebih luas, Tongkonan menjadi pusat komunikasi dan interaksi sosial, di mana diskusi penting tentang kehidupan bermasyarakat dan pengambilan keputusan kolektif dilakukan secara musyawarah. Hal ini menjadikan Tongkonan sebagai wadah yang efektif dalam memfasilitasi dialog lintas agama, mencerminkan bagaimana budaya lokal dapat berfungsi sebagai alat dalam membangun moderasi beragama.

Kutipan wawancara dengan seorang tokoh adat menegaskan bahwa Tongkonan tidak sekadar bangunan fisik, tetapi juga lambang kebersamaan dalam masyarakat Toraja:

"Tongkonan adalah tempat kami berkumpul, berdiskusi, dan menyelesaikan perbedaan. Di sini, tidak ada batasan agama atau kepercayaan, karena yang utama adalah menjaga hubungan baik dalam keluarga dan masyarakat." (Wawancara dengan tokoh adat, Tana Toraja, November 2024)

Seorang anggota komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial menjelaskan bahwa Tongkonan tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk dalam urusan keagamaan dan sosial:

"Kami sering menggunakan Tongkonan untuk kegiatan bersama, mulai dari rapat keluarga besar, pertemuan adat, hingga acara keagamaan. Bagi kami, ini adalah tempat yang menghubungkan semua generasi dan latar belakang agama." (Wawancara dengan masyarakat Toraja, November 2024)

Dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa Tongkonan memiliki nilai filosofis yang berkaitan erat dengan konsep kebersamaan dan

keharmonisan sosial. Catatan sejarah mencatat bahwa dalam setiap acara adat di Tongkonan, masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan sosial terlibat aktif tanpa adanya sekat yang membatasi peran mereka. Foto-foto yang terdokumentasi dalam berbagai acara menunjukkan bagaimana Tongkonan tetap menjadi pusat kehidupan sosial, dengan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Keberadaan Tongkonan di setiap komunitas juga menegaskan bahwa nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebersamaan telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Toraja selama berabad-abad.

Buku "Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja" menjelaskan bahwa Tongkonan telah lama menjadi simbol persatuan masyarakat Toraja, di mana berbagai perbedaan kepercayaan dapat disatukan dalam ruang sosial yang sama. Sejarah mencatat bahwa dalam berbagai upacara adat yang dilakukan di Tongkonan, kehadiran masyarakat lintas agama tidak hanya diterima, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari tradisi komunitas yang lebih luas. Ritual adat yang digelar di Tongkonan sering kali melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama, memperlihatkan bahwa identitas budaya tidak bertentangan dengan keberagaman agama, tetapi justru memperkuat kohesi sosial.

Berbagai upacara adat di Toraja menunjukkan bagaimana Tongkonan tetap menjadi pusat kehidupan sosial yang menghubungkan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama. Dokumentasi dari ritual adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'* menunjukkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Hal ini memperkuat fakta bahwa Tongkonan telah lama menjadi simbol kebersamaan yang melampaui batas kepercayaan.

Seorang tokoh masyarakat di Toraja menegaskan bahwa Tongkonan selalu menjadi ruang di mana semua orang diterima tanpa memandang perbedaan agama:

"Di sini, siapa pun yang datang ke Tongkonan selalu diterima. Ini bukan hanya rumah adat, tetapi juga tempat di mana kami belajar hidup berdampingan dalam keberagaman." (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Tana Toraja, November 2024)

Tongkonan bukan sekadar rumah adat bagi masyarakat Toraja, tetapi juga pusat kehidupan sosial dan simbol persatuan yang menghubungkan komunitas tanpa memandang perbedaan agama. Sebagai tempat tinggal keluarga besar, Tongkonan menjadi ruang kolektif untuk berbagai aktivitas sosial, keagamaan, dan musyawarah. Observasi menunjukkan bahwa setiap acara adat yang diselenggarakan di Tongkonan selalu melibatkan seluruh anggota

komunitas, baik yang beragama Islam, Kristen, maupun penganut kepercayaan lokal. Hal ini menegaskan bahwa Tongkonan mengakomodasi keberagaman, memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk tetap terlibat dalam kehidupan sosial secara setara.

Selain sebagai tempat tinggal, Tongkonan juga berfungsi sebagai pusat komunikasi dan interaksi sosial, di mana pengambilan keputusan kolektif dilakukan melalui musyawarah. Keberlanjutan perannya sebagai ruang dialog lintas agama terlihat dari keterlibatan berbagai komunitas dalam kegiatan yang berlangsung di dalamnya, termasuk upacara adat, pertemuan keluarga besar, dan penyelesaian konflik sosial. Buku "Toraja, Tongkonan dan Kerukunan" menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, sengketa yang berkaitan dengan perbedaan agama diselesaikan melalui pertemuan di Tongkonan. Hal ini membuktikan bahwa budaya lokal dapat menjadi sarana alami dalam membangun moderasi beragama, di mana musyawarah dijadikan mekanisme utama dalam menyelesaikan perbedaan tanpa mengorbankan keharmonisan sosial.

Sebagai pusat komunitas, Tongkonan juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai acara sosial dan keagamaan, seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'*. Dalam ritual-ritual ini, keterlibatan berbagai kelompok agama menunjukkan bahwa Tongkonan adalah ruang yang terbuka bagi semua elemen masyarakat, menciptakan suasana kebersamaan yang melampaui batas keyakinan pribadi. Buku "Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja" menjelaskan bahwa Tongkonan telah lama menjadi simbol persatuan masyarakat Toraja, di mana berbagai perbedaan kepercayaan dapat disatukan dalam satu ruang sosial yang sama. Tradisi yang dijalankan dalam Tongkonan menegaskan bahwa identitas budaya dapat memperkuat kohesi sosial dan mendukung moderasi beragama.

Lebih dari sekadar rumah adat, Tongkonan memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antaragama, terutama dalam menyelesaikan konflik sosial melalui mekanisme musyawarah. Implementasi nilai moderasi terlihat dalam bagaimana Tongkonan menjadi pusat dialog dan tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat. Di dalamnya, perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan bagian dari harmoni sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sebagai ruang yang memfasilitasi interaksi sosial, Tongkonan mencerminkan bagaimana tradisi dan budaya dapat menjadi alat efektif dalam membangun kerukunan dan kesepahaman antarumat beragama.

Keberlanjutan tradisi ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap bertahan di tengah perubahan sosial yang cepat,

memberikan solusi berkelanjutan bagi tantangan keberagaman di masyarakat modern. Dengan demikian, Tongkonan bukan hanya rumah adat yang memiliki nilai historis, tetapi juga simbol harmoni sosial yang meneguhkan moderasi beragama di Tana Toraja.

2) Upacara *Rambu Solo'* sebagai Model Koeksistensi Keberagaman Agama

Upacara *rambu solo'*, yang merupakan ritual pemakaman adat masyarakat Toraja, memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan membangun koeksistensi antaragama. Observasi terhadap pelaksanaan *rambu solo'* menunjukkan bahwa meskipun upacara ini berbasis adat, partisipasi lintas agama tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi. Wawancara dengan keluarga yang melaksanakan *rambu solo'* mengungkapkan bahwa upacara ini melibatkan berbagai komunitas agama, baik dalam bentuk kehadiran fisik maupun keterlibatan dalam aspek sosial. Seorang tokoh agama yang sering menghadiri upacara ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya, umat Islam, Kristen, dan penganut kepercayaan lokal turut serta dalam berbagai tahap upacara, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan ritual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *rambu solo'* memiliki akar budaya yang kuat, masyarakat tidak membatasi keterlibatan berdasarkan agama, tetapi lebih menekankan pada nilai sosial, kebersamaan, dan penghormatan terhadap keluarga yang sedang berduka.

Observasi terhadap berbagai pelaksanaan *rambu solo'* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Toraja untuk saling berpartisipasi dalam prosesi pemakaman ini. Ritual ini sering kali dihadiri oleh masyarakat lintas agama yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, membantu dalam persiapan logistik, hingga ikut serta dalam prosesi adat. Dalam konteks sosial, *rambu solo'* bukan hanya ritual keagamaan atau adat semata, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi berbagai komunitas yang berbeda latar belakang kepercayaan, menciptakan ruang interaksi sosial yang inklusif dan mendukung moderasi beragama.

Kutipan wawancara dengan seorang tokoh adat di Tana Toraja menunjukkan bahwa *rambu solo'* adalah peristiwa sosial yang terbuka untuk semua orang, tanpa melihat latar belakang agama:

"Ketika ada *rambu solo'*, semua orang datang untuk membantu dan memberikan penghormatan. Tidak ada batasan siapa yang boleh dan tidak boleh hadir. Ini bukan hanya upacara keluarga, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial masyarakat kami." (Wawancara dengan tokoh adat, Tana Toraja, November 2024)

Seorang pemuka agama Kristen yang sering menghadiri *rambu solo'* menekankan bahwa perbedaan agama tidak menjadi hambatan dalam mengikuti prosesi adat:

"Meskipun saya seorang Kristen, saya tetap menghadiri *rambu solo'* ketika tetangga Muslim atau yang masih memegang kepercayaan lokal mengadakan upacara ini. Karena di sini, kita lebih mengutamakan kebersamaan daripada perbedaan." (Wawancara dengan tokoh agama, Tana Toraja, November 2024).

Di Tana Toraja, nilai-nilai moderasi beragama tercermin dalam berbagai tradisi seperti *rambu solo'*. Seorang pemuka adat Toraja mengungkapkan:

"Di sini, orang-orang dari berbagai agama bisa terlibat dalam upacara adat. *Rambu solo'* misalnya, melibatkan seluruh masyarakat tanpa melihat agama mereka. Ini adalah bentuk nyata dari moderasi beragama yang telah diwariskan turun-temurun." (Wawancara dengan tokoh adat, Tana Toraja, November 2024)

Meskipun demikian, beberapa warga di kedua daerah menyampaikan keprihatinan mereka terkait pengaruh luar, seperti radikalisme dan media sosial, yang mulai mengikis nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi toleransi.

Buku Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan memberikan bukti dokumentasi bahwa *rambu solo'* selalu melibatkan masyarakat lintas agama dalam pelaksanaannya. Foto-foto dari berbagai acara menunjukkan bagaimana umat Islam, Kristen, dan pemeluk *aluk todolo* hadir tanpa adanya sekat sosial yang membatasi partisipasi mereka. Dalam beberapa prosesi, pemuka agama dari berbagai latar belakang juga turut serta dalam doa dan penghormatan, memperlihatkan bahwa upacara ini bukan sekadar ritual budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang mempererat hubungan antarumat beragama.

Buku Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja memperkuat fakta bahwa *rambu solo'* telah lama menjadi ajang interaksi lintas agama. Kehadiran lintas agama dalam upacara ini bukan hanya karena faktor budaya, tetapi juga merupakan wujud nyata dari nilai kebersamaan dan toleransi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dokumentasi mencatat bahwa komunitas Muslim dan Kristen tidak hanya hadir dalam prosesi, tetapi juga berperan aktif dalam penyelenggaraan acara, seperti membantu logistik, bergotong royong dalam persiapan, serta ikut dalam ritual penghormatan bagi almarhum.

Sebagai ritual adat terbesar di Tana Toraja, *rambu solo'* selalu melibatkan partisipasi kolektif dari berbagai lapisan masyarakat.

Upacara ini tidak hanya menjadi momen penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga menghadirkan interaksi sosial lintas agama yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Dalam berbagai dokumentasi, terlihat bahwa umat Islam, Kristen, maupun pemeluk *aluk todolo* saling bekerja sama dalam persiapan dan pelaksanaan prosesi, baik dalam penyediaan perlengkapan, persiapan makanan, maupun ritual adat lainnya.

Lebih dari sekadar ritual pemakaman, *rambu solo'* juga menjadi sarana membangun komunikasi lintas keyakinan dan mempererat hubungan sosial. Interaksi antaragama dalam upacara ini berlangsung secara alami, di mana masyarakat Muslim dapat hadir untuk memberikan penghormatan tanpa harus terlibat dalam unsur ritual yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Begitu pula dengan komunitas Kristen yang tetap mendukung jalannya prosesi sebagai bentuk solidaritas sosial. Buku Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan menegaskan bahwa kehadiran lintas agama dalam *rambu Solo'* telah menjadi tradisi yang berlangsung selama berabad-abad, menunjukkan bahwa budaya lokal telah lama menjadi fondasi bagi kehidupan sosial yang inklusif.

Dari sisi fungsi sosial, *rambu solo'* tidak hanya menjadi ritual adat, tetapi juga ajang untuk memperkuat hubungan sosial dan menghilangkan batas perbedaan agama. Buku *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja* mencatat bahwa partisipasi lintas agama dalam upacara ini berdampak positif dalam membangun komunikasi antarumat beragama. Dengan keterbukaan yang dijunjung tinggi, masyarakat lebih memahami praktik keagamaan satu sama lain tanpa prasangka.

Sebagai model keberhasilan dalam mengelola keberagaman agama di tingkat komunitas, *rambu solo'* membuktikan bahwa moderasi beragama dapat tumbuh secara alami melalui praktik budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Upacara ini menjadi bukti bahwa adat dan budaya dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih inklusif. Dokumentasi dari berbagai sumber menegaskan bahwa *rambu solo'* bukan hanya sekadar ritual pemakaman, tetapi juga mekanisme sosial yang memungkinkan integrasi antaragama terjadi secara alami dalam kehidupan masyarakat Toraja. Oleh karena itu, tradisi ini bukan hanya warisan budaya yang memiliki nilai historis, tetapi juga salah satu pilar utama dalam menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

3) *Rambu Tuka'* sebagai Perayaan Syukur dan Harmoni Sosial

Rambu tuka' merupakan upacara adat masyarakat Toraja yang berfungsi sebagai perayaan syukur atas pencapaian atau kebahagiaan

yang diraih oleh keluarga atau komunitas. Observasi terhadap pelaksanaan *rambu tuka'* menunjukkan bahwa upacara ini melibatkan berbagai komunitas lintas agama, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pasca-acara. Wawancara dengan tokoh adat dan pemuka agama mengungkapkan bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi masyarakat yang masih memegang kepercayaan *Aluk Todolo*, tetapi juga menjadi ajang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok keagamaan.

Seorang tokoh masyarakat menyebutkan bahwa dalam praktiknya, umat Islam, Kristen, dan pemeluk kepercayaan lokal turut hadir dalam upacara ini, baik sebagai peserta maupun sebagai bagian dari komunitas yang mendukung jalannya prosesi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *rambu tuka'* berasal dari tradisi adat, nilai kebersamaan tetap diutamakan, memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk saling berpartisipasi dalam ekspresi rasa syukur bersama.

Observasi terhadap beberapa pelaksanaan *rambu tuka'* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perayaan ini tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan dalam komunitas kecil, tetapi juga menjadi ajang sosial yang lebih luas yang mendukung terciptanya harmoni antaragama. Dalam beberapa dokumentasi, terlihat bahwa baik umat Islam maupun Kristen ikut serta dalam prosesi dengan memberikan doa dan dukungan moral kepada keluarga yang mengadakan *rambu tuka'*. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran dalam membangun toleransi beragama, dengan menciptakan ruang sosial di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui dalam komunitasnya.

Kutipan wawancara dengan seorang tokoh adat di Tana Toraja menunjukkan bahwa *rambu tuka'* adalah perayaan yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang perbedaan agama:

"Ketika ada *rambu tuka'*, bukan hanya keluarga yang datang, tetapi juga tetangga dan masyarakat luas. Kita berkumpul bersama, saling berbagi kebahagiaan, dan bersyukur atas berkah yang telah diberikan. Ini bukan hanya tradisi kami, tetapi juga tradisi kebersamaan yang melibatkan semua orang." (Wawancara dengan tokoh adat, Tana Toraja, November 2024)

Seorang pemuka agama Kristen menegaskan bahwa kehadiran lintas agama dalam *rambu tuka'* bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Toraja:

"Saya sering menghadiri *rambu tuka'*, meskipun saya bukan penganut *aluk todolo*. Bagi saya, ini bukan hanya acara adat, tetapi juga kesempatan untuk mempererat hubungan dengan saudara-saudara kami yang memiliki keyakinan berbeda."

(Wawancara dengan tokoh agama, Tana Toraja, November 2024)

Buku Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan memberikan bukti dokumentasi bahwa *rambu tuka'* bukan sekadar perayaan adat, tetapi juga memiliki makna sosial yang kuat. Foto-foto dari berbagai acara menunjukkan bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama berkumpul dalam satu perayaan untuk berbagi kebahagiaan dan rasa syukur. Dokumentasi juga mencatat bahwa dalam beberapa prosesi, pemuka agama dari berbagai kepercayaan hadir untuk memberikan doa dan dukungan kepada keluarga yang merayakan upacara ini.

Buku Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Tana Toraja memperkuat fakta bahwa *rambu tuka'* telah lama menjadi ajang interaksi lintas agama di masyarakat Toraja. Kehadiran umat Islam, Kristen, dan penganut *aluk todolo* dalam perayaan ini mencerminkan nilai kebersamaan dan toleransi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam dokumentasi sejarah, komunitas lintas agama tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek upacara, seperti berbagi makanan, membantu persiapan acara, serta memberikan doa dan harapan baik bagi keluarga yang merayakan.

Lebih dari sekadar ekspresi budaya, *rambu tuka'* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan lintas agama. Upacara ini menciptakan ruang bagi interaksi lintas komunitas dalam suasana penuh kebersamaan dan harmoni. Tidak terbatas pada satu kelompok agama saja, *rambu tuka'* terbuka bagi semua lapisan masyarakat, menegaskan bahwa perbedaan kepercayaan tidak menghalangi keterlibatan dalam perayaan bersama. Buku "Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan" menegaskan bahwa upacara ini telah menjadi simbol inklusivitas, di mana semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dalam momen kebersamaan ini.

Selain itu, *rambu tuka'* memiliki dampak sosial yang besar terhadap hubungan antaragama di Toraja. Prosesi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang agama dapat berkumpul tanpa adanya sekat sosial atau eksklusivisme keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial yang lebih harmonis, di mana keberagaman dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dirayakan bersama, bukan sebagai sesuatu yang memisahkan.

Keberlanjutan *rambu tuka'* dalam konteks modern membuktikan bahwa perayaan ini tetap relevan sebagai mekanisme sosial dalam menjaga toleransi dan moderasi beragama. Dengan tetap mempertahankan keterbukaan terhadap partisipasi lintas agama,

rambu tuka' menjadi bukti bahwa budaya dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun kehidupan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Dokumentasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa tradisi ini telah membentuk kerukunan secara alami, menegaskan bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, melainkan dirayakan dalam kebersamaan.

Sebagai simbol moderasi beragama, *rambu tuka'* mengajarkan bahwa nilai kebersamaan dapat menjadi jembatan dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Dengan memberikan ruang bagi semua kelompok agama untuk berpartisipasi, perayaan ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dapat dibangun melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui praktik budaya yang memungkinkan setiap individu terlibat dalam ruang sosial yang sama tanpa sekat keagamaan. Oleh karena itu, *rambu tuka'* bukan hanya warisan budaya, tetapi juga representasi dari harmoni sosial yang berkelanjutan di Tana Toraja.

4) ***Ma'kombongan sebagai Model Penyelesaian Konflik dan Penguatan Moderasi Beragama***

Ma'kombongan merupakan forum musyawarah adat di Tana Toraja yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan sosial, termasuk konflik lintas agama, melalui pendekatan dialog dan mufakat. Tradisi ini berakar kuat dalam nilai *unnalli melo* (mengalah untuk menang bersama) dan diwariskan turun-temurun sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan harmoni sosial. Pelaksanaan *Ma'kombongan* menunjukkan bahwa forum ini dihadiri oleh tokoh adat, pemuka agama, perwakilan pemerintah, serta pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengakomodasi semua kepentingan tanpa memihak.

Wawancara dengan *To Parengé* ibu Pawa Palembang, mengungkapkan bahwa *ma'kombongan* bukan hanya wadah formal penyelesaian masalah, tetapi juga simbol kearifan lokal yang memelihara toleransi di tengah keberagaman:

“*Ma'kombongan* itu tidak hanya untuk adat, tapi untuk semua. Kalau ada masalah antara orang berbeda agama, kita duduk bersama, tokoh adat, tokoh agama, dan semua pihak terkait. Kita cari jalan keluar yang damai dan adil.” (Wawancara, Tokoh Adat Tana Toraja, April 2025)

Seorang tokoh adat juga menjelaskan bahwa prinsip yang dipegang dalam *ma'kombongan* adalah memastikan setiap pihak memiliki kesempatan bicara yang sama dan keputusan diambil secara kolektif:

“Tidak ada yang diputuskan sepihak. Semua harus bicara, semua harus dengar. Keputusan yang diambil itu mengikat semua orang karena itu kesepakatan bersama.” (Wawancara dengan tokoh adat, Tana Toraja, Mei 2025)

Dalam praktiknya, *ma'kombongan* kerap menjadi ruang pertemuan lintas iman. Kasus-kasus yang melibatkan perbedaan pandangan keagamaan, seperti penggunaan fasilitas umum, batas tanah makam, atau tata cara pelaksanaan upacara adat, sering diselesaikan melalui forum ini. Pemuka agama dari berbagai keyakinan turut duduk bersama tokoh adat untuk merumuskan solusi, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing, namun tetap menghormati nilai adat yang berlaku.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa *ma'kombongan* memiliki peran strategis dalam mencegah eskalasi konflik. Dalam beberapa kasus, forum ini berhasil meredam potensi ketegangan antarumat beragama dengan memprioritaskan musyawarah terbuka. Dokumentasi dari “Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan” mencatat bahwa partisipasi lintas agama dalam *ma'kombongan* telah lama menjadi bagian dari tradisi sosial Toraja. Baik umat Kristen, Muslim, maupun penganut *aluk todolo* sama-sama hadir dan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dari sisi sosial, *ma'kombongan* memperkuat kohesi antarwarga dengan membangun rasa saling percaya. Forum ini menciptakan ruang aman bagi semua pihak untuk mengemukakan pendapat tanpa rasa takut atau diskriminasi. Nilai-nilai seperti *siri'* (harga diri), *sipakatau* (saling menghormati), dan *karapasan* (kedamaian) menjadi pedoman dalam setiap tahap proses *ma'kombongan*.

Sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya lokal, *Ma'kombongan* membuktikan bahwa moderasi beragama dapat dipraktikkan secara efektif di tingkat komunitas. Dengan mengedepankan musyawarah, keterlibatan lintas agama, dan penghormatan terhadap adat, tradisi ini bukan hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat integrasi antara nilai budaya dan ajaran agama. Keberlanjutan *Ma'kombongan* di era modern menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi pilar utama dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif dan toleran.

5) Pengaruh Teknologi dan Media Digital terhadap Budaya dan Moderasi Beragama

Teknologi dan media digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan nilai-nilai budaya serta agama. Dari wawancara yang dilakukan, beberapa

narasumber mengungkapkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang memperkuat maupun melemahkan moderasi beragama. Seorang akademisi di Parepare menyebutkan:

"Di satu sisi, media sosial memungkinkan masyarakat untuk saling belajar tentang agama dan budaya lain. Namun, di sisi lain, algoritma media sosial sering kali memperkuat polarisasi dan menyebarkan ujaran kebencian, yang dapat merusak harmoni sosial." (Wawancara akademisi, Parepare, Oktober 2024)

Di Tana Toraja, beberapa generasi muda mulai lebih banyak mendapatkan informasi keagamaan dari media digital dibandingkan dari pemuka adat atau tokoh agama lokal. Seorang mahasiswa di Tana Toraja menyatakan:

"Kami lebih sering melihat ceramah agama di YouTube atau TikTok. Kadang-kadang ajaran yang disampaikan tidak sesuai dengan budaya lokal kita yang menekankan harmoni dan toleransi." (Wawancara masyarakat sipil, Tana Toraja, November 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya yang sebelumnya menjadi landasan moderasi beragama mulai mengalami pergeseran akibat pengaruh globalisasi dan digitalisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai seperti *sipakatau* dan *rambu solo'* bisa semakin terpinggirkan oleh pemahaman keagamaan yang lebih eksklusif.

Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menjaga relevansi budaya lokal dalam moderasi beragama. Salah satunya adalah kegiatan sosialisasi nilai-nilai budaya melalui platform digital yang diinisiasi oleh komunitas keagamaan di Parepare. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai tradisi lokal dan bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi dalam membangun harmoni sosial.

Dialog lintas agama yang melibatkan generasi muda juga semakin digalakkan, baik secara langsung dalam pertemuan tatap muka maupun melalui webinar. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan membangun pemahaman bersama tentang pentingnya moderasi beragama di tengah keberagaman budaya dan keyakinan. Kampanye budaya di media sosial juga menjadi strategi yang efektif dalam menyoroti pentingnya menjaga tradisi lokal sebagai sarana untuk memperkuat toleransi dan kerukunan. Melalui konten-konten edukatif dan interaktif, masyarakat diajak untuk mengenali serta mengapresiasi budaya mereka sendiri sebagai bagian dari identitas yang dapat mendukung kehidupan sosial yang lebih inklusif dan harmonis.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya di Parepare dan Tana Toraja masih memiliki peran penting dalam menjaga moderasi beragama, tetapi juga menghadapi tantangan dari teknologi dan media digital. Jika tidak ada upaya strategis untuk mengintegrasikan budaya lokal dalam perkembangan teknologi, maka ada risiko pergeseran nilai yang dapat mengancam harmoni sosial. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas, dukungan dari tokoh agama dan pemuka adat, serta pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai budaya yang moderat menjadi langkah penting dalam mempertahankan dan memperkuat moderasi beragama di masa depan.

Keberlanjutan nilai-nilai dalam Tongkonan (rumah adat), *aluk todolo* (kepercayaan leluhur), serta tradisi *rambu solo'* dan *rambu tuka'*, yang semuanya masih berfungsi aktif dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Hasil wawancara dengan Sekretaris Umum MUI Tana Toraja, yang menegaskan bahwa masyarakat masih menjadikan tradisi ini sebagai sarana membangun kerukunan dan interaksi lintas iman.

“Tongkonan bukan hanya simbol, tetapi pusat kesepakatan. Kalau ada masalah lintas agama, masyarakat sering kembali ke musyawarah di Tongkonan.” (Wawancara, Sekum MUI Tana Toraja, November 2024)

“Dalam Rambu Solo', semua orang terlibat, Kristen, Islam, bahkan yang tidak beragama. Mereka semua hadir sebagai keluarga. Di situ moderasi nyata, karena budaya mengikat kita lebih dulu sebelum agama masuk.” (Wawancara, Sekum MUI Tana Toraja, November 2024)

Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya lokal tetap menjadi jembatan dialog sosial di tengah masyarakat Toraja yang mayoritas Kristen, namun hidup berdampingan secara harmonis dengan umat Muslim dan penganut keyakinan lain. Nilai-nilai tersebut terbukti mengatasi batas-batas agama, karena mengakar kuat dalam struktur sosial komunitas.

Tongkonan, sebagai rumah adat, tetap digunakan sebagai pusat musyawarah dan resolusi konflik. Dalam banyak kasus, keputusan sosial dan lintas agama tetap dirundingkan melalui forum adat di Tongkonan, mencerminkan sinergi antara budaya dan nilai moderasi.

Aluk todolo sebagai kepercayaan leluhur tidak lagi dianut secara luas, namun nilai-nilai etikanya tetap hidup dalam bentuk penghormatan terhadap leluhur, alam, dan kehidupan komunal. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa nilai keseimbangan,

harmoni, dan solidaritas yang terkandung dalam Aluk Todolo masih dilestarikan secara simbolik maupun fungsional.

“Aluk Todolo itu tidak lagi dominan, tapi esensinya hidup. Misalnya, kami tetap punya waktu-waktu khusus menghormati leluhur atau menjaga harmoni dengan alam. Nilainya tetap jalan meski format agamanya berubah.” (Wawancara, Aktivis Pemuda Toraja, Desember 2024)

Terdapat dinamika menarik dalam konteks generasi muda Toraja. Globalisasi dan pengaruh digital membawa perubahan dalam persepsi nilai-nilai budaya. Wawancara dengan generasi muda menunjukkan adanya transformasi makna, di mana budaya dijadikan simbol identitas, namun tidak selalu dipraktikkan secara utuh.

“Kami bangga jadi orang Toraja, tapi kadang tidak semua dari kami ikut *rambu solo'* atau tahu adat secara detail. Tapi kami tetap menghormati itu sebagai bagian dari identitas kami.” (Wawancara, Mahasiswa Kristen Toraja, Desember 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai budaya tetap dianggap penting, perlu ada revitalisasi agar nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dipahami secara kontekstual oleh generasi muda. Dalam praktiknya, *rambu solo'* dan *rambu tuka'* telah menjadi wadah interaksi sosial lintas agama. Kehadiran umat Islam dalam ritual Kristen dan sebaliknya telah menjadi praktik umum yang mencerminkan inklusivitas dan semangat toleransi.

Lebih dari sekadar perayaan budaya, tradisi ini menjadi alat komunikasi antaragama yang efektif, karena beroperasi di luar dogma agama formal, tetapi dalam ranah sosial-budaya yang inklusif. Sehingga, komunikasi budaya lokal di Toraja menjadi praktik nyata dari moderasi beragama berbasis komunitas.

2.5.2 Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal seperti *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge* di Kota Parepare serta *Rambu Solo'*, *Tongkonan*, dan *Aluk Todolo* di Kabupaten Tana Toraja tidak hanya hidup dalam tataran simbolik, tetapi masih memiliki kekuatan empiris yang nyata dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Nilai-nilai tersebut terbukti digunakan secara aktif dalam menjaga harmoni lintas agama, mencegah konflik, dan membentuk pola komunikasi inklusif di antara komunitas yang berbeda keyakinan.

Di Parepare, nilai-nilai *sipakatau* dan *SIPaKALEBBI* masih menjadi landasan dalam interaksi sosial yang penuh penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan. Temuan dari wawancara dengan tokoh pemerintah dan observasi pada kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai ini secara

praktis digunakan dalam konteks penyelesaian masalah sosial, forum musyawarah seperti *tudang sipulung*, serta perayaan keagamaan lintas komunitas. Nilai-nilai ini bukan hanya diwariskan secara verbal, tetapi juga dihidupkan dalam praktik kolektif masyarakat urban yang multikultural.

Di Tana Toraja, tradisi seperti *rambu solo'*, Tongkonan, dan *aluk todolo* tidak sekadar dijadikan simbol kebanggaan budaya, melainkan terus dijalankan sebagai mekanisme sosial yang mempertemukan berbagai kelompok agama. Kehadiran umat Kristen maupun Islam dalam upacara adat tersebut menunjukkan kuatnya fungsi nilai budaya sebagai ruang sosial untuk membangun solidaritas. Bahkan dalam konteks regenerasi nilai, meskipun terdapat gejala pergeseran makna di kalangan generasi muda, praktik budaya tetap dijaga dan disesuaikan dengan konteks kekinian sebagai bentuk adaptasi.

Validasi empiris terhadap nilai-nilai ini diperoleh melalui triangulasi data wawancara, observasi partisipatif, dan dokumen lokal yang menunjukkan konsistensi penggunaan nilai budaya dalam membangun moderasi beragama. Ini menunjukkan bahwa budaya lokal bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi telah menjadi instrumen kontemporer yang mampu menjawab tantangan keberagaman melalui cara-cara yang akomodatif dan berbasis kearifan lokal.

2.5.1.1. Nilai Budaya Lokal di Kota Parepare

Nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* menjadi fondasi utama dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare. Ketiga nilai ini membentuk sistem sosial yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan penuh penghormatan dan toleransi. *Sipakatau* menekankan pentingnya penghormatan terhadap sesama, *sipakalebbi* menanamkan sikap saling menghargai dalam interaksi sosial, *sipakainge* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan keseimbangan hubungan antarumat beragama.

Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tampak dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Parepare. Dalam interaksi sosial, nilai *sipakatau* mengajarkan masyarakat untuk memperlakukan setiap individu dengan penghormatan, terlepas dari latar belakang agamanya. Nilai *sipakalebbi* tercermin dalam penghargaan terhadap praktik keagamaan umat lain, seperti hadir dalam acara keagamaan meskipun tidak ikut beribadah. Sementara itu, *sipakainge* memainkan peran dalam mencegah konflik dengan memberikan teguran sosial yang santun, di mana masyarakat lebih memilih musyawarah daripada konfrontasi dalam menyelesaikan perbedaan.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun melalui peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Tokoh adat bertanggung jawab dalam memastikan bahwa nilai-nilai ini tetap menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, sementara tokoh agama menanamkan ajaran yang menekankan penghormatan terhadap umat lain dalam khutbah dan ceramah keagamaan. Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) dan pemerintah daerah memainkan peran dalam menginstitusionalisasi nilai-nilai budaya ini ke dalam kebijakan sosial yang mendukung harmoni lintas agama.

Keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal ini membuktikan bahwa kearifan lokal di Parepare tidak hanya sekadar warisan leluhur, tetapi juga instrumen utama dalam membangun dan menjaga moderasi beragama di tingkat komunitas. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat Parepare berhasil menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan toleran, sehingga menjadi model moderasi beragama berbasis budaya yang dapat dijadikan referensi dalam pembangunan harmoni sosial di wilayah lain.

Hubungan antara Nilai Budaya Parepare Dengan Moderasi Beragama.

Keberlanjutan moderasi beragama di Kota Parepare tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari kerja sama berbagai pemangku kepentingan yang menjaga, menerapkan, dan menyebarkan nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*. *Stakeholder Theory* Freeman et al. (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem sosial, termasuk moderasi beragama, sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks Parepare, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil memiliki peran masing-masing dalam mempertahankan nilai-nilai budaya ini sebagai mekanisme sosial yang mendukung keberagaman dan harmoni antaragama.

Penelitian Hamzah & Marwati (2023) juga menunjukkan bahwa nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* berfungsi sebagai fondasi harmoni sosial dan alat untuk menekan potensi konflik berbasis agama. Nilai-nilai ini bukan hanya berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, tetapi juga memiliki dampak terhadap penguatan sistem sosial yang inklusif, di mana perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi sumber konflik, melainkan dipandang sebagai bagian dari keberagaman yang harus dijaga. Tokoh agama dan adat memainkan peran utama dalam memastikan nilai-nilai ini tetap diinternalisasi oleh masyarakat, baik melalui praktik sosial maupun dalam pengajaran keagamaan. Hal ini sesuai dengan temuan Alang (2020) yang menyatakan bahwa nilai budaya tidak hanya sebatas norma sosial, tetapi juga menjadi strategi dalam menyelesaikan konflik dan memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya ini menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas, dimana berbagai elemen masyarakat bekerja sama dalam mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial.

Secara lebih spesifik, tokoh adat memainkan peran sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal, memastikan bahwa ajaran tentang penghormatan, penghargaan, dan kontrol sosial tetap tertanam dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama bertindak sebagai mediator yang menerjemahkan nilai budaya ini ke dalam perspektif ajaran agama, misalnya dengan menekankan pentingnya penghormatan antarumat beragama dalam ceramah keagamaan. Akademisi dan

lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mendokumentasikan dan mengajarkan kembali nilai-nilai budaya ini kepada generasi muda, sementara pemerintah daerah dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) bertanggung jawab dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kebijakan sosial dan program pembangunan daerah.

Studi Bachrong & Ansar (2021a) menunjukkan bahwa nilai budaya lokal memiliki potensi besar dalam moderasi beragama, tetapi masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam kebijakan formal. Meskipun nilai budaya lokal di Parepare telah terbukti berkontribusi dalam membangun kerukunan sosial, tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai ini tetap ada, terutama dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin cepat akibat modernisasi dan digitalisasi. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam mempertahankan nilai budaya ini menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal untuk menjaga keberlanjutan sistem moderasi beragama. Oleh karena itu, keberadaan stakeholder dalam pengelolaan nilai budaya harus terus diperkuat, agar nilai-nilai ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Selain keterlibatan berbagai stakeholder, penyebaran nilai-nilai budaya ini juga berlangsung melalui mekanisme komunikasi sosial yang dijelaskan oleh *Multi-Step Flow Theory* Lazarsfeld et al. (1948). Teori ini menekankan bahwa *opinion leaders*, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan akademisi, memiliki peran sentral dalam menyebarkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Dalam konteks Parepare, *opinion leaders* menggunakan berbagai media, baik melalui khutbah, diskusi komunitas, hingga pemanfaatan media digital untuk menjangkau generasi muda. Indainanto et al. (2023) menemukan bahwa tokoh agama di Parepare memainkan peran strategis dalam menyebarluaskan pesan moderasi beragama melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam komunitas lokal, opini publik sering kali terbentuk berdasarkan informasi yang diterima dari tokoh agama dan adat, sehingga peran mereka dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi menjadi sangat penting. Media digital juga menjadi sarana efektif dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya ini, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terhubung dengan teknologi. Oleh karena itu, strategi penyebaran nilai budaya ini tidak hanya dilakukan melalui mekanisme tradisional, tetapi juga harus memperhitungkan perkembangan teknologi komunikasi agar tetap relevan di era modern.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal tidak hanya diwariskan melalui interaksi keluarga, tetapi juga diperkuat melalui forum-forum diskusi publik seperti *tudang sipulung*, yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana nilai *sipakatau* memastikan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam interaksi sosial, *sipakalebbi* menanamkan penghargaan terhadap praktik agama lain, dan *sipakainge* mendorong

masyarakat untuk mengingatkan satu sama lain dengan cara yang santun. Penelitian Alam (2023) juga menunjukkan bahwa praktik budaya seperti Upacara *rambu solo*' di Tana Toraja mencerminkan model interaksi lintas agama yang menciptakan toleransi sosial.

Dalam konteks masyarakat Parepare, mekanisme ini berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, terutama dalam konteks keberagaman agama yang dihadapi oleh komunitas lokal. Namun, dalam penerapannya, terdapat beberapa tantangan dalam mempertahankan nilai budaya lokal sebagai alat moderasi beragama. Baharuddin et al. (2021) mengidentifikasi bahwa penelitian mengenai moderasi beragama lebih banyak difokuskan pada wilayah pedesaan seperti Tana Toraja, sementara di wilayah urban seperti Parepare, nilai budaya ini masih menghadapi tantangan dalam adaptasi terhadap modernisasi. Abduh (2023) mencatat bahwa resistensi terhadap keberagaman agama masih terjadi di Parepare, seperti dalam kasus penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai budaya lokal telah lama menjadi dasar bagi moderasi beragama, tetap diperlukan usaha lebih lanjut dalam mengadaptasinya agar tetap relevan dengan tantangan zaman.

Nilai-nilai budaya lokal di Parepare berfungsi sebagai kerangka sosial yang mendukung moderasi beragama, di mana stakeholder bekerja sama untuk mempertahankan sistem nilai ini, sementara *opinion leaders* berperan dalam menyebarkannya kepada masyarakat luas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dapat dibangun melalui regulasi formal, tetapi juga melalui mekanisme budaya yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme ini menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan Parepare sebagai contoh dalam penerapan moderasi berbasis budaya, yang tidak hanya berbasis pada kebijakan formal tetapi juga dalam praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dukungan terhadap nilai-nilai ini harus terus dilakukan agar dapat menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks, terutama di tengah dinamika keberagaman agama di Indonesia.

Keberhasilan moderasi beragama di Parepare melalui mekanisme nilai budaya lokal memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti peran budaya dalam membangun harmoni sosial. Namun, pendekatan yang digunakan di Parepare menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan daerah lain. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai budaya lokal di berbagai daerah di Indonesia sering kali menjadi instrumen dalam membangun moderasi beragama, tetapi Parepare memiliki pendekatan yang unik karena mengandalkan sinergi antara pemangku kepentingan dan *opinion leaders* dalam menyebarkan nilai-nilai budaya. Jika dibandingkan dengan Yogyakarta, misalnya, pendekatan moderasi beragama di Parepare lebih berbasis pada praktik sosial dan interaksi komunitas, sedangkan di Yogyakarta, moderasi beragama lebih banyak dikembangkan melalui pendidikan dan komunitas akademik.

Studi Andy et al. (2021) menemukan bahwa moderasi beragama di Yogyakarta banyak ditopang oleh sistem pendidikan formal yang inklusif, di mana institusi pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk sikap toleran di kalangan generasi muda. Sementara itu, di Parepare, nilai budaya seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* lebih banyak diwariskan secara sosial melalui interaksi keluarga, komunitas, dan kegiatan adat, yang memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam membangun harmoni sosial.

Penelitian tentang moderasi beragama di Lombok menunjukkan bahwa pesantren dan lembaga keagamaan memiliki peran utama dalam membentuk nilai-nilai moderasi. Studi Zhaki (2020) menemukan bahwa pesantren tradisional di Lombok berperan dalam menyebarkan nilai moderasi dengan menanamkan ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* kepada santri. Berbeda dengan Parepare yang menitikberatkan pada sistem nilai budaya lokal, di Lombok, penyebaran moderasi beragama lebih banyak dilakukan melalui pendidikan berbasis pesantren dan jaringan ulama. Parepare tidak memiliki dominasi pesantren dalam membangun moderasi beragama, tetapi lebih banyak mengandalkan tokoh adat dan komunitas sebagai fasilitator dalam menjaga harmoni antaragama. Hal ini sejalan dengan temuan Bachrong & Ansar (2021a) yang menyatakan bahwa moderasi berbasis budaya lebih efektif diterapkan di daerah yang memiliki tradisi sosial yang kuat, seperti di Sulawesi Selatan.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat digunakan sebagai instrumen dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. Penelitian Lestari et al. (2019) mengenai penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal di Maluku menunjukkan bahwa tradisi *pela gandong* menjadi model dalam memperkuat harmoni antaragama. Tradisi ini memungkinkan masyarakat Muslim dan Kristen di Maluku untuk hidup berdampingan dalam satu sistem sosial yang berbasis pada nilai persaudaraan lintas agama. Dalam konteks ini, *pela gandong* memiliki kemiripan dengan *tudang sipulung* di Parepare, dimana dialog menjadi mekanisme utama dalam menyelesaikan perbedaan dan membangun kesepahaman. Namun, ada perbedaan yang mencolok dalam penerapan tradisi ini. Di Maluku, *pela gandong* diformalkan dalam banyak aspek kehidupan sosial, termasuk dalam sistem kepemimpinan lokal dan aturan adat, sedangkan *tudang sipulung* di Parepare lebih bersifat sebagai forum diskusi nonformal yang tetap bertahan dalam praktik kehidupan sosial.

Meskipun ada banyak kesamaan dalam pendekatan budaya dalam membangun moderasi beragama di berbagai daerah, Parepare memiliki ciri khas dalam mengandalkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan *opinion leaders* dalam menyebarkan nilai budaya lokal sebagai alat moderasi beragama. *Stakeholder Theory* Freeman (1984) dan *Multi-Step Flow Theory* Lazarsfeld et al. (1948) menjadi kerangka yang relevan dalam menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan bekerja sama untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, dan bagaimana *opinion leaders* menyebarkan pesan-pesan moderasi kepada masyarakat luas. Berbeda dengan daerah lain yang lebih

mengandalkan pendidikan formal atau institusi keagamaan sebagai aktor utama dalam moderasi beragama, Parepare lebih menekankan pada praktik sosial berbasis budaya dan komunikasi komunitas.

Parepare memiliki pendekatan yang unik dalam membangun moderasi beragama, dimana budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai mekanisme dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan harmoni. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang bersifat universal dalam membangun moderasi beragama, tetapi setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing dalam mengadaptasi nilai-nilai lokal untuk mendukung keberagaman agama.

Makna Nilai Budaya Lokal Dalam Konteks Sosial dan Historis.

Nilai-nilai budaya lokal di Parepare, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*, tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga memiliki makna historis yang mendalam dalam membangun dan mempertahankan harmoni antaragama. *Sipakatau* menanamkan prinsip penghormatan terhadap sesama tanpa memandang latar belakang agama, *sipakalebbi* mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial, sementara *sipakainge* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga hubungan antarwarga tetap harmonis. Penelitian Hamzah & Marwati (2023) menunjukkan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan interpersonal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas dalam masyarakat Bugis-Makassar. Secara historis, nilai-nilai ini telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Parepare sejak masa kerajaan Bugis, di mana hubungan antaragama telah lama diatur dalam sistem sosial yang menekankan harmoni dan kesetaraan.

Dari perspektif sosial, nilai budaya lokal di Parepare berfungsi sebagai perekat dalam membangun hubungan lintas agama yang lebih harmonis dan inklusif. *Stakeholder Theory* Freeman (1984) menjelaskan bahwa keberlanjutan suatu sistem sosial sangat bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Dalam konteks Parepare, pemangku kepentingan seperti tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya ini tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Penelitian Alam (2023) menemukan bahwa nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun memiliki dampak langsung dalam membentuk sikap inklusif masyarakat terhadap perbedaan agama. Kehadiran forum-forum dialog seperti *tudang sipulung* dan keterlibatan berbagai komunitas agama dalam ritual sosial menunjukkan bahwa nilai budaya tidak hanya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan perbedaan dan mencegah konflik berbasis agama.

Dalam konteks historis, nilai-nilai budaya ini juga memiliki makna yang erat dengan peran kerajaan Bugis dalam membangun tata sosial yang

menjunjung tinggi keberagaman. Penelitian Bachrong & Ansar (2021a) menunjukkan bahwa sejak masa kerajaan di Sulawesi Selatan, konsep penghormatan terhadap sesama telah menjadi bagian dari sistem adat yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk dalam aspek keagamaan. Konsep ini diwariskan secara turun-temurun dan tetap bertahan dalam praktik sosial masyarakat hingga saat ini. Hal ini juga diperkuat oleh studi Lestari et al. (2019) yang menemukan bahwa dalam banyak masyarakat tradisional, budaya lokal menjadi sarana utama dalam menciptakan kohesi sosial, karena memiliki sifat yang lebih adaptif dibandingkan dengan regulasi formal. Oleh karena itu, budaya lokal di Parepare tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai instrumen dalam membangun moderasi beragama secara berkelanjutan.

Perspektif komunikasi sosial, *Multi-Step Flow Theory* Lazarsfeld et al. (1948) menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya ini dapat bertahan dan terus berkembang melalui peran *opinion leaders*. Tokoh adat dan agama menjadi penghubung utama dalam menyebarkan nilai-nilai ini kepada masyarakat, baik melalui ceramah keagamaan, diskusi komunitas, maupun interaksi sosial lainnya. Studi Indainanto et al. (2023) menemukan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dapat lebih efektif disebarkan ketika melibatkan *opinion leaders* yang memiliki pengaruh kuat di tingkat komunitas lokal. Di Parepare, peran ini dimainkan oleh para tokoh adat, akademisi, dan pemuka agama yang secara aktif menyebarkan ajaran toleransi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan forum diskusi keagamaan.

Meskipun nilai budaya lokal telah lama menjadi fondasi moderasi beragama di Parepare, tantangan dalam mempertahankan dan mengadaptasi nilai-nilai ini tetap ada. Penelitian Baharuddin et al. (2021) mengidentifikasi bahwa dalam masyarakat urban yang semakin modern, terjadi pergeseran nilai budaya akibat masuknya budaya global, sehingga nilai-nilai lokal tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, resistensi terhadap keberagaman masih ditemukan dalam beberapa kasus, seperti yang ditunjukkan Abduh (2023) mengenai penolakan terhadap pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya ini tetap dapat bertahan dan berfungsi sebagai alat moderasi beragama di era modern.

Nilai budaya lokal di Parepare memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar norma sosial, tetapi juga sebagai alat dalam membangun struktur sosial yang lebih inklusif dan toleran. Makna sosial dari nilai-nilai ini terlihat dalam bagaimana masyarakat menggunakannya untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi sehari-hari, sementara makna historisnya terletak pada bagaimana nilai-nilai ini telah diwariskan sejak zaman kerajaan dan tetap bertahan hingga saat ini. Keberlanjutan nilai-nilai ini sangat bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan terus memperkuat sistem budaya ini melalui edukasi, kebijakan

sosial, serta pemanfaatan media komunikasi untuk menyebarluaskan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi yang lebih muda.

Tantangan Dalam Penerapan Budaya Lokal Untuk Moderasi.

Meskipun nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* telah menjadi pilar utama dalam membangun moderasi beragama di Kota Parepare, penerapan nilai-nilai ini menghadapi berbagai tantangan dalam konteks sosial yang semakin kompleks. Modernisasi, globalisasi, serta perubahan pola interaksi sosial di era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana nilai budaya lokal diwariskan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Studi Baharuddin et al. (2021) menunjukkan bahwa di tengah masyarakat urban yang semakin modern, terjadi pergeseran nilai budaya akibat masuknya budaya global, sehingga nilai-nilai lokal tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan dalam kehidupan sosial. Fenomena ini terlihat dalam bagaimana generasi muda mulai kehilangan keterikatan dengan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya diwariskan melalui keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, tantangan utama dalam mempertahankan moderasi beragama berbasis budaya di Parepare adalah bagaimana nilai-nilai ini tetap relevan di tengah perubahan zaman dan tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu.

Selain perubahan sosial akibat modernisasi, tantangan lainnya berasal dari munculnya kelompok-kelompok dengan paham keagamaan eksklusif yang menolak nilai-nilai moderasi. Abduh (2023) mencatat bahwa resistensi terhadap keberagaman agama masih ditemukan dalam beberapa kasus di Parepare, seperti penolakan pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel yang menunjukkan masih adanya kelompok yang belum menerima keberagaman sebagai bagian dari realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai budaya lokal telah lama berfungsi sebagai alat moderasi, tantangan dalam penerapannya tetap ada terutama ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok yang menolak nilai inklusivitas dan keberagaman. Dalam konteks ini, *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menjadi penting untuk memahami bagaimana pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dalam mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal sebagai alat moderasi beragama. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat harus bersinergi dalam menciptakan ruang yang lebih luas bagi dialog lintas agama, sekaligus menangkal narasi eksklusivisme yang dapat merusak harmoni sosial.

Di sisi lain, perubahan dalam pola komunikasi masyarakat juga memberikan tantangan baru dalam penyebaran nilai-nilai budaya lokal. Dahulu, nilai-nilai seperti *sipakatau* dan *sipakalebbi* diwariskan secara lisan melalui interaksi keluarga dan komunitas, tetapi dalam era digital, generasi muda lebih banyak menerima informasi dari media sosial yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Studi Indainanto et al. (2023) menemukan bahwa penyebaran nilai moderasi beragama lebih efektif jika dilakukan melalui *opinion leaders* yang memahami dinamika komunikasi digital dan dapat memanfaatkan

media sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua *opinion leaders* memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital, sehingga masih terdapat kesenjangan antara cara penyebaran nilai budaya tradisional dengan realitas komunikasi modern. Oleh karena itu, tantangan lainnya adalah bagaimana memanfaatkan media digital sebagai alat untuk mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam strategi komunikasi yang lebih efektif di era globalisasi.

Keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal dalam membangun moderasi beragama juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program-program berbasis budaya yang memperkuat nilai-nilai ini di masyarakat. Penelitian Bachrong & Ansar (2021) menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam mempertahankan nilai budaya lokal adalah kurangnya kebijakan yang mengakomodasi tradisi lokal dalam program pendidikan dan pembangunan sosial. Meskipun terdapat inisiatif seperti program Kampung Moderasi Beragama dan peran FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, belum ada kebijakan yang secara sistematis mengintegrasikan nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan formal atau program pelatihan bagi generasi muda. Jika nilai-nilai ini tidak dilembagakan dalam sistem pendidikan dan kebijakan sosial, maka keberlanjutannya akan semakin terancam, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi yang semakin kuat.

Tantangan utama dalam penerapan budaya lokal sebagai instrumen moderasi beragama di Parepare adalah bagaimana menjaga relevansi nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman, menangkalkan paham keagamaan eksklusif, menyesuaikan strategi komunikasi dengan perkembangan media digital, serta memastikan adanya dukungan kebijakan yang lebih konkret dalam melestarikan nilai-nilai ini. Keberlanjutan nilai budaya lokal tidak dapat berjalan secara otomatis, tetapi membutuhkan upaya aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperkuat nilai-nilai ini dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika tidak ada langkah nyata dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, maka ada kemungkinan bahwa nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* semakin terpinggirkan dalam kehidupan sosial masyarakat urban yang semakin modern dan digital.

Strategi Berbasis Budaya Lokal Dalam Kebijakan Moderasi Beragama.

Meskipun nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* telah terbukti menjadi instrumen efektif dalam membangun moderasi beragama di Parepare, langkah konkret harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutannya di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis. *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menekankan bahwa keberlanjutan suatu sistem sosial bergantung pada bagaimana pemangku kepentingan bekerja sama untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai yang menjadi fondasi harmoni sosial.

Langkah-langkah strategis berbasis budaya lokal perlu diimplementasikan dalam kebijakan moderasi beragama guna menjaga nilai-nilai ini tetap relevan dan berfungsi sebagai alat sosial dalam menghadapi tantangan keberagaman agama di era modern. Penelitian Alam (2023) menegaskan bahwa tanpa adanya kebijakan yang memperkuat nilai budaya lokal dalam kehidupan sosial, terdapat kemungkinan bahwa nilai-nilai ini semakin memudar akibat modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, strategi berbasis budaya harus menjadi bagian dari pendekatan kebijakan yang berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penguatan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam menyebarkan nilai budaya lokal melalui berbagai kanal komunikasi. *Multi-Step Flow Theory* (Lazarsfeld et al., 1948) menjelaskan bahwa informasi sosial, termasuk nilai-nilai budaya, lebih efektif jika disebarkan melalui *opinion leaders* yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas. Di Parepare, tokoh adat dan pemuka agama harus mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam menjalankan perannya sebagai penyebar nilai-nilai moderasi beragama. Studi Indainanto et al. (2023) menunjukkan bahwa penyebaran nilai moderasi beragama dapat lebih efektif jika dilakukan melalui *opinion leaders* yang memahami dinamika komunikasi modern dan dapat memanfaatkan media digital sebagai alat utama dalam penyebaran nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan bagi tokoh adat dan agama agar mereka dapat menggunakan media digital sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

Integrasi nilai budaya lokal dalam kebijakan pendidikan formal dan nonformal menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai ini. Penelitian Bachrong & Ansar (2021) menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam mempertahankan nilai budaya lokal adalah kurangnya kebijakan yang mengakomodasi tradisi lokal dalam kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal dengan memasukkan nilai-nilai budaya seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* ke dalam materi pembelajaran di sekolah. Kurikulum yang menanamkan nilai-nilai ini dapat menjadi instrumen dalam membangun kesadaran sejak dini mengenai pentingnya moderasi beragama, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman bahwa keberagaman adalah bagian dari identitas sosial yang harus dijaga. Selain di sekolah, pendidikan berbasis komunitas melalui program pelatihan di masjid, gereja, serta pusat kebudayaan juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal kepada masyarakat.

Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan berbasis budaya yang mendukung program-program sosial yang bertujuan memperkuat harmoni antaragama. Salah satu contoh yang dapat diadopsi adalah penguatan program Kampung Moderasi Beragama, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 137 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama. Program ini dapat diadaptasi

dengan memasukkan nilai budaya lokal sebagai bagian dari pendekatan dalam membangun harmoni antarumat beragama. Di Parepare, program serupa dapat dikembangkan dengan menjadikan tradisi lokal seperti *tudang sipulung* sebagai forum utama dalam membangun kesepahaman antaragama. Selain itu, ritual budaya seperti *mappalili* dapat diangkat sebagai agenda tahunan dalam perayaan budaya yang tidak hanya menjadi simbol identitas lokal, tetapi juga sebagai instrumen dalam membangun dialog dan interaksi lintas agama.

Selain kebijakan berbasis budaya, peran media dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya lokal juga harus diperkuat. Studi *Relation of Social Media Literacy, Trust, and Information Quality on Public Perception* (2023) menemukan bahwa persepsi publik terhadap isu sosial dan agama sangat dipengaruhi oleh media, terutama media sosial. Di tengah meningkatnya arus informasi digital, nilai budaya lokal harus dapat diadaptasi ke dalam format media yang lebih mudah diakses oleh generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan konten-konten digital berbasis budaya yang dapat menyebarluaskan pesan-pesan moderasi beragama dengan cara yang lebih kreatif dan menarik. Program seperti pembuatan film dokumenter, infografis interaktif, serta kampanye media sosial yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam moderasi beragama dapat menjadi strategi yang efektif dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, strategi berbasis budaya dalam kebijakan moderasi beragama harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan peran tokoh adat dan agama sebagai *opinion leaders*, integrasi nilai budaya dalam sistem pendidikan, pengembangan program sosial berbasis budaya, hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif. Jika langkah-langkah ini dapat diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan, maka nilai-nilai budaya lokal tidak hanya akan bertahan di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis, tetapi juga dapat terus berkembang sebagai instrumen dalam menjaga harmoni sosial dan moderasi beragama di Parepare. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen bersama antara pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat, serta dapat terus diwariskan kepada generasi yang lebih muda sebagai aset dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.

Dalam konteks masyarakat urban seperti Kota Parepare, nilai-nilai budaya lokal memainkan peran yang strategis sebagai instrumen komunikasi sosial untuk menjaga kohesi sosial lintas agama. Budaya *sipakatau* (saling memanusiation), *sipakalebbi* (saling memuliakan), dan *sipakainge* (saling mengingatkan) menjadi fondasi yang menopang pola interaksi masyarakat dalam menghadapi tantangan keberagaman agama dan dinamika sosial kota.

Nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada ranah normatif atau simbolik, melainkan dipraktikkan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks dialog dan resolusi konflik. Salah satu bentuk konkret dari mekanisme

komunikasi berbasis budaya tersebut adalah praktik *tudang sipulung*, yaitu forum musyawarah komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan pemerintah. Dalam forum ini, berbagai isu sosial termasuk potensi gesekan antar kelompok agama dibahas secara terbuka dalam kerangka nilai-nilai kearifan lokal. Proses deliberatif yang mengedepankan penghormatan, kesetaraan, dan kepentingan bersama ini telah menjadi cara khas masyarakat Parepare dalam mengelola perbedaan secara damai dan produktif.

Observasi partisipatif dan wawancara dengan informan menyatakan bahwa mekanisme budaya ini masih aktif digunakan bahkan dalam isu kontemporer, seperti penolakan terhadap pembangunan lembaga pendidikan berbasis agama tertentu. Dalam kasus tersebut, pendekatan dialog melalui *tudang sipulung* dan penguatan nilai *sipakatau* terbukti mampu menurunkan ketegangan dan membangun pemahaman bersama di antara warga dengan latar belakang berbeda.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tersebut tidak hanya dimaknai oleh generasi tua, tetapi juga mendapat pengakuan dari generasi muda. Meskipun makna dan bentuk penerapannya mengalami adaptasi, nilai *sipakatau* dan *sipakalebbi* tetap dijadikan acuan etika sosial oleh kalangan muda, terutama dalam kehidupan digital dan aktivitas lintas komunitas. Beberapa informan muda, misalnya, mengaitkan nilai *sipakainge* dengan praktik saling menasihati dalam komunitas daring dan peran tokoh muda dalam menjaga narasi toleransi di media sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks urban seperti Parepare, nilai budaya lokal bertransformasi menjadi instrumen komunikasi sosial yang kontekstual, dinamis, dan inklusif. Kehadirannya tidak hanya memperkuat jaringan sosial, tetapi juga membentuk ruang interaksi lintas iman yang aman, beretika, dan berorientasi pada perdamaian jangka panjang.

2.5.1.2. Nilai Budaya Lokal di Kabupaten Tana Toraja

Moderasi beragama di Kabupaten Tana Toraja bukanlah konsep baru yang diperkenalkan melalui kebijakan formal, tetapi telah lama tertanam dalam praktik sosial masyarakat melalui nilai-nilai budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya seperti Tongkonan, *ma'kombongan*, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* memainkan peran sentral dalam menjaga harmoni sosial dan keberagaman agama. Tongkonan, sebagai rumah adat masyarakat Toraja, tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial yang mengakomodasi berbagai latar belakang agama. Ruang sosial ini memungkinkan berbagai kelompok agama untuk berinteraksi dalam suasana kekeluargaan, berdiskusi, serta menyelesaikan perbedaan secara damai.

Selain Tongkonan, *rambu solo'* sebagai ritual pemakaman adat berfungsi sebagai model koeksistensi antaragama. Prosesi pemakaman ini dihadiri oleh masyarakat dari berbagai latar belakang kepercayaan, yang menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat menjadi alat perekat sosial. Partisipasi masyarakat

Muslim dan Kristen dalam upacara ini menandakan bahwa moderasi beragama di Tana Toraja telah berjalan secara alami, tanpa harus didorong oleh regulasi formal. Dalam praktiknya, *rambu solo'* tidak hanya menjadi bagian dari sistem kepercayaan *aluk todolo*, tetapi juga menjadi ajang pertemuan masyarakat lintas agama yang memperkuat solidaritas sosial.

Rambu tuka' sebagai perayaan syukur juga menjadi ruang inklusif bagi semua kelompok agama untuk berpartisipasi dalam perayaan bersama. Upacara ini menunjukkan bahwa ekspresi budaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, di mana keberagaman agama tidak menjadi pemisah, melainkan perekat hubungan antarindividu dalam komunitas. Observasi dan wawancara dengan tokoh adat serta pemuka agama mengungkapkan bahwa masyarakat Toraja telah lama mengembangkan pola hidup berdampingan yang menjunjung tinggi toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan.

Berbagai bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam Tongkonan, *Rambu Solo'*, dan *Rambu Tuka'* membuktikan bahwa budaya lokal dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun moderasi beragama. Bukti dokumentasi dari "Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja" menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan moderasi beragama di Tana Toraja tidak hanya bertumpu pada kebijakan formal, tetapi juga pada nilai-nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Ma'kombongan, sebagai forum musyawarah adat masyarakat Toraja, berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan perwakilan komunitas dari beragam latar belakang kepercayaan. Tradisi ini menekankan prinsip *unnalli melo* (mengalah untuk menang bersama) yang mendorong terciptanya kompromi dan kesepakatan kolektif demi menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial. Dalam praktiknya, *Ma'kombongan* menjadi ruang dialog lintas agama yang terbuka, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi tanpa memandang perbedaan keyakinan. Observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa forum ini tidak hanya menjaga kelestarian adat, tetapi juga memperkuat moderasi beragama dengan mengedepankan nilai kebersamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap semua pihak yang terlibat.

Hubungan Antara Nilai Budaya Toraja Dengan Moderasi Beragama

Keberlanjutan moderasi beragama di Tana Toraja bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sistem budaya yang telah terstruktur secara turun-temurun. Nilai-nilai lokal seperti Tongkonan, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* memainkan peran kunci dalam membangun hubungan sosial yang harmonis

antara kelompok agama yang berbeda. *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem sosial bergantung pada sinergi antara pemangku kepentingan. Dalam konteks Tana Toraja, pemangku kepentingan yang berperan dalam menjaga moderasi beragama meliputi tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Mereka bekerja sama dalam mempertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya lokal yang mendorong interaksi sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Sebagai contoh, Tongkonan tidak hanya menjadi rumah adat, tetapi juga simbol persatuan yang mawadahi musyawarah dan penyelesaian konflik. Buku *Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja* menegaskan bahwa dalam setiap pertemuan besar di Tongkonan, perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan kolektif. Keberadaan ruang sosial seperti ini memastikan bahwa masyarakat memiliki wadah untuk mendiskusikan perbedaan dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, nilai budaya lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat moderasi beragama, menjadikannya lebih dari sekadar konsep, tetapi juga praktik sosial yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Toraja.

Dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya yang mendukung moderasi beragama, peran pemimpin masyarakat menjadi sangat penting. *Multi-Step Flow Theory* (Lazarsfeld et al., 1948) menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial dan keagamaan tidak langsung diterima oleh masyarakat luas, tetapi melalui perantara *opinion leaders* seperti tokoh adat dan pemuka agama. Dalam konteks Tana Toraja, pemimpin adat dan agama memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya keberagaman dan harmoni sosial. Sebagai contoh, dalam setiap pelaksanaan *rambu solo*, tokoh adat sering kali memberikan arahan kepada masyarakat agar tetap menjunjung tinggi sikap menghormati antarumat beragama. Sebuah wawancara dengan seorang pemuka adat menyebutkan bahwa "Dalam setiap prosesi *rambu solo*, kehadiran umat dari berbagai agama selalu diterima dengan tangan terbuka, karena penghormatan terhadap yang telah meninggal lebih utama daripada membedakan keyakinan." (Wawancara dengan tokoh adat, Tana Toraja, November 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya peran aktif dari *opinion leaders*, nilai budaya yang mendukung moderasi beragama sulit dipertahankan. Buku *Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan* juga mencatat bahwa dalam pelaksanaan *rambu solo*, umat Islam, Kristen, dan penganut *aluk todolo* memiliki peran masing-masing dalam mendukung prosesi pemakaman, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pasca-upacara. Dengan adanya keterlibatan aktif dari berbagai komunitas agama, ritual ini telah menjadi contoh konkret bagaimana budaya dapat menjadi instrumen dalam membangun toleransi dan memperkuat interaksi lintas agama.

Selain sebagai alat pemersatu, nilai budaya di Tana Toraja juga berfungsi sebagai mekanisme dalam menyelesaikan konflik sosial berbasis agama. Sebuah studi dari *Identifying and Resolving Conflicts Using Local Wisdom: A Qualitative Study* menunjukkan bahwa masyarakat yang mengandalkan pendekatan berbasis budaya cenderung lebih memilih dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik daripada menggunakan pendekatan yang lebih konfrontatif. Dalam konteks Tana Toraja, Tongkonan telah lama digunakan sebagai tempat musyawarah keluarga besar dalam menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat, termasuk dalam isu-isu keagamaan.

Dokumentasi dari Buku Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa beberapa konflik antaragama yang pernah terjadi dapat diselesaikan melalui pertemuan adat yang diadakan di Tongkonan. Seorang tokoh agama dalam wawancara menyatakan bahwa "Ketika ada perbedaan atau kesalahpahaman terkait agama, kami lebih memilih untuk duduk bersama di Tongkonan dan berbicara secara terbuka, karena cara ini lebih efektif dibandingkan membiarkan masalah berkembang menjadi konflik besar." (Wawancara dengan tokoh agama, Tana Toraja, November 2024). Hal ini membuktikan bahwa mekanisme budaya dalam bentuk musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai metode penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkelanjutan.

Ritual adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'* juga berperan dalam membangun interaksi lintas agama dan menjaga kohesi sosial. Kedua upacara ini secara alami menciptakan ruang bagi berbagai komunitas agama untuk berpartisipasi dalam satu perayaan yang sama tanpa ada sekat eksklusivitas keagamaan. Dokumentasi dari Buku Toraja, Tongkonan, dan Kerukunan menunjukkan bahwa dalam berbagai acara *rambu solo'*, tidak hanya keluarga inti yang terlibat, tetapi juga masyarakat luas dari berbagai agama yang hadir dan ikut serta dalam prosesi.

Kehadiran umat Muslim, Kristen, dan penganut kepercayaan lokal dalam upacara ini menciptakan interaksi sosial yang inklusif, di mana perbedaan agama bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi bagian dari dinamika sosial yang alami. Studi *Implementasi Cultural Values of Traditional Houses in Learning* juga menegaskan bahwa budaya lokal dapat menjadi sarana efektif dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai inklusivitas dan toleransi. Melalui interaksi yang terjadi dalam ritual adat, masyarakat secara tidak langsung belajar untuk menghargai dan menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Nilai budaya lokal di Tana Toraja bukan hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai instrumen yang nyata dalam membangun moderasi beragama. Sinergi antar pemangku kepentingan, peran *opinion leaders*, serta mekanisme budaya yang mendukung dialog dan interaksi sosial menjadi faktor utama yang menjadikan moderasi beragama tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Tanpa keberlanjutan nilai-nilai budaya ini, potensi munculnya konflik berbasis agama dapat meningkat, mengingat semakin kompleksnya dinamika

sosial di era modern. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari strategi membangun moderasi beragama harus terus diperkuat agar nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan toleransi tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tana Toraja.

Keberhasilan moderasi beragama yang berbasis budaya lokal di Tana Toraja memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas peran budaya dalam menciptakan harmoni sosial. Namun, terdapat pula perbedaan dalam pendekatan dan mekanisme penerapannya. Stakeholder Theory (Freeman, 1984) dan Multi-Step Flow Theory (Lazarsfeld et al., 1948) membantu menjelaskan bagaimana perbedaan dalam peran pemangku kepentingan serta pola komunikasi sosial memengaruhi efektivitas nilai budaya dalam membangun moderasi beragama.

Penelitian oleh Bachrong & Ansar (2021) menunjukkan bahwa budaya Karapasan di Tana Toraja memainkan peran dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ruang inklusif bagi komunitas lintas agama. Namun, dibandingkan dengan budaya Karapasan, nilai-nilai dalam Tongkonan, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* lebih terstruktur dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki mekanisme sosial yang lebih sistematis dalam penyelesaian konflik. Hal ini menunjukkan bahwa peran budaya dalam moderasi beragama di Tana Toraja tidak hanya terletak pada norma sosial yang diwariskan, tetapi juga dalam praktik yang dijalankan secara kolektif oleh masyarakat.

Penelitian Alam (2023) yang membahas *rambu solo'* sebagai ritual adat yang mempertemukan komunitas lintas agama menyoroti bagaimana perayaan ini menjadi simbol kohesi sosial. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek seremonial dan pengaruhnya dalam menjaga keharmonisan sosial tanpa membahas secara mendalam keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung nilai-nilai moderasi beragama. Sebaliknya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upacara seperti *rambu solo'* tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga memiliki nilai sosial yang dapat menjadi alat penyelesaian konflik berbasis agama.

Beberapa kasus, masyarakat dari berbagai latar belakang agama yang hadir dalam *rambu solo'* tidak hanya berperan sebagai pengunjung, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang turut serta dalam proses penyelenggaraan acara. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal di Tana Toraja memiliki peran lebih dari sekadar identitas kultural, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keberagaman dan stabilitas sosial.

Dalam konteks perbandingan antarwilayah, penelitian Daheri (2022) yang membahas moderasi beragama di wilayah lain di Indonesia menekankan pentingnya dialog antaragama yang didukung oleh kebijakan formal dan partisipasi komunitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama yang efektif memerlukan kombinasi antara kebijakan negara dan peran budaya lokal. Jika dibandingkan dengan Tana Toraja, pendekatan yang digunakan dalam

penelitian tersebut cenderung berbasis institusi keagamaan dan peran negara dalam mendorong dialog lintas agama.

Di Tana Toraja, moderasi beragama lebih banyak dipertahankan melalui mekanisme budaya yang diwariskan turun-temurun dan didukung oleh pemangku kepentingan lokal tanpa terlalu bergantung pada kebijakan formal. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa wilayah lain di Indonesia, moderasi beragama lebih banyak ditopang oleh peraturan dan regulasi, sementara di Tana Toraja, nilai-nilai moderasi justru lahir dari praktik budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Perbandingan juga dapat dilakukan dengan penelitian Baharuddin et al. (2021) yang membahas bagaimana nilai budaya di wilayah urban seperti Makassar dan Parepare diterapkan dalam konteks moderasi beragama. Studi tersebut menemukan bahwa di kota-kota besar, moderasi beragama lebih banyak dikaitkan dengan interaksi sosial yang difasilitasi oleh pendidikan dan komunitas akademik. Namun, di Tana Toraja, budaya lokal tetap menjadi faktor utama yang mendukung moderasi beragama, dengan Tongkonan, *rambu solo*, dan *rambu tuka* sebagai ruang interaksi sosial lintas agama.

Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai *opinion leaders* memainkan peran penting dalam membangun moderasi beragama, sebagaimana dijelaskan dalam *Multi-Step Flow Theory* (Lazarsfeld et al., 1948). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penerapannya berbeda, peran aktor sosial dalam menyebarkan nilai-nilai budaya dan agama tetap menjadi faktor utama dalam keberlanjutan moderasi beragama.

Penelitian Febriani & Ritonga (2022) menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi alat dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan generasi muda. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih berfokus pada peran budaya dalam membangun moderasi beragama melalui interaksi sosial langsung, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan platform digital memungkinkan nilai-nilai moderasi beragama dapat disebarluaskan dengan jangkauan yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan Tana Toraja, maka strategi yang dapat dikembangkan adalah mengadaptasi nilai-nilai budaya lokal seperti Tongkonan, *rambu solo*, dan *rambu tuka* dalam media digital agar dapat menjangkau generasi muda yang lebih banyak berinteraksi di ruang virtual. Meskipun nilai budaya di Tana Toraja sangat efektif dalam membangun moderasi beragama, masih ada ruang untuk integrasi dengan media digital agar pesan moderasi beragama dapat terus berkembang dan bertahan dalam dinamika sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif internasional, studi tentang model penyelesaian konflik berbasis budaya di Balkan Barat Limani et al. (2024) menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki sistem sosial berbasis adat lebih mampu mengelola perbedaan dan konflik secara damai. Hal ini sejalan dengan model yang diterapkan di Tana Toraja, di mana masyarakat secara alami menyelesaikan

konflik berbasis agama melalui mekanisme budaya tanpa memerlukan intervensi formal dari negara.

Penelitian tentang Implementasi Nilai Budaya Rumah Adat Tradisional dalam Pembelajaran Suranata et al. (2022) menegaskan bahwa rumah adat bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai alat edukatif dalam memperkuat karakter masyarakat di tengah arus modernisasi. Seperti halnya Tongkonan di Tana Toraja, rumah adat dalam penelitian tersebut memainkan peran strategis dalam mengajarkan nilai-nilai sosial kepada generasi muda, memastikan bahwa warisan budaya tetap menjadi landasan dalam membangun kohesi sosial.

Meskipun ada persamaan dalam bagaimana budaya lokal mendukung moderasi beragama di berbagai wilayah, pendekatan yang digunakan tetap memiliki karakteristik yang berbeda. Tana Toraja menonjol dalam hal bagaimana budaya lokal secara langsung menjadi instrumen sosial yang menjaga keharmonisan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan formal. Hal ini membuktikan bahwa model moderasi berbasis budaya dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berbasis agama. Dengan memahami karakteristik unik dari nilai-nilai budaya di Tana Toraja, pendekatan ini dapat menjadi model yang dapat diadaptasi oleh daerah lain yang memiliki keberagaman agama yang tinggi.

Makna Nilai Budaya Lokal Dalam Interaksi Sosial dan Keagamaan.

Keberlanjutan nilai budaya lokal di Kabupaten Tana Toraja tidak hanya sebatas sebagai simbol identitas komunitas, tetapi juga sebagai instrumen yang aktif dalam membangun harmoni sosial dan moderasi beragama. Tongkonan, *rambu solo*, dan *rambu tuka* bukan hanya warisan budaya yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk hidup berdampingan dalam suasana yang penuh toleransi dan saling menghormati. *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem sosial, termasuk moderasi beragama, sangat dipengaruhi oleh sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks Tana Toraja, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat berperan dalam memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian oleh Taneo et al. (2024) mengenai peran rumah adat Ume Kbbu dalam menjaga identitas komunitas di Atoin Meto sejalan dengan temuan bahwa Tongkonan juga memiliki peran serupa dalam masyarakat Toraja. Ume Kbbu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan edukasi nilai-nilai komunitas, mirip dengan peran Tongkonan yang menjadi pusat penyelesaian masalah, musyawarah, dan upacara adat yang mempertemukan berbagai kelompok agama dalam satu ruang sosial. Konsep ini juga terlihat dalam penelitian mengenai Implementasi Nilai Budaya Rumah Adat Tradisional dalam Pembelajaran (Suranata et al., 2022), yang menunjukkan

bahwa rumah adat berfungsi sebagai instrumen pendidikan bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai keberagaman dan toleransi.

Nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan dalam ritual seperti *rambu solo*' dan *rambu tuka*' memperlihatkan bagaimana masyarakat Toraja mampu mempraktikkan toleransi beragama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian oleh Abatan et al. (2021) tentang resolusi konflik berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki sistem sosial berbasis adat lebih mampu mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks Toraja, upacara seperti *rambu solo*' dan *rambu tuka*' tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk bertemu, berdialog, dan saling berbagi peran dalam prosesi yang sakral. Hal ini membuktikan bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai alat sosial yang efektif dalam memperkuat kerukunan dan mengurangi ketegangan berbasis agama.

Penelitian Limani et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis budaya dalam membangun moderasi beragama telah diterapkan di berbagai masyarakat multikultural di dunia. Studi tersebut mengungkapkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi instrumen dalam menciptakan stabilitas sosial, terutama di daerah yang memiliki sejarah panjang dalam keberagaman agama. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Tana Toraja, di mana nilai-nilai budaya yang kuat telah membantu masyarakat untuk menjaga harmoni tanpa perlu terlalu bergantung pada regulasi formal negara.

Di era digital saat ini, keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal sebagai instrumen moderasi beragama menghadapi tantangan baru. Febriani & Ritonga (2022) menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi alat dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan generasi muda. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang bergantung pada interaksi langsung, media digital memberikan ruang bagi narasi budaya untuk disebarluaskan dalam skala yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan Tana Toraja, maka strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan mengadaptasi nilai-nilai budaya lokal seperti Tongkonan, *rambu solo*', dan *rambu tuka*' dalam format digital, agar dapat menjangkau generasi muda yang lebih banyak berinteraksi di ruang virtual.

Penelitian oleh Jalli (2016) tentang peran media sosial dalam menyebarkan ideologi dan nilai sosial menunjukkan bahwa *opinion leaders*, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkuat pesan-pesan kebudayaan dan moderasi beragama. Dalam konteks Tana Toraja, tokoh-tokoh adat dapat memainkan peran serupa dengan memanfaatkan media digital sebagai alat untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan moderasi beragama. Konsep ini juga diperkuat dalam penelitian Rizal (2022) yang menyoroti bagaimana *opinion leaders* dapat

bertindak sebagai moderator dalam komunitas lokal untuk meningkatkan komitmen terhadap nilai sosial dan keberagaman.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya lokal di Tana Toraja tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga keharmonisan dan moderasi beragama. Dengan tetap mempertahankan praktik budaya dalam kehidupan sehari-hari dan mengadaptasinya dalam konteks digital, nilai-nilai ini dapat terus bertahan di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, strategi berbasis budaya yang menggabungkan pendekatan tradisional dan digital menjadi penting dalam memastikan bahwa moderasi beragama di Tana Toraja tetap terjaga dan terus berkembang.

Tantangan Dalam Menjaga Nilai Budaya Untuk Moderasi Beragama.

Moderasi beragama berbasis budaya lokal di Tana Toraja menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kelangsungan praktik nilai-nilai tradisional seperti Tongkonan, *rambu solo*, dan *rambu tuka* dalam membangun harmoni sosial dan keberagaman agama. Salah satu tantangan utama adalah modernisasi dan perubahan pola komunikasi yang menyebabkan berkurangnya peran budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring berkembangnya zaman, generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital dibandingkan dengan keterlibatan dalam aktivitas budaya dan sosial. Perubahan ini berdampak pada menurunnya partisipasi mereka dalam upacara adat dan tradisi lokal, yang selama ini menjadi wadah bagi moderasi beragama. Jika nilai-nilai budaya tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, maka potensi konflik berbasis agama semakin meningkat karena masyarakat kehilangan mekanisme sosial yang selama ini menjaga keseimbangan dalam keberagaman.

Salah satu penyebab utama dari tantangan ini adalah perubahan preferensi generasi muda yang lebih cenderung berorientasi pada budaya global dibandingkan dengan budaya lokal. Baharuddin et al. (2021) menunjukkan bahwa di wilayah urban seperti Makassar dan Parepare, nilai budaya semakin jarang digunakan sebagai pedoman dalam membangun interaksi sosial. Situasi ini juga mulai terlihat di Tana Toraja, di mana keterlibatan generasi muda dalam upacara adat seperti *rambu solo* dan *rambu tuka* semakin menurun akibat kesibukan dengan pendidikan, pekerjaan, dan meningkatnya ketertarikan pada budaya luar.

Penelitian Febriani & Ritonga (2022) menunjukkan bahwa media sosial kini lebih berpengaruh dalam membentuk pola pikir generasi muda, yang dapat mengakibatkan berkurangnya minat mereka terhadap budaya lokal sebagai bagian dari identitas sosial. Jika tidak ada upaya untuk mengadaptasi nilai-nilai budaya ke dalam kehidupan modern, maka tradisi yang selama ini berfungsi sebagai alat moderasi beragama bisa terkikis oleh modernisasi.

Selain tantangan modernisasi, masuknya paham keagamaan yang lebih eksklusif juga menjadi ancaman bagi praktik moderasi berbasis budaya. Studi

Pajarianto et al. (2023) menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan keberagaman agama tinggi, munculnya kelompok dengan pemahaman keagamaan yang lebih eksklusif dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam praktik budaya yang bersifat inklusif dan lintas agama. Di Tana Toraja, terdapat indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keabsahan upacara adat dari perspektif agama tertentu, yang menyebabkan berkurangnya keterlibatan kelompok tertentu dalam acara seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'*.

Penelitian yang berjudul *The Women's Empowerment Model Based on Cultural Literature to Realize Tourism Aware Villages in Sustainable Development* (2024) menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, budaya lokal yang dikomersialisasikan untuk kepentingan pariwisata mengalami reduksi makna, sehingga kehilangan esensi sosial dan keagamaannya. Dalam konteks Tana Toraja, Tongkonan, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* berisiko menjadi sekadar atraksi wisata tanpa mempertahankan peran aslinya sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat hubungan lintas agama.

Untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat, diperlukan strategi yang dapat menghubungkan budaya lokal dengan kebutuhan zaman modern. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem pendidikan formal dan informal, sehingga generasi muda tetap memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai yang mendukung moderasi beragama.

Penggunaan media digital sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda menjadi strategi penting, sebagaimana diusulkan dalam penelitian Jalli (2016) dan Rizal et al. (2022) mengenai peran media sosial dalam memperkuat komitmen komunitas terhadap nilai sosial dan keberagaman. Dengan menghadapi tantangan ini secara proaktif, nilai-nilai budaya lokal di Tana Toraja dapat terus menjadi fondasi bagi moderasi beragama yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan bahwa praktik-praktik budaya seperti Tongkonan, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.

Strategi Berbasis Budaya Lokal Untuk Membangun Moderasi Beragama.

Untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal di Tana Toraja tetap menjadi fondasi dalam membangun moderasi beragama, diperlukan strategi yang dapat mengadaptasi praktik budaya ke dalam kehidupan sosial modern. Tongkonan, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* telah terbukti berfungsi sebagai ruang sosial yang memungkinkan interaksi lintas agama dan memperkuat harmoni dalam masyarakat. Namun, tanpa adanya langkah strategis yang sistematis, keberlanjutan nilai-nilai ini bisa terancam oleh perubahan sosial, modernisasi, dan pengaruh budaya luar.

Strategi berbasis budaya lokal harus dikembangkan untuk menjaga relevansi nilai-nilai budaya ini dalam membangun toleransi, kerukunan, dan

kohesi sosial di tengah masyarakat yang semakin beragam. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan tradisi, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perubahan zaman. Implementasi yang efektif dari strategi berbasis budaya ini juga dapat membantu memperkuat identitas komunitas dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kehidupan multireligius. Oleh karena itu, upaya penguatan budaya lokal harus dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan pola komunikasi sosial, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kebijakan publik, dan media digital. Bettalayah et al. (2024) menyoroti bahwa dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan pemahaman tentang budaya lokal kepada generasi muda. Jika nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* di Parepare telah terbukti dapat dijadikan pedoman sosial dalam interaksi antaragama, maka di Tana Toraja, Tongkonan, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* juga harus diajarkan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan moderasi beragama.

Pendidikan formal maupun informal perlu menekankan bahwa budaya lokal bukan hanya warisan leluhur, tetapi juga instrumen dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif. Integrasi budaya lokal dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk kurikulum yang mengajarkan tentang sejarah, nilai-nilai, dan praktik budaya yang mendukung moderasi beragama, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks kebijakan publik, strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memasukkan nilai-nilai budaya lokal ke dalam regulasi daerah tentang kerukunan umat beragama. Studi Pajarianto et al. (2023) menunjukkan bahwa daerah yang memiliki kebijakan berbasis budaya lebih mampu dalam mempertahankan stabilitas sosial dan mengelola keberagaman agama. Di Tana Toraja, langkah ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mendukung praktik budaya yang mendukung moderasi beragama. *Rambu solo'* dan *rambu tuka'* dapat dijadikan sebagai bagian dari program kebersamaan lintas agama yang difasilitasi oleh FKUB, sehingga tetap menjadi ruang dialog sosial bagi berbagai komunitas.

Penelitian *Mainstreaming Religious Moderation in the Digital Space* (2024) menunjukkan bahwa moderasi beragama semakin efektif jika dikombinasikan dengan strategi komunikasi digital. Oleh karena itu, penguatan narasi budaya dalam media digital perlu menjadi bagian dari strategi untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tetap relevan dan dapat diakses oleh generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya lokal dapat diperkenalkan kepada audiens yang lebih luas, termasuk masyarakat yang tidak

tinggal di wilayah Tana Toraja, tetapi tetap ingin memahami dan menghargai nilai-nilai budaya tersebut.

Dengan adanya strategi berbasis budaya lokal yang melibatkan pendidikan, kebijakan publik, dan media digital, nilai-nilai moderasi beragama yang telah mengakar dalam masyarakat Tana Toraja dapat terus beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Menggunakan budaya sebagai instrumen moderasi beragama tidak hanya memastikan bahwa Tongkonan, *rambu solo*, dan *rambu tuka* tetap berfungsi sebagai ruang sosial yang inklusif, tetapi juga memperkuat sistem nilai dalam masyarakat yang mendorong toleransi dan harmoni lintas agama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dapat dijaga melalui regulasi formal, tetapi juga melalui praktik budaya yang terus diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Strategi berbasis budaya lokal harus dijadikan bagian integral dari pembangunan sosial di Tana Toraja untuk memastikan keberlanjutan harmoni dan moderasi beragama yang telah diwariskan secara turun-temurun. Penerapan strategi ini juga dapat menjadi model bagi wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang serupa, sehingga moderasi beragama berbasis budaya dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam menjaga keberagaman dan harmoni sosial. Dengan demikian, Tana Toraja dapat menjadi contoh bagaimana budaya lokal dapat digunakan sebagai alat utama dalam membangun dan mempertahankan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif.

Dalam konteks masyarakat rural seperti Kabupaten Tana Toraja, nilai-nilai budaya lokal tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga berfungsi nyata sebagai mekanisme komunikasi sosial lintas agama. Budaya seperti *Tongkonan*, *rambu solo*, dan *aluk todolo* tidak terpisah dari kehidupan keagamaan masyarakat, melainkan justru menjadi ruang yang memungkinkan perjumpaan antarumat beragama dalam suasana yang egaliter dan penuh penghormatan.

Tradisi *rambu solo*, misalnya, menyatukan komunitas Kristen dan Islam dalam kerja sama kolektif, mulai dari persiapan logistik hingga partisipasi dalam ritual utama. Tongkonan, sebagai pusat musyawarah keluarga dan komunitas, berfungsi sebagai arena deliberasi di mana persoalan sosial dan keagamaan dibahas secara inklusif. Sedangkan *aluk todolo*, meskipun sebagai warisan kepercayaan leluhur, tetap hidup dalam bentuk nilai moral dan spiritual yang mengajarkan keseimbangan dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan.

Sekretaris Umum MUI Tana Toraja menegaskan bahwa “masyarakat lintas agama tetap mengakui dan berpartisipasi dalam ruang budaya seperti *rambu solo* dan Tongkonan,” menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi media aktif dalam menjalin solidaritas lintas iman. Ia juga menyoroti adanya tantangan regenerasi nilai di kalangan anak muda, yang cenderung melihat praktik adat secara simbolik atau bahkan sekadar tontonan budaya. Meskipun demikian, terdapat kesadaran dari sebagian generasi muda

untuk melestarikan nilai-nilai tersebut, terutama yang terkait dengan kebersamaan dan penghormatan antaragama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya di Tana Toraja menyatu secara dinamis dengan agama dan kehidupan sosial, bukan sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai sarana kohesi sosial dan penguat moderasi beragama yang berbasis komunitas. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai ini tetap menunjukkan vitalitasnya sebagai instrumen resolusi konflik dan pembentukan harmoni lintas iman di wilayah rural.

Nilai-Nilai Budaya Di Parepare dan Tana Toraja Dapat Mendukung Moderasi Beragama.

Nilai-nilai budaya lokal di Parepare dan Tana Toraja, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, budaya Tongkonan, ritual *ma'kombongan*, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'*, telah terbukti memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni sosial dan membangun moderasi beragama. Budaya lokal ini tidak hanya menjadi pedoman moral masyarakat tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam membangun interaksi lintas agama yang inklusif dan berkelanjutan. Budaya tersebut berkembang secara organik dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak memerlukan regulasi formal untuk memastikan keberlangsungannya.

Sebagai bagian dari warisan leluhur, nilai-nilai budaya ini juga berkontribusi dalam membentuk sistem nilai yang mendukung keberagaman dan toleransi. Oleh karena itu, budaya lokal bukan sekadar tradisi, tetapi juga alat strategis yang dapat menjaga keseimbangan sosial dan mencegah potensi konflik berbasis agama di masyarakat yang plural seperti di Parepare dan Tana Toraja.

Moderasi beragama yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar regulasi formal. Masyarakat membutuhkan nilai-nilai yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan toleransi yang bersifat alami. Budaya di Parepare dan Tana Toraja menyediakan fondasi tersebut dengan mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan membangun mekanisme sosial dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. Budaya yang telah diwariskan turun-temurun membentuk norma sosial yang diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa paksaan, berbeda dengan regulasi yang mungkin sulit diterima oleh kelompok tertentu. Dengan adanya budaya yang mendukung nilai inklusivitas dan penghormatan terhadap sesama, interaksi sosial yang lebih harmonis dapat tercipta secara berkelanjutan. Selain itu, nilai budaya juga memiliki sifat adaptif yang memungkinkan mereka untuk terus relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern.

Berdasarkan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), keberhasilan suatu sistem sosial ditentukan oleh sinergi berbagai pemangku kepentingan. Di Parepare, nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* diwariskan melalui tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi, serta didukung oleh FKUB (Forum Kerukunan

Umat Beragama) dan pemerintah daerah dalam berbagai program sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya tidak hanya bertahan sebagai identitas, tetapi juga menjadi alat dalam membangun harmoni sosial.

Di Tana Toraja, budaya Tongkonan, *ma'kombongan*, *rambu solo'*, dan *rambu tuka'* telah lama berfungsi sebagai mekanisme interaksi sosial lintas agama. Studi *Implementation of Cultural Values of Traditional Houses in Learning* (2023) menunjukkan bahwa rumah adat bukan hanya simbol budaya, tetapi juga media edukatif dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan koeksistensi beragama. Dengan peran berbagai pemangku kepentingan ini, budaya tidak hanya menjadi alat untuk membentuk identitas komunitas, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis agama.

Nilai-nilai budaya lokal dapat mendukung moderasi beragama karena tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk hidup berdampingan secara damai. Dengan budaya yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman, interaksi antaragama dapat terjadi secara alami tanpa adanya batasan yang menghambat. Oleh karena itu, strategi berbasis budaya harus diintegrasikan dalam pendekatan pembangunan sosial dan kebijakan moderasi beragama. Pendekatan ini tidak hanya lebih efektif dalam menciptakan toleransi yang berkelanjutan, tetapi juga lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan regulasi formal yang mungkin tidak sejalan dengan praktik budaya lokal.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan dalam Buku Moderasi Beragama yang menekankan bahwa moderasi tidak hanya dapat dicapai melalui regulasi formal, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan partisipasi masyarakat. Konsep moderasi dalam buku ini menyatakan bahwa keseimbangan dan inklusivitas adalah kunci utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Budaya memiliki potensi besar dalam membangun moderasi beragama karena secara alami mengajarkan masyarakat untuk menerima perbedaan tanpa adanya tekanan eksternal. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang telah lama eksis di Parepare dan Tana Toraja memperlihatkan bagaimana moderasi beragama dapat terwujud secara organik dalam masyarakat tanpa adanya intervensi kebijakan yang terlalu ketat.

Buku Moderasi Beragama menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai budaya dalam membangun kehidupan keagamaan yang moderat. Penelitian ini membuktikan bahwa budaya di Parepare dan Tana Toraja memainkan peran tersebut dengan menyediakan ruang interaksi lintas agama melalui nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ini memperlihatkan bahwa budaya dapat menjadi instrumen moderasi yang tidak hanya menumbuhkan sikap toleran, tetapi juga menjadi alat dalam menyelesaikan konflik sosial. Sebagai contoh, di Parepare, nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* membantu masyarakat dalam menjaga hubungan sosial yang baik dengan sesama, sementara di Tana Toraja, upacara adat seperti *rambu solo'* dan *rambu tuka'*

menjadi arena bagi masyarakat lintas agama untuk berinteraksi dan memperkuat hubungan sosial.

Penelitian *Mainstreaming Religious Moderation in the Digital Space* menunjukkan bahwa moderasi beragama dapat diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas dan budaya. Hal ini sejalan dengan penelitian ini, yang menemukan bahwa budaya di Parepare dan Tana Toraja telah berhasil menjaga harmoni sosial dengan cara yang lebih organik dibandingkan pendekatan berbasis regulasi. Selain itu, *penelitian Identifying and Resolving Conflicts Using Local Wisdom* menunjukkan bahwa komunitas dengan sistem sosial berbasis adat lebih mampu mengelola konflik berbasis agama dibandingkan komunitas yang lebih mengandalkan pendekatan legalistik. Temuan ini semakin memperkuat bahwa budaya memiliki peran yang lebih efektif dibandingkan regulasi formal dalam membangun moderasi beragama.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan konsep dalam Buku Moderasi Beragama, di mana budaya memainkan peran yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat yang toleran dan inklusif. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang telah terbukti efektif dalam moderasi beragama di Parepare dan Tana Toraja dapat menjadi model bagi strategi nasional. Pendekatan berbasis budaya ini perlu dipertimbangkan dalam kebijakan publik agar moderasi beragama dapat berkembang dengan pendekatan yang lebih diterima oleh masyarakat dan lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Perbandingan antara Kota Parepare dan Kabupaten Tana Toraja mengungkap bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi pendekatan komunikasi nilai budaya dalam membangun moderasi beragama. Kedua wilayah menunjukkan bahwa nilai lokal dapat menjadi instrumen sosial yang kuat dalam merawat harmoni, namun pendekatan dan ekosistem yang membentuk nilai tersebut sangat berbeda.

Parepare, sebagai kota dengan mayoritas Muslim dan karakter urban, mengandalkan mekanisme dialog sosial formal dan informal, seperti *tudang sipulung*, serta nilai-nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* sebagai prinsip etis dalam interaksi sosial. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman praktis yang diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial lintas agama. Dalam konteks urban, tantangan keberagaman agama sering muncul dalam bentuk resistensi simbolik, sehingga strategi yang digunakan lebih menekankan pada musyawarah, mediasi, dan integrasi nilai budaya ke dalam regulasi formal dan ruang publik.

Tana Toraja, dengan mayoritas Kristen dan struktur masyarakat rural, lebih menekankan komunikasi berbasis partisipasi komunitas dan tradisi ritual, seperti *rambu solo'*, Tongkonan, dan *aluk todolo*. Tradisi ini bukan hanya upacara simbolik, tetapi ruang aktual di mana masyarakat lintas agama berinteraksi, saling membantu, dan membangun solidaritas melalui praktik budaya. Nilai-nilai yang dominan di wilayah ini dibentuk oleh pola kehidupan komunal, kedekatan antarwarga, dan legitimasi sosial yang bersumber dari adat istiadat. Dalam

konteks rural, perbedaan agama justru dipeluk dalam semangat kebersamaan yang diikat oleh sistem budaya turun-temurun.

Dengan demikian, nilai dominan seperti *sipakatau* di Parepare dan *rambu solo*' di Tana Toraja merepresentasikan pendekatan khas dari masing-masing ekosistem sosial. Meskipun strategi komunikasi berbeda satu berbasis deliberasi kebijakan dan ruang formal, satu berbasis budaya komunal dan ritual keduanya menunjukkan efektivitas dalam memperkuat moderasi beragama. Kesamaan terletak pada komitmen kolektif masyarakat lokal untuk menjaga kerukunan, menjadikan budaya sebagai bahasa bersama dalam mengelola perbedaan keyakinan.

Perbandingan ini mempertegas bahwa moderasi beragama tidak bisa didesain secara seragam, tetapi harus dibentuk dari dalam kultur masyarakat, dengan menghormati dinamika lokal. Strategi komunikasi berbasis nilai budaya menjadi lebih relevan ketika selaras dengan pola relasi sosial, struktur keyakinan, dan tantangan khas yang dihadapi oleh masing-masing komunitas.

Keterkaitan Antara Budaya Lokal dengan Moderasi Beragama

Keberhasilan moderasi beragama yang berbasis budaya menunjukkan bahwa identitas lokal memiliki potensi besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Budaya bukan hanya sekadar warisan sejarah, tetapi juga mekanisme sosial yang hidup dan berkembang dalam interaksi masyarakat. Budaya memungkinkan masyarakat untuk membangun moderasi secara natural tanpa adanya pemaksaan dari regulasi formal yang terkadang kurang efektif dalam diterapkan di masyarakat plural. Moderasi berbasis budaya ini memungkinkan berbagai kelompok agama untuk menemukan titik temu dan membangun relasi sosial yang lebih kuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keterkaitan antara budaya lokal dengan moderasi beragama tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang nyata dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan berbasis budaya dalam moderasi beragama memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan berbasis regulasi formal karena lebih bersifat organik dan telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Budaya memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menerima perbedaan tanpa harus merasa terpaksa oleh regulasi dari pemerintah. Nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menjaga toleransi antaragama dibandingkan dengan kebijakan formal yang dapat berubah seiring dengan perubahan politik atau kepemimpinan. Oleh karena itu, integrasi nilai budaya dalam moderasi beragama tidak hanya menjadi langkah strategis, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan sosial di masyarakat yang beragam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tongkonan di Tana Toraja bukan hanya rumah adat, tetapi juga ruang diskusi dan mediasi sosial, di mana keputusan-keputusan kolektif dibuat berdasarkan nilai musyawarah. Konsep ini

sejalan dengan penelitian *Western Balkans: It's Complicated*, yang menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi faktor utama dalam membangun harmoni sosial di masyarakat multikultural. Selain itu, studi *The Women's Empowerment Model Based on Cultural Literature* menunjukkan bahwa budaya yang diwariskan melalui komunitas memiliki peran yang lebih kuat dalam membentuk pola pikir inklusif dibandingkan dengan regulasi formal yang sering kali tidak efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat. Studi ini semakin memperkuat bahwa nilai budaya tidak hanya sebatas identitas lokal, tetapi juga menjadi alat sosial yang dapat membangun sikap moderasi beragama di berbagai konteks.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal memiliki peran yang sangat penting dalam membangun moderasi beragama. Identitas lokal tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai mekanisme sosial yang terus berkembang dan dapat menjadi model dalam membangun keberagaman yang harmonis. Oleh karena itu, strategi berbasis budaya harus diperkuat untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi tetap terjaga dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Implikasi Sosial dan Tantangan Dalam Penerapan Moderasi Beragama Berbasis Budaya.

Meskipun budaya lokal di Parepare dan Tana Toraja telah terbukti efektif dalam mendukung moderasi beragama, tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan dan mengadaptasi nilai-nilai ini dalam konteks modern. Globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di kalangan generasi muda menjadi tantangan utama dalam mempertahankan moderasi berbasis budaya. Jika nilai-nilai ini tidak diwariskan dengan cara yang relevan dengan zaman, ada kemungkinan besar bahwa efektivitasnya dalam membangun toleransi akan menurun.

Era modern saat ini, banyak generasi muda yang lebih banyak terpapar dengan nilai-nilai global yang cenderung mengurangi keterikatan mereka terhadap budaya lokal. Budaya lokal yang dahulu diwariskan melalui interaksi langsung dalam komunitas, kini semakin tergeser oleh informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang mendukung moderasi beragama tetap dapat bertahan dan diwariskan kepada generasi berikutnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Penelitian *Youth Participation in Religious Activities and Nation Character Development in Indonesia* menekankan bahwa generasi muda lebih banyak terpapar dengan narasi keagamaan yang disebarlan melalui media sosial dibandingkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi baru diperlukan untuk menjangkau generasi muda agar tetap mempertahankan moderasi berbasis budaya. Selain itu, studi *Relation of Social Media Literacy, Trust, and Information Quality on Public* menunjukkan bahwa penggunaan media digital yang tidak dikontrol dapat

menjadi tantangan bagi keberlanjutan nilai-nilai budaya, terutama jika informasi yang beredar lebih banyak dipengaruhi oleh narasi ekstremis dibandingkan dengan nilai-nilai moderasi.

Untuk memastikan keberlanjutan moderasi berbasis budaya, perlu ada adaptasi strategi komunikasi, termasuk penggunaan media digital dan peran *opinion leaders* dalam menyebarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Jika nilai-nilai ini dapat dikemas dengan baik dalam format yang lebih menarik dan relevan dengan kondisi sosial saat ini, maka keberlanjutan moderasi berbasis budaya dapat lebih terjamin di masa depan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model dalam merancang kebijakan moderasi beragama di tingkat nasional. Pendekatan berbasis budaya telah terbukti lebih efektif dalam membangun moderasi beragama dibandingkan dengan pendekatan berbasis regulasi formal. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya yang telah teruji dalam membangun harmoni sosial di Parepare dan Tana Toraja dapat diadopsi dan diintegrasikan dalam kebijakan nasional yang lebih luas.

Pendekatan berbasis budaya lebih mudah diterima oleh masyarakat karena mereka merasa bahwa nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jika dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat *top-down*, kebijakan berbasis budaya lebih efektif karena diterapkan secara *bottom-up* dengan melibatkan komunitas secara langsung. Dengan demikian, strategi ini lebih mampu menciptakan keberlanjutan dalam jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan regulasi.

Model komunikasi dalam gambar menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tidak efektif tanpa peran aktif dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan saluran komunikasi yang tepat. Dalam konteks Parepare dan Tana Toraja, nilai budaya seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, *rambu solo'*, Tongkonan, dan *rambu tuka'* disebarluaskan melalui tokoh adat, pemuka agama, akademisi, media, dan institusi sosial. Selain itu, mekanisme difusi melalui saluran formal (pendidikan, kebijakan) dan digital (media sosial, diskusi online) menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai moderasi ini. Dengan memahami model ini, strategi nasional dapat dirancang untuk memperkuat moderasi beragama berbasis budaya dengan memastikan bahwa stakeholder bekerja sama dalam menyebarkan nilai-nilai ini ke berbagai lapisan masyarakat.

Moderasi beragama berbasis budaya yang telah berhasil diterapkan di Parepare dan Tana Toraja dapat dijadikan acuan kebijakan nasional dalam membangun keberagaman yang harmonis di Indonesia. Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan ini dalam merancang kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis partisipasi komunitas, sehingga moderasi beragama dapat tumbuh secara natural dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

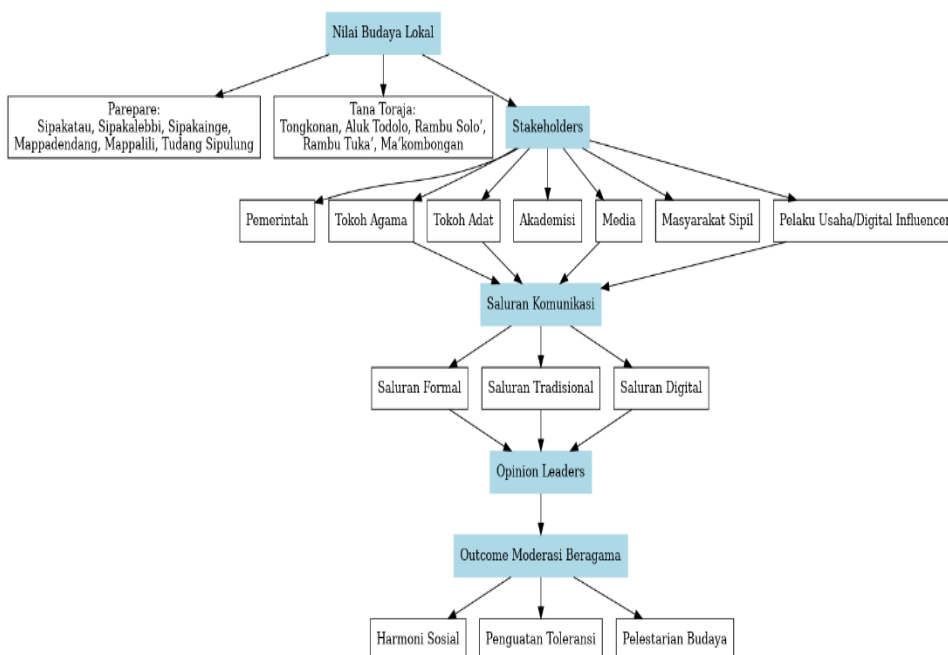
Model Komunikasi Nilai Budaya untuk Moderasi Beragama

Model komunikasi nilai budaya untuk moderasi beragama adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam interaksi sosial

untuk menciptakan harmoni dan toleransi antarumat beragama. Model ini menekankan bahwa budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas komunitas, tetapi juga sebagai mekanisme komunikasi yang efektif dalam membangun moderasi beragama. Dalam konteks ini, komunikasi berbasis nilai budaya memainkan peran sebagai media dialog, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai kelompok agama dalam masyarakat. Tradisi musyawarah seperti *tudang sipulung* di Parepare dan peran Tongkonan di Tana Toraja menunjukkan bahwa ruang deliberatif berbasis budaya mampu menjadi sarana komunikasi yang inklusif untuk menyelesaikan perbedaan tanpa konfrontasi.

Ritual budaya seperti *mappalili* dan *mappadendang* di masyarakat Bugis serta *rambu solo'* dan *rambu tuka'* di Tana Toraja berfungsi sebagai alat komunikasi sosial yang mempererat keterhubungan antaragama melalui partisipasi kolektif. Model ini menekankan bahwa moderasi beragama tidak hanya dapat dibangun melalui kebijakan formal atau regulasi negara, tetapi juga melalui mekanisme komunikasi berbasis budaya, di mana nilai-nilai seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge* diimplementasikan dalam interaksi sosial untuk membangun pemahaman bersama. Dengan demikian, model komunikasi nilai budaya untuk moderasi beragama menjadi pendekatan strategis yang mengadaptasi praktik komunikasi tradisional untuk menjaga keseimbangan antara identitas budaya dan keberagaman agama dalam masyarakat multikultural.

Gambar 2.1 disajikan komunikasi nilai budaya dalam membangun moderasi beragama, yang menggambarkan bagaimana berbagai elemen budaya di Parepare dan Tana Toraja dapat berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial dan toleransi antaragama. Model ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya, pemangku kepentingan (*stakeholders*), saluran komunikasi (*diffusion channels*), *opinion leaders*, dan dampak yang dihasilkan dalam moderasi beragama.



Gambar 2.1 Komunikasi Nilai Budaya Lokal untuk Moderasi Beragama
Sumber: Data Penelitian, 2024

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa efektivitas nilai-nilai budaya dalam membangun moderasi beragama sangat bergantung pada peran aktif pemangku kepentingan dan mekanisme komunikasi yang digunakan. Komunikasi nilai budaya lokal menampilkan bagaimana berbagai nilai budaya *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, tradisi *mappadandang* dan *mappalili* dari Parepare serta ajaran *aluk todolo*, rumah adat Tongkonan, ritual *rambu tuka'*, *rambu solo'* dan *ma'kombongan* dari Tana Toraja tidak hanya bertahan sebagai identitas lokal, tetapi juga berkembang sebagai alat sosial dalam menciptakan harmoni dan toleransi beragama.

Moderasi beragama berbasis budaya merupakan pendekatan strategis dalam membangun harmoni sosial di masyarakat multikultural. Pendekatan ini menekankan peran stakeholder dalam menyebarkan nilai-nilai budaya, mekanisme komunikasi yang digunakan, serta pengaruh *opinion leaders* dalam membentuk pemahaman masyarakat. Dengan komunikasi yang efektif, moderasi beragama berbasis budaya dapat memperkuat toleransi, melestarikan tradisi, dan mencegah konflik berbasis agama. Studi kasus di Parepare dan Tana Toraja menunjukkan bagaimana integrasi nilai budaya dengan strategi komunikasi mampu menciptakan keterhubungan sosial yang kuat. Oleh karena itu, model ini dapat dijadikan acuan dalam kebijakan nasional untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

1) Peran *Stakeholders* dalam Menyebarluaskan Nilai Budaya

Stakeholder berperan sebagai aktor utama dalam menyebarluaskan nilai-nilai budaya yang mendukung moderasi beragama. Dalam model ini, stakeholder terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, media, dan sektor bisnis. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki peran spesifik dalam mempertahankan dan memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Tokoh agama dan tokoh adat memainkan peran utama dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya nilai budaya dalam membangun toleransi, sementara pemerintah dan FKUB berfungsi sebagai penghubung dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung moderasi berbasis budaya. Selain itu, akademisi berkontribusi dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai ini melalui penelitian dan publikasi, sedangkan media dan masyarakat sipil bertindak sebagai penyebar informasi dan promosi nilai-nilai budaya ini kepada publik.

2) Mekanisme Difusi: Jalur Komunikasi yang Digunakan

Mekanisme difusi menjadi aspek krusial dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama ke berbagai lapisan masyarakat. Gambar 2.1 menunjukkan tiga jalur utama yang digunakan: saluran formal, saluran tradisional, dan saluran digital.

- a. Saluran formal mencakup pendidikan, kebijakan pemerintah, serta forum-forum diskusi yang dilakukan secara langsung. Sekolah dan institusi keagamaan menjadi wadah penting untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, sedangkan FKUB dan organisasi keagamaan menjadi penghubung dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di tingkat komunitas.
- b. Saluran tradisional meliputi upacara adat, pertemuan komunitas, dan praktik budaya yang berlangsung secara turun-temurun seperti *rambu solo*, *mappalili*, atau *ma'kombongan*. Saluran ini mengandalkan interaksi tatap muka dalam konteks budaya lokal yang sarat nilai, sehingga pesan moderasi beragama tersampaikan secara kontekstual dan emosional.
- c. Saluran digital mencakup media sosial dan platform digital lainnya yang menjadi sarana efektif dalam menyebarluaskan nilai budaya ke generasi muda. Studi dari *Mainstreaming Religious Moderation in the Digital Space* menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam menjangkau audiens luas, terutama dalam memperkenalkan nilai-nilai moderasi di kalangan anak muda. Oleh karena itu, strategi berbasis digital harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya di era modern.

3) Peran *Opinion Leaders* dalam Mempengaruhi Masyarakat

Opinion leaders dalam model ini bertindak sebagai perantara antara nilai budaya dan masyarakat luas. *Opinion leaders* dapat berasal dari tokoh agama,

tokoh adat, serta figur publik yang memiliki pengaruh besar dalam komunitasnya. Dengan pendekatan berbasis *Multi-Step Flow Theory* (Lazarsfeld et al., 1948), nilai-nilai budaya dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat jika disebarluaskan melalui tokoh-tokoh yang dihormati. Dalam konteks Parepare dan Tana Toraja, tokoh adat dan pemuka agama sering kali menjadi perantara dalam menyebarkan nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, *sipakainge*, *rambu solo*, tongkonan, dan *rambu tuka* ke generasi berikutnya.

4) Dampak Moderasi Beragama Berbasis Budaya

Gambar 2.1 ini juga menunjukkan bagaimana komunikasi nilai budaya yang efektif dapat menghasilkan *moderation outcomes* (hasil moderasi), yaitu:

- a. *Social harmony* (harmoni sosial). Nilai budaya lokal menciptakan masyarakat yang hidup berdampingan secara damai tanpa konflik berbasis agama.
- b. *Tolerance reinforcement* (penguatan toleransi). Budaya membantu masyarakat untuk memahami dan menghargai keberagaman tanpa merasa terancam oleh perbedaan.
- c. *Cultural preservation* (pelestarian budaya). Moderasi berbasis budaya tidak hanya mempertahankan keberagaman agama, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat.

Moderasi beragama berbasis budaya tidak dapat berjalan secara efektif tanpa keterlibatan berbagai stakeholder serta mekanisme komunikasi yang tepat. Dengan memahami peran *stakeholder*, jalur komunikasi, serta hasil yang ingin dicapai, kebijakan moderasi beragama di tingkat nasional dapat dirancang dengan lebih efektif. Pemerintah dapat mengadopsi model ini sebagai strategi nasional dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif. Pendekatan berbasis budaya seperti yang telah diterapkan di Parepare dan Tana Toraja dapat menjadi acuan kebijakan nasional dalam membangun keberagaman yang harmonis di Indonesia, mengurangi konflik berbasis agama, serta memperkuat identitas budaya sebagai alat sosial yang berkelanjutan.

2.6. Simpulan

Penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa nilai-nilai budaya lokal seperti *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi*, tradisi *mappadandang*, dan *mappalili* di Kota Parepare serta adat Tongkonan, kepercayaan *aluk todolo*, tradisi *rambu solo*, *rambu tuka* dan *ma'kombongan* di Kabupaten Tana Toraja bukan sekadar simbol warisan leluhur, tetapi berfungsi nyata sebagai mekanisme komunikasi sosial yang mendukung moderasi beragama. Nilai-nilai tersebut diverifikasi melalui wawancara, observasi partisipatif, serta dokumentasi kegiatan lintas iman yang menunjukkan bahwa nilai budaya masih hidup, berkembang, dan menjadi rujukan dalam merawat harmoni sosial di tengah keberagaman agama.

Di Kota Parepare yang berkarakter urban dan mayoritas Muslim, nilai-nilai seperti *sipakatau* dan *sipakalebba* telah menjadi kerangka etik dalam membangun dialog sosial dan penyelesaian konflik antarumat. Praktik musyawarah *tudang sipulung*, ritual agraris *mappalili* dan *mappadandang*, serta keterlibatan tokoh adat dan pemuka agama memperlihatkan bagaimana budaya lokal dipraktikkan secara aktual dan diteruskan kepada generasi muda, meskipun terdapat kecenderungan pergeseran makna.

Di Kabupaten Tana Toraja yang cenderung rural dan mayoritas Kristen, tradisi seperti *rambu solo'*, *rambu tuka'*, *ma'kombongan* dan Tongkonan tidak hanya menjadi ekspresi budaya, tetapi juga wadah solidaritas lintas iman. Nilai spiritual dalam *aluk todolo* memperlihatkan kemampuan adaptif budaya lokal dalam berdampingan dengan agama formal. Meski diakui oleh tokoh-tokoh lokal bahwa regenerasi nilai menghadapi tantangan, praktik budaya ini masih aktif dan diterima oleh kalangan muda dalam bentuk partisipasi aktif dalam prosesi adat.

Perbandingan kontekstual menunjukkan bahwa strategi komunikasi budaya antara Parepare dan Tana Toraja berbeda dalam bentuk, tetapi memiliki tujuan yang sama. Di Parepare, pendekatan formal-institusional dan dialog sosial menjadi penguat, sedangkan di Tana Toraja, tradisi dan partisipasi kolektif melalui upacara adat menjadi wahana moderasi. Perbedaan ekosistem sosial, keagamaan, dan struktur masyarakat turut membentuk cara nilai-nilai budaya dijalankan dan diteruskan.

Dengan menggabungkan pendekatan *Stakeholder Theory* dan *Multi-Step Flow Theory*, penelitian ini menunjukkan bahwa opinion leader, baik tokoh agama, adat, maupun pemerintah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam menyebarkan nilai budaya sebagai instrumen moderasi. Komunikasi lintas iman berbasis budaya lokal terbukti efektif dalam membangun harmoni sosial yang tidak hanya berbasis pada regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif.

Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan model komunikasi moderasi beragama berbasis budaya lokal yang kontekstual, berakar kuat pada praktik sosial masyarakat, dan memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain. Penelitian ini juga membuka ruang baru bagi pengembangan kebijakan publik berbasis budaya serta integrasi strategi komunikasi budaya ke dalam ruang digital untuk menjangkau generasi muda.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam kajian komunikasi budaya dan moderasi beragama dengan menghadirkan pendekatan empiris berbasis etnografi komunikasi yang belum banyak dilakukan sebelumnya. Melalui pemanfaatan teori *stakeholder* dan *multi-step flow*, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi aktor kunci dalam penyebaran nilai-nilai budaya, tetapi juga memetakan bagaimana pesan-pesan moderasi disebarluaskan secara berlapis melalui interaksi sosial, media tradisional, dan ruang digital.

Konseptualisasi nilai budaya lokal sebagai instrumen komunikasi strategis dalam penguatan moderasi beragama menjadi kontribusi baru yang

memperkaya wacana moderasi yang selama ini lebih banyak diposisikan dalam pendekatan normatif atau regulatif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang diskusi akademik ke arah model hibryd antara budaya dan komunikasi dalam tata kelola keberagaman.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, terdapat sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Perluasan wilayah studi ke daerah lain di Indonesia dengan karakter budaya dan demografis berbeda guna menguji konsistensi model komunikasi moderasi berbasis budaya dalam konteks yang lebih luas dan beragam.
2. Integrasi metode kuantitatif, seperti survei atau eksperimen sosial, untuk mengukur sejauh mana nilai budaya lokal benar-benar memengaruhi sikap toleransi dan perilaku masyarakat lintas agama.
3. Eksplorasi lebih dalam terhadap digitalisasi nilai budaya lokal, terutama bagaimana media sosial dapat menjadi ruang baru dalam merawat dan menyebarkan nilai-nilai seperti *sipakatau* atau *rambu solo'* kepada generasi muda secara lebih kreatif dan interaktif.
4. Analisis kebijakan publik berbasis budaya, untuk menilai bagaimana pemerintah daerah maupun pusat dapat mengadopsi dan menginstitutionalisasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam program-program pembangunan sosial dan keagamaan.
5. Studi longitudinal, untuk melacak perubahan makna dan praktik nilai budaya di tengah masyarakat akibat globalisasi, migrasi, atau disrupsi digital, sehingga dapat diketahui dinamika keberlanjutan nilai-nilai lokal dalam menghadapi tantangan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan kontribusi teoritik dan praktis, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan model moderasi beragama yang lebih kontekstual, responsif, dan berkelanjutan, berbasis pada kekuatan budaya masyarakat Indonesia.

2.7. Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2023). *Duduk Perkara Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare Ditolak Warga*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6973950/duduk-perkara-pembangunan-sekolah-kristen-gamaliel-di-parepare-ditolak-warga>
- Akhmedshina, F. A. (2021). Interreligious dialogue in modern Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10. <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00287.1>
- Alam, S. (2023). Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tana. *Sosioireligius: Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v8i1.40341>
- Alang, A. H. (2020). Siring Culture in Tana Toraja. *International Journal of Asian Education*, 1. <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.67>

- Andri. (2023). *Tongkonan Sebagai Media Toleransi Beragama di Tana Toraja Dalam Kajian Sosiologis*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6h24z>
- Andy, S., Afifa, F. Z., Lubis, N. A. S., Ramadhani, R. M., & Sari, S. P. (2021). Implementasi Pendidikan Agama dalam Membangun Kerukunan Umat Selama Pandemi Covid-19 pada Anak Usia Dini di Kecamatan Binjai Utara. In *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* (Vol. 5, Issue 1, pp. 737–744). STKIP Muhammadiyah Enrekang. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.2028>
- Astika, V. D. (2020). *Studi Etnografi Virtual Aktivitas #memedakwah di Media Sosial Instagram*. Skripsi S1, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Aulia, G. R., & Nawas, Si. S. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Umat Bergama Pada Upacara Rambu Solo Di Tana Toraja. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(2), 83–98. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i2.23115>
- Bachrong, F., & Ansar, F. A. (2021a). Religious Moderation in Karapasan the Local Culture of Tana Toraja Community in South Sulawesi. *Al-Qalam*, 27(1), 63. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i1.973>
- Bachrong, F., & Ansar, F. A. (2021b). Religious Moderation In Karapasan The Local Culture Of Tana Toraja Community In South Sulawesi. *Al-Qalam*, 27. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i1.973>
- Baharuddin, H., Asmal, I., & Syarif, E. (2021). The Impact of Local Wisdom on the Coastal Settlement Spatial Configuration in the City of Parepare. *EPI International Journal of Engineering*, 4. <https://doi.org/10.25042/10.25042/epi-ije.082021.11>
- Baturante, H. N. (2019). *Toraja Tongkonan dan Kerukunan*. Al-Zikra.
- Bettaliyah, A. A., Oktavianti, A., & Robikhah, A. S. (2024). Religious Moderation in Paguyuban Mejing Tabon's Local Wisdom as Support for Accomplishing SDGs. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 8. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v8i1.7708>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706QP063OA>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Daheri, M. (2022). Religious Moderation, Inclusive, and Global Citizenship as New Directions for Islamic Religious Education in Madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/1853>

- Daheri, M., Warsah, I., Morganna, R., Putri, O. A., & Adelia, P. (2023). Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 31, 571–586. <https://doi.org/10.25133/JPSSv312023.032>
- Douglas, H. (2022). *Sampling Techniques for Qualitative Research*. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_29
- Faizah, R., Baedowi, A., & Yusrina, J. A. (2022). Religious Moderation: The Concepts and Implementation of Local Traditions in Karimunjawa. *Dialog*, 45. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.642>
- Febriani, S. R., & Ritonga, A. W. (2022). The Perception of Millennial Generation on Religious Moderation through Social Media in the Digital Era. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2), 313–334. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art1>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Zyglidopoulos, S. (2018). Stakeholder Theory. In *Elements in Organization Theory*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108539500>
- Geertz, C. (2019). *outes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. In *Sciences* (Vol. 28, Issue 1).
- Hamzah, I., & Marwati, A. (2023). *Revitalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Falsafah Bugis: Sipakatau Sipakalebbi dan Sipakainge*. 16(2), 141–152.
- Hidayat, E. K. N. (2022). Paradigma Perubahan Sosial Dalam Ritual Pemakaman Rambu Solo Di Tana Toraja. *Kusa Lawa*, 2. <https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.01.05>
- Indainanto, Y. I., Dalimunthe, M. A., Sazali, H., Rubino, & Kholil, S. (2023). Islamic Communication in Voicing Religious Moderation as an Effort to Prevent Conflicts of Differences in Beliefs. *Pharos Journal of Theology*, 104(4). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.415>
- Jalli, N. B. (2016). The Effectiveness of Social Media in Assisting Opinion Leaders to Disseminate Political Ideologies in Developing Countries: The Case of Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 32(1), 233–260. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2016-3201-26>
- Kholil, S., Sihombing, I., & Yusnadi, Y. (2020). Interfaith Figures Communication Model in Building Religious Harmony in North Labuhanbatu Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1383>
- Kuswarno, E. (2008). Etnografi Komunikasi. In *Bandung: Widya Padjadjaran*.
- Lestari, P., Kertamukti, R., & Ruliana, P. (2019). Use of local wisdom (purpusage) through heart-to-heart communication in settling of social conflicts in Karo, North Sumatra Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(3), 163–181. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-10>

- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Limani, B., Majlich, D., Aslan, M., Kikalishvili, S., & Brown, D. (2024). Western Balkans: It's Complicated An Inter-ethnic Communication Interdisciplinary Examination. *Journal of Intercultural Communication*, 24(1), 132–143. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i1.324>
- Maulana, A. M. R., Karomi, K., & Ahyadi, N. A. R. A. (2023). Christian Funeral Rites And *Rambu solo'* In Tana Toraja. *Harmoni*, 22. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i2.709>
- Morales-Pate, O., Beresford, M., Tsai, Y., Brewis, A., Landes, L., Roque, A., Lucero, R., Wutich, A., Jepson, W., & Hanemann, M. (2023). Community-based Participant-observation (CBPO): A Participatory Method for Ethnographic Research. *Field Methods*. <https://doi.org/10.1177/1525822x231198989>
- Nurfridayanti, R., Putra, A., & Azi, R. (2022). Ethnography of Communication Analysis in “Luca Movie” Dialogue. *ELITE: Journal of English Language and Literature*, 7. <https://doi.org/10.33772/elite.v5i1.1486>
- Pajarianto, H., Galugu, N. S., & Pribadi, I. (2023). Youth Religious Moderation Model and Tolerance Strengthening Through Intellectual Humility. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2022). Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Pora', S. T., Malleana, A. A., & Nurhasanah, N. (2023). Menguak Kearifan Lokal Masyarakat Toraja dalam Menjaga Toleransi. *PUSAKA*, 11(2), 299–312. <https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V11I2.1234>
- Ramadhan, M., Fuadi, A., Dahlan, B., Nuryadin, N., & Gifari, A. (2024). Relevansi Pilar Moderasi Beragama Quraish Shihab pada Upacara *Rambu solo'* Toraja di Kelurahan Ratte Buttu, Tana Toraja. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 12(1), 15–26. <https://doi.org/10.18592/alhiwar.v12i1.12090>
- Rizal, A. R. A. (2022). Conceptualising the Role of Opinion Leaders as Moderator to Local Communities Commitment in Corporate Social Responsibility (CSR) Communication. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(4), 425–441. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3804-24>
- Sadler-Smith, E., & Kalou, Z. (2015). Using Ethnography of Communication in Organizational Research. *Organizational Research Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1094428115590662>
- Suranata, K., Suartama, I. K., Doddy Tisna Ms, G., Lasmawan, I. W., Yaniasti, N. L., & Susiani, K. (2022). Incorporated Tri Premana Philosophy on Learning Science in Elementary School Culture. *Journal of Intercultural Communication*, 22(4), 37–43. <https://doi.org/10.36923/jicc.v22i4.60>
- Taneo, M., Madu, A., & Ndoen, F. A. (2024). The Cultural Heritage of Ume Kbulu:

- Strengthening Atoin Meto Identity Through School Learning. *Journal of Intercultural Communication*, 24(3), 88–103. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i3.881>
- Zhaki, M. A. (2020). *Komunikasi Antarbudaya Studi Pola Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Menjalin Kerukunan di RW 19 Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Abduh, M. (2023). *Duduk Perkara Pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare Ditolak Warga*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6973950/duduk-perkara-pembangunan-sekolah-kristen-gamaliel-di-parepare-ditolak-warga>
- Akhmedshina, F. A. (2021). Interreligious dialogue in modern Uzbekistan. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10. <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2021.00287.1>
- Alam, S. (2023). Kerukunan Dalam Beragama: Koeksistensi Antar Agama Dalam Upacara Rambu Solo Tana. *Sosioireligius: Jurnal Sosiologi Agama*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v8i1.40341>
- Alang, A. H. (2020). Siri' Culture in Tana Toraja. *International Journal of Asian Education*, 1. <https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.67>
- Andri. (2023). *Tongkonan Sebagai Media Toleransi Beragama di Tana Toraja Dalam Kajian Sosiologis*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6h24z>
- Andy, S., Afifa, F. Z., Lubis, N. A. S., Ramadhani, R. M., & Sari, S. P. (2021). Implementasi Pendidikan Agama dalam Membangun Kerukunan Umat Selama Pandemi Covid-19 pada Anak Usia Dini di Kecamatan Binjai Utara. In *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* (Vol. 5, Issue 1, pp. 737–744). STKIP Muhammadiyah Enrekang. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.2028>
- Astika, V. D. (2020). *Studi Etnografi Virtual Aktivitas #memedakwah di Media Sosial Instagram*. Skripsi S1, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Aulia, G. R., & Nawas, Si. S. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Umat Bergama Pada Upacara Rambu Solo Di Tana Toraja. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(2), 83–98. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i2.23115>
- Bachrong, F., & Ansar, F. A. (2021a). Religious Moderation in Karapasan the Local Culture of Tana Toraja Community in South Sulawesi. *Al-Qalam*, 27(1), 63. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i1.973>
- Bachrong, F., & Ansar, F. A. (2021b). Religious Moderation In Karapasan The Local Culture Of Tana Toraja Community In South Sulawesi. *Al-Qalam*, 27. <https://doi.org/10.31969/alq.v27i1.973>
- Baharuddin, H., Asmal, I., & Syarif, E. (2021). The Impact of Local Wisdom on the Coastal Settlement Spatial Configuration in the City of Parepare. *EPI International Journal of Engineering*, 4. <https://doi.org/10.25042/10.25042/epi-ije.082021.11>

- Baturante, H. N. (2019). *Toraja Tongkonan dan Kerukunan*. Al-Zikra.
- Bettaliyah, A. A., Oktavianti, A., & Robikhah, A. S. (2024). Religious Moderation in Paguyuban Mejing Tabor's Local Wisdom as Support for Accomplishing SDGs. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 8. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v8i1.7708>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706QP063OA>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. <https://doi.org/10.4135/9781452230153>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Daheri, M. (2022). Religious Moderation, Inclusive, and Global Citizenship as New Directions for Islamic Religious Education in Madrasah. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/1853>
- Daheri, M., Warsah, I., Morganna, R., Putri, O. A., & Adelia, P. (2023). Strengthening Religious Moderation: Learning from the Harmony of Multireligious People in Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, 31, 571–586. <https://doi.org/10.25133/JPSSv312023.032>
- Douglas, H. (2022). *Sampling Techniques for Qualitative Research*. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_29
- Faizah, R., Baedowi, A., & Yusrina, J. A. (2022). Religious Moderation: The Concepts and Implementation of Local Traditions in Karimunjawa. *Dialog*, 45. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.642>
- Febriani, S. R., & Ritonga, A. W. (2022). The Perception of Millennial Generation on Religious Moderation through Social Media in the Digital Era. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(2), 313–334. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art1>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Zyglidopoulos, S. (2018). Stakeholder Theory. In *Elements in Organization Theory*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108539500>
- Geertz, C. (2019). *Outs: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. In *Sciences* (Vol. 28, Issue 1).
- Hamzah, I., & Marwati, A. (2023). *Revitalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Falsafah Bugis: Sipakatau Sipakalebbi dan Sipakainge*. 16(2), 141–152.
- Hidayat, E. K. N. (2022). Paradigma Perubahan Sosial Dalam Ritual Pemakaman Rambu Solo Di Tana Toraja. *Kusa Lawa*, 2.

<https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.01.05>

- Indainanto, Y. I., Dalimunthe, M. A., Sazali, H., Rubino, & Kholil, S. (2023). Islamic Communication in Voicing Religious Moderation as an Effort to Prevent Conflicts of Differences in Beliefs. *Pharos Journal of Theology*, 104(4). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.415>
- Jalli, N. B. (2016). The Effectiveness of Social Media in Assisting Opinion Leaders to Disseminate Political Ideologies in Developing Countries: The Case of Malaysia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 32(1), 233–260. <https://doi.org/10.17576/jkmjc-2016-3201-26>
- Kholil, S., Sihombing, I., & Yusnadi, Y. (2020). Interfaith Figures Communication Model in Building Religious Harmony in North Labuhanbatu Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1383>
- Kuswarno, E. (2008). Etnografi Komunikasi. In *Bandung: Widya Padjadjaran*.
- Lestari, P., Kertamukti, R., & Ruliana, P. (2019). Use of local wisdom (purpusage) through heart-to-heart communication in settling of social conflicts in Karo, North Sumatra Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(3), 163–181. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-10>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Limani, B., Majlich, D., Aslan, M., Kikalishvili, S., & Brown, D. (2024). Western Balkans: It's Complicated An Inter-ethnic Communication Interdisciplinary Examination. *Journal of Intercultural Communication*, 24(1), 132–143. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i1.324>
- Maulana, A. M. R., Karomi, K., & Ahyadi, N. A. R. A. (2023). Christian Funeral Rites And *Rambu solo'* In Tana Toraja. *Harmoni*, 22. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i2.709>
- Morales-Pate, O., Beresford, M., Tsai, Y., Brewis, A., Landes, L., Roque, A., Lucero, R., Wutich, A., Jepson, W., & Hanemann, M. (2023). Community-based Participant-observation (CBPO): A Participatory Method for Ethnographic Research. *Field Methods*. <https://doi.org/10.1177/1525822x231198989>
- Nurfridayanti, R., Putra, A., & Azi, R. (2022). Ethnography of Communication Analysis in “Luca Movie” Dialogue. *ELITE: Journal of English Language and Literature*, 7. <https://doi.org/10.33772/elite.v5i1.1486>
- Pajarianto, H., Galugu, N. S., & Pribadi, I. (2023). Youth Religious Moderation Model and Tolerance Strengthening Through Intellectual Humility. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2022). Tolerance between religions through the role of local wisdom and religious moderation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78. <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>

- Pora', S. T., Malleana, A. A., & Nurhasanah, N. (2023). Menguak Kearifan Lokal Masyarakat Toraja dalam Menjaga Toleransi. *Pusaka*, 11(2), 299–312. <https://doi.org/10.31969/PUSAKA.V11I2.1234>
- Ramadhan, M., Fuadi, A., Dahlan, B., Nuryadin, N., & Gifari, A. (2024). Relevansi Pilar Moderasi Beragama Quraish Shihab pada Upacara *Rambu solo'* Toraja di Kelurahan Rattu Buttu, Tana Toraja. *Al-Hiwar Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 12(1), 15–26. <https://doi.org/10.18592/alhiwar.v12i1.12090>
- Rizal, A. R. A. (2022). Conceptualising the Role of Opinion Leaders as Moderator to Local Communities Commitment in Corporate Social Responsibility (CSR) Communication. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(4), 425–441. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3804-24>
- Sadler-Smith, E., & Kalou, Z. (2015). Using Ethnography of Communication in Organizational Research. *Organizational Research Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1094428115590662>
- Suranata, K., Suartama, I. K., Doddy Tisna Ms, G., Lasmawan, I. W., Yaniasti, N. L., & Susiani, K. (2022). Incorporated Tri Premana Philosophy on Learning Science in Elementary School Culture. *Journal of Intercultural Communication*, 22(4), 37–43. <https://doi.org/10.36923/jicc.v22i4.60>
- Taneo, M., Madu, A., & Ndoen, F. A. (2024). The Cultural Heritage of Ume Kibu: Strengthening Atoin Meto Identity Through School Learning. *Journal of Intercultural Communication*, 24(3), 88–103. <https://doi.org/10.36923/jicc.v24i3.881>
- Zhaki, M. A. (2020). *Komunikasi Antarbudaya Studi Pola Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Menjalin Kerukunan di RW 19 Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan*. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif